

## B A B - I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memiliki letak geografis sebagai negara kepulauan, merupakan salah satu faktor penyebab terlambatnya percepatan pertumbuhan pembangunan di daerah dari berbagai sector. hal ini merupakan perdebatan yang berkepanjangan, sehingga perlu adanya sebuah terobosan, melalui suatu gerakan reformasi Birokrasi. Hal ini dipicu oleh adanya **pertumbuhan ekonomi di pusat dan daerah yang tidak merata**, terlebih lagi dengan masih banyaknya potensi – potensi di daerah yang belum maksimal dikelola, sehingga belum memberikan efek positif bagi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Dalam berbagai kajian akademis, motivasi utama Otonomi Daerah antara lain adalah :

1. Kebutuhan untuk Pemerataan Ekonomi Daerah
2. Kondisi Geografis yang terlalu luas, yang mengakibatkan proses Delivery pelayanan publik tidak pernah terlaksana dengan optimal, karena infrastruktur yang tidak memadai.
3. Perbedaan basis identitas etnis dan asal muasal keturunan masyarakat lokal yang berdomisili didaerah pemekaran, sebagai komunitas budaya tersendiri yang berbeda dengan komunitas budaya daerah induk.
4. Kegagalan pengelolaan konflik komunal
5. Insentif fiskal yang dijamin oleh UU untuk daerah – daerah baru, hasil pemekaran melalui Dana Alokasi Umum (DAU).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Fachruddin, *“Membangun Otonomi Daerah, Memperkuat NKRI”*, Jakarta : Serat Alam Media (SAM), 2016, h. 8 – 9.

Dimasa Orde Baru, pemerintah menerapkan sistem sentralisasi pemerintahan. Sehingga surplus produksi daerah yang kaya dan sumber alam ditarik dan dibagi-bagi untuk kepentingan pusat bukan diinvestasikan untuk pembangunan daerah tersebut. Daerah pusat menikmati kekayaan daerah sementara daerah sangat lamban berkembang. Akibatnya, terjadi ketimpangan pembangunan antara daerah dan pusat. Setelah tahun 1998 dan keluarnya Undang-undang Otonomi daerah, beberapa daerah ingin memisahkan diri dari pemerintahan Republik Indonesia seperti Aceh, Papua, Riau dan Timor Timur. Selain itu muncul banyak aspirasi dan tuntutan daerah yang ingin membentuk provinsi atau kabupaten baru. Dalam upaya pembentukan provinsi dan kabupaten baru, terjadi tarik-menarik antara kelompok yang pro dan yang kontra.<sup>2</sup>

Otonomi Daerah direalisasikan dengan disahkannya Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah oleh Presiden Republik Indonesia. Sejak saat itu pula keinginan masyarakat di daerah untuk melakukan pemekaran meningkat tajam. Dimana sejak tahun 1999 hingga Desember 2009 telah terbentuk sebanyak 215 Daerah Otonom Baru yang terdiri dari 7 provinsi, 173 kabupaten dan 35 kota. Dengan demikian, Total Daerah Otonom Di Indonesia Adalah 33 Provinsi, 398 Kabupaten dan 93 Kota.

Data pemekaran tersebut diklasifikasikan pada 3 (tiga) fase yaitu :

1. Fase berlakunya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, dimekarkan 11 (sebelas) kabupaten/kota (masa 1974-1998).
2. Fase berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 (1999-2003), telah dibentuk 149 (seratus empat puluh sembilan) daerah otonom baru, terdiri dari 7 (tujuh) provinsi baru, dan 142 kabupaten/kota baru.
3. Fase berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, telah dibentuk 53 (lima puluh tiga) kabupaten/kota baru (hingga akhir desember 2009).<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> David Osborne, "*Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for Reinventing Government*", East Lansing, Michigan, 1996, h. 17

<sup>3</sup> <https://otda.kemendagri.go.id/>

Tujuan Otonomi Daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 Jo UU No. 23 Tahun 2014 adalah : Meningkatkan Pelayanan Masyarakat, Mengembangkan Kehidupan Berdemokrasi, Mendorong Pemberdayaan Masyarakat hingga Menumbuhkan Kreativitas Masyarakat.

Sementara **Tujuan Pelaksanaan Otonomi Daerah** adalah :

### **1. Tujuan Politik**

Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya tujuan politik. Pelaksanaan **Pemberian Kewenangan Daerah** bertujuan untuk mewujudkan proses demokrasi politik melalui partai politik dan DPRD.

Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan masyarakat setempat mendapatkan pelayanan yang baik, pemberdayaan masyarakat, serta terciptanya sarana dan prasarana yang layak.

### **2. Tujuan Administratif**

Tujuan pelaksanaan otonomi daerah berkaitan dengan **Pembagian Administrasi Pemerintahan Pusat Dan Daerah**, termasuk dalam manajemen birokrasi, serta sumber keuangan.

Pemberian kewenangan daerah juga bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang lebih efektif dan memberikan peluang kepada warga setempat untuk turut serta dalam menyelenggarakan pemerintahan.

### **3. Tujuan Ekonomi**

Dari sisi ekonomi, Otonomi Daerah diharapkan dapat **Mewujudkan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** sehingga **Kesejahteraan Masyarakat** setempat menjadi lebih baik.

Selain itu, **Penerapan Otonomi** ini bertujuan untuk **Meningkatkan Daya Saing dan Kualitas Produksi Daerah Otonom tersebut**, sehingga berdampak nyata pada **Kesejahteraan Masyarakat** setempat.<sup>4</sup>

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Jika kesejahteraan masyarakat merupakan sasaran utama pembangunan daerah maka tekanan utama pembangunan akan lebih banyak diarahkan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam bentuk Pengembangan Pendidikan, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan peningkatan penerapan teknologi tepat guna. Untuk mencapai tujuan tersebut berbagai strategi dan kebijakan dilaksanakan.<sup>5</sup>

Dewasa ini, masalah kebijakan pembangunan regional, tidak lagi hanya dikaitkan dengan masalah efisiensi dan pemerataan saja, melainkan pula dikaitkan dengan masalah pelayanan kepada masyarakat dan perkembangan aspirasi masyarakat tersebut. Kebijakan pembangunan, unit pemerintahan pada tingkat manapun yang mengimplementasikannya, secara ekonomis ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah meningkatnya pendapatan perkapita, distribusi pendapatan masyarakat, dan peran pemerintah. Kemudian, peningkatan pendapatan perkapita ini bisa dicapai bila terjadi pertumbuhan dalam bidang ekonomi.

### **Kesejahteraan Masyarakat Menurut Konsep Al-Qur'an**

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari **Rahmatan Lil Alamin** yang diajarkan oleh Agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah Swt jika manusia melaksanakan

---

<sup>4</sup> <https://otda.kemendagri.go.id/>

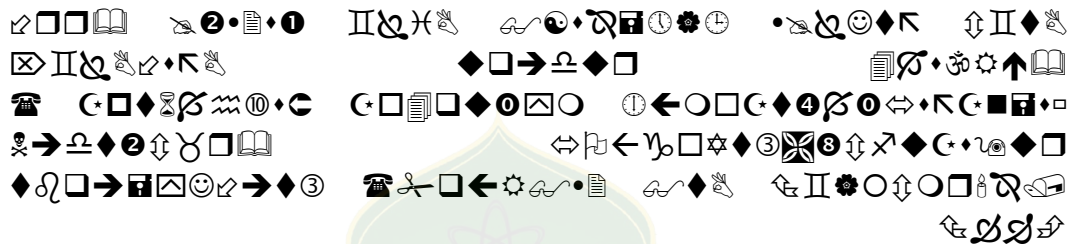
<sup>5</sup> Hasan, Muhammad, '*Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014 di Indonesia*', Jakarta : Gramedia, h. 30 - 52

apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada yang secara langsung (tersurat) dan ada yang secara tidak langsung (tersirat) berkaitan dengan **Permasalahan Ekonomi**.

Namun demikian, penjelasan dengan menggunakan dua cara ini menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan :

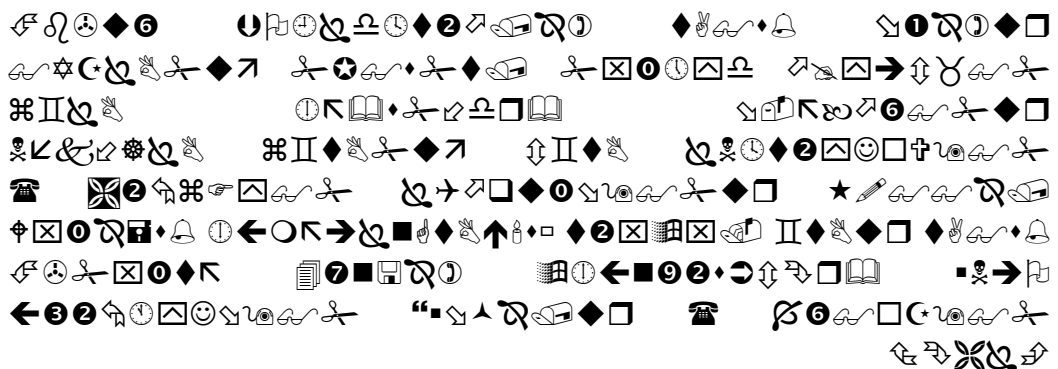
### 1. Qur'an Surat An-Nahl Ayat : 97



97. "Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan".

Kesejahteraan merupakan jaminan atau janji dari Allah Swt yang diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan yang beriman kepadaNya. Allah Swt juga akan membalas berbagai amal perbuatan baik orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari amalnya. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, santai dan puas dengan rezeki yang halal, termasuk didalamnya mencakup seluruh bentuk ketenangan apapun dan bagaimanapun bentuknya.

### 2. Qur'an surat : Al-Baqarah : 126



126. *“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan Itulah seburuk-buruk tempat kembali".*

Kesejahteraan hanya diperoleh dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Swt. Ajaran Islam mengajarkan juga tentang konsep untuk berbagi, membagi nikmat, membagi kebahagiaan dan ketenangan tidak hanya untuk individu namun untuk seluruh umat manusia diseluruh dunia.

### 3. Qur'an Surat : An-Nisa Ayat : 9



9. *“Dan hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (Kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”.*

Kesejahteraan dapat diperoleh hanya dengan ketaqwaan kepada Allah Swt dan juga berbicara secara jujur dan benar. Pada ayat ini, Allah meminta kepada hambaNya Untuk Memperhatikan Kesejahteraan Generasi Yang Akan Datang. Oleh karenanya harus dipersiapkan generasi yang kuat akan ketaqwaannya kepada Allah Swt. Bahkan Nabi Muhammad Saw juga melarang untuk memberikan seluruh hartanya kepada orang lain dengan meninggalkan ahli warisnya. Nabi SAW bersabda: ”Sesungguhnya bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik dari pada membiarkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Kementerian Sosial RI, *”Masyarakat Madani Yang Sejahtera”*, Jakarta : Kemensos Printing, 2014, H . 22 -23

Pemekaran **Kabupaten Serdang Bedagai**, diatur sesuai dengan : **Undang-undang RI nomor 36 tahun 2003 pada tanggal 18 Desember 2003**. Proses lahirnya undang-undang tentang pembentukan Serdang Bedagai sebagai kabupaten pemekaran merujuk pada usulan yang disampaikan melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 18/K/2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Deli Serdang. Kemudian Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 26/K/DPRD/2003 **tanggal 10 Maret 2003 tentang Persetujuan** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Atas Usul Rencana **Pemekaran Kabupaten Deli Serdang menjadi dua kabupaten Kabupaten Deli Serdang (Induk), dan Kabupaten Serdang Bedagai**. Kabupaten yang luasnya mencapai **1.900,22** kilometer persegi ini, terdiri atas **243** desa/kelurahan yang berada dalam **17 kecamatan**. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel - 1. 1

Jumlah Desa / Kelurahan, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk  
Per – Kecamatan Di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun : 2020

Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Jiwa / Km <sup>2</sup> )	Persentase Penduduk (%)
1. Kotarih	11	78.02	9.169	118	1.39
2. Silinda	9	56.74	9.514	168	1.45
3. Bintang Bayu	19	95.59	12.511	131	1.90
4. Dolok Masihul	28	237.42	52.705	222	8.02
5. Serbajadi	10	50.69	21.759	429	3.31

6. Sipispis	20	145.26	33.826	233	5.14
7. Dolok Merawan	17	120.60	17.976	149	2.73
8. Tebing Tinggi	14	182.29	41.162	226	6.26
9. Tebing Syahbandar	10	120.30	33.585	279	5.11
10. Bandar Khalifah	5	116.00	25.857	223	3.93
11. Tanjung Beringin	8	74.17	42.142	568	6.41
12. Sei Rampah	17	198.90	71.366	359	10.85
13. Sei Bamban	10	72.26	46.043	637	7.00
14. Teluk Mengkudu	12	66.95	48.334	722	7.35
15. Perbaungan	28	111.62	112.153	1.005	17.06
16. Penggajahan	13	93.12	30.206	324	4.59
17. Pantai Cermin	12	80.30	49.182	612	7.48
<b>Total</b>	<b>243</b>	<b>1.900.22</b>	<b>657.490</b>	<b>346</b>	<b>100.00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai, 2021

Pemberian Otonomi Daerah kepada Kabupaten Kabupaten Samosir yang dimekarkan dari Kabupaten Toba Samosir, bersamaan dengan Kabupaten Serdang Bedagai yang dimekarkan dari Kabupaten Deli Serdang, menjadikan Provinsi Sumatera Utara kini **memiliki 33 Kabupaten / Kota yang terdiri dari : 25 Kabupaten dan 8 Kota** (Kota Medan, Kota Pematang Siantar, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kota Padang Sidempuan, Kota Sibolga, Kota Gunung Sitoli, Kota Tanjung Balai, untuk lebih rincinya dapat dilihat pada table – 1.4)



Dengan pemekaran ini, pemerintah kabupaten Serdang Bedagai harus menyesuaikan diri dan berlatih untuk mandiri dalam mengatur dan mengelola daerahnya sendiri dan untuk memajukan kesejahteraan masyarakatnya.<sup>7</sup>

Jumlah Penduduk Kabupaten Serdang Bedagai, yang merupakan potensi Sumber Daya Manusia yang cukup Signifikan merupakan Modal Dasar untuk melaksanakan pembangunan diwilayahnya. Agar lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel - 1. 2  
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Per - Kecamatan  
Di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun : 2010, 2019 dan 2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	
	2010	2019	2020	2010-2020	2019-2020
Kotarih	7.975	8.216	9.169	1.36	0.94
Silinda	8.332	8.544	9.514	1.29	1.04
Bintang Bayu	10.581	10.864	12.511	1.63	1.21
Dolak Masihul	48.241	49.837	52.705	0.86	0.62
Serbajadi	19.560	20.071	21.759	1.04	0.79
Sipispis	31.617	32.473	33.826	0.66	0.49
Dolak Merawan	17.029	17.455	17.976	0.53	0.43
Tebing Tinggi	40.253	41.681	41.162	0.22	0.14
Tebing Syahbandar	32.191	33.124	33.585	0.41	0.32
Bandar Khalifah	24.774	25.478	25.857	0.41	0.30
Tanjung Beringin	36.864	38.011	42.142	1.30	0.93

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai , *"Serdang Bedagai Dalam Angka Tahun 2020"*, BPS Sergei, 2020, h. 44 -45

Sei Rampah	63.379	65.660	71.366	1.16	0.81
Sei Bamban	42.791	44.275	46.043	0.71	0.48
Teluk Mengkudu	41.118	42.513	48.334	1.58	1.02
<b>Perbaungan</b>	99.936	105.177	112.153	1.12	0.55
Penggajian	26.859	27.676	30.206	1.14	0.81
Pantai Cermin	42.883	45.341	49.182	1.34	0.56
<b>Total</b>	<b>594.383</b>	<b>616.396</b>	<b>657.490</b>	<b>0.98</b>	<b>0.93</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai, 2021

Kesejahteraan Masyarakat pada dasarnya adalah buah dari pelayanan publik yang dilakukan pemerintah. Dengan pelayanan publik yang baik maka kesejahteraan masyarakat juga berpeluang besar untuk lebih baik. Kesejahteraan masyarakat sendiri dapat dilihat dari berbagai indikator.

Salah satu indikator yang dapat dipakai adalah **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**, yang dikembangkan sejak tahun 1990 oleh **UNDP** (United Nations Development Programme) yang meliputi :

1. Tingkat Harapan Hidup (**Kesehatan**)
2. Tingkat Melek Huruf Masyarakat (**Pendidikan**)
3. Tingkat **Pendapatan** Riil Perkapita Masyarakat berdasarkan Daya Beli.<sup>8</sup>

Adapun Data IPM Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010 – 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel -1. 3

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Serdang Bedagai Menurut Komponennya pada Tahun 2010 - 2019 adalah sebagai Berikut :

Komponen	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Umur Harapan	Tahun	66,66	66,84	67,03	67,17	67,27	67,47	67,63	67,79	68,08	68,46

<sup>8</sup> Ibid, h. 69 - 85

Hidup (UHH)											
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	10,63	10,73	11,35	11,87	12,29	12,31	12,54	12,55	12,57	12,59
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,69	7,74	7,78	8,02	8,04	8,08	8,34	8,35	8,51	8,53
Pengeluaran Perkapita	Rp 000	9.419	9.771	8.817	9.882	10.042	10.110	10.246	10.551	10.737	11.061
IPM		<b>64,67</b>	<b>65,28</b>	<b>66,14</b>	<b>67,11</b>	<b>67,78</b>	<b>68,01</b>	<b>68,77</b>	<b>68,16</b>	<b>69,69</b>	<b>70,21</b>
Pertumbuhan IPM	%	-	0,95	1,31	1,48	0,99	0,34	1,12	0,57	0,77	0,75

Sumber : BPS Serdang Bedagai Tahun 2021.

Dari Tabel – 1.3 diatas, dapat diketahui bahwa : Meningkatnya IPM tersebut akibat dari meningkatnya seluruh komponen pembentuk IPM seperti **Umur Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita.**<sup>9</sup>

IPM Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2019, jika dibandingkan dengan 33 Kabupaten / Kota yang ada di Sumatera Utara **masih menempati Urutan ke – 18.** Sementara Kabupaten Deli Serdang, sebagai Kabupaten Induk, menempati urutan ke – 4.

Begitu pula dengan Kabupaten Samosir menempati urutan ke – 17, padahal Kabupaten Toba Samosir, sebagai Kabupaten Induk, menempati urutan ke - 7. Dimana kedua daerah ini tahun pemekarannya bersamaan.

Begitu juga dengan Umur Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah dan Rata – Rata Lama Sekolah, Kabupaten Samosir lebih unggul jika dibandingkan dengan Kabupaten Serdang Bedagai, datanya dapat dilihat pada Tabel – 1.4 berikut ini :

<sup>9</sup> Ibid h. 99 - 108

Tabel – 1.4

## Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara

Menurut Kabupaten / Kota Tahun 2019

No.	Kabupaten / Kota	Umur Harapan Hidup (Thn)	Harapan Lama Sekolah (Thn)	Rata-rata Lama Sekolah (Thn)	Pengeluaran Perkapita ( Rp. 000 )	IPM
1.	<b>Kota Medan</b>	72,98	14,73	11,38	15.033	80,97
2.	<b>Kota Pematang Siantar</b>	73,33	14,21	11,15	12.571	78,57
3.	<b>Kota Binjai</b>	72,25	13,61	10,77	11.260	75,89
<b>4.</b>	<b>Deli Serdang</b>	<b>71,61</b>	<b>13,34</b>	<b>10,08</b>	<b>12.317</b>	<b>75,43</b>
5.	<b>Kota Tebing Tinggi</b>	<b>70,76</b>	<b>12,71</b>	<b>10,28</b>	<b>12.895</b>	<b>75,08</b>
6.	<b>Kota Padang Sidempuan</b>	69,15	14,53	10,70	11.181	75,06
<b>7.</b>	<b>Toba Samosir</b>	<b>69,93</b>	<b>13,28</b>	<b>10,36</b>	<b>12.375</b>	<b>74,92</b>
8.	Karo	71,27	12,75	9,62	12.474	74,25
9.	<b>Kota Sibolga</b>	68,77	13,15	10,18	11.656	73,41
10.	Dairi	68,79	13,09	9,34	10.602	71,42
11.	Simalungun	71,07	12,77	9,36	11.422	72,98
12.	Labuhan Batu	69,86	12,67	9,23	11.193	71,94

13.	Labuhan batu Utara	69,37	12,82	8,36	11.957	71,43
14.	Dairi	68,79	13,09	9,34	10.602	71,42
15.	Labuhan Batu Selatan	68,64	12,99	8,74	11.553	71,39
16.	Langkat	68,59	12,81	8,64	11.208	70,76
17.	<b>Samosir</b>	<b>71,16</b>	<b>13,46</b>	<b>9,15</b>	<b>8.654</b>	<b>70,55</b>
18.	<b>Serdang Bedagai</b>	<b>68,46</b>	<b>12,59</b>	<b>8,53</b>	<b>11.061</b>	<b>70,21</b>
19.	Asahan	68,11	12,59	8,49	10.983	69,92
20.	Tapanuli Selatan	64,82	13,12	8,57	11.410	69,75
21.	<b>Kota Gunung Sitoli</b>	71,02	13,73	8,58	8.058	69,30
22.	Padang Lawas Utara	67,06	12,47	9,10	10.194	69,29
23.	Tapanuli Tengah	67,08	12,79	8,48	10.175	68,86
24.	Humbang Hasundutan	69,06	13,27	9,53	7.902	68,83
25.	<b>Kota Tanjung Balai</b>	63,02	12,49	9,26	11.383	68,51
26.	Batu Bara	66,75	12,62	8,02	10.575	68,35
27.	Padang Lawas	66,98	13,02	8,69	9.100	68,16
28.	Pakpak Barat	65,59	13,85	8,73	8.402	67,47
29.	Mandailing Natal	62,51	13,17	8,36	9.900	66,52
30.	Nias Utara	69,29	12,78	6,25	6.245	61,98
31.	Nias	69,68	12,39	5,15	7.042	61,65

32.	Nias Selatan	68,58	12,22	5,53	7.105	61,59
33.	Nias barat	68,82	12,71	6,14	6.009	61,14
	Sumatera Utara	68,95	13,15	9,45	10.649	71,74

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara 2020.

Selanjutnya jika ditinjau dari Persentase Penduduk yang Masih Sekolah menurut Kelompok Umur di kabupaten Serdang bedagai Tahun 2019, masih terdapat anak Putus Sekolah / Tidak melanjutkan Pendidikan karena keterbatasan kemampuan Ekonomi keluarga serta sarana dan prasaran sekolah yang masih kurang memadai. Sebagaimana terlihat pada Tabel – 1. 5 berikut :

Table –1. 5

Persentase Penduduk yang Masih Sekolah menurut Kelompok Umur di kabupaten Serdang bedagai Tahun 2019

Nomor	Kelompok Umur (Tahun)	Persentase Penduduk yang Masih Sekolah
1.	7 – 12 (SD)	99,44
2.	13 – 15 (SMP)	96,70
3.	16 – 18 (SMA)	76,43
4.	19 – 24 (PT)	11,69

Sumber : BPS Serdang Bedagai Tahun 2020.

Persentase penduduk Kabupaten Serdang Bedagai yang masih sekolah :

1. Pada kelompok umur 7-12 tahun sebesar 99,44 %
2. Pada kelompok usia 13-15 tahun sebesar 96,70 %

Artinya ada penduduk usia sekolah pada usia 13-15 tahun **yang sudah tidak melanjutkan sekolah lagi / Anak Putus Sekolah (3,30 %).**

Padahal Pendidikan merupakan hak yang sangat mendasar bagi kehidupan Manusia, dan ini merupakan Tanggung jawab Kabupaten Serdang Bedagai.

1. Pada kelompok umur 16-18 tahun, persentase penduduk yang masih sekolah adalah 76,43 %.
2. Pada kelompok usia 19-24 tahun, Hanya tinggal sebesar 11,69 % yang memasuki Perguruan Tinggi. Artinya sangat kecil kesempatan bagi Masyarakat Serdang Bedagai melanjutkan sekolahnya sampai kejenjang Tertinggi.

Pelaksanaan Otonomi Daerah telah berjalan Cukup lama dan diharapkan dapat memperbaiki Kualitas Hidup Rakyat sehingga tercapai Kesejahteraan Masyarakat, yang ditandai dengan terjadinya Pembangunan / Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat dalam wilayah tersebut.

Pembangunan Ekonomi Daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara **Pemerintah Daerah** dengan **Sektor Swasta** untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang **Perkembangan Kegiatan Ekonomi (Pertumbuhan Ekonomi)** dalam wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan perusahaan baru. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Lincoln Arsyad, "*Pengantar Perencanaan Ekonomi Daerah*", BPFE, 2005,

Pembangunan ekonomi daerah juga didefinisikan sebagai semua kegiatan pembangunan baik yang termasuk urusan rumah tangga daerah maupun yang tidak termasuk, yang meliputi berbagai sumber dari pemerintah (APBD dan APBN) maupun yang bersumber dari masyarakat. Dalam hal ini kegiatan pembangunan daerah yang dibiayai oleh **Pemerintah Pusat** merupakan pelaksanaan asas Dekonsentrasi, sedangkan pembangunan daerah yang dibiayai oleh pemerintah daerah provinsi, **Pemerintah Daerah**, Kabupaten dan pemerintah desa merupakan pelaksanaan asas Desentralisasi dan tugas pembantuan (Medebewind).

Masih dalam tataran **Konsep Pembangunan Nasional**, muncul pendekatan yang lebih memperhatikan kondisi dan potensi setiap wilayah dalam suatu negara tertentu, yaitu pendekatan pembangunan regional, yang selanjutnya terus berkembang dan menjadi perhatian baik dikalangan praktisi maupun kalangan akademisi. Dalam perkembangannya, menuntut kualitas dan kuantitas pelayanan publik dari pemerintah serta tuntutan kemandirian dan partisipasi pembangunan bagi masyarakat secara luas. Dewasa ini, masalah kebijakan pembangunan regional, tidak lagi hanya dikaitkan dengan masalah efisiensi dan pemerataan saja, melainkan pula dikaitkan dengan masalah pelayanan kepada masyarakat dan perkembangan aspirasi masyarakat tersebut. Kebijakan pembangunan, unit pemerintahan pada tingkat manapun yang mengimplementasikannya, secara ekonomis ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Syariah**

Pondasi ekonomi Islam atau ekonomi syariah merujuk pada Al-Quran dan hadis. Lalu apa pengertian ekonomi syariah..? Dalam dunia ekonomi, ekonomi syariah cukup berbeda dibandingkan system ekonomi konvensional. Namun, jika dilihat dari sudut pandang keilmuan, ekonomi syariah dapat disejajarkan dengan system ekonomi kapitalis dan sosialis. Menurut buku



Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam oleh Muhamad, hal tersebut dikarenakan ekonomi syariah telah memenuhi persyaratan sebagai sebuah sistem ekonomi. Pengembangan ekonomi syariah juga sedang digencarkan oleh pemerintah Indonesia belakangan ini. Pasalnya, ekonomi syariah dinilai bisa memberikan dampak positif bagi stabilitas moneter, sistem keuangan, dan kesejahteraan masyarakat. Lantas, apa pengertian ekonomi syariah..?.

Pengertian ekonomi syariah Mengutip buku Ekonomi Syariah oleh Yoyok Prasetyo, pengertian ekonomi syariah sama dengan ekonomi Islam, yang membedakan hanya perspektif setiap pakar yang mendefinisikannya.

1. Menurut Yusuf Qardhawi, pengertian ekonomi syariah adalah ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan dengan tujuan akhirnya kepada Tuhan dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syariat Tuhan daerah. <sup>11</sup> .
2. Menurut Monzer Kahf, pengertian ekonomi syariah adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner. Artinya, ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri dan perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu pendukungnya daerah. <sup>12</sup> .
3. Menurut M.A Mannan, pengertian ekonomi syariah adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam daerah. <sup>13</sup> .
4. Sementara menurut Umar Chapra, pengertian ekonomi syariah adalah cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia mewujudkan kesejahteraan melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Namun, tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebih, menciptakan ketidak seimbangan

---

<sup>11</sup> Hery, Sudarsono, "*Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*", Yogyakarta, Ekonosia, 2009. h. 53 - 54

<sup>12</sup> Kahf, Monzer, "*Pengantar Ekonomi Islam*", Jakarta, 2010, h. 123 - 124

<sup>13</sup> Mannan, Abdul, M, "*Teori dan Praaktek Ekonomi Islam*", Yogyakarta, Prima Yasa, 2010, h. 87 - 88

makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial daerah.<sup>14</sup> .

5. Secara umum, pengertian **Ekonomi Syariah** adalah **System Ekonomi Yang Menerapkan Ajaran Al-Quran dan Hadis** atau syariat Islam **Dalam Kegiatannya.**

Lalu, apa saja Karakteristik Ekonomi Syariah ..? Karakteristik ekonomi syariah adalah : ciri khas yang membedakannya dengan ekonomi lain seperti ekonomi kapitalis dan sosialis. Seperti diketahui, ekonomi syariah merujuk pada Al-Quran dan hadis dimana hal ini tidak dipahami pada sistem ekonomi konvensional. Para ahli memiliki penjelasan yang berbeda mengenai karakteristik ekonomi syariah.

Berikut karakteristik ekonomi syariah yang didefinisikan oleh para ahli, yaitu :

- ❖ **Ekonomi ketuhanan.** Artinya, bersumber dari wahyu Allah dalam bentuk syariat Islam.
- ❖ **Ekonomi pertengahan.** Meski bersumber dari Allah, ekonomi syariah juga menekankan pada kesejahteraan manusia. Jadi, ekonomi syariah berpandangan bahwa hak individu harus seimbang dengan dunia dan akhirat.
- ❖ **Ekonomi berkeadilan.** Artinya, ekonomi syariah sangat memperhatikan aspek keadilan bagi semua pihak.

**Tujuan Ekonomi Syariah** Melansir buku Pengantar Ekonomi Islam oleh Mohammad Hidayat, terdapat beberapa tujuan ekonomi syariah, yaitu :

1. **Kesejahteraan Ekonomi** dalam kerangka norma moral islam.
2. **Persaudaraan dan keadilan universal.**
3. **Distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata.**
4. **Kebebasan individu** dalam konteks kemaslahatan social.

---

<sup>14</sup> Chapra, M. Umer, "*Islam dan Tantangan Ekonomi*", Jakarta : Gema Insani Press, 2007, h.17 - 18

## **Prinsip Dasar Ekonomi Syariah**

Mengutip situs resmi Bank Indonesia, dalam mengembangkan sistem ekonomi syariah, Islam memegang teguh prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah. Prinsip ini dijabarkan sebagai berikut :

1. **Membayarkan zakat** kepada orang yang membutuhkan, agar roda perekonomian berputar karena harta yang mengendap disalurkan ke orang miskin untuk menghasilkan aktivitas ekonomi yang produktif.
2. **Melarang riba** dalam kegiatannya. Misalnya, saat menyimpan atau meminjam uang di bank syariah tidak akan dikenakan bunga. Sebab, ekonomi syariah menganggap uang hanya bisa didapat dan mendatangkan hasil dari kegiatan sector riil.
3. **Bertransaksi produktif dan berbagi hasil.** Ekonomi syariah sangat menjunjung keadilan dan menekankan bagi hasil dan risiko.
4. **Transaksi keuangan hanya terkait sector riil**, untuk menghindari financial bubble yang kerap terjadi pada ekonomi konvensional.
5. **Partisipasi sosial untuk kepentingan publik.** Hal ini sesuai dengan nilai ekonomi Islam dimana tujuan sosial diupayakan secara maksimal dengan menyalurkan sebagian harta untuk kepentingan bersama.
6. **Bertransaksi atas dasar kerjasama dan keadilan untuk semua pihak.** Setiap transaksi, khususnya perdagangan dan pertukaran harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan syariat Islam.<sup>15</sup> .

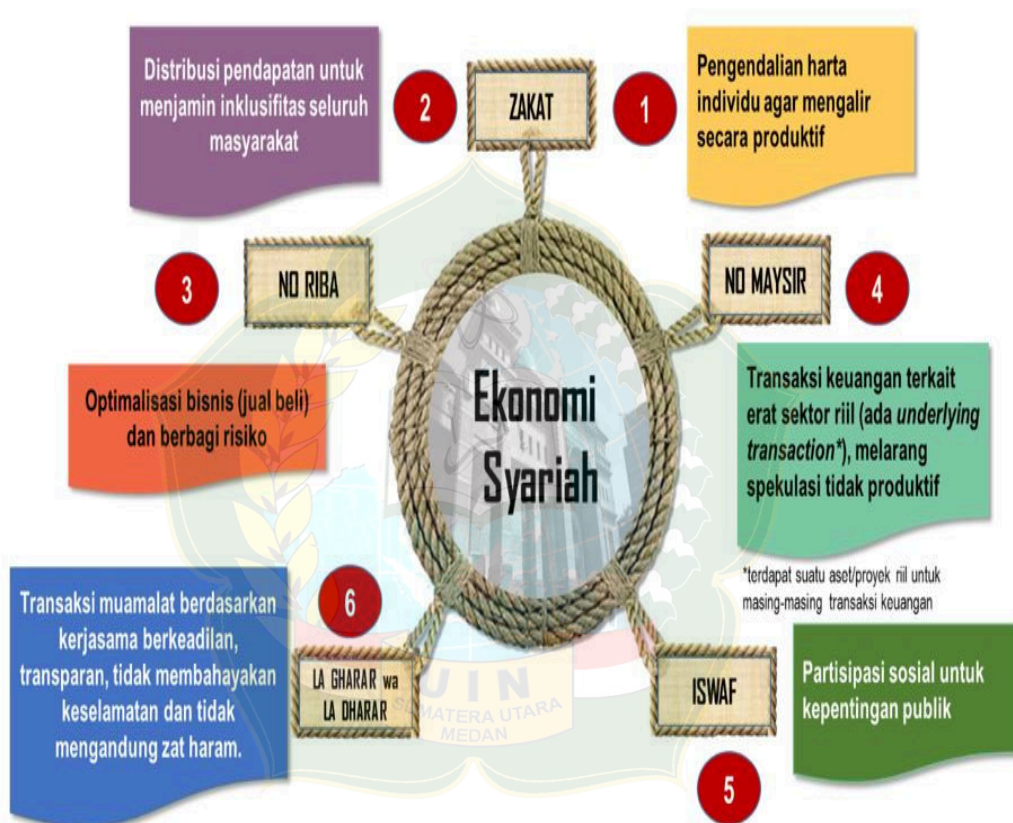
Kesimpulannya, ekonomi syariah merujuk pada Al-Quran dan hadis. Sehingga pengertian ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang menerapkan ajaran Al-Quran dan hadis dalam kegiatannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada :

---

<sup>15</sup> Wahyu, Makalau Rio, *“Pengantar Ekonomi Islam”*, PT Rafika Adhitama, 2020, Yogyakarta. h. 65 - 97

Gambar 1.1.

Siklus Ekonomi Syariah berikut ini :<sup>16</sup>



Referensi: Mannan (1970), Siddiqui (1981), Kaht (1973), Sheikh (1957), Hasanuzzaman (1976), Agil dan Ghazali (2005), Chapra (2008), Askari, Iqbal, Krichene, dan Mirakhor (2010) dll.

Dalam ilmu ekonomi, permasalahan kesejahteraan merupakan salah satu bahasan utama. Namun, konsep kesejahteraan konvensional yang berorientasi pada materi dan self-interest dianggap tidak sesuai dengan tujuan ekonomi Islam dan tujuan syariah (maqashid al-syari'ah) pada umumnya. Konsep

<sup>16</sup> Ibid, h. 124 - 125

kesejahteraan dalam terminologi ekonomi Islam disebut sebagai mashlahah. Mashlahah merupakan sebuah konsep yang sangat kuat yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik ekonomi individu dan kolektif, dan sangat relevan dengan pencapaian kesejahteraan sosial (falah) serta sesuai dengan tujuan syariah.

Tujuan syariah menurut Imam al-Ghazali adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada perlindungan : keimanan (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-'aql), keturunan (al-nasl), dan kekayaan (al-mal).

Konsep mashlahah juga diterapkan dalam perilaku konsumen, dimana manusia cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan mashlahah yang maksimum. Hal ini sesuai dengan rasionalitas Islam bahwa setiap agen ekonomi ingin meningkatkan mashlahah yang diperolehnya.<sup>17</sup>

### **Sejarah Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

IPM dikembangkan pada tahun 1990 oleh **Pemenang Nobel India : Amartya Sen** dan **Seorang Ekonom Pakistan Mahbub Ul Haq**, serta dibantu oleh **Gustav Ranis** dari **Yale University** dan **Lord Meghnad Desai** dari **London School Of Economics**. Sejak itu indeks ini dipakai oleh Program pembangunan PBB pada laporan IPM tahunannya.

Yang dalam hal ini, Amartya Sen menggambarkan IPM sebagai “pengukuran vulgar” oleh karena batasannya. IPM lebih berfokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna dari pada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. IPM juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk **mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya, sumbar daya manusia.**

---

<sup>17</sup> Ghofur, Abdullah, “*Pengantar Ekonomi Syariah*”, PT Rajawali Grafindo, 2018, Jakarta. h. 150 - 167

Selain itu IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia yang terdiri dari :

1. Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran.
2. Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa “bobotnya 2/3” dan kombinasi pendidikan dasar, menengah dan atas dengan bobot 1/3.
3. Standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli.

### **Unsur Dasar Indeks Pembangunan Manusia**

Untuk mengukur IPM maka digunakan 3 unsur dasar pembangunan manusia yaitu:

#### **1. Usia Harapan Hidup**

Usia harapan hidup mencerminkan usia maksimum yang diharapkan seseorang untuk dapat bertahan hidup. Pembangunan manusia harus lebih mengupayakan agar penduduk dapat mencapai usia harapan hidup yang panjang. Indikator harapan hidup ini meliputi :

1. Angka kematian bayi.
2. Penduduk yang diperkirakan tidak mencapai usia 40 tahun.
3. Persentase penduduk dengan keluhan kesehatan.
4. Persentase penduduk yang sakit “morbiditas”.
5. Rata-rata lama sakit.
6. Persentase penduduk yang melakukan pengobatan sendiri.
7. Persentase kelahiran ditolong yang ditolong oleh tenaga medis.
8. Persentase balita kekurangan gizi.
9. Persentase rumah tangga yang mempunyai akses kesumber air minum bersih.

10. Persentase rumah tangga yang menghuni rumah berlantai tanah.
11. Persentase penduduk tanpa akses terhadap fasilitas kesehatan.
12. Persentase rumah tangga tanpa akses terhadap sanitasi.

## 2. Pengetahuan

Pengetahuan dalam hal ini **Tingkat Pendidikan** juga diakui secara luas sebagai unsur mendasar dari pembangunan manusia, indikator pendidikan ini meliputi:

1. Angka melek huruf.
2. Rata-rata lama sekolah.
3. Angka partisipasi sekolah.
4. **Angka Putus Sekolah “Drop Out/DO”** dan lain-lain.

## 3. Standar Hidup Layak

Unsur dasar pembangunan manusia yang ketiga ialah standar hidup layak Indikator standar hidup layak bisa dilihat dari daya beli masyarakat yang meliputi :

1. Jumlah yang bekerja.
2. Jumlah pengangguran terbuka.
3. Jumlah dan persentase penduduk miskin.
4. PDRB riil per kapita.

Jadi setiap tahun daftar negara menurut IPM diumumkan berdasarkan penilaian diatas. Pengukuran alternatif lainnya ialah Indeks Kemiskinan Manusia yang **Lebih Berfokus Kepada Kemiskinan**.

Salah satu indikator terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah meningkatnya pendapatan perkapita, distribusi pendapatan masyarakat dan peran pemerintah. Kemudian, peningkatan pendapatan perkapita ini bisa dicapai bila terjadi **Pertumbuhan Dalam**

## **Bidang Ekonomi.**

Proses pembangunan daerah pada dasarnya bukanlah sekedar fenomena ekonomi semata. Pembangunan tidak sekedar ditujukan oleh prestasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara, namun yang lebih luas dari itu pembangunan memiliki perspektif yang luas, terutama perubahan sosial.

Dimensi sosial yang sering terabaikan dalam pendekatan pertumbuhan ekonomi, justru mendapat tempat strategis bagi proses pembangunan. Dalam proses pembangunan selain mempertimbangkan pertumbuhan dan pemerataan, juga dampak aktivitas ekonomi terhadap kehidupan sosial masyarakat. Lebih dari itu, dalam proses pembangunan dilakukan upaya yang bertujuan untuk mengubah struktur perekonomian kearah yang lebih baik.

Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, kinerja ekonomi akan mampu berjalan maksimal. Selanjutnya, bahwa antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi berhubungan erat, karena peningkatan pembangunan ekonomi merupakan prasyarat tercapainya pembangunan manusia yang akan mendukung peningkatan produktivitas melalui pengisian kesempatan kerja dengan usaha-usaha produktif sehingga tercapai peningkatan pendapatan. Oleh karena itu, dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan pembangunan manusia, termasuk dalam konteks ekonomi daerah.

Dengan kata lain, peningkatan kualitas modal manusia juga akan memberikan manfaat dalam mengurangi ketimpangan antar daerah. Kualitas sumber daya manusia tercermin dari terciptanya lingkungan yang memungkinkan bagi manusia untuk menikmati **Hidup Sehat, Umur Panjang, dan Menjalankan Kehidupan yang Produktif**. Pembangunan manusia menyangkut dimensi yang sangat luas. Upaya membuat pengukuran pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah harus dapat memberikan gambaran tentang dampak dari



pembangunan manusia bagi penduduk dan sekaligus dapat memberikan gambaran tentang persentase pencapaian terhadap sasaran ideal.

United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut **Penduduk** ditempatkan sebagai tujuan akhir (*The Ultimate End*) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*Principal Means*) untuk mencapai tujuan itu. Dalam konteks pembangunan daerah, IPM ditetapkan sebagai salah satu ukuran utama yang dicantumkan dalam **Pola Dasar Pembangunan Daerah** yang akan datang. Hal ini merupakan langkah penting karena IPM menduduki salah satu posisi penting dalam **Manajemen Pembangunan Daerah**, oleh karena pelaksanaan pembangunan secara luas yang meliputi unsur Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi.

Selain IPM terdapat juga Indeks **Pembangunan Daerah (IPD)** sebagai suatu konsep ukuran pembangunan, yang terdiri dari : **keberdayaan pemerintah, perkembangan wilayah dan keberdayaan masyarakat**.<sup>18</sup>

Definisi **keberdayaan pemerintah** adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan upaya atau hasil pemberdayaan pemerintah (*Reinventing Government*) disuatu daerah. **perkembangan wilayah** didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kondisi ekonomi wilayah, penyediaan fasilitas publik, serta potensi fisik dan lingkungan suatu daerah. Kriteria yang terakhir yaitu **keberdayaan masyarakat**, didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan upaya dan hasil pemberdayaan masyarakat disuatu daerah.

Kedudukan dan peranan Indeks Pembangunan Manusia dalam manajemen pembangunan akan lebih terlihat jika dilengkapi dengan suatu data set yang berisikan indikator yang relevan dengan IPM dan disusun sebagai suatu sistem data base pembangunan manusia. Sistem data base tersebut merupakan sumber data utama dalam identifikasi lebih lanjut yang

---

<sup>18</sup> Ibid h. 189 - 201

dilakukan untuk mengenali lebih dalam permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan upaya dan hasil-hasil serta dampak pembangunan manusia. Identifikasi tersebut dibuat kedalam suatu analisis situasi pembangunan manusia yang mengkaji berbagai kendala dalam implementasi program pembangunan pada periode sebelumnya dan potensi yang dimiliki suatu wilayah untuk dimasukkan sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan daerah periode yang akan datang.

Proses ini merupakan kajian yang dapat menghasilkan rekomendasi bagi implikasi kebijakan pembangunan yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, maka IPM merupakan **Alat Advokasi** kepada para pengambil keputusan dan perumus kebijakan tentang langkah-langkah pada masa mendatang yang perlu dilakukan.

Sebenarnya paradigma pembangunan manusia tidak berhenti sampai disana. Pilihan-pilihan tambahan yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat luas seperti : Kebebasan Politik, Ekonomi dan Sosial, sampai Kesempatan untuk Menjadi Kreatif Dan Produktif, dan menikmati kehidupan yang sesuai dengan harkat pribadi dan jasmani hak-hak azasi manusia merupakan bagian dari paradigma tersebut.

Dengan demikian, **paradigma pembangunan manusia** memiliki dua sisi. sisi pertama berupa **formasi kapabilitas manusia** seperti perbaikan taraf kesehatan, pendidikan dan keterampilan. Sisi lainnya adalah pemanfaatan kapabilitas mereka untuk **kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, kultural, sosial dan politik**. jika kedua sisi itu **tidak seimbang** maka hasilnya adalah **prustasi masyarakat**.

Hasil pembangunan manusia dapat dijelaskan dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index merupakan indikator komposit tunggal yang walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, tetapi mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (**Basic Capabilities**) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah usia hidup (**Longevity**)

yang diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir (*life expectanc at birth*), pengetahuan (*Knowledge*) yang diukur dengan dua indikator yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah (mean-years of schooling), dan standar hidup layak (*Decent Living*) yang diukur dengan indikator rata-rata pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan (*Adjusted Real Per Capita Expenditure*).

Jika dilihat dari pertumbuhan IPM pada Tabel diatas, dimana setiap tahunnya meningkat (Tabel – 1.3 dan Table – 1.4), namun jika dibandingkan / dianalisa lebih lanjut dengan Tabel – 1.5 Masih terdapat hasil yang **Tidak Signifikan**.

Selanjutnya pertanyaan Besarnya adalah : “ Apakah Otonomi Daerah ini membawa Perbaikan / Peningkatan Mutu Pendidikan / Kesejahteraan Masyarakat, khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai...?”.

Untuk itu penulis tertarik untuk menelitinya dan memilih judul :

**“ANALISIS PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH  
UNTUK MENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI“.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka Perumusan masalah yang dapat diambil sebagai kajian dalam Penelitian Disertasi ini, adalah sebagai berikut :

1. Apa saja yang menjadi Faktor Internal dan Ekternal Penyebab Tingginya Angka Anak Putus Sekolah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Bagaimana Strategi yang Tepat dalam Mengatasi Tingginya Angka Anak Putus Sekolah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Kabupaten Serdang Bedagai.

### C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Tingginya Angka Anak Putus Sekolah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Untuk memberikan Usulan Alternatif Strategi Prioritas dalam Mengatasi Tingginya Angka Anak Putus Sekolah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Kabupaten Serdang Bedagai.

### D. Batasan Masalah Penelitian

Menurut Mudrajad Kuncoro (2014) Saat ini penggunaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) sebagai indikator Kesejahteraan Masyarakat memperoleh penerimaan secara luas diseluruh dunia, bahkan telah memperoleh penerimaan pada tingkat daerah. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan Indeks Pembangunan Manusia sebagai acuan untuk menentukan tingkat Kesejahteraan Masyarakat.

Sebagaimana yang telah diterangkan diatas bahwa salah alat untuk mengukur Kesejahteraan Masyarakat adalah : Indeks Pembangunan Manusia. Sementara Indikator IPM itu sendiri terdiri dari tiga, yaitu : Kesehatan, Pendidikan dan Pendapatan. Dimana satu sama lain tidak dapat dipisahkan, artinya ketiga indicator ini memiliki keterkaitan satu sama lain.

1. Dengan pendidikan yang murah dan mudah, semua orang dapat dengan mudah mengakses pendidikan setinggi-tingginya.
2. Dengan pendidikan yang tinggi, kualitas sumberdaya manusianya semakin meningkat, termasuk tingkat Kesehatannya. Akhirnya, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak semakin terbuka.
3. Ketiga Indikator ini akan **Menjadi Factor Penentu** dalam usaha-usaha yang dilakukan oleh semua pihak dalam mencapai

kesejahteraan Masyarakat. Ketiga hal ini diyakini **Merupakan Puncak Dari Gunung Es Kesejahteraan Masyarakat** yang didambakan oleh semua orang.

Kesejahteraan manusia dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan, serta mampu menggunakan pendidikan itu untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya, sehingga terwujudlah Masyarakat yang Sehat dan Sejahtera. Dari berbagai analisa diatas, Penulis memutuskan untuk membuat **Batasan Penelitian**, dengan memprioritaskan pada **Pendidikan** (Tingginya Angka Anak Putus Sekolah).

Dengan berbagai analisa antara lain :

1. Suasana Covid-19 ini, membatasi gerak Penulis untuk mendapatkan Data Penelitian : Jika meneliti **Indeks Kesehatan**, berarti Penulis harus ke **Dinas Kesehatan dan Puskesmas – Puskesmas** di Kabupaten Serdang Bedagai, ini sangat Rawan bagi Kesehatan Penulis.
2. Sementara **Indeks Pendapatan**, Penulis harus mengumpulkan Data dari **Dinas Pendapatan dan instansi terkait**, dimana Kondisi saat ini baru saja Pergantian dan Pelantikan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai, Bupati : **Darma Wijaya dengan Wabup, Adlin Yusri Tambunan**, Pada tanggal : 26 Februari 2021. Untuk Priode 2021-2026. Kondisi masih dalam suasana gonjang – ganjing Politik dan Mutasi Para Pejabat Struktural, sehingga sulit untuk memperoleh data penelitian yang dibutuhkan.
3. **Indeks Pendidikan**, Penulis sedikit lebih mudah untuk memperoleh data penelitian dari Dinas Pendidikan dan Sekolah – Sekolah yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai.
4. Dengan berbagai pertimbangan diatas, Akhirnya Penulis memfokuskan untuk meneliti **Indeks Pendidikan** (Tingginya Angka Anak Putus Sekolah). Semoga kedepannya Kedua Indikator IPM lainnya dapat diteliti, baik oleh Peneliti sendiri, maupun peneliti lainnya.

## **E. Manfaat Penelitian**

Hasil Penelitian ini, diharapkan dapat Bermanfaat Bagi :

1. Para Akademisi pada umumnya dan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada khususnya.
2. Hasil Penelitian ini, diharapkan dapat menjadi Bahan Masukan atau Kajian untuk melakukan Penelitian selanjutnya demi Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Khususnya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Yang Sama – Sama Kita Cintai ini.
3. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan Masyarakat Serdang Bedagai.
4. Dari Hasil Penelitian ini, akan dapat memberikan Usulan Alternatif Strategi Prioritas dalam Mengatasi Tingginya Angka Anak Putus Sekolah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Peneliti

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah Wawasan dan Ilmu Pengetahuan Penulis, Serta merupakan Salah satu Persyaratan dalam Meraih Gelar Doktor Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) . Amin Yaa Robbal Alamin.

## **B A B - II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Konsep Pembangunan**

##### **1. Pembangunan Ekonomi Daerah**

Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada dibawah satu administrasi tertentu seperti satu provinsi, kabupaten, kecamatan, dan sebagainya. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, Alih Ilmu Pengetahuan (Transfere Ilmu) dan pengembangan perusahaan perusahaan baru. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk

merancang dan membangun perekonomian daerah.<sup>19</sup>

Pembangunan ekonomi daerah juga didefinisikan sebagai semua kegiatan pembangunan baik yang termasuk urusan rumah tangga daerah maupun yang tidak termasuk, yang meliputi berbagai sumber dari pemerintah (APBD dan APBN) maupun yang bersumber dari masyarakat. Dalam hal ini kegiatan pembangunan daerah yang dibiayai oleh pemerintah pusat merupakan pelaksanaan asas dekonsentrasi, sedangkan pembangunan daerah yang dibiayai oleh pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah. Kabupaten, dan pemerintah desa merupakan pelaksanaan asas desentralisasi dan tugas pembantuan (medebewind).

Proses pembangunan daerah pada dasarnya bukanlah sekedar fenomena ekonomi semata. Pembangunan tidak sekedar ditujukan oleh prestasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara, namun yang lebih luas dari itu pembangunan memiliki perspektif yang luas, terutama perubahan sosial. Dimensi sosial yang sering terabaikan dalam pendekatan pertumbuhan ekonomi, justru mendapat tempat strategis bagi proses pembangunan. Dalam proses pembangunan selain mempertimbangkan pertumbuhan dan pemerataan, juga dampak aktivitas ekonomi terhadap kehidupan sosial masyarakat. Lebih dari itu, dalam proses pembangunan dilakukan upaya yang bertujuan untuk mengubah struktur perekonomian kearah yang lebih baik. (Kuncoro, 2003 dalam Safi'I, 2007).

Perkembangan akhir-akhir ini, menunjukkan munculnya pemihakan baru terhadap peningkatan peran serta pemerintah regional dalam perumusan kebijakan pembangunan didaerahnya. Dalam konteks ini, **Kelompok Pertama** lebih Menekankan Kepada Aspek Efisiensi, sementara **Kelompok Kedua** selain aspek efisiensi juga aspek distribusi menjadi pertimbangan lain. Tumbuhnya pemikiran kedua ini, ditandai dengan perkembangan yang meyakinkan dalam konsepsi ekonomi regional, serta berkembangnya pemikiran baru mengenai integrasi kebijakan ekonomi

---

<sup>19</sup>Ardian, Ahmadin *“Ekonomi Daerah Dalam Era Otonomi Daerah”*, Jakarta, Gramedia, 2008, h. 15 - 54



dengan politik, dalam mengakomodasi perkembangan tuntutan masyarakat yang semakin meningkat terhadap pelayanan, kemandirian, serta partisipasi pembangunan. Dengan demikian, kajian desentralisasi dan otonomi daerah, tidak lagi hanya menjadi konsepsi tentang kajian politik, tetapi juga kajian ekonomi.<sup>20</sup>

Pembangunan regional pada hakikatnya diadakan berdasarkan pada pemikiran bahwa wilayah secara keseluruhan adalah suatu kesatuan yang utuh dan menyeluruh yang secara integral merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem nasional. Pembangunan yang dilakukan di wilayah-wilayah pada dasarnya adalah juga pembangunan nasional. Atas dasar pemikiran itu, muncul pendekatan pembangunan atas dasar sektor-sektor kegiatan tanpa memperhatikan lokasinya. Namun, dalam perkembangannya pendekatan tersebut dirasakan kurang lengkap, karena kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua wilayah yang memiliki kondisi dan potensi yang sama, sehingga muncul permasalahan kesenjangan dan inefisiensi dalam pembangunan.

Masih dalam tataran konsep pembangunan nasional, muncul pendekatan yang lebih memperhatikan kondisi dan potensi setiap wilayah dalam suatu negara tertentu, yaitu pendekatan pembangunan regional, yang selanjutnya terus berkembang dan menjadi perhatian baik dikalangan praktisi maupun kalangan akademisi. Dalam perkembangannya, menuntut kualitas dan kuantitas pelayanan publik dari pemerintah serta tuntutan kemandirian dan partisipasi pembangunan bagi masyarakat secara luas. Dewasa ini, masalah kebijakan pembangunan regional, tidak lagi hanya dikaitkan dengan masalah efisiensi dan pemerataan saja, melainkan pula dikaitkan dengan masalah pelayanan kepada masyarakat dan perkembangan aspirasi masyarakat tersebut. Kebijakan pembangunan, unit pemerintahan pada tingkat manapun yang mengimplementasikannya, secara ekonomis ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah

---

<sup>20</sup> Sobandi, Baban, *“Etika Kebijakan Publik : Moralitas Profetis Profesionalisme Birokrasi”*, 2004, Humaniora Utama Press, Bandung, h. 25 -25

satu indikator terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah meningkatnya pendapatan perkapita, distribusi pendapatan masyarakat, dan peran pemerintah. Kemudian, peningkatan pendapatan perkapita ini bisa dicapai bila terjadi pertumbuhan dalam bidang ekonomi.

Menurut Mudrajad Kuncoro, ada 4 (empat) peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah yaitu sebagai berikut :

#### 1. Entrepreneur (Wirausaha)

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis, pemerintah daerah bisa mengembangkan suatu usaha sendiri (BUMD). Aset-aset pemerintah daerah harus dapat dikelola dengan lebih baik sehingga lebih menguntungkan. Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan Potensi tanah dan bangunan untuk tujuan bisnis / ekonomi. Pantai, Jalan Raya dan Pusat Hiburan Rakyat dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan yang dapat menciptakan peluang kerja dan pemberdayaan masyarakat marginal.

Organisasi Kemasyarakatan memainkan peran penting dalam menjalankan Wirausaha, guna menciptakan peluang kerja yang tidak dapat dilakukan perusahaan swasta sehingga terjamin tersedianya jasa tenaga kerja.

#### 2. Koordinator

Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan didaerahnya. Perluasan dari peranan ini dalam pembangunan ekonomi bisa melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam proses pengumpulan dan pengevaluasian informasi ekonomi, misalnya tingkat kesempatan kerja, angkatan kerja, pengangguran dan sebagainya. Dalam perannya sebagai koordinator, pemerintah daerah bisa juga melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha, dan masyarakat dalam penyusunan sasaran-sasaran ekonomi, rencana-rencana, dan strategi-

strategi. Pendekatan ini sangat potensial dalam menjaga konsistensi pembangunan daerah dengan nasional (pusat) dan menjamin bahwa perekonomian daerah akan mendapatkan manfaat yang maksimum.

### 3. Fasilitator

Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudinal (perilaku) atau budaya masyarakat didaerahnya. Hal ini akan mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan daerah yang lebih baik.

### 4. Stimulator

Pemerintah daerah dapat mestimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk kedaerah tersebut dan menjaga agar perusahaan yang telah ada tetap berada didaerah tersebut. Salah satu faktor utama yang mengakibatkan daerah tidak berkembang adalah tidak diberikannya kesempatan yang memadai bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini didorong oleh kuatnya sentralisasi kekuasaan dibidang politik dan ekonomi. Dalam rangka mendorong pembangunan daerah telah mulai dikembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab, serta peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat.

Arah kebijakan pembangunan daerah. secara garis besar adalah :

- a).Mengembangkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab
- b).Melakukan pengkajian atas kebijakan tentang berlakunya otonomi daerah bagi provinsi, kabupaten/kota dan desa.
- c).Mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara adil dengan mengutamakan kepentingan daerah yang lebih luas melalui desentralisasi perizinan dan investasi serta pengelolaan sumberdaya.
- d).Serta memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka

melaksanakan fungsi dan peranannya guna penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.<sup>21</sup>

## 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, kinerja ekonomi akan mampu berjalan maksimal. Selanjutnya, bahwa antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi berhubungan erat, karena peningkatan pembangunan ekonomi merupakan prasyarat tercapainya pembangunan manusia yang akan mendukung peningkatan produktivitas melalui pengisian kesempatan kerja dengan usaha-usaha produktif sehingga tercapai peningkatan pendapatan. Oleh karena itu, dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan pembangunan manusia, termasuk dalam konteks ekonomi daerah. Dengan kata lain, peningkatan kualitas modal manusia juga akan memberikan manfaat dalam mengurangi ketimpangan antar daerah. Kualitas sumber daya manusia tercermin dari terciptanya lingkungan yang memungkinkan bagi manusia untuk menikmati hidup sehat, umur panjang, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Pembangunan manusia menyangkut dimensi yang sangat luas. Upaya membuat pengukuran pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah harus dapat memberikan gambaran tentang dampak dari pembangunan manusia bagi penduduk dan sekaligus dapat memberikan gambaran tentang persentase pencapaian terhadap sasaran ideal.

United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (the ultimate end) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (principal means) untuk mencapai tujuan itu.

---

<sup>21</sup> Kuncoro, Mudjarad, *“Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah Edisi 3”*, 2014, Erlangga, Jakarta, h. 171 - 173

Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan.

Secara ringkas empat hal pokok tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :

### **1. Produktivitas**

Penduduk harus diberdayakan untuk meningkatkan produktivitas dan untuk berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan lapangan pekerjaan. Pembangunan ekonomi yang demikian merupakan himpunan bagian dari model pembangunan manusia.

### **2. Pemerataan**

Penduduk harus memiliki kesempatan/peluang yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

### **3. Kesinambungan**

Akses terhadap sumberdaya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua sumberdaya fisik, manusia, dan lingkungan harus selalu diperbaharui (replenished).

### **4. Pemberdayaan**

Penduduk harus selalu berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk / arah) kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.

UNDP juga mengatakan bahwa pembangunan manusia adalah perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging the choices of people*), yang dapat dilihat sebagai proses upaya kearah perluasan pilihan dan sekaligus sebagai taraf yang dapat dicapai dari upaya tersebut. Pada saat yang sama, pembangunan manusia dapat pula dilihat sebagai pembangunan (*formation*) kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan, dan

keterampilan, serta sekaligus sebagai pemanfaatan (utilization) kemampuan / keterampilan mereka (Urbanus, 2002). Sebenarnya paradigma pembangunan manusia tidak berhenti sampai disana. Pilihan-pilihan tambahan yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat luas seperti menikmati kehidupan yang sesuai dengan harkat pribadi dan jasmani hak hak azasi manusia merupakan bagian dari paradigma tersebut. Dengan demikian, paradigma kebebasan politik, ekonomi dan sosial, sampai kesempatan untuk menjadi kreatif dan produktif, dan pembangunan manusia memiliki dua sisi. Sisi pertama berupa formasi kapabilitas manusia seperti perbaikan taraf kesehatan, pendidikan dan keterampilan. Sisi lainnya adalah pemanfaatan kapabilitas mereka untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, kultural, sosial dan politik. Jika kedua sisi itu tidak seimbang maka hasilnya adalah prustasi masyarakat.

Hasil pembangunan manusia dapat dijelaskan dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index merupakan indikator komposit tunggal yang walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, tetapi mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (basic capabilities) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah usia hidup (longevity) yang diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir (life expectanc at birth), pengetahuan (knowledge) yang diukur dengan dua indikator yaitu angka melek huruf (literacy rate) dan rata-rata lama sekolah (mean-years of schooling), dan standar hidup layak (decent living) yang diukur dengan indikator rata-rata pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan (adjusted real per capita expenditure).

Saat ini penggunaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) sebagai indikator kesejahteraan memperoleh penerimaan secara luas di seluruh dunia, bahkan telah memperoleh penerimaan pada tingkat daerah. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan indeks pembangunan manusia sebagai acuan untuk

menentukan tingkat kesejahteraan dalam bentuk ranking kesejahteraan suatu negara atau daerah. Hal ini dianggap penting karena perencanaan pembangunan dewasa ini umumnya menggunakan pendekatan partisipatif.

Dalam konteks pembangunan daerah, IPM ditetapkan sebagai salah satu ukuran utama yang dicantumkan dalam pola dasar pembangunan daerah yang akan datang. Hal ini merupakan langkah penting karena IPM menduduki salah satu posisi penting dalam manajemen pembangunan daerah, oleh karena pelaksanaan pembangunan secara luas yang meliputi unsur perencanaan, pengawasan dan evaluasi.

Selain IPM terdapat juga Indeks Pembangunan Daerah (IPD) sebagai suatu konsep ukuran pembangunan, yang terdiri dari :

- (1). Keberdayaan Pemerintah
- (2). Perkembangan Wilayah
- (3). Keberdayaan Masyarakat.<sup>22</sup>

Setiap kriteria tersebut dapat dibagi-bagi lagi kedalam beberapa aspek atau unsur. Misalnya, aspek-aspek yang tercakup dalam kriteria keberdayaan pemerintah adalah kemampuan dan kualitas aparat pemerintah itu sendiri, atau sarana dan prasarana yang digunakan aparat untuk melayani masyarakat. Definisi keberdayaan pemerintah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan upaya atau hasil pemberdayaan pemerintah (reinventing government) disuatu daerah. Perkembangan wilayah didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kondisi ekonomi wilayah, penyediaan fasilitas publik, serta potensi fisik dan lingkungan suatu daerah. Kriteria yang terakhir yaitu keberdayaan masyarakat, didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan upaya dan hasil pemberdayaan masyarakat disuatu daerah.

Kedudukan dan peranan Indeks Pembangunan Manusia dalam manajemen pembangunan akan lebih terlihat jika dilengkapi dengan suatu data set yang berisikan indikator yang relevan dengan IPM dan disusun

---

<sup>22</sup> Ibid h. 181 - 182

sebagai suatu sistem data base pembangunan manusia. Sistem data base tersebut merupakan sumber data utama dalam identifikasi lebih lanjut yang dilakukan untuk mengenali lebih dalam permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan upaya dan hasil-hasil serta dampak pembangunan manusia.

Identifikasi tersebut dibuat kedalam suatu analisis situasi pembangunan manusia yang mengkaji berbagai kendala dalam implementasi program pembangunan pada periode sebelumnya dan potensi yang dimiliki suatu wilayah untuk dimasukkan sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan daerah periode yang akan datang.

Proses ini merupakan kajian yang dapat menghasilkan rekomendasi bagi implikasi kebijakan pembangunan yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, maka IPM merupakan alat advokasi kepada para pengambil keputusan dan perumus kebijakan tentang langkah-langkah pada masa mendatang yang perlu dilakukan.

## **B. KONSEP DASAR EKONOMI SYARIAH**

1. Defenisi dan Tujuan Ekonomi Syariah
2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah
3. Posisi Ekonomi Syariah Dalam Totalitas Sistem Islam
4. Ruang Lingkup Ekonomi Syariah

### **1. Defenisi dan Tujuan Ekonomi Syariah**

Menurut bahasa, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu : Oikos yang artinya keluarga atau rumah tangga. Nomos artinya Peraturan atau Aturan. Atau dengan istilah lain : Manajemen Rumah Tangga atau Peraturan Rumah Tangga.

Dalam kehidupan sehari – hari, ekonomi sangat diperlukan dalam memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu ekonomi merupakan ilmu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Selain itu, ekonomi sebagai alat untuk mengukur tingkat kemajuan dalam suatu Negara, apakah keadaan ekonomi



yang baik atau semakin memburuk.

Para ahli ekonomi Neo Klasik mengajukan pengertian bahwa inti kegiatan ekonomi itu adalah aspek pilihan dalam penggunaan sumber daya yang langka. Sasaran utamanya adalah bagaimana mengatasi kelangkaan. Defenisi ini mengandung arti bahwa segala perilaku manusia mengandung konsekuensi. Ia dituntut untuk memilih satu dari berbagai pilihan yang dihadapi, yang pada akhir pilihannya yang terbaik, tetapi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, yang cenderung mempengaruhi sikap manusia untuk lebih memperhatikan kepentingan pribadi.<sup>23</sup>

Dalam Al Quran, ekonomi diidentikkan dengan iqtishad, yang artinya “umat yang pertengahan” atau bisa dimaknai menggunakan rezeki yang ada disekitar kita dengan cara berhemat agar kita menjadi manusia-manusia yang baik dan tidak merusak nikmat apapun yang diberikan olehNYA. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa nama “Ekonomi Syariah” bukan nama yang baku dalam terminology Islam. Bisa saja dikatakan “Ekonomi Illahiyah”, “Ekonomi Islamiyah”, “Ekonomi Qurani”, “Ekonomi Syar’i. Namun realitasnya, Ekonomi Syariah atau Ekonomi Islam, lebih Populer. Menurut Abdul Manan, ekonomi Islam (Syariah) merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari ekonomi rakyat yang diilhami oleh Nilai-nilai Islam.

- 1) Ekonomi Syariah berbeda dari Kapitalisme, Sosialisme, maupun Negara Kesejahteraan (Welfare State).
- 2) Berbeda dari kapitalisme, karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin dan melarang penumpukan kekayaan.
- 3) Selain itu, ekonomi dalam kacamata Islam merupakan tuntutan kehidupan, sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah.
- 4) Berbeda dari Ekonomi Konvensional karena, dalam ekonomi Islam **Kebutuhan (Need) Terbatas** (sebab pemenuhannya disesuaikan

---

<sup>23</sup> Sudarsono, Heri, “*Konsep Ekonomi Islam suatu Pengantar*”, Jogyakarta, Okonosia, 2004, h. 10

dengan kapasitas jasmani seseorang, seperti : makan, minum dan sebagainya).

- 5) Dengan **Sumber – Sumber Yang Tidak Terbatas** (sebab Allah menciptakan alam semesta bagi manusia, tidak habis – habisnya. karena di alam semesta ini, banyak potensi kekayaan yang belum sepenuhnya tergali oleh manusia. Hal ini menuntut manusia untuk senantiasa bekerja keras, untuk menggali berbagai potensi yang ada di alam semesta ini).
- 6) **Yang Tidak Terbatas Bukan Need, tetapi Want (Keinginan) .**
- 7) Sementara ekonomi konvensional menyatakan bahwa, kebutuhan (**Want / Keinginan**) manusia Tidak Terbatas, dengan sumber daya Terbatas.
- 8) Hal ini menjadikan **Perbedaan Yang Mendasar** antara Ekonomi Syariah dan Ekonomi Konvensional.

Bagi sebahagian kalangan, Ekonomi Syariah digambarkan sebagai Ekonomi Hasil Racikan antara aliran kapitalis dan sosialis, sehingga ciri khas khusus yang dimiliki oleh ekonomi syariah itu sendiri Hilang, padahal yang sesungguhnya, Ekonomi Syariah adalah satu system yang mencerminkan Fitrah dan ciri khasnya sekaligus.

Dengan Fitrahnya, ekonomi syariah, merupakan satu system yang dapat mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh umat. Sedangkan dengan ciri khasnya, ekonomi Islam **Dapat Menunjukkan Jati Dirinya** dengan segala kelebihanannya pada setiap system yang dimilikinya.

## **2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah**

### **a. Landasan Syariah**

Ajaran Islam memberikan jalan tengah yang adil untuk berbagai pasangan : antara Dunia dan Akhirat, antara Ratio dan Hati, antara Idealisme dan Fakta, antara Individu dan Masyarakat.

Ajaran Islam mengacu pada berbagai sumber hukum yang telah ditetapkan yaitu :



dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

**2). Surat Ali – Imran Ayat : 32**



32. Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, Maka Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir".

**3). Surat An – Nisa Ayat : 80**



80. Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka[321].

[321] Rasul tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan mereka dan tidak menjamin agar mereka tidak berbuat kesalahan.

**b. Landasan Konstitusional**

Secara Historis - Yuridis kegiatan Ekonomi Syariah Indonesia, diakui sejak lahirnya UU No. 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah menjadi UU No. 10 tahun 1998. Selanjutnya pada tahun 2008, ditetapkan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam UU Perbankan Syariah dijelaskan bahwa Tujuan Pembangunan Nasional, sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 adalah : terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, berdasarkan Demokrasi Ekonomi dengan mengembangkan sisem Ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan.

Agar tercapai tujuan pembangunan nasional dan dapat berperan aktif

dalam persaingan global yang sehat, diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat, guna mendukung proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional.

Salah bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah : Pengembangan Sistem Ekonomi berdasarkan nilai Islam (Syariah) dengan mengangkat prinsip – prinsipnya kedalam Sistem Hukum Nasional. Prinsip Syariah berdasarkan pada nilai – nilai : Keadilan, Kemanfaatan, Keseimbangan dan Keuniversalan (Rahmatan Lil Alamin). Nilai – nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan Perbankan yang didasarkan pada prinsip syariah yang disebut : Perbankan Syariah.

Dengan diundangkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pada tanggal 16 Juli 2008. Merupakan jawaban dari desakan berbagai pihak, yang selama ini menginginkan satu regulasi utuh mengenai Perbankan Syariah. Selama **Regulasi** ini perbankan syariah masih diatur dalam UU Perbankan yang tidak secara akumulatif merepresentasikan system perbankan syariah nasional.

Penyelenggaraan kegiatan usaha berbasis syariah ini di Indonesia juga dilandasi oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). DSN – MUI merupakan lembaga yang berwenang untuk menetapkan Fatwa Produk dan Jasa dalam kegiatan usaha bank berdasarkan Prinsip Syariah. Seperti Aktivitas Usaha : Perbankan syariah, Asuransi, Reksa Dana Syariah, Obligasi dan Pembiayaan Syariah.<sup>24</sup> .

### **3. Posisi Ekonomi Syariah Dalam Totalitas Sistem Islam**

Ekonomi Syariah dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai Derevasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam

---

<sup>24</sup> Ghofur, Abdul, H, Heri, “*Pengantar Ekonomi Syariah, Konsep Dasar Paradigma Pengembangan Ekonomi Syariah*”, Jakarta, Rajawali Press, 2017, h. 16 - 27

dalam berbagai aspeknya. Islam adalah system kehidupan (Ways Of Life), dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap baik kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi; berbagai aturan ini bersifat pasti (Qoth'i) dan berlaku permanen, sementara beberapa yang lain bersifat kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi.

Islam merupakan suatu agama yang memberikan tuntunan pada seluruh aspek kehidupan, baik hubungan manusia dengan tuhan atau hubungan manusia dengan sesama makhluk tuhan, inilah yang sering disebut dengan implementasi Islam secara Kaffah (menyeluruh). Pengetian implementasi Islam secara Kaffah ini adalah :

- a). Islam dilaksanakan secara keseluruhan
- b). Meliputi seluruh aspek kehidupan, yaitu : seluruh aspek kehidupan harus dibingkai dengan Ajaran Islam.

#### **4. Ruang Lingkup Ekonomi Syariah**

Dalam pandangan Islam, kehidupan manusia di dunia ini merupakan rangkaian kehidupan yang telah ditetapkan Allah kepada setiap makhlukNYA untuk kemudian dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Telah menjadi suatu ketetapan (Qodrat) dan kehendak (Iradat) Allah bahwa manusia diciptakan juga sekaligus diberi tuntutan hidup agar dapat menjalani kehidupan di dunia sebagai hamba Allah untuk kemakmuran kehidupan di dunia ini sesuai dengan kehendakNYA dan disempurnakan ajaranNYA melalui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, merupakan suatu system kehidupan yang bersifat integral dan komprehensif mengatur semua aspek kehidupan yang sejahtera baik di dunia maupun di akhirat.

Ekonomi syariah bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau komunitas Muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku yang didasarkan pada ajaran Islam. Ia mencakup cara memandung permasalahan ekonomi, menganalisis dan mengajukan alternative solusi atas berbagai permasalahan ekonomi. Ekonomi syariah merupakan konsekuensi logis dari implementasi Islam

secara Kaffah dalam aspek ekonomi.

Ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi, serta prinsip – prinsip dan nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut. Ekonomi Islam menekankan pada perilaku individu dan masyarakat yang konsisten terhadap **Orientasi Masalah.**

### **C. Konsep Otonomi Daerah**

#### **1. Pengertian Otonomi Daerah**

Otonomi Daerah berasal dari bahasa Yunani yaitu : *Authos* yang berarti sendiri dan *Namos* yang berarti undang-undang atau aturan. Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai : “*Kewenangan Untuk Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangga Sendiri*” .<sup>25</sup>

Otonomi dalam makna sempit dapat diartikan sebagai “mandiri”. Sedangkan makna yang lebih luas diartikan sebagai “berdaya”. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Jika daerah sudah mampu mencapai kondisi sesuai yang dibutuhkan daerah maka dapat dikatakan bahwa daerah sudah berdaya (mampu) untuk melakukan apa saja secara mandiri tanpa tekanan dan paksaan dari pihak luar dan tentunya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

#### **Beberapa Pendapat Ahli Yaitu :**

##### **a. F. Sugeng Istianto**

Mengartikan otonomi daerah sebagai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.

---

<sup>25</sup> Hatta, Moh. "*Demokrasi dan Autonomi*", Jakarta : Keng Po lauggal, 2011. h.10-17

b. Ateng Syarifuddin

Mengemukakan bahwa otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan (tidak terikat atau tidak bergantung kepada orang lain atau pihak tertentu). Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.<sup>26</sup>

c. Benyamin Hoesein (1993)

Bahwa otonomi daerah adalah pemerintahan oleh dan untuk rakyat dibagian wilayah nasional suatu Negara secara informal berada diluar pemerintah pusat.

d. Philip Mahwood (1983)

Mengemukakan bahwa otonomi daerah adalah suatu pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan sendiri yang keberadaannya terpisah dengan otoritas (kekuasaan atau wewenang) yang diserahkan oleh pemerintah guna mengalokasikan sumber sumber material yang substansial (sesungguhnya atau yang inti) tentang fungsi-fungsi yang berbeda.<sup>27</sup>

Berbagai definisi tentang Otonomi Daerah telah banyak dikemukakan oleh para pakar. Dan dapat disimpulkan bahwa Otonomi Daerah yaitu kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa (inisiatif) sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom itu sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 2. Sejarah Otonomi Daerah Di Indonesia

Perjalanan bangsa Indonesia melalui berbagai sistem pemerintahan dan

---

<sup>26</sup> Ibid. h. 21 - 23

<sup>27</sup> Ibid h. 78



dipimpin berbagai macam kepala pemerintahan serta munculnya masalah – masalah baru dalam lingkungan pemerintah ataupun lingkungan masyarakat tentu sangat membutuhkan tatanan hukum yang berbeda dari waktu ke waktu untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia.

Keberadaan kebijakan mengenai Pemerintahan Daerah bukan merupakan hal yang final, statis dan tetap tetapi membutuhkan pembaruan – pembaruan untuk mengatasi berbagai keadaan dan masalah baru yang muncul. Adapun Sejarah perkembangan undang – undang yang menjadi pedoman dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai berikut :

**1).UU No. 1 tahun 1945**

Mengatur Pemerintah Daerah yang membagi tiga jenis daerah otonom yakni, keresidenan, kabupaten, dan kota.

**2).UU No. 22 tahun 1948**

Mengatur susunan Pemerintah Daerah yang demokratis, membagi dua jenis daerah otonom yakni, daerah otonom biasa dan otonomi istimewa, dan tiga tingkatan daerah otonom yakni, provinsi, kab/ kota dan desa.

**3).UU No. 1 tahun 1957**

Mengatur tunggal yang berseragam untuk seluruh Indonesia.

**4).UU No. 18 tahun 1965**

Mengatur otonomi yang menganut sistem otonomi yang riil dan seluas luasnya.

**5).UU No.5 tahun 1974**

Mengatur pokok – pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah (prinsip yang dipakai : otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, merupakan pembaruan dari otonomi daerah yang seluas – luasnya dapat menimbulkan pemikiran yang dapat membahayakan keutuhan

NKRI, dan tidak serasi dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi).<sup>28</sup>

**6).UU No. 22 tahun 1999**

Mengatur tentang Pemerintahan Daerah (perubahan mendasar pada format otonomi daerah dan substansi desentralisasi).

**7).UU No. 25 tahun 1999**

Mengatur tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

**8).UU No. 32 tahun 2004**

Mengatur Pemerintahan Daerah sebagai pengganti **UU No. 22 tahun 1999**

**9).UU No. 33 tahun 2004**

Mengatur Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( perubahan UU didasarkan pada berbagai UU yang terkait di bidang politik dan keuangan negara antara lain: UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD; UU No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD; UU No. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara ).<sup>29</sup> Sedangkan perubahan yang mendasar dari pedoman Otonomi Daerah dari UU No. 22 tahun 1999 digantikan oleh **UU No. 32 tahun 2004** adalah sebagai berikut :

1). Prinsip – Prinsip Otonomi Daerah dalam UU No. 22 tahun 1999

- a. Demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi dan keanekaragaman daerah.
- b. Otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab.

---

<sup>28</sup> Karim, Abdul Gaffar, "*Kompleksitas Otonomi Daerah di Indonesia*", Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003. h. 25 - 54

<sup>29</sup> Ibid h. 78 -102

- c. Otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota.
- d. Sesuai dengan konstitusi negara.
- e. Kemandirian daerah otonom.
- f. Meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah.
- g. Asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi sebagai wilayah administrasi.
- h. Asas tugas perbantuan.

## 2). Prinsip – Prinsip Otonomi Daerah dalam UU No. 32 tahun 2004

a. Demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keaneka ragaman daerah.

b. Otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab.

**Otonomi Luas** : daerah yang memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Otonomi Nyata** : penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

**Otonomi Yang Bertanggung jawab** : dalam penyelenggaraan otonomi harus sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonom, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

- c. Otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota.
- d. Sesuai dengan konstitusi negara.
- e. Kemandirian daerah otonom.
- f. Meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah.
- g. Asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi sebagai wilayah administrasi.

h. Asas tugas perbantuan.

### **3. Tujuan Dan Prinsip Otonomi Daerah**

#### **Tujuan Otonomi Daerah**

Menurut pengalaman dalam pelaksanaan bidang-bidang tugas tertentu sistem Sentralistik tidak dapat menjamin kesesuaian tindakan-tindakan Pemerintah Pusat dengan keadaan di daerah-daerah. Maka untuk mengatasi hal ini, pemerintah kita menganut sistem Desentralisasi atau Otonomi Daerah. Hal ini disebabkan wilayah kita terdiri dari berbagai daerah yang masing-masing memiliki sifat-sifat khusus tersendiri yang dipengaruhi oleh faktor geografis (keadaan alam, iklim, flora-fauna, adat-istiadat, kehidupan ekonomi dan bahasa), tingkat pendidikan dan lain sebagainya.<sup>30</sup>

Dengan sistem Desentralisasi diberikan kekuasaan kepada daerah untuk melaksanakan kebijakan pemerintah sesuai dengan keadaan khusus di daerah kekuasaannya masing-masing, dengan catatan tetap tidak boleh menyimpang dari garis-garis aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Jadi pada dasarnya, maksud dan tujuan diadakannya pemerintahan di daerah adalah untuk mencapai efektivitas pemerintahan.

Otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah ini bersifat mandiri dan bebas. Pemerintah daerah bebas dan mandiri untuk membuat peraturan bagi wilayahnya. Namun, harus tetap mempertanggung jawabkannya dihadapan Negara dan pemerintahan pusat. Selain tujuan diatas, masih terdapat beberapa point sebagai tujuan dari otonomi daerah.

Dibawah ini adalah beberapa **Tujuan Dari Otonomi Daerah** dilihat dari segi :

#### **a). Politik**

Dilihat dari segi politik, penyelenggaraan otonomi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan dipusat dan membangun masyarakat yang demokratis, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan

---

<sup>30</sup> Ibid h. 99 - 187

melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi.

#### **b). Pemerintahan**

Dilihat dari segi pemerintahan, penyelenggaraan otonomi daerah untuk mencapai pemerintahan yang efisien.

#### **c). Sosial Budaya**

Dilihat dari segi sosial budaya, penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan agar perhatian lebih fokus kepada daerah.

#### **d). Ekonomi**

Dilihar dari segi ekonomi, otonomi perlu diadakan agar masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing. Untuk mencapai tujuan otonomi daerah tersebut, sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Para pejabat harus memiliki kesadaran penuh bahwa tugas yang diembannya merupakan sebuah amanah yang harus dijalankan dan dipertanggung jawabkan. Selain itu, kita semua juga memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam rangka tercapainya tujuan otonomi daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya bukan hal yang mudah karena tidak mungkin dilakukan secara instan. Butuh proses dan berbagai upaya serta partisipasi dari banyak pihak. Oleh karena itu, diperlukan kesungguhan serta kerjasama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan ini.

### **Prinsip - Prinsip Otonomi Daerah**

Atas dasar pencapaian tujuan diatas, prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman dalam pemberian Otonomi Daerah adalah sebagai berikut (Penjelasan UU No. 32 Tahun 2004) :

a).Prinsip Otonomi Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah *diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan Pemerintah* yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah

untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

b).Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya, adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

c).Pembagian Kekuasaan dalam Kerangka Otonomi Daerah

Pembagian antara pusat dan daerah dilakukan berdasarkan prinsip negara kesatuan tetapi dengan semangat federalisme. Jenis kekuasaan yang ditangani pusat hampir sama dengan yang ditangani oleh pemerintah di negara federal, yaitu hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, dan agama, serta berbagai jenis urusan yang memang lebih efisien ditangani secara sentral oleh pemerintah pusat, seperti kebijakan makro ekonomi, standarisasi nasional, administrasi pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), dan pengembangan sumber daya manusia.

Selain sebagai daerah otonom, provinsi juga merupakan daerah administratif, maka kewenangan yang ditangani provinsi atau gubernur akan mencakup kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi.

***Kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom provinsi*** dalam rangka desentralisasi mencakup :

1).Kewenangan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, seperti kewenangan dalam bidang pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan, dan perkebunan.

- 2).Kewenangan pemerintahan lainnya, yaitu perencanaan pengendalian pembangunan regional secara makro, pelatihan bidang alokasi sumber daya manusia potensial, penelitian yang mencakup wilayah provinsi dan perencanaan tata ruang provinsi.
- 3).Kewenangan kelautan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut, pengaturan kepentingan administratif, penegakan hukum dan bantuan penegakan keamanan, dan kedaulatan negara.
- 4).Kewenangan yang tidak atau belum dapat ditangani daerah kabupaten dan daerah kota diserahkan kepada provinsi dengan pernyataan dari daerah otonom kabupaten atau kota tersebut.<sup>31</sup>

### **Nasionalisme dalam Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah**

Otonomi pada dasarnya adalah sebuah konsep politik, yang selalu dikaitkan atau disepadankan dengan pengertian kebebasan dan kemandirian. Sesuatu akan dianggap otonom jika dia menentukan dirinya sendiri, membuat hukum sendiri dengan maksud mengatur diri sendiri, dan berjalan berdasarkan kewenangan, kekuasaan, dan prakarsa sendiri. Muatan politis yang terkandung dalam istilah ini adalah bahwa dengan kebebasan dan kemandirian tersebut, maka suatu daerah dianggap otonom kalau memiliki kewenangan (authority) atau kekuasaan (power) dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama untuk menentukan kepentingan daerah maupun masyarakatnya sendiri. Namun demikian, dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, satu prinsip yang harus dipegang oleh bangsa Indonesia adalah : bahwa aplikasi otonomi daerah tetap berada dalam konteks persatuan dan kesatuan nasional Indonesia. Otonomi tidak ditujukan untuk kepentingan pemisahan suatu daerah untuk bisa melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang bagaimana nasionalisme berperan dalam pembangunan daerah.? Apabila dijabarkan prinsip-prinsip dasar nasionalisme, maka dapat disebutkan antara lain :

- 1) Cinta Kepada Tanah Air

---

<sup>31</sup> Ibid h. 103 – 145

- 2) Kesatuan
- 3) Dapat Bekerjasama
- 4) Demokrasi dan Persamaan
- 5) Kepribadian
- 6) Prestasi.

Bagi bangsa Indonesia, prinsip-prinsip dasar nasionalisme tersebut tercermin dalam Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” (Unity In Diversity). Dalam setiap pembangunan di daerah, nasionalisme akan tetap terjaga apabila keenam prinsip tersebut selalu dilaksanakan dan diamalkan. Memang, nasionalisme sebagai rujukan untuk membangun jauh lebih sulit diwujudkan. Diperlukan pemikiran yang konstruktif dan kemampuan strategis untuk menggunakan sumberdaya untuk mencapai sasaran-sasaran berjangka panjang sambil menyelesaikan masalah-masalah berjangka pendek, sambil menetralisasi dampak negative dari nasionalisme dan demokrasi sebagai gerakan yang destruktif. Cinta tanah air meletakkan setiap proses pembangunan untuk kepentingan bangsa dan negara bukan golongan apalagi individu. Adapun prinsip kesatuan diaplikasikan dalam bentuk - bentuk pembangunan yang mengutamakan kebersamaan dalam demi keutuhan NKRI dengan memperhatikan keaneka ragaman sifat pluralistic dari bangsa Indonesia. Artinya, setiap pembangunan di daerah tidak hanya diperuntukkan dan harus dilaksanakan oleh orang “**Asli Atau Putra Daerah**” daerah itu saja. Selanjutnya apabila kita lihat UU No. 22 Tahun 1999 maka kita bisa menjabarkan pokok-pokok nasionalisme yang perlu diperhatikan oleh setiap daerah dalam melaksanakan pembangunan sebagai pencerminan kedaulatan negara dan pokok-pokok otonomi sebagai pencerminan kedaulatan rakyat. Prinsip ketiga dari nasionalisme adalah dapat bekerjasama. Ini berarti bahwa dalam setiap proses pembangunan di daerah perlu dibudayakan kerjasama baik interen subjek pembangunan di dalam daerah maupun antar daerah. Setiap daerah otonom perlu membuka alternatif kerjasama antara satu dengan lainnya, perlu menjembatani berbagai kepentingan antara rakyat dari daerah satu dengan daerah lain, dan sebagainya. Dalam Pembangunan Daerah perlu ditekankan adanya: prinsip-



prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan,serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, dalam pelaksanaannya. Jangan sampai pembangunan di daerah meninggalkan peran serta masyarakat, apalagi mengorbankan mereka. Sejarah masa lalu membuktikan bahwa krisis multidimensi bangsa Indonesia saat ini sebenarnya bukan terletak pada melemahnya nasionalisme , tetapi karena terjadinya proses ketidakadilan structural dalam sistem masyarakat Indonesia. Musuh utama nasionalisme dalam pembangunan yang berkembang saat ini adalah banditisme modern struktural, ideology pemaksaan dan manipulasi kekuasaan yang kolusi oleh beberapa elite terhadap masyarakat. Salah satu hal yang penting tetapi selalu dianggap remeh dan disepelekan adalah pentingnya wawasan sejarah dalam pembangunan daerah. Wawasan sejarah akan menjelaskan nasionalisme bangsa, dan nasionalisme akan mengarahkan pembangunan. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap sejarah lokal sangat penting bagi proses pembangunan daerah. Berdasarkan bidang yang menjadi “bintang” itu, sesungguhnya setiap daerah membutuhkan pemahaman terhadap bidang – bidang tersebut dengan pendekatan historis. Mengapa....?

Karena penentuan langkah dan kebijakan dalam menggarap bidang tidak bisa dilepaskan dengan akar sejarahnya. Pada dasarnya setiap bidang yang akan dikembangkan itu mempunyai problematikanya sendiri. Problematika itu tidak lain merupakan produk masa lampunya. Oleh karena itu untuk bisa menjawab berbagai persoalan yang berkembang sekarang, maka kajian historis sangat penting. Jadi setiap bidang Membutuhkan Analisis dan Kajian Sejarah.

Untuk mencapai tujuan otonomi daerah, sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Para pejabat harus memiliki kesadaran penuh bahwa tugas yang diembannya merupakan sebuah amanah yang harus dijalankan dan dipertanggungjawabkan. Selainitu, kita semua juga memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam rangka tercapainya tujuan otonomi daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya bukan hal yang mudah karena tidak mungkin dilakukan secara instan. Butuh proses dan berbagai upaya serta partisipasi dari banyak pihak. Oleh karena itu,

diperlukan kesungguhan serta kerjasama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan ini.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :

Indikator Keberhasilan OTDA :

1. EKONOMI

- a) Pendapatan nasional perkapiata
- b) Pengurangan jumlah penduduk miskin
- c) Tingkat pengangguran
- d) Gini ratio, luas daerah dibawah kurva lorent, dll

2. SOSIAL

- a) Ratio guru terhadap murid
- b) Ratio tenaga kesehatan terhadap penduduk, dll

3. PRASARANA DASAR

- a) Prasarana perhubungan
- b) Prasarana penerbangan.<sup>32</sup>

### **Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia**

Sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, banyak aspek positif yang diharapkan dalam pemberlakuan Undang-Undang tersebut. Termasuk diharapkan penerapan otonomi daerah karena kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini sangat terpusat di Jakarta. Sementara itu pembangunan di beberapa wilayah lain dilaikan. Disamping itu pembagian kekayaan secara tidak adil dan merata di setiap daerahnya. Daerah-daerah yang memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah, seperti : Aceh, Riau, Irian Jaya (Papua), Kalimantan dan Sulawesi ternyata tidak menerima perolehan dana yang patut dari pemerintah pusat serta kesenjangan sosial antar satu daerah dengan daerah lain sangat mencolok.

Otonomi Daerah memang dapat membawa perubahan positif di daerah dalam

---

<sup>32</sup> Karim, Adiwirman, *“Ekonomi Mikro Islami”*, Jakarta, Raja Grafindo, 2018, h. 153

hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah impian karena system pemerintahan yang sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting atau sebagai pelaku pinggiran. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah sangat baik, yaitu untuk memberdayakan daerah, termasuk masyarakatnya, mendorong prakarsa dan peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Pada masa lalu, pengerukan potensi daerah ke pusat terus dilakukan dengan dalih pemerataan pembangunan. Alih-alih mendapatkan manfaat dari pembangunan, daerah justru mengalami proses pemiskinan yang luar biasa. Dengan kewenangan yang diperoleh daerah dari pelaksanaan Otonomi Daerah, banyak daerah yang optimis bakal bisa mengubah keadaan yang tidak menguntungkan tersebut.

Beberapa contoh keberhasilan dari berbagai daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu :

- 1) Di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, masyarakat lokal dan LSM yang mendukung telah berkerja sama dengan dewan setempat untuk merancang suatu aturan tentang pengelolaan sumber daya kehutanan yang bersifat kemasyarakatan (community-based). Aturan itu ditetapkan untuk memungkinkan bupati mengeluarkan izin kepada masyarakat untuk mengelola hutan milik Negara dengan cara yang berkelanjutan.
- 2) Di Gorontalo, Sulawesi, masyarakat nelayan disana dengan bantuan LSM-LSM setempat serta para pejabat yang simpatik di wilayah provinsi baru tersebut berhasil mendapatkan kembali kontrol mereka terhadap wilayah perikanan tradisional/ adat mereka.

Kedua contoh diatas menggambarkan bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah dapat membawa dampak positif bagi kemajuan suatu daerah. Kedua contoh diatas dapat terjadi berkat adanya Otonomi Daerah di daerah tersebut. Pada tahap awal pelaksanaan Otonomi Daerah, telah banyak mengundang suara pro dan kontra. Suara pro umumnya datang dari daerah yang kaya akan sumber daya, daerah-daerah tersebut tidak sabar ingin agar Otonomi Daerah tersebut

segera diberlakukan. Sebaliknya, untuk suara kontra bagi daerah-daerah yang tidak kaya akan sumber daya, mereka pesimis menghadapi era otonomi daerah tersebut. Masalahnya, otonomi daerah menuntut kesiapan daerah disegala bidang termasuk peraturan perundang-undangan dan sumber keuangan daerah. Oleh karena itu, bagi daerah-daerah yang tidak kaya akan sumber daya pada umumnya belum siap ketika Otonomi Daerah pertama kali diberlakukan. Selain karena kurangnya kesiapan daerah-daerah yang tidak kaya akan sumber daya dengan berlakunya otonomi daerah, dampak negatif dari otonomi daerah juga dapat timbul karena adanya berbagai penyelewengan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut.

### **Permasalahan/Kendala dalam Penerapan Otonomi Daerah**

Dalam era transisi kebijakan sentralistik ke desentralistik demokratis yang dituju dalam pemerintahan nasional sebagaimana ditandai dengan diberlakukannya Otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang No. 22 tahun 1999 sejak tanggal 1 Januari 2000, memang masih ditemui kendala-kendala yang perlu diatasi. Dari sekian kendala terdapat permasalahan yang mengandung potensi instabilitas yang dapat mengarah kepada melemahnya ketahanan nasional di daerah bahkan dapat memicu terjadinya disintegrasi bangsa bila tidak segera diatasi, yaitu :

#### **1) Pembagian Urusan**

Contoh permasalahan di Kepri yakni : dalam pembuatan kebijakan pusat untuk daerah Permasalahan yang paling sering dialami oleh daerah adalah banyaknya aturan yang saling tumpang tindih antara pusat dan daerah. Akibatnya banyak aturan pusat yang akhirnya tidak bisa diterapkan di daerah. Salah satu sebab itu karena pusat tidak memahami keadaan yang sedang dialami daerah tersebut. Kondisi inilah yang diduga menjadi kendala utama belum maksimalnya pelaksanaan Free Trade Zone (FTZ) di Kepri ini. Daerah selalu menunggu aturan dari pusat atau kebijakan dari pusat sehingga setelah ditunggu ternyata hasilnya selalu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Seharusnya hal tersebut dapat

diatasi apabila pembagian urusan antara daerah dan pusat tidak tumpang tindih. Artinya, dalam pengusulan suatu konsep aturan daerah harus terlibat langsung. Atau dengan kata lain sebelum pemerintah pusat membuat aturan, daerah memiliki tugas seperti mengajukan konsep awal yang tidak bertentangan dengan aturan yang ada di daerah. Sehingga pemerintah pusat dalam menyusun aturan, memiliki landasan yang kuat mengacu pada konsep daerah.

## **2) Pelayanan Masyarakat**

Pada umumnya, Sumber Daya Manusia pada pemerintah daerah memiliki sumber informasi dan pengetahuan yang lebih terbatas dibandingkan dengan sumber daya pada Pemerintah Pusat. Hal ini mungkin diakibatkan oleh sistem kepegawaian yang masih tersentralisasi sehingga Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan wewenang dalam mengelola Sumber Daya manusianya sesuai dengan kriteria dan karakteristik yang dibutuhkan oleh suatu daerah. Sehingga pelayanan yang diberikan hanya standar minimum.

## **3) Lemahnya Koordinasi Antar Sektor dan Daerah .**

Koordinasi antar sektor tidak hanya menyangkut kesepakatan dalam suatu kerjasama yang bersifat operasional tetapi juga koordinasi dalam pembuatan aturan. Dua hal ini memang tidak serta merta menjamin terjadinya sinkronisasi antar berbagai lembaga yang memproduksi peraturan dan kebijakan tetapi secara normative koordinasi dalam penyusunan peraturan perundangan akan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang sistematis dan tidak bertubrukan satu sama lain. Walaupun Kepala Daerah dalam kedudukan sebagai Badan Eksekutif Daerah bertanggung jawab kepada DPRD, namun DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah tetap merupakan partner (mitra) dari dan berkedudukan sejajar dengan Pemerintah Daerah atau Kepala Daerah. Masalah seperti ini pun sangat terasa di Pusat. Kesan memposisikan

diri yang lebih kuat, lebih tinggi dari yang lainnya yang kadang-kadang disaksikan oleh masyarakat luas. Ada tiga hal yang perlu disadari dan disamakan oleh legislatif dan eksekutif dalam menyikapi berbagai perbedaan yaitu pola pikir, pola sikap dan pola tindak. Pola pikir yang harus sama adalah kita sadar terhadap apa yang harus kita pertahankan dan kita upayakan, yaitu integritas dan identitas bangsa serta berbagai upaya untuk memajukan dan mencapai tujuan bangsa. Pola sikap yaitu, bahwa setiap elemen bangsa mempunyai kemampuan dan kontribusi seberapapun kecilnya. Dan pola tindak yang komprehensif, terkordinasi dan terkomunikasikan.

4) Pembagian Pendapatan UU 25 tahun 1999.

pada dasarnya menganut paradigma baru, yaitu berbeda dengan paradigma lama, maka seharusnya setiap kewenangan diikuti dengan pembiayaannya, sesuai dengan bunyi pasal 8 UU 22/1999. Pada saat sekarang ini, banyak daerah yang mengeluh tentang tidak proporsionalnya jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima, baik oleh Daerah Propinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Banyak daerah yang DAU-nya hanya cukup untuk membayar gaji pegawai daerah dan pegawai eks kanwil, Kandep/Instansi vertikal di daerah. Disamping itu, kriteria penentuan bobot setiap daerah dirasakan oleh banyak daerah kurang transparan. Kriteria potensi daerah dan kebutuhan daerah tampaknya kurang representatif secara langsung terhadap pembiayaan daerah. Dengan demikian perhitungan DAU yang transparan sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU 25/1999 jo PP 104/2000 tentang perimbangan keuangan terutama pasal-pasal yang menyangkut perhitungan DAU dan faktor penyeimbangan, kiranya perlu ditata kembali. Kemudian, pembagian bagi hasil Sumber Daya Alam (SDA) dirasakan kurang mengikuti prinsip-prinsip pembiayaan yang layak yang sejalan dengan pemberian kewenangan Kepala Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Seperti halnya dalam paradigma lama, melalui

paradigma baru pun bagian daerah selalu jauh dari Sumber Daya Alam yang kurang potensial (seperti: perkebunan, kehutanan, pertambangan umum dan sebagainya), sedangkan disektor minyak dan gas alam, hanya mendapat porsi kecil. Bagian bagi hasil di bidang ini perlu diperbesar, sehingga daerah penghasil mendapat bagian yang proporsional sebanding dengan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh eksplorasi dan eksploitasi SDA tersebut.

##### 5) Fanatisme Daerah (Ego Kedaerahan)

Sifat seperti ini sangat tidak baik jika ada disuatu wilayah/ daerah atau dimanapun, karena hal ini dapat menimbulkan kesenjangan atau kecemburuan terhadap daerah-daerah lain.

Contoh pemasalahannya kejadian yang terjadi di daerah kabupaten Anambas dalam penerimaan CPNS. Bagi pelamar CPNS minimal mempunyai Ijazah yang dikeluarkan oleh disdik kabupaten. Anambas baik SD, SMP, dan SMA. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terlalu egoisnya suatu daerah yang **Mengutamakan Putra Daerah** untuk dapat menjadi CPNS dalam mengembangkan daerahnya sendiri sehingga untuk warga daerah lain tidak diberikan peluang untuk menjadi CPNS dan hal ini juga dapat menimbulkan kerugian bagi warga Anambas karena dapat mengurangi pendapatan mereka (yang berjualan atau yang membuka tempat-tempat kos) Solusinya sebaiknya dalam hal ini daerah Anambas tidak terlalu egois dalam penerimaan CPNS ini. Sehingga warga lain yang bukan berasal dari Anambas dapat bekerja dan dan bersaing demi memajukan daerah tersebut dan membuka peluang bagi siapapun yang memiliki kemampuan dan skiil serta pengetahuan mereka dalam berkopetensi untuk bersaing demi kebaikan dan memajukan daerah tersebut. Hal ini juga dapat meningkatkan pendapatan untuk penghasilan bagi warga yang memiliki mata pencarian sebagai pedagang dan yang memiliki rumah-rumah kos. Jika dibandingkan dengan adanya fanatisme.

#### 6) Disintegrasi

Disintegrasi dapat menimbulkan perpecahan atau terganggunya stabilitas keamanan nasional dalam penyelenggaraan sebuah negara. Hal ini dapat disebabkan oleh keegoisan suatu kelompok masyarakat atau daerah dalam mempertahankan suatu pendapat yang memiliki unsur kepentingan-kepentingan kelompok satu dengan yang lain. Yang dapat merugikan atau kecemburuan terhadap kelompok – kelompok yang lain untuk mendapatkan hak yang sama sehingga dapat memecahkan rasa persatuan dan kesatuan kita dan dapat menimbulkan berbagai pertikaian dalam sebuah negara atau daerah tersebut. Contohnya: GAM, RMS, dan lain-lain. Solusinya sebaiknya kita sebagai warga negara yang baik harusnya tidak egois dalam mempertahankan suatu hak atau pendapat antara kelompok yang satu dengan yang lain dapat menimbulkan pertikaian dan mengganggu keamanan di daerah tersebut. Namun kita harus bersatu demi memajukan daerah atau negara yang kita cintai.

#### 7) Otonomi Daerah Dikaitkan Semata - mata dengan Uang.

Pemahaman otonomi daerah harus mencukupi sendiri segala kebutuhannya, terutama dibidang keuangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa uang memang merupakan sesuatu yang mutlak, namun uang bukan satu-satunya alat dalam menggerakkan roda pemerintahan. Kata kunci dari otonomi adalah “**kewenangan**”. Dengan kewenangan uang dapat dicari dan dengan itu pula pemerintah harus mampu menggunakan uang dengan bijaksana, tepat guna dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

#### 8) Daerah Belum Siap dan Belum Mampu.

Pembuatan kebijaksanaan otonomi daerah menurut Undang– Undang No. 22 tahun 1999 dianggap tergesa-gesa karena daerah tidak/ belum siap dan tidak/ belum mampu. Munculnya pandangan seperti ini sebagai



akibat dari munculnya kesalah pahaman yang pertama karena selama ini daerah sangat bergantung pada pusat dalam bidang keuangan, apalagi melihat kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD rata – rata di bawah 15% untuk kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

**9) Dengan Otonomi Daerah Maka Pusat Akan Melepaskan Tanggungjawabnya Untuk Membantu dan Membina Daerah.**

Kekhawatiran yang muncul dari daerah – daerah dengan adanya otonomi adalah pemerintah pusat melepaskan sepenuhnya terhadap daerah, terutama di bidang keuangan. Padahal dalam Undang–undang No. 22 tahun 1999 menganut falsafah yang sudah sangat umum dikenal di berbagai negara, yaitu setiap pemberian kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada daerah harus disertai dengan dana yang jelas dan cukup, apakah dalambentuk Dana Alokasi Umum atau Dana Alokasi Khusus serta bantuan keuangan yang lainya dari pemerintah pusat pada daerah.

**10) Otonomi Daerah Akan Menciptakan Raja–Raja Kecil di Daerah dan Memindahkan Korupsi di Daerah.**

Otonomi daerah dapat memindahkan KKN dengan menciptakan raja–raja kecil di daerah dapat terjadi apabila dilakukan tanpa kontrol sama sekali dari masyarakat – seperti yang telah dialami bangsa Indonesia oleh pemerintahan Orde Baru ataupun Orde Lama. Sedangkan otonomi daerah saat ini mendasarkan pada demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, tidak ada lagi penguasa tunggal seperti pada masa lampau.<sup>33</sup>

#### **4. Otonomi Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah**

Umat Islam sejak lama telah Menerapkan Prinsip Otonomi Daerah di masa

---

<sup>33</sup>Siregar, Nurmayana, *‘Semangat Berbangsa dan Bernegara Di Era Globalisasi’*, Medan : Perdana Publishing, 2020. h. 70 – 98.

kekhalfahan.

Administrasi pemerintahan pada zaman modern mengandalkan konsep otonomi daerah. Sistem ini dianut oleh sebagian besar Negara di dunia. Dengan otonomi, tiap daerah bisa mengatur urusan local tanpa perlu menunggu instruksi dari pusat sehingga mampu menggerakkan roda pembangunan dengan cepat.

Umumnya, diketahui konsep otonomi atau tata pemerintahan secara keseluruhan berasal dari gagasan cendekiawan Barat, terutama selama periode Renaissance. Klaim ini tidak sepenuhnya benar. Sebab, berpuluh abad sebelumnya, kaum Muslim sudah menerapkan kebijakan otonomi dalam mengatur negara. Penelusuran sejarah dilakukan para ilmuwan kontemporer. **Mereka menemukan fakta bahwa dinasti kekhalfahan abad pertengahan dibangun berdasarkan sistem administrasi otonomi.** Provinsi-provinsi Islam memiliki kekuasaan dalam menerapkan kebijakan di beberapa bidang.

Demikian disebutkan pada buku *History of the Arab*. Penulisnya, sejarawan sains Philip K Hitti menyatakan, **Sejak Dinasti Umayyah** memegang tampuk kekuasaan di dunia Islam, sistem otonomi segera diberlakukan. Terkait hal ini, otoritas dan tanggung jawab pengelolaan wilayah diemban para gubernur, sultan, atau emir di tingkat lokal. Mereka adalah wakil khalifah di masing-masing provinsi. Gubernur, papar Philip Hitti, wajib mengurus administrasi politik dan militer di provinsinya.

**Hanya satu bidang yang tidak sepenuhnya diberikan kuasa kepada gubernur**, yakni pajak. Pada era Umayyah, pajak ditiap daerah diurus oleh petugas khusus (shahib al kharaj). Mereka bertanggung jawab langsung kepada khalifah. Sejarah mencatat, khalifah Muawiyah pernah mengirim petugas khusus dari ibu kota Damaskus ke Kuffah.

Pada awalnya, penarikan pajak dan kas negara diberikan otonominya kepada tiap provinsi. Tetapi, lama kelamaan, para pegawai daerah melalaikan

amanah itu sehingga khalifah merasa perlu mengevaluasi kebijakannya dengan mengirim petugas khusus. Tak hanya bagi kalangan politisi dan penguasa negara, sistem otonomi sangat penting bagi para ilmuwan Muslim. Mereka mulai menggali warisan pemikiran kuno terutama dari Yunani dan India, yang terkait dengan penerapan otonomi dilingkup politik pemerintahan.

Salah satu tokoh penting yang mengusung **Tema Otonomi Dalam Gagasan Ilmiahnya** yakni : **Khwaja Ziauddin al Barani (1285-1357)**. Pemikirannya pada bidang otonomi, diuraikan oleh Mark Bevir dalam buku *Encyclopedia of Political Theory*, bersumber dari ide Plato maupun Aristoteles. Mark Bevir mencatat, yang dikemukakan al Barani termasuk konsep Islam paling awal tentang otonomi. Al Barani menegaskan bahwa khalifah mengemban amanah Tuhan di muka bumi untuk memimpin umat menuju kehidupan yang lebih baik. Ia diberikan seperangkat alat kekuasaan untuk menjalankan amanah itu. Meski demikian, pada praktiknya, khalifah atau penguasa tidak sepenuhnya bisa mengawasi jalannya upaya pengaturan negara. Oleh karena itu, sebagian kekuasaannya harus diberikan kepada para pembantunya.

Mark Bevir menyebut **Pemikiran Al Barani Sebagai Konsep Otonomi Di Dunia Islam Abad Pertengahan**. Bahkan, al Barani dengan tegas mengatakan, konsep itu menjadi keniscayaan bagi negara atau imperium Islam dengan wilayah kekuasaan yang luas. Tidak mungkin terwujud sebuah negara serta kekuasaan yang kuat tanpa ditopang wilayah-wilayah yang kuat dan makmur,” tutur al Barani. Pemikiran ini berpengaruh sangat luas dan diterapkan pada masa-masa berikutnya.

Pada **Era Pemerintahan Dinasti Abbasiyah**, sistem otonomi pun dipergunakan secara kuat untuk mendukung perkembangan segenap aspek kehidupan. Berdasarkan karya-karya sejarawan Muslim klasik, semisal al Ishtakhiri, ibn Hawqal, atau ibn al Faqih, wilayah Abbasiyah juga terbagi

dalam provinsi-provinsi. Pada perkembangannya, tak jarang terjadi perubahan jumlah atau batas wilayah provinsi tersebut. Proses desentralisasi dan otonomi pun tak terhindarkan. Philip Hitti menyatakan, hal ini merupakan konsekuensi dari wilayah yang demikian luas dari imperium Islam kala itu. Terutama karena sulitnya sarana komunikasi.”

Gubernur menjalankan urusan administrasi di tingkat lokal. Otoritas seorang gubernur sangat dominan. Bahkan, jabatannya bisa diwariskan kepada keturunannya. Gubernur bisa terus memegang jabatannya selama masih dipercaya oleh wazir istana.

### **Dua Jenis Gubernur**

Sejarawan Muslim al Mawardi mengungkap dua jenis jabatan gubernur pada era kejayaan. **Pertama, dalam kapasitas sebagai imarah 'ammah (amir umum)**, ia memiliki wewenang untuk mengatur urusan militer, juga mengangkat hakim serta mengawasi hakim peradilan. Otoritas lainnya yakni memungut pajak di wilayahnya, memelihara ketertiban, menata administrasi kepolisian, dan menjadi imam shalat Jumat.

**Kedua adalah gubernur yang punya otoritas khusus (khashshah).** Di sini, gubernur tidak memiliki otoritas peradilan dan pajak.<sup>34</sup>

Kata Philip Hitti, ada kalanya kewenangan gubernur atau amir jauh lebih luas. Ia memiliki otonomi luar biasa, antara lain, karena kemampuan pribadinya, lemahnya pengawasan khalifah, jarak yang jauh dari pusat pemerintahan, dan lainnya. Dalam urusan keuangan, provinsi pun berhak menyusun rencana anggaran sendiri sesuai kebutuhan. Jika pengeluaran lokal lebih sedikit dari pemasukan, sisanya dikirimkan ke ibu kota. Demikian pula peradilan, dipegang oleh seorang kepala hakim provinsi.

---

<sup>34</sup>Karim, Adi Warman, *‘Ekonomi Mikro Islami’*, Jakarta : Rajawali Publishing, 2018. h.50 – 98.

Konsep otonomi juga melingkupi aspek keagamaan. Pada masa itu, banyak terdapat komunitas non-Muslim, antara lain, Nasrani, Yahudi, Sabiin, Zoroaster, Manikea, dan sebagainya. Oleh penguasa kekhalifahan, mereka diakui hak-haknya dan mendapat otoritas khusus, yakni dalam kaitan menjalankan ajaran agama atau kepercayaan, membentuk peradilan agama, atau mengangkat pemimpin agama. Namun, jika terjadi perselisihan dengan umat Muslim, akan diselesaikan diperadilan umum.

### **Permasalahan Otonomi Daerah Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.**

Lahirnya sistem otonomi daerah merupakan buah demokrasi yang tumbuh berkembang di Indonesia sejak era reformasi 1998. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pemerintah daerah memiliki hak wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (KPU).

Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan daerah sesuai dengan potensi lokal wilayahnya. Kedudukan pemerintah daerah terutama kabupaten/kota dalam sistem otonomi daerah menjadi sangat penting karena akan berperan sebagai motor dalam pelaksanaan otonomi. Pemerintah daerah yang menguasai daerah yang lebih sempit daripada pemerintah pusat diharapkan sangat memahami kondisi dan permasalahan wilayahnya secara lebih detail. Dengan demikian, pembangunan daerah diharapkan dapat berjalan secara aktif dan merata sampai pada wilayah-wilayah daerah.

Sejak diberlakukannya undang-undang mengenai otonomi daerah, banyak orang sering membicarakan aspek positifnya. Memang tidak disangkal lagi, bahwa otonomi daerah membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah impian karena sistem pemerintahan yang terpusat cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting. Sebelum pemberlakuan otonomi daerah, pengerukan potensi daerah ke pusat

terus dilakukan dengan alasan pemerataan pembangunan. Alih-alih mendapatkan manfaat dari pembangunan, daerah justru mengalami proses pemiskinan yang luar biasa. Dengan kewenangan tersebut tampaknya banyak daerah yang optimis bakal bisa mengubah keadaan yang tidak menguntungkan tersebut. Akan tetapi di tengah optimisme itu ternyata justru muncul permasalahan-permasalahan baru. **Masalah pertama** terkait timbulnya percepatan kerusakan hutan dan lingkungan yang berdampak pada merosotnya sumber daya air di hampir seluruh wilayah tanah air, bahkan untuk Pulau Jawa dan Bali sejak tahun 1995 telah mengalami defisit air karena kebutuhan air jauh diatas ketersediaan air.

Eksplorasi hutan dan lahan yang tak terkendali juga menyebabkan hancurnya habitat dan ekosistem satwa liar yang berdampak terhadap punahnya sebagian varietas tumbuhan dan satwa langka serta mikro organisme yang sangat bermanfaat untuk menjaga kelestarian alam. Kerusakan dan masalah lingkungan hidup cenderung meningkat sejak otonomi daerah diberlakukan. Celakanya, banyak keputusan pemerintah daerah dalam membuka jalur investasi yang mengabaikan analisa mengenai dampak lingkungan (amdal). Banyak perizinan yang dikeluarkan dengan tidak memperhatikan lingkungan, mengabaikan amdal. Fenomena ini telah jelas diterangkan dalam :

**Surat Ar-Rum ayat : 41- 42 yaitu :**



41. *Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*

42. *Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)."*

Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas untuk memanfaatkan, mengelola dan memelihara alam semesta. Allah telah menciptakan alam semesta untuk kepentingan dan kesejahteraan semua makhluk-Nya, khususnya manusia. Keserakahan dan perlakuan buruk sebagian manusia terhadap alam dapat menyengsarakan manusia itu sendiri. Tanah longsor, banjir, kekeringan, tata ruang daerah yang tidak karuan dan udara serta air yang tercemar adalah buah kelakuan manusia yang justru merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya. Islam mengajarkan agar umat manusia senantiasa menjaga lingkungan.

Kelemahan lain dari sistem otonomi daerah adalah memicu perkembangan daerah yang tidak merata dan semakin lebarnya jurang kesenjangan antar daerah. Dimana daerah dengan sumber daya alam melimpah akan mampu menciptakan iklim investasi yang tinggi dan akan mempercepat pertumbuhan daerah tersebut. Namun, realitanya tidak semua daerah mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah, sehingga inilah yang menyebabkan kesenjangan antar daerah. Tidak hanya itu sifat-sifat kedaerahan yang terlalu fanatis semakin muncul dengan adanya otonomi daerah ini sehingga memunculkan konflik-konflik baru yang pada akhirnya dapat mengancam kedaulatan wilayah NKRI itu sendiri.

Masalah penggunaan anggaran dana yang besar dimana penyelenggaraan pemilukada yang begitu banyak di Indonesia dinilai sangat memboroskan anggaran daerah. Bahkan bagi daerah yang kemampuan fiskalnya rendah, kewajiban membiayai pilkada ternyata mengurangi belanja pelayanan publik seperti urusan pendidikan dan kesehatan. Biaya pilkada untuk kabupaten/kota Rp 25 miliar, untuk pilkada provinsi Rp 100 miliar. Jadi untuk keseluruhan pilkada di Indonesia diperlukan Rp 17 triliun.

Dengan melihat hal tersebut tentu saja harusnya dana tersebut dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat. Allah sangat membenci perilaku manusia yang boros. Ibnu Katsir mengatakan, Allah ingin membuat manusia menjauhi sikap boros dengan mengatakan :

*“Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan”.*

Dikatakan demikian karena orang yang bersikap boros menyerupai setan dalam hal ini Ibnu Katsir juga mengatakan, “Disebut saudara setan karena orang yang boros dan menghambur-hamburkan harta akan mengantarkan pada meninggalkan ketaatan pada Allah dan terjerumus dalam maksiat.”

**Masalah selanjutnya** dengan diberlakukannya otonomi daerah semakin membuka peluang korupsi. Masih hangat ditelinga kita mengenai berita penetapan **Gubernur Riau Rusli Zainal sebagai tersangka kasus korupsi anggaran proyek Pekan Olahraga Nasional XVIII** yang semakin menambah panjang daftar kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menuturkan **Sebanyak 290 Kepala Daerah** sudah berstatus tersangka, terdakwa, dan terpidana karena terbelit kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 251 orang kepala daerah atau sekitar 86,2 persen terjerat kasus korupsi.

Belum lagi kasus korupsi di tubuh Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pilkada. Hal ini disebabkan karena baik pihak yang menang maupun yang kalah dalam pilkada sama-sama merasa belum aman jika proses pemilihan belum diputuskan sah di MK. Kondisi ini yang dimanfaatkan oleh hakim, maupun pihak yang bersengketa.

Selain itu kasus politik uang sebagai tersangka istri Gubernur Nusa Tenggara Timur, **Lusia Adinda Lebu Raya**, dalam hal ini Panwaslu Timor Tengah Selatan menemukan Lusia membagi-bagikan uang kepada masyarakat di Kabupaten TTS menjelang pelaksanaan pemilu kepala daerah (Pilkada) Gubernur NTT putaran kedua di daerah itu. Saksi mengaku melihat dan menerima uang yang dibagikan kepada masyarakat di desa tersebut. Dana yang diberikan bervariasi, antara Rp 100 dan 200 ribu.

Didalam Islam korupsi merupakan tindakan yang sangat dibenci oleh Allah, seperti yang termaktub di dalam Surat :

**Al-Baqarah ayat : 188 yaitu :**







188. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Q.S Al-Anfal Ayat : 27 yakni :



27. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Dengan melihat kondisi diatas dengan adanya otonomi daerah ternyata semakin memperpanjang daftar permasalahan-permasalahan yang ada baik dari segi ekonomi, sosial, politik dll. Semua hal tersebut dapat kita renungkan seperti yang terdapat dalam hadits Rasulullah saw yang artinya :

*“Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi.” Ada seorang sahabat bertanya; ‘bagaimana maksud amanat disia-siakan..?’ Nabi menjawab; “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.”*

Sungguh benarlah ucapan Rasulullah SAW diatas :

*“Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi.”*

Amanah yang paling pertama dan utama bagi manusia ialah amanah ketaatan kepada Allah, Pencipta, Pemilik, Pemelihara dan Penguasa alam semesta dengan segenap isinya. Manusia hadir kemuka bumi ini telah diserahkan amanah untuk berperan sebagai *khalifah* yang diwajibkan membangun dan memelihara kehidupan di dunia berdasarkan aturan dan hukum Yang Memberi Amanah, yaitu Allah swt.

*“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.”(QS Al-Ahzab 72)*

Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan diatas diperlukan peran pemerintah pusat atau provinsi untuk memberikan bantuan dan dorongan untuk pemerataan pembangunan daerah. Kategorisasi daerah atas dasar sumber daya perlu dilakukan agar bantuan untuk mendorong pemerataan pembangunan daerah dapat terlaksana tepat sasaran. Pelaksanaan sistem tata kelola otonomi daerah seharusnya tidak berjalan secara otonom sepenuhnya. Dalam beberapa hal, perlu adanya campur tangan dan kontrol dari pemerintah pusat kepada daerah, terutama terhadap hal-hal terkait sumber daya alam yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, dan juga terkait program untuk kesejahteraan rakyat daerah.

Dalam praktik birokrasi pun harus diberikan kontrol dan pengawasan yang ketat dengan tujuan alokasi dana untuk pembangunan bisa dipergunakan sebagaimana tujuannya dan teralokasikan tepat sasaran. Seperti yang diketahui bersama bahwa otonomi daerah juga membuka celah untuk praktik korupsi yang juga semakin terdesentralisasi hingga pemerintahan daerah. Tentunya hal ini harus dicegah, dengan melakukan kontrol dan pengawasan birokrasi yang ketat hingga ke pemerintahan daerah. Dengan demikian, pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, dan akan mendorong kehidupan rakyat yang semakin baik lagi. Tidak hanya pengawasan dari pusat tetapi pengawasan dari masyarakat juga mutlak perlu apabila ada pemimpin yang

menyalahi amanat kepemimpinannya jangan segan-segan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Disisi lain Islam sendiri mengharuskan kita untuk memilih pemimpin yang *sidiq, amanah, tabligh* dan *fatanah*. Agar amanat rakyat bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Karena yang terjadi di masyarakat sekarang mereka dapat dengan mudah tergiur uang yang diberikan calon pemimpin. Padahal mereka tidak sadar bahwa uang yang mereka dapatkan tidak sepadan dengan hasil yang mereka terima nanti.<sup>35</sup>

Jangan sampai karena salah pilih pemimpin akan memberikan mudharat yang sangat buruk bagi daerah itu sendiri. Mengingat dalam pesta demokrasi daerah ini membutuhkan dana yang tidaklah sedikit. Seyogyanya dengan adanya otonomi daerah ini harusnya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat daerah bukannya malah menambah permasalahan-permasalahan baru. Jika demikian adanya harusnya pemerintah lebih bersikap tegas terhadap pemerintah daerah yang menyalahi aturan. Hukum harus ditegakkan siapa yang bersalah maka ia harus diberi hukuman yang setimpal.

#### **D. Konsep Kesejahteraan Masyarakat**

##### **1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat**

Istilah kesejahteraan *Berasal Dari Kata Sejahtera* yang berarti : “Aman Sentosa dan Makmur dan dapat Berarti, Selamat Terlepas Dari Gangguan”. Sedangkan Kesejahteraan diartikan dengan : Hal atau Keadaan Sejahtera, Keamanan, Keselamatan dan Ketentraman” .

Istilah kesejahteraan erat kaitannya dengan tujuan Negara Indonesia. Negara didirikan, dipertahankan dan dikembangkan untuk kepentingan seluruh rakyat yaitu untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan umum. Setiap manusia memiliki keinginan untuk sejahtera, sejahtera menunjuk kesuatu keadaan yang serba baik atau suatu kondisi manusia,

---

<sup>35</sup>Beik, Irfan, Syauqi, *“Ekonomi Pembangunan Syariah”*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2017. h.45 – 112.

dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat, dan damai. Dalam paradigma pembangunan ekonomi, perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat.

**Kesejahteraan masyarakat adalah:** *"Suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat"*.<sup>36</sup>

### **Pengertian Kesejahteraan Masyarakat menurut Para Ahli :**

#### **1. Menurut Todaro dan Stephen C. Smith (2006)**

Kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi :

- a).Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan.
- b).Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai- nilai kemanusiaan.
- c).Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Adenan, Djamasri, dkk, *"Ekonomi Pembangunan I"*. Jakarta,Pusat Penerbitan UT. 2010 h.12 - 35

<sup>37</sup> Husodo, S, *Pancasila : "Jalan Menuju Negara Kesejahteraan"* Yogyakarta, 2010. h.22-39

Secara umum **Teori Kesejahteraan** diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu :

**a).Classical Utilitarium**

Teori ini menekankan bahwa kepuasan atau kesenangan seseorang dapat diukur dan bertambah. Tingkat kepuasan setiap individu dapat dibandingkan secara kuantitatif.

**b).Neoclassical Welfare Theory**

Teori ini menekankan pada prinsip *pareto optimality*. Pareto optimum didefinisikan sebagai sebuah posisi dimana tidak memungkinkan suatu realokasi input atau output untuk membuat seseorang seseorang menjadi lebih baik tanpa menyebabkan sedikitnya satu orang atau lebih buruk.

**c).New Contraction Approach**

Teori ini menekankan pada konsep dimana setiap individu memiliki kebebasan maksimum dalam hidupnya.

Ketiga pandangan tersebut menekankan bahwa tingkat kesejahteraan seseorang sangat tergantung pada tingkat kepuasan, kesenangan yang diraih dalam kehidupannya.

**2.Gregory dan Stuart (1992)**

Gregory dan Stuart, mengatakan bahwa pertumbuhan pendapatan perkapita dari waktu ke waktu umumnya membawa perubahan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan arah yang sama. Pertimbangan menggunakan pendapatan perkapita sebagai indikator kesejahteraan masyarakat karena data tersebut umumnya mudah diperoleh di kantor-kantor statistik. Sebaliknya, data indikator kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat yang lebih kompleks, seperti presentase penduduk yang memiliki rumah, menikmati fasilitas air bersih, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, pemilikan alat hiburan seperti televisi dan radio, jarang tersedia (Sukirno, 2001).

Meskipun demikian, pengukuran kesejahteraan masyarakat yang

hanya menggunakan pendapatan perkapita banyak ditentang oleh berbagai pihak. Hal ini terjadi karena kesejahteraan sifatnya normatif sehingga diperlukan pengukuran yang lebih komprehensif yang dapat menggambarkan kemajuan kualitas hidup masyarakat. Todaro (2000) mengatakan bahwa angka kenaikan GNP per kapita mengandung kelemahan yang sangat fatal, yakni menyamarkan kenyataan fundamental yang sebenarnya, yaitu sama sekali belum membaiknya kondisi kesejahteraan kelompok penduduk yang relatif paling miskin.

### **3. United Nations Research Institute for Social Development**

Menyusun delapan belas indikator yang apabila digunakan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat maka perbedaan tingkat pembangunan antara negara maju dan negara sedang berkembang tidak terlampau besar.

Delapan belas indikator tersebut, antara lain :

- 1) Tingkat Harapan Hidup
- 2) Konsumsi Protein Hewani Per Kapita
- 3) Persentase Anak-Anak Yang Belajar di Sekolah Dasar dan Menengah.
- 4) Persentase Anak-Anak Yang Belajar Di Sekolah Kejuruan
- 5) Jumlah Surat Kabar
- 6) Jumlah Telepon
- 7) Jumlah Radio
- 8). Jumlah Penduduk Kotanya adalah : 20.000 Orang atau Lebih
- 9). Persentase Laki-Laki Dewasa disektor Pertanian
- 10). Persentase Tenaga Kerja Yang Bekerja Di Sektor Listrik, Gas, Air, Kesehatan, Pengangkutan, Pergudangan, dan Transportasi
- 11). Persentase Tenaga Kerja yang Memperoleh Gaji
- 12). Persentase PDB yang Berasal dari Industri Pengolahan
- 13). Konsumsi Energi Per Kapita
- 14). Konsumsi Listrik Per Kapita
- 15). Konsumsi Baja Per Kapita

- 16) Nilai Per Kapita Perdagangan Luar Negeri
- 17).Produk Pertanian Rata-Rata dari Pekerja Laki-Laki disektor Pertanian
- 18). Pendapatan Per Kapita Produk Nasional Bruto.<sup>38</sup>

#### **4. World Bank Pada Tahun 2000**

Merumuskan indikator kesejahteraan masyarakat sebagai indikator pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan manusia dan kemiskinan. Rumusan indikator pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan manusia dan kemiskinan. Rumusan indikator pembangunan itu disebut sebagai *Millenium Development Goals (MDGs)*.

MDGs terdiri dari delapan indicator capaian pembangunan yaitu :

- a. Penghapusan Kemiskinan
- b. Pendidikan Untuk Semua
- c. Persamaan Gender
- d. Perlawanan Terhadap Penyakit Menular
- e. Penurunan Angka Kematian Anak
- f. Peningkatan Kesehatan Ibu
- g. Pelestarian Lingkungan Hidup
- h. Kerja Sama Global.

Keberhasilan pembangunan manusia diukur dalam beberapa dimensi utama tersebut. Menurut *World Bank*, tingkat pencapaian pembangunan manusia dapat diamati melalui dimensi pengurangan kemiskinan (*decrease in proverty*), peningkatan kemampuan baca tulis (*increase in literacy*), penurunan tingkat kematian bayi (*decrease in infant mortality*), peningkatan harapan hidup (*life expectancy*), dan penurunan dalam ketimpangan pendapatan (*decrease income inequality*).

#### **5. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)**

Menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia, yaitu Indeks

---

<sup>38</sup> Ibid h. 45 - 50

Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). Indeks ini dibentuk berdasarkan empat indikator, yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan kemampuan daya beli. Indikator angka harapan hidup merepresentasikan dimensi umur panjang dan sehat. Selanjutnya, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mencerminkan output dari dimensi pengetahuan. Adapun indikator kemampuan daya beli digunakan untuk mengukur dimensi hidup layak.

#### **6. Badan Pusat Statistik (BPS)**

Menggunakan IPM untuk mengukur capaian pembangunan manusia dengan menggunakan tiga dimensi dasar yaitu mencakup : Umur panjang dan sehat, pengetahuan, kehidupan yang layak. Ketiga dimensi dasar tersebut menggambarkan empat komponen dasar :

- a). Kualitas hidup yakni angka harapan hidup yang mewakili bidang **Kesehatan**,
- b). Angka melek huruf dan rata-rata lama bersekolah untuk mengukur capaian pembangunan di bidang **Pendidikan**
- c). Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok hidup masyarakat yang dapat dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan **Pendapatan** yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup yang layak.<sup>39</sup>

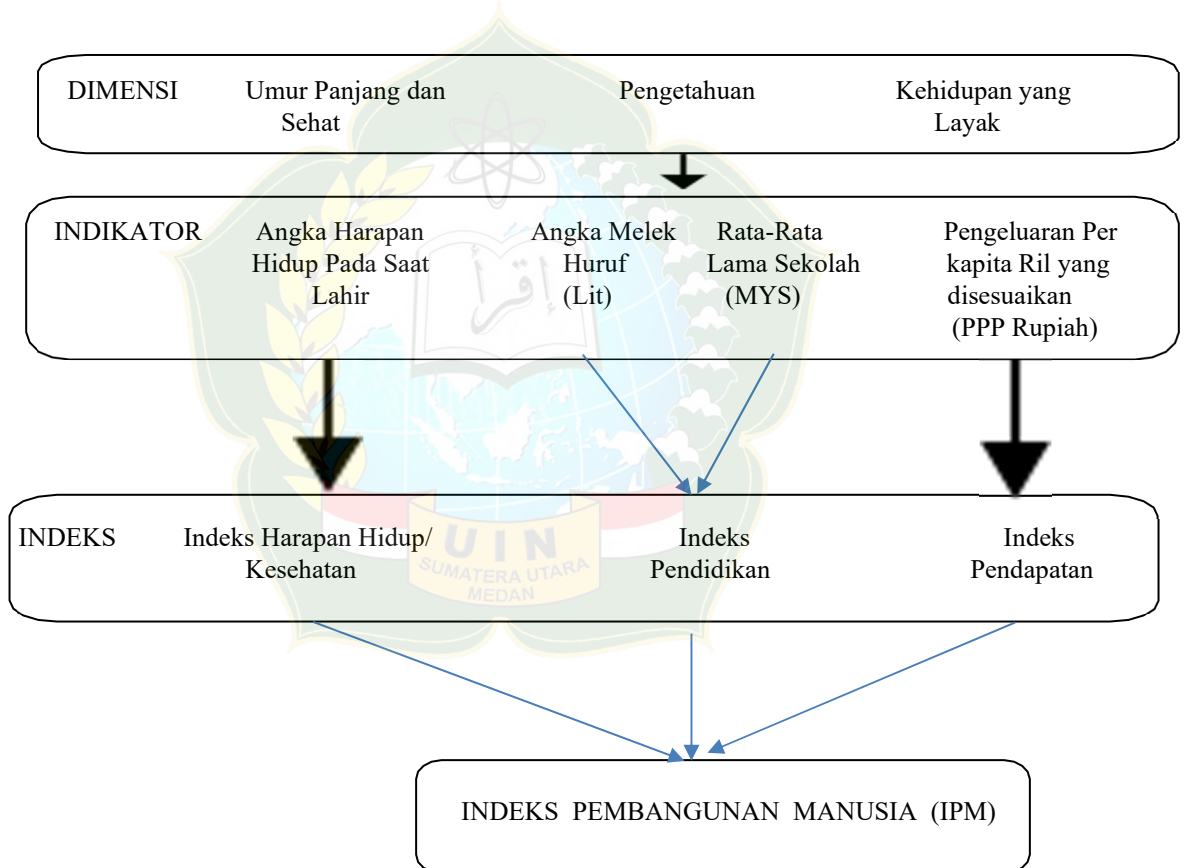
Sehingga dapat digambarkan pada Diagram IPM berikut :

---

<sup>39</sup> Soemardjan, S, *Pancasila Dalam Kehidupan Sosial*, Jakarta : BP 7 Pusat, 2004, h.22 - 30



**Gambar 2.2. Diagram Perhitungan IPM**



**Sumber : BPS Sumatera Utara, 2020**

**7. Menurut Kamus Bahasa Indonesia.**

Sejahtera juga mengandung pengertian aman sentosa, makmur, serta selamat, terlepas dari segala macam gangguan.

Menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, diartikan bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

#### **8. Stiglitz (2011)**

Stiglitz menyatakan bahwa untuk mendefinisikan kesejahteraan, rumusan multidimensi harus digunakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi standar hidup material (pendapatan, konsumsi, dan kekayaan), kesehatan, pendidikan, aktivitas individu termasuk bekerja, suara politik, dan tata pemerintahan, hubungan dan kekerabatan sosial, lingkungan hidup (kondisi masa kini dan masa depan), baik yang bersifat ekonomi maupun fisik. Semua dimensi ini menunjukkan kualitas hidup masyarakat dan untuk mengukurnya diperlukan data objektif dan subjektif.

#### **9. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)**

BKKBN mengatakan bahwa keluarga yang dikatakan sejahtera apabila memenuhi kriteria berikut :

- a. Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan anggotanya, baik kebutuhan sandang, pangan, perumahan, sosial maupun agama
- b. Keluarga yang mempunyai keseimbangan antara penghasilan keluarga dan jumlah anggota keluarga
- c. Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan anggota keluarga, kehidupan bersama dengan masyarakat sekitar, beribadah khusuk, disamping terpenuhi kebutuhan pokoknya.

#### **2. Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah**

Pengertian kesejahteraan menurut kamus bahasa Indonesia berasal

dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya).<sup>40</sup> Kesejahteraan material dan spiritual merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembangunan.

Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan haruslah dicapai tidak saja dalam aspek material, tetapi juga dalam aspek spiritual. Ketika sebuah proses pembangunan hanya diarahkan untuk mencapai keberhasilan material maka bisa dipastikan kesejahteraan masyarakat yang diinginkan tidak akan bisa tercapai. Masyarakat akan merasakan kehidupan yang hampa dan tanpa makna meskipun semua fasilitas tersedia.

Kesejahteraan oleh sebagian masyarakat selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup. Konsep kualitas hidup merupakan gambaran tentang keadaan kehidupan yang baik.<sup>41</sup>

World Health Organization mengartikan kualitas hidup sebagai sebuah persepsi individu terhadap kehidupannya di masyarakat dalam konteks budaya dan sistem nilai yang ada yang terkait dengan tujuan, harapan, standar, dan juga perhatian terhadap kehidupan. Konsep ini memberikan makna yang lebih luas karena dipengaruhi oleh kondisi fisik individu, psikologis, tingkat kemandirian, dan hubungan sosial individu dengan lingkungannya.<sup>42</sup>

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 menjelaskan juga tentang arti dari kesejahteraan. Kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.

---

<sup>40</sup> W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1999 h. 887.

<sup>41</sup> Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung : Refika Aditama, 2012, h. 8

<sup>42</sup> Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung : Humaniora Utama Press, 2010, h. 20

Dalam konteks kenegaraan, kesejahteraan digunakan dalam rangka menunjukkan bahwa pemerintahannya menyediakan pelayanan-pelayanan sosial secara luas kepada warga negaranya. Negara kesejahteraan diartikan sebagai sebuah proyek sosialis demokrat yang dihasilkan oleh pejuang orang-orang kelas pekerja untuk menciptakan masyarakat yang adil. Ide negara kesejahteraan barat ini dianggap sebagai perubahan yang dilakukan oleh sistem kapitalis menuju kepada aspirasi yang dibawa dalam sistem sosialis.<sup>43</sup>

Dipihak lain, penulis-penulis Marxist mengatakan bahwa negara kesejahteraan hanyalah sedikit melebihi usaha untuk mengurangi eksese-eksese yang lebih buruk dari kapitalisme. Mereka mengatakan bahwa negara kesejahteraan sedikitpun bukan merupakan negara sosialis. Hal ini karena di negara kesejahteraan paling maju, sistem ekonomi tetap dimiliki dan dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan swasta. Jadi negara kesejahteraan berbeda dengan sistem sosialis menurut golongan Marxist yang sistem ekonominya dikuasai oleh swasta. Kelompok yang tidak menyetujui gagasan kapitalisme maupun sosialisme memberikan definisi tersendiri tentang kesejahteraan. Negara kesejahteraan diartikan sebagai sebuah pembentukan sosial yang unik berdasarkan prinsip-prinsip neo-merkantilis. Negara kesejahteraan merupakan konsensus kesejahteraan atau kompromi demokratis sosial. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian historis antara kapitalisme dan sosialisme.

Dalam konteks teori kewarganegaraan, kesejahteraan diartikan sebagai puncak dari evolusi hak-hak kewarganegaraan. Masyarakat Barat yang demokratis berkembang bermula dari hanya sebagian kecil saja yang mendapatkan hak-hak sipil, politik, dan sosial. Ketika hak-hak sipil mulai diterapkan secara lebih luas, maka pengertian kewarganegaraan menuntut untuk dipenuhi secara penuh akan hak-hak sosialnya. Seseorang tidak dapat dianggap sebagai anggota masyarakat yang penuh dan sederajat kalau

---

<sup>43</sup> Ibid, h. 23-24

kehidupannya dalam : *Kemiskinan, Menempati Rumah Yang Tidak Layak Dihuni, Kesehatannya Tidak Terjaga Dengan Baik, Dan Berpendidikan Tidak Memadai.*

Negara kesejahteraan atau *welfare state* memiliki arti yang berbeda bagi semua orang. Oleh karenanya, Titmuss memberikan pengertian yang lebih terbuka pada kesejahteraan. Beliau menyarankan kriteria kesejahteraan sebagai suatu masyarakat yang secara terbuka menerima tanggung jawab kebijakan untuk mendidik dan melatih warga negaranya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya akan tenaga dokter, perawat, pekerja sosial, ilmuwan, insinyur, dan sebagainya. Saran ini disampaikan agar negara-negara yang lebih miskin tidak kehabisan tenaga-tenaga ahli yang sangat diperlukan untuk pembangunan negara tersebut.

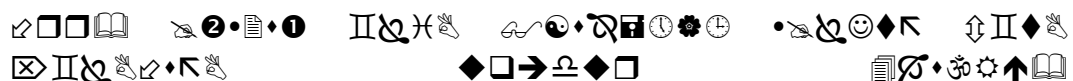
Konsep kesejahteraan telah berkembang menuju kesempurnaannya. Kesamaan berbagai konsep ini tertuju pada tujuan yang sama, yakni sebuah kondisi masyarakat yang semakin baik. Kondisi kesejahteraan ini merupakan sebuah gambaran yang diidealkan bersama, baik oleh pelaku usaha.

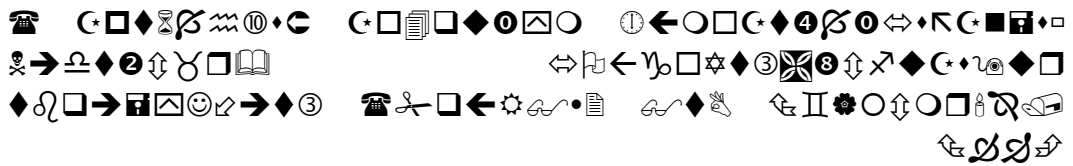
#### Kesejahteraan Menurut Al-Qur'an

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh Agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah Swt jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada yang secara langsung (tersurat) dan ada yang secara tidak langsung (tersirat) berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Namun demikian, penjelasan dengan menggunakan dua cara ini menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan :

#### 1. Qur'an Surat An-Nahl Ayat : 97





97. “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik[839] dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

[839] Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman.

Kesejahteraan merupakan jaminan atau janji dari Allah Swt yang diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan yang beriman kepadaNya. Allah Swt juga akan membalas berbagai amal perbuatan baik orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari amalnya. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, santai, dan puas dengan rezeki yang halal, termasuk didalamnya mencakup seluruh bentuk ketenangan apapun dan bagaimanapun bentuknya.

**2. Qur’an Surat : Thaha Ayat : 117-119**



117. “Maka Kami berkata: "Hai Adam, Sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka.

118. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan didalamnya dan tidak akan telanjang,

119. Dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari didalamnya”.

Kesejahteraan menurut pengertian Al-Qur'an tercermin di Surga yang dihuni oleh Nabi Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka bertugas sebagai khalifah di bumi. Kesejahteraan yang digambarkan dalam ayat ini menjamin adanya pangan, sandang, dan papan yang diistilahkan dengan tidak kelaparan, tidak merasa dahaga, tidak telanjang, dan tidak kepanasan oleh matahari. Sedangkan kebalikan darinya adalah kehidupan yang sempit, yakni jauh dari tentram dan tenang, selalu tidak puas, dadanya sesak dan gelisah walaupun lahirnya tampak mewah, serba ada, cukup pakaian dan tempat tinggalnya.

### 3. Qur'an Surat : Al-A'raf Ayat : 10

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

10. "Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur".

Pada ayat ini, Allah Swt mengingatkan kepada hambaNya untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikanNya. Nikmat itu adalah sarana untuk mendapatkan kesejahteraan yang berupa bumi yang diciptakanNya untuk tempat tinggal, tempat memenuhi segala hajat hidup, menguasai tanah, hasil tanamannya, binatang-binatangnya, dan tambang-tambangNya".

### 4. Qur'an Surat : An-Nisa Ayat : 9

وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَخَوَّنُوا وَإِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُرْسَلُونَ

9. "Dan hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka

*bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”.*

Kesejahteraan dapat diperoleh hanya dengan ketaqwaan kepada Allah Swt dan juga berbicara secara jujur dan benar. Pada ayat ini, Allah meminta kepada hambaNya untuk memperhatikan kesejahteraan generasi yang akan datang. Oleh karenanya harus dipersiapkan generasi yang kuat akan ketaqwaannya kepada Allah Swt. Bahkan Nabi Muhammad Saw juga melarang untuk memberikan seluruh hartanya kepada orang lain dengan meninggalkan ahli warisnya. Nabi SAW bersabda: ”Sesungguhnya bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik dari pada membiarkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain.<sup>44</sup>

#### 5. Qur'an surat : Al-Baqarah : 126



126. *“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan Itulah seburuk-buruk tempat kembali”.*

Kesejahteraan hanya diperoleh dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Swt. Ajaran Islam mengajarkan juga tentang konsep untuk berbagi, membagi nikmat, membagi kebahagiaan dan ketenangan tidak hanya

<sup>44</sup> Ibnu Katsir, *”Tafsir Singkat Jilid II”*, Surabaya: Bina Ilmu, 1998, h. 314-315.



untuk individu namun untuk seluruh umat manusia diseluruh dunia.<sup>45</sup>

### **Kesejahteraan Dimasa Rasulullah Dan Para Sahabatnya**

Ajaran ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari sumber utamanya, yakni Al-Qur'an, Sunnah, dan khazanah Islam lainnya. Konsep-konsep ekonomi Islam yang didalamnya membahas tentang kesejahteraan individu, keluarga, masyarakat, dan negara telah tergambar secara jelas dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya berhenti pada tataran konsep tetapi telah terwujud dalam praktek kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya. Implementasi nilai-nilai kesejahteraan ini tidak hanya dirasakan oleh umat Islam saat itu tetapi juga umat non muslim, bahkan rahmat bagi seluruh alam hingga masa modern saat ini.

Ajaran Islam telah menjelaskan bahwa sesungguhnya tujuan dasar Islam adalah terwujudnya kesejahteraan baik di dunia maupun akhirat. Dalam prakteknya, Rasulullah Saw. Membangun suatu perekonomian yang dulunya dari titik nol menjadi suatu perekonomian raksasa yang mampu menembus keluar dari jazirah Arab. Pemerintahan yang dibangun Rasulullah Saw di Madinah mampu menciptakan suatu aktivitas perekonomian yang membawa kemakmuran dan keluasan pengaruh pada masa itu.

Kegiatan ekonomi telah menjadi sarana pencapaian kesejahteraan atau kemakmuran. Nabi Muhammad Saw memperkenalkan sistem ekonomi Islam. Hal ini berawal dari kerja sama antara kaum Muhajirin dan Anshar. Sistem ekonomi Islam yang diperkenalkan, antara lain, *syirkah*, *qirad*, dan *khiyar* dalam perdagangan. Selain itu, juga diperkenalkan sistem *musaq ah*, *mukhabarah*, dan *muzara'ah* dalam bidang pertanian dan perkebunan. Para sahabat juga melakukan perdagangan dengan penuh kejujuran. Mereka tidak mengurangi timbangan dalam berdagang.

Semenjak hijrah ke Madinah, kehidupan telah banyak berubah. Para

---

<sup>45</sup> Kementerian Sosial RI, "*Masyarakat Madani Yang Sejahtera*", Jakarta : KEMENSOS PRINTING, 2014, h . 10 - 35

sahabat Nabi Muhammad Saw dari kaum Muhajirin bahu membahu dengan penduduk lokal Madinah dari kaum Anshar dalam membangun kegiatan ekonomi. Berbagai bidang digeluti oleh beliau dan para sahabatnya, baik itu pertanian, perkebunan, perdagangan maupun peternakan. Pasar-pasar dibangun di Madinah. Kebun-kebun kurma menghasilkan panen yang melimpah. Peternakan kambing menghasilkan susu yang siap dipasarkan maupun hanya sekedar untuk diminum. Dalam sejarah, dikenal tokoh Islam yang terkenal dengan kekayaannya dan kepiawaiannya dalam berdagang dan berbagai bidang lainnya.

Mereka adalah Abdurahman bin A'waf, Abu Bakr, 'Umar bin Khattab, dan sebagainya. Mereka sadar akan dapat hidup di Madinah hanya dengan usaha mereka sendiri. Masyarakat Madinah terus berupaya meningkatkan aktivitas ekonomi dengan etos kerja yang tinggi. Ibadah dan kerja adalah dua jenis aktivitas ukhrawi dan duniawi yang menghiasi hari-hari mereka silih berganti.

Pada awal tahun kedua Hijrah, Allah swt sudah mewajibkan kaum muslimin membayar zakat. Tentu saja, zakat yang diwajibkan hanya bagi mereka yang telah berkecukupan.<sup>46</sup>

### **Kesejahteraan Menurut Para Ulama**

Ekonomi Islam telah menjadi pembahasan tersendiri pada masa modern sekarang ini. Kajian-kajian telah banyak dilakukan oleh para ulama mengingat pada masa awal pertumbuhan Islam, ekonomi Islam belum muncul sebagai sebuah disiplin keilmuan. Meskipun demikian, pondasi atau landasan dasarnya telah terealisasi dalam sejarah Islam, sehingga hal inilah yang merupakan warisan yang terus menjadi sumber bagi berkembangnya nilai-nilai ekonomi Islam. Para Ulama berperan besar dalam memberikan penjelasan kepada para pelaku ekonomi dalam menjalankan kegiatan

---

<sup>46</sup> Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, Jakarta : Litera Antar Nusa, 1989, h. 197.

muamalahnya.

Sesungguhnya mengkaji ekonomi Islam bukanlah dominasi para ekonom. Tetapi kajian ekonomi Islam hendaknya dilakukan para pakar Islam yang menguasai pandangan Islam dengan segala aspeknya yang sempurna. Kemudian setelah ini, baru pengkajian berpindah pada para spesialis, spesialis perekonomian merumuskan sistem perekonomian dengan Tetap membuat pandangan Islam sebagai landasan dan acuan dasar. Pandangan Islam meliputi syariahnya, yang berkait dengan sistem perekonomian maupun yang berkait dengan sosial kemasyarakatan.

Al-Ghazali dalam Kitabnya : *Ihya' 'Ulum al-Din* dan *Al-Mustasfa fi 'Ilm al-Usul*, mengartikan atau memaknai ilmu ekonomi sebagai berikut : sarana untuk mencapai tujuan akhirat adalah dengan mencari nafkah (harta yang halal), semua ilmu itu bermanfaat dan dapat digolongkan menjadi dua kategori, yakni wajib dituntut secara *Fard 'Ayn* dan *FardKifayah* (termasuk ilmu ekonomi), dan tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai kemaslahatan / kesejahteraan hidup (*maslahah*).<sup>47</sup>

Berdasarkan deskripsi al-Ghazali diatas, pengertian ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan (Al - Iktisa), yang wajib dituntut (fard kifayah). Berdasarkan Etika (syariah) dalam upaya membawa dunia kegerbang kemaslahatan menuju akhirat.

Definisi ini membawa kepada pemikiran bahwa ilmu ekonomi memiliki dua dimensi, yakni **Dimensi Ilahiyah Dan Dimensi Insaniyah**. Kesejahteraan menurut al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (*Maqasid al-Shari'ah*). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian Batin, melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia didunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara' agar dapat terealisasinya

---

<sup>47</sup> Al-Ghazali, *"Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din"*, Surabaya : Bina Ilmu, 2010, h. 53-56.

kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang :

Sumber-Sumber Kesejahteraan, Yakni, Terpeliharanya : **Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta**

Harta merupakan sarana yang penting dalam menciptakan kesejahteraan umat. Dalam hal tertentu harta juga dapat membuat bencana dan malapetaka bagi manusia. Al-Ghazali menempatkan urutan prioritasnya dalam urutan yang kelima dalam *maqasid al-shari'ah*. Keimanan dan harta benda sangat diperlukan dalam kebahagiaan manusia. Namun imanlah yang membantu menyuntikkan suatu disiplin dan makna, sehingga dapat menghantarkan harta sesuai tujuan syariah.

### **Kesejahteraan Menurut Ekonom Muslim**

Salah satu pengertian dari ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana manusia bertindak pekerti untuk mengorganisir kegiatan-kegiatan konsumsi dan produksinya. Oleh karenanya sistem ekonomi apapun termasuk ekonomi Islam yang diterapkan didunia ini akan selalu berkaitan dengan **Tiga Masalah Utama Perekonomian** (The Three Fundamental and Interdependent Economic Problem).

**Ketiga masalah tersebut adalah :**

- 1. Barang Apa**
- 2. Berapa Jumlahnya dan Cara Dibuatnya**
- 3. Untuk Siapa Distribusinya**

Sistem ekonomi konvensional beranggapan bahwa tingkat kesejahteraan optimal akan dapat tercapai apabila setiap faktor produksi sudah teralokasikan sedemikian rupa sehingga tercapai keseimbangan yang ideal diseluruh sektor produksi. Dalam pandangan konsumen, kesejahteraan optimal dapat tercapai apabila distribusi barang telah teralokasi sedemikian rupa kepada setiap konsumen, sehingga tercapai keseimbangan ideal.<sup>48</sup>

Konsep kesejahteraan tersebut dalam pandangan ekonomi Islam masih

---

<sup>48</sup> Paul A.Samuelson dan William D.Nordhaus, "*Ekonomi Edisi Keduabelas Jilid I*", terjemahan. Jaka Wasana, Jakarta : Penerbit Erlangga, 1989, h.29-30.

mencakup hanya dimensi materi. Ekonomi Islam menghendaki kesejahteraan itu juga mencakup keseluruhan unsur materi dan non materi (psikis).

Hal ini disebabkan kepuasan manusia itu terletak pada unsur-unsur non materi. **Kesejahteraan Dalam Fungsi Matematisnya** dapat dilihat dibawah ini :

$$K_i = F(MQ, SQ)$$

**$K_i$  = adalah kesejahteraan yang Islami (*Islamic Welfare*)**

**$MQ$  = Kecerdasan Material (*Material Quetient*)**

**$SQ$  = Kecerdasan Spiritual (*Spiritual Quetient*)**

Dalam fungsi diatas dapat diketahui bahwa kesejahteraan yang optimal dapat tercapai apabila kecerdasan material dikontrol oleh kecerdasan spiritual mulai dari cara memperolehnya sampai kepada membelanjakannya. Dalam prakteknya, mereka yang memiliki kecerdasan spiritual dapat menjadi tenteram, aman, dan sejahtera meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan material. Sedangkan manusia yang hanya memiliki kecerdasan material tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan meskipun dengan harta melimpah.<sup>49</sup>

Kecerdasan Islami merupakan fungsi dari kecerdasan material dan kecerdasan spiritual. Oleh karenanya, kecerdasan Islami dapat dicapai apabila hal-hal sebagai berikut dilakukan, yakni : benda yang dimiliki diperoleh dengan cara halal dan baik, bertujuan untuk ibadah, kualitas lebih dipentingkan daripada kuantitas, dan penggunaannya sesuai syariah

Kecerdasan Islami merupakan fungsi dari kecerdasan material dan kecerdasan spiritual. Oleh karenanya, kecerdasan Islami dapat dicapai apabila hal-hal sebagai berikut dilakukan, yakni : benda yang dimiliki diperoleh dengan cara halal dan baik, bertujuan untuk ibadah, kualitas lebih dipentingkan daripada kuantitas, dan penggunaannya sesuai syariah

---

<sup>49</sup> Hasan Aedy, "*Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam Sebuah Studi Komparasi*", Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011, h. 112.

Dalam kenyataannya, tidak semua manusia memiliki kecerdasan spiritual sebagaimana yang dijelaskan diatas.

Adapun ciri-ciri manusia yang memiliki ciri-ciri kecerdasan adalah :

- 1. Setia Dan Taat Kepada Allah (*Habl Min Allah*),**
- 2. Setia Dan Konsisten Memberikan Manfaat Atau Pelayanan Terbaik Kepada Sesama Manusia (*Habl Min Al-NaS*), Dan**
- 3. Setia Dan Konsisten Dengan Pemelihara Alam Dan Lingkungan Yang Seimbang (*Habl Min Al-'ALamiN*).**

Kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan telah dijamin oleh Tuhan. Memang sumber-sumber daya yang disediakan Tuhan didunia ini tidak tak terbatas, namun semua itu akan dapat mencukupi bagi kebahagiaan manusia seluruhnya jika dipergunakan secara efisien dan adil. Manusia dapat melakukan pilihan terhadap berbagai kegunaan alternatif dari sumber-sumber tersebut. Namun harus disadari bahwa jumlah umat manusia bukanlah sedikit tetapi dalam jumlah yang besar. Oleh karenanya, penggunaan sumber-sumber tersebut hanya bisa dilakukan dengan perasaan tanggung jawab dan dalam batasan yang ditentukan oleh petunjuk Tuhan dan *maqas idnya*. Persaingan atau kompetisi dalam memanfaatkan sumber daya tetap akan didorong sepanjang hal dilakukan dengan sehat, meningkatkan efisiensi, dan membantu mendorong kesejahteraan manusia, yang merupakan keseluruhan tujuan Islam. Namun demikian, jika persaingan itu melampaui batas, mengakibatkan nafsu pamer, kecemburuan, mendorong kekejaman, dan kerusakan maka ia harus dikoreksi

Komitmen ini menuntut semua sumber daya ditangan manusia sebagai suatu titipan sakral dari Allah Swt dan harus dimanfaatkan untuk merealisasikan *maqasid al-shari'ah*, yang berupa : pemenuhan kebutuhan pokok, sumber pendapatan yang terhormat, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, dan pertumbuhan dan stabilitas. Konsep ekonomi Islam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan khazanah literature Islam adalah : Kepemilikan Harta, meliputi

- 1. Kepemilikan Individu,**

## **2. Kepemilikan Umum, Dan**

## **3. Kepemilikan Negara.**

Pengelolaan harta harus mencakup pemanfaatan dan pengembangan harta. Politik ekonomi Islam yang dilaksanakan oleh negara untuk menjamin tercapainya semua kebutuhan pokok (primer) setiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan mereka.<sup>50</sup>

Kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam adalah terpenuhinya kebutuhan materi dan non materi, dunia dan diakhirat berdasarkan kesadaran pribadi dan masyarakat untuk patuh dan taat (sadar) terhadap hukum yang dikehendaki oleh Allah Swt melalui petunjukNya dalam Al- Qur'an, melalui contoh dalam keteladanan Rasulullah Saw, dan melalui ijtihad dan kebaikan para ulama. Oleh karenanya kesejahteraan bukanlah sebuah cita-cita yang tanpa pengorbanan tetapi membutuhkan perjuangan yang terus-menerus dan berkesinambungan.

### **Indikator Untuk Mengukur Kesejahteraan Masyarakat**

Indikator kesejahteraan merupakan ukuran-ukuran yang digunakan dalam mengukur tingkat kesejahteraan hidup seseorang. Kehidupan yang didambakan oleh semua manusia didunia ini adalah kesejahteraan. Baik tinggal dikota maupun yang didesa, semua mendambakan kehidupan yang sejahtera. Sejahtera lahir dan bathin. Namun, dalam perjalanannya, kehidupan yang dijalani oleh manusia tak selamanya dalam kondisi sejahtera. Pasang surut kehidupan ini membuat manusia selalu berusaha untuk mencari cara agar tetap sejahtera. Mulai dari pekerjaan kasar seperti buruh atau sejenisnya, sampai pekerjaan kantor yang bisa sampai ratusan juta gajinya dilakoni oleh manusia. Jangankan yang halal, yang harampun rela dilakukan demi kesejahteraan hidup. Sejahtera menunjuk keadaan yang lebih baik,

---

<sup>50</sup> Muhammad Sholahuddin, *"World Revolution With Muhammad"*, Sidoarjo : Mashun Insani Press, 2009, h. 220-221.

kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat atau damai. Lebih jauh, menurut Wikipedia, dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Menurut Wikipedia pula, dalam kebijakan social, kesejahteraan sosial menunjuk kejangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari ekonomi, sosial, budaya, iptek, hankamnas, dan lain sebagainya. Bidang-bidang kehidupan tersebut meliputi jumlah dan jangkauan pelayanannya. Pemerintah memiliki kewajiban utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Untuk mendapatkan kesejahteraan itu memang tidak gampang. Tetapi bukan berarti mustahil didapatkan. Tak perlu juga melakukan yang haram, sebab yang halal masih banyak yang bisa dikerjakan untuk mencapai kesejahteraan.

Kita hanya perlu memperhatikan **Indikator Kesejahteraan Masyarakat Yaitu :**

1). Jumlah Dan Pemerataan **Pendapatan.**

Hal ini berhubungan dengan masalah ekonomi. Pendapatan berhubungan dengan lapangan kerja, kondisi usaha, dan factor ekonomi lainnya. Penyediaan lapangan kerja mutlak dilakukan oleh semua pihak agar masyarakat memiliki pendapat tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa itu semua, mustahil manusia dapat mencapai kesejahteraan. Tanda-tanda masih belum sejahteranya suatu kehidupan masyarakat adalah jumlah dan sebaran pendapatan yang mereka terima.

Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang mereka terima. Dengan pendapatan yang mereka ini, masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Mustafa Edwin Nasution, Nurul Huda, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2010. h.56-68



## 2). Pendidikan Yang Semakin Mudah Untuk Dijangkau.

Pengertian mudah disini dalam arti jarak dan nilai yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Pendidikan yang mudah dan murah merupakan impian semua orang. ***Dengan pendidikan yang murah dan mudah itu, semua orang dapat dengan mudah mengakses pendidikan setinggi-tingginya. Dengan pendidikan yang tinggi itu, kualitas sumberdaya manusianya semakin meningkat. Dengan demikian kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak semakin terbuka.*** Berkat kualitas sumberdaya manusia yang tinggi ini, lapangan kerja yang dibuka tidak lagi berbasis kekuatan otot, tetapi lebih banyak menggunakan kekuatan otak. Sekolah dibangun dengan jumlah yang banyak dan merata, disertai dengan peningkatan kualitas, serta biaya yang murah.

Kesempatan untuk memperoleh pendidikan tidak hanya terbuka bagi mereka yang memiliki kekuatan ekonomi, atau mereka yang tergolong cerdas saja. Tapi, semua orang diharuskan untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya. Sementara itu, sekolah juga mampu memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Pendidikan disini, baik yang bersifat formal maupun non formal. Kedua jalur pendidikan ini memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama dari pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Angka melek huruf menjadi semakin tinggi, karena masyarakatnya mampu menjangkau pendidikan dengan biaya murah. ***Kesejahteraan manusia dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan, serta mampu menggunakan pendidikan itu untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya.***

## 3). Kualitas Kesehatan Yang Semakin Meningkat Dan Merata.

Kesehatan merupakan faktor untuk mendapatkan pendapatan dan pendidikan. Karena itu, faktor kesehatan ini harus ditempatkan sebagai hal yang utama dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan dirinya. Jumlah dan jenis pelayanan

kesehatan harus sangat banyak. Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Setiap saat mereka dapat mengakses layanan kesehatan yang murah dan berkualitas. Lagi-lagi, ini merupakan kewajiban pemerintah yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Apabila masih banyak keluhan masyarakat tentang layanan kesehatan, maka itu pertanda bahwa suatu Negara masih belum mampu mencapai taraf kesejahteraan yang diinginkan oleh rakyatnya. Inilah tiga indikator tentang kesejahteraan rakyat.

Ketiga Indikator ini akan ***Menjadi Factor Penentu*** dalam usaha-usaha yang dilakukan oleh semua pihak dalam mencapai kesejahteraan Masyarakat. Ketiga hal ini diyakini ***Merupakan Puncak Dari Gunung Es Kesejahteraan Masyarakat*** yang didambakan oleh semua orang.

Pandangan ekonomi Islam tentang kesejahteraan didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini. Sehingga konsep kesejahteraan Islam sangat berbeda dengan konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional, dikarenakan perbedaan dalam memandang kehidupan. Kesejahteraan menurut Islam tidak selalu diwujudkan dengan memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, namun menuntut kepuasan aspek materi dan spiritual diri manusia dalam suatu cara yang seimbang. Kebutuhan - kebutuhan materi mencakup sandang, pangan, papan, pendidikan, transportasi, jaminan kehidupan serta harta benda yang memadai, dan semua barang dan jasa yang memberikan kenyamanan dan kesejahteraan riil. Sementara, kebutuhan spiritual mencakup ketakwaan kepada Allah, kedamaian pikiran (budi), kebahagiaan batin, keharmonisan keluarga serta masyarakat, dan tiadanya kejahatan anomi. Sedangkan Imam Al-Ghazali memaknai kesejahteraan dengan menggunakan pendekatan maqashid. Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosial dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartit meliputi: keniscayaan atau daruriyyat, kebutuhan atau hajiyyat, dan kelengkapan atau tahsiniyyat. Sehingga tujuan utama syariah adalah mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada pemenuhan daruriyyat yaitu: perlindungan agama (hifzudiin), jiwa (hifzunnafs), harta

benda (hifzul maal), akal (hifzul-aqli), keturunan (hifzunnasl).

Kata “melindungi” mengandung arti perlunya mendorong pengayaan perkara-perkara tersebut secara terus menerus sehingga keadaan semakin mendekat kepada kondisi ideal dan membantu umat manusia meningkatkan kesejahteraannya secara berkelanjutan. Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar tersebut terletak pada penyediaan tingkatan Pertama (daruriyyat), yaitu kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Namun demikian, Ghazali menyadari bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar cenderung fleksibel, mengikuti waktu dan tempat serta dapat mencakup kebutuhan sosiopsikologis.

**Kelompok kebutuhan Kedua (hajiyyat)**, yaitu terdiri dari semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital bagi lima fondasi tersebut, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesukaran dalam hidup.

**Kelompok Ketiga (tahsiniyyat)**, yaitu mencakup kegiatan-kegiatan dan hal-hal yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja; meliputi hal-hal yang melengkapi, menerangi atau menghiasi hidup.

Dalam literatur lain menerangkan bahwa kesejahteraan dalam Islam terdapat empat indikator, yaitu : nilai ajaran Islam, kekuatan ekonomi (industry dan perdagangan), pemenuhan kebutuhan dasar dan system distribusi, dan keamanan serta ketertiban sosial.

Adapun Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Syariah berdasarkan klasifikasi sifat yaitu :

**a. Kesejahteraan Holistik dan Seimbang** Mencakup dimensi material maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial. Manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan harus seimbang di antara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual, akan tetapi tentu saja tidak terlepas dari lingkungan sosial. Manusia akan bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya sendiri dengan lingkungan sosialnya.

**b. Kesejahteraan Didunia dan Diakhirat** Manusia tidak hanya hidup di dalam dunia saja, akan tetapi juga di alam akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ia merupakan suatu kehidupan yang dalam segala hal lebih bernilai. Istilah umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara material spiritual pada kehidupan di dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah falah.

Konsep Falah menurut Afzalur Rahman, adalah tujuan akhir kehidupan manusia yaitu falah di akhirat, sedangkan falah di dunia hanya merupakan tujuan antara. Hal ini tidak berarti bahwa kehidupan di dunia tidak penting, namun kehidupan dunia merupakan lading bagi pencapaian tujuan akhirat. Falah dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan – kebutuhan hidup manusia secara seimbang sehingga tercipta masalah. Masalah sebagai tujuan antara untuk mencapai falah. Dengan demikian definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam adalah falah, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.

Pandangan ekonomi Syariah tentang kesejahteraan didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini. Sehingga konsep kesejahteraan Islam sangat berbeda dengan konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional, dikarenakan perbedaan dalam memandang kehidupan. Kesejahteraan menurut Islam tidak selalu diwujudkan dengan memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, namun menuntut kepuasan aspek materi dan spiritual diri manusia dalam suatu cara yang seimbang. Kebutuhan - kebutuhan materi mencakup sandang, pangan, papan, pendidikan, transportasi, jaminan kehidupan serta harta benda yang memadai, dan semua barang dan jasa yang memberikan kenyamanan dan kesejahteraan riil. Sementara, kebutuhan spiritual mencakup ketakwaan kepada Allah, kedamaian pikiran (budi), kebahagiaan batin, keharmonisan keluarga serta masyarakat, dan tiadanya kejahatan anomi.

Sedangkan Imam Al-Ghazali memaknai kesejahteraan dengan menggunakan pendekatan maqashid. Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi

dari fungsi kesejahteraan sosial dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartit meliputi: keniscayaan atau daruriyyat, kebutuhan atau hajiyyat, dan kelengkapan atau tahsiniyyat. Sehingga tujuan utama syariah adalah mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada pemenuhan daruriyyat yaitu: perlindungan agama (hifzudiin), jiwa (hifzunnafs), harta benda (hifzul maal), akal (hifzul-aqli), keturunan (hifzunnasl). Kata “melindungi” mengandung arti perlunya mendorong pengayaan perkara-perkara tersebut secara terus menerus sehingga keadaan semakin mendekati kepada kondisi ideal dan membantu umat manusia meningkatkan kesejahteraannya secara berkelanjutan. Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar tersebut terletak pada :

**Penyediaan Tingkatan Pertama** (daruriyyat), yaitu kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Namun demikian, Ghazali menyadari bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar cenderung fleksibel, mengikuti waktu dan tempat serta dapat mencakup kebutuhan sosiopsikologis.

**Kelompok kebutuhan** Kedua (hajiyyat), yaitu terdiri dari semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital bagi lima fondasi tersebut, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesukaran dalam hidup.

**Kelompok Ketiga (tahsiniyyat)**, yaitu mencakup kegiatan-kegiatan dan hal-hal yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja, meliputi hal-hal yang melengkapi, menerangi atau menghiasi hidup.

Dalam literatur lain menerangkan bahwa Kesejahteraan dalam Islam terdapat Empat Indikator yaitu :

- 1) Nilai Ajaran Islam
- 2) Kekuatan Ekonomi (Industry dan Perdagangan)
- 3) Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan System Distribusi
- 4) Keamanan Serta Ketertiban Sosial.

Adapun kesejahteraan Perspektif Ekonomi Syariah berdasarkan klasifikasi sifat yaitu :

**a. Kesejahteraan Holistik dan Seimbang**

Mencakup dimensi **Material Maupun Spiritual** serta mencakup individu

maupun sosial. Manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan harus seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual, akan tetapi tentu saja tidak terlepas dari lingkungan sosial. Manusia akan bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya sendiri dengan lingkungan sosialnya.

#### **b. Kesejahteraan didunia dan diakhirat**

Manusia tidak hanya hidup dialam dunia saja, akan tetapi juga di alam akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ia merupakan suatu kehidupan yang dalam segala hal lebih bernilai. Istilah umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara material spiritual pada kehidupan di dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah falah.

Konsep Falah menurut Afzalur Rahman, adalah tujuan akhir kehidupan manusia yaitu falah di akhirat, sedangkan falah di dunia hanya merupakan tujuan antara. Hal ini tidak berarti bahwa kehidupan di dunia tidak penting, namun kehidupan dunia merupakan ladang bagi pencapaian tujuan akhirat. Falah dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan – kebutuhan hidup manusia secara seimbang sehingga tercipta masalah. Masalah sebagai tujuan antara untuk mencapai falah. Dengan demikian definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam adalah falah, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.

### **3. Indikator Untuk Mengukur Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.**

Pertumbuhan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai keadilan distributive, karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, dengan terciptanya lapangan kerja baru maka pendapatan riil masyarakat akan meningkat, dan ini merupakan salah satu indikator kesejahteraan dalam ekonomi Syariah tingkat pengangguran yang tinggi merupakan masalah yang

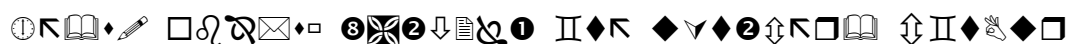
memerlukan perhatian serius seperti halnya dalam ekonomi kapitalis, hanya saja dalam pemikiran liberal, tingkat pengangguran yang tinggi bukan merupakan indikator kegagalan system ekonomi kapitalis yang didasarkan pada pasar bebas, hal itu dianggap sebagai proses transisional, sehingga problem itu dipandang akan hilang begitu pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan. Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam surat Quraisy ayat : 3-4 :

***“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”*** (QS. Quraisy: 3-4).

Berdasarkan ayat diatas, maka kita dapat melihat bahwa indikator kesejahteraan dalam al-Qur'an tiga, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka'bah, menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut.

**Indikator pertama**, untuk kesejahteraan adalah **Ketergantungan Penuh Manusia Kepada Tuhan** pemilik Ka'bah, yaitu Allah SWT. Indikator ini merupakan representasi dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indicator kesejahteraan yang berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mengalami kebahagiaan, kita sering mendengar jika ada orang yang memiliki rumah mewah, kendaraan banyak, harta yang melimpah namun hatinya selalu gelisah dan tidak pernah tenang bahkan tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, padahal seluruh kebutuhan materinya telah terpenuhi. Karena itulah ketergantungan manusia kepada Tuhannya yang diaplikasikan dalam penghambaan (ibadah) kepada-Nya secara ikhlas merupakan indicator utama kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki) seseorang sebagaimana yang dialami oleh penduduk Bhutan, Negara yang memiliki indeks kebahagiaan tertinggi dan merupakan negara paling aman didunia. Allah SWT berfirman dalam :

**Surat : Thaha ayat : 124**





124. Dan Barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, Maka Sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam Keadaan buta".

**Indikator kedua adalah Hilangnya Rasa Lapar** (terpenuhinya kebutuhan konsumsi), ayat di atas menyebutkan bahwa Dialah Allah yang memberi mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar, statemen tersebut menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan hendaknya bersifat secukupnya (hanya untuk menghilangkan rasa lapar) dan tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai melakukan penimbunan demi mengeruk kekayaan yang maksimal, terlebih lagi jika harus menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama, tentu hal ini tidak sesuai anjuran Allah dalam surat Quraisy diatas, jika hal itu bisa dipenuhi, maka kita tidak akan menyaksikan adanya korupsi, penipuan, pemerasan, dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya. Allah Berfirman dalam :

**Surat Al – Hasyar Ayat : 7**



7. Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka



*terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.*

**Indikator ketiga adalah Hilangnya Rasa Takut**, yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai. Jika berbagai macam kriminalitas seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, dan kejahatan- kejahatan lain banyak terjadi di tengah masyarakat, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan, atau dengan kata lain masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan. Ayat lain yang menjadi rujukan bagi kesejahteraan terdapat dalam Al-Qur'an :

**Surat An-Nisa' ayat 9 :**

9. *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.*

Berpijak pada ayat diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah representasi dari kemiskinan, yang merupakan lawan dari kesejahteraan, ayat tersebut menganjurkan kepada manusia untuk menghindari kemiskinan dengan bekerja keras sebagai wujud ikhtiyar dan bertawakal kepada Allah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi “Sesungguhnya Allah menyukai seseorang yang melakukan amal perbuatan atau pekerjaan dengan tekun dan sungguh-sungguh (profesional).”

Pada ayat diatas, Allah juga menganjurkan kepada manusia untuk memperhatikan generasi penerusnya (anak keturunannya) agar tidak terjatuh dalam kondisi kemiskinan, hal itu bisa dilakukan dengan mempersiapkan atau mendidik generasi penerusnya (anak keturunannya) dengan pendidikan yang

berkualitas dan berorientasi pada kesejahteraan moral dan material, sehingga kelak menjadi SDM yang terampil dan berakhlakul karimah, mengingat anak adalah asset yang termahal bagi orang tua.<sup>52</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh dengan membentuk mental menjadi mental yang hanya bergantung kepada Sang Khalik (bertaqwa kepada Allah SWT) dan juga berbicara dengan jujur dan benar, serta Allah SWT. juga menganjurkan untuk menyiapkan generasi penerus yang kuat, baik kuat dalam hal ketaqwaannya kepada Allah SWT, maupun kuat dalam hal ekonomi.

## **E. Konsep Otonomi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah**

### **Pengertian Otonomi (*Desentralisasi*) Pendidikan**

Setelah digulirkannya tuntutan reformasi beberapa tahun yang lalu (1998) tampak membuah hasil dengan diberlakukannya otonomi daerah sejak tahun 2003. Perubahan arah kebijakan tersebut secara langsung juga berimplikasi pada dunia pendidikan.

Paradigma pendidikan dari *sentralistik* menjadi *desentralisasi* merupakan produk nyata dari pelaksanaan reformasi dibidang pendidikan.

Sejumlah faktor yang menjadi pendorong pelaksanaan otonomi pendidikan antara lain : tuntutan dari segenap pemangku kepentingan, adanya reformasi dalam bidang pendidikan dan adanya dampak negatif yang ditimbulkan sebagai akibat sentralisasi pendidikan selama ini. Memasuki reformasi, tuntutan orang tua, kelompok masyarakat, para legislator, pebisnis dan perhimpunan buruh untuk turut serta, berpartisipasi aktif, mengontrol dan melakukan penilaian kualitas proses dan *output* pendidikan.

Pendidikan dapat diartikan dari dua segi : segi bahasa dan istilah. Dapat juga diartikan dalam bahasa Indonesia, Inggris, Arab dan Yunani.

Dalam bahasa Indonesia, Pendidikan berasal dari kata “didik’ lalu kata itu mendapat awalan “Pe” dan akhiran “an”, artinya : memlihara dan memberi latihan.

---

<sup>52</sup>Ibid, h.96 - 108

Dalam memelihara dan memberi latihan, diperlukan adanya ajaran, tuntunan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.<sup>53</sup>

Pengertian Pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : Sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.<sup>54</sup>

Poebakawatja dan Harapan mengatakan bahwa :

1. “ Usaha secara sengaja dari orang dewasa untuk dengan pengaruhnya meningkatkan sianak ke kedewasaan yang selalu diartikan mampu menimbulkan tanggung jawab moril dan segala perbuatannya. Orang dewasa yang dimaksud adalah : orang tua sianak atau orang yang atas dasar tugas kedudukannya mempunyai tugas kewajiban untuk mendidik misalnya : guru sekolah, pemuka agama (dalam lingkungan keagamaan), kepala – kepala asrama dll”.<sup>55</sup>
2. Dalam bahasa Inggris Pendidikan (education) berasal dari kata Educate (mendidik) artinya memberi peningkatan (to elicit, to give rise to) dan mengembangkan (to evolve, to develop). Jadi Pendidikan adalah : ...*the total process of developing human abilities and behaviors, drawing on almost all life's experiences*. Maksudnya adalah seluruh tahapan pengembangan kemampuan – kemampuan pengalaman kehidupan.<sup>56</sup>
3. Dalam bahasa Yunani Pendidikan (Paedagogike) adalah kata majemuk yang terdiri dari kata : “Paes” yang berarti “anak” dan kata “ago” yang berarti “aku membimbing” . jadi Paedagogike berarti : aku membimbing anak. Orang pekerjaannya membimbing anak dengan maksud membawa ketempat belajar, dalam bahasa Yunani disebut :”Paedagogos”.<sup>57</sup>
4. Sedangkan istilah dalam bahasa Arab disebut dengan “Tarbiyah” dengan kata kerja “rabba” . Kata pengajaran dalam bahasa arabnya adalah

---

<sup>53</sup> Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, Bandung : Rosdakarya, 2000, Cet. ke-3, h.11

<sup>54</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1998, Cet. ke-1, h.204

<sup>55</sup> Muhibbin Syah, Loc Cit

<sup>56</sup> Ibid h.23

<sup>57</sup> Sahilun A Nasir, *Peranan Pendidikan Agama Islam Terhadap Pencegahan Problema Remaja*, Jakarta : Kalam Mulia, 1999, Cetakan ke – 1. h.10

“ta’lim” dengan kata kerja “allama”. Pendidikan dan Pengajaran dalam bahasa Arabnya : “tarbiyah wa ta’lim”.<sup>58</sup>

5. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 Bab I pasal 1 dikatakan bahwa : “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”.<sup>59</sup>

### **Makna Pendidikan Dalam Islam**

Pendidikan secara bahasa berasal bahasa Yunani dari kata “pedagogi” terdiri dari “paedas” dan “agoge” yang berarti saya membimbing dan memimpin anak-anak. Dari makna tersebut dapat diartikan bahwa pendidikan adalah kegiatan seseorang dalam membimbing dan memimpin anak menuju pertumbuhan dan perkembangan dengan bertanggung jawab.

Pendidikan juga secara bahasa dapat diambil dari bahasa Inggris “education” yang berarti pengembangan dan bimbingan makna kata ini dipahami oleh beberapa ahli didik dengan pemahaman yang lebih luas karena sifatnya lebih umum, yaitu tidak hanya membimbing tapi juga mengembangkan potensi anak didik agar lebih tumbuh dan berkembang.

Adapun makna pendidikan secara istilah adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang.<sup>60</sup>

Disisi lainnya, pendidikan Islam tidak hanya bersifat teoritis saja, tetapi juga

---

<sup>58</sup> Abu Ahmad dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2001, Cetakan ke – 2. h.70

<sup>59</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2003.

<sup>60</sup> DPR RI, *Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, h.3

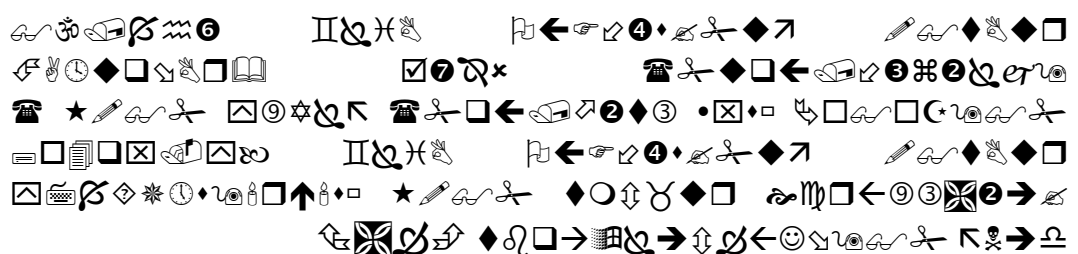
praktis, ajaran Islam tidak memisahkan antara iman dan amal saleh. Oleh karena itu pendidikan Islam adalah sekaligus pendidikan iman dan pendidikan amal dan karena ajaran Islam berisi ajaran tentang sikap dan tingkah laku pribadi masyarakat, menuju kesejahteraan hidup perorangan dan bersama, maka pendidikan Islam adalah pendidikan individu dan pendidikan masyarakat.

Tokoh pendidikan yang lainnya seperti Burlian Somad pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan membentuk individu menjadi makhluk yang bercorak diri, berderajat tinggi menurut ukuran Allah dan isi pendidikannya untuk mewujudkan tujuan itu adalah ajaran Allah. Menurut Musthafa Al-Gulayaini bahwa pendidikan Islam ialah menanamkan akhlak yang mulia didalam jiwa anak didalam masa pertumbuhannya dan menyiraminya dengan air, petunjuk dan nasehat, sehingga akhlak itu menjadi salah satu kemampuan ( meresap dalam) jiwanya kemudian buahnya berwujud keutamaan dan cinta bekerja untuk kemanfaatan tanah air.

Sementara itu tokoh pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara memaknai pendidikan adalah segala usaha yang dilakukan oleh seorang pendidik terhadap seorang anak didik dengan perkembangan yang positif secara maksimal. sedangkan Abdurrahman Al-Nahlawi memaknainya dengan Al-Tarbiyah yang dipahami memiliki tiga makna dasar yaitu :

1. Memperbaiki, Menuntun, Menjaga atau Memelihara.
2. Menjadi Besar
3. Bertambah, Tumbuh hal ini sesuai dengan yang tersurat pada :

**1. Surat Ar-Rum Ayat : (39) Yaitu :**



39. Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan

*Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*

Dari ke 3 pemahaman tersebut diatas pada intinya bahwa kegiatan pendidikan selalu mengarah pada perubahan yang mengarah kepada kebaikan sesuai dengan uraian Abdurrahman selanjutnya bahwa makna pendidikan dalam Al-Tarbiyah itu memiliki empat unsur yakni : Menjaga, Memelihara, Mengembangkan dan Mengarahkan, Kegiatan itu dilaksanakan secara bertahap.

Maka secara umum pengertian Pendidikan dapat difahami merupakan usaha yang dilakukan secara sadar oleh semua elemen yang ada disekitar kita. Pada masa sekarang pendidikan memiliki pola yang bermacam-macam, ada pendidikan umum, pendidikan khusus, pendidikan kejuruan, pendidikan akademi, pendidikan profesi, pendidikan karakter, hingga pendidikan agama.

Model dan pola yang dikembangkan oleh pendidikan saat ini sesungguhnya adalah untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara yang pada gilirannya nanti para peserta didik siap menghadapi berbagai bentuk permasalahan yang ada dalam lingkungan kehidupannya, serta memiliki daya saing yang handal, baik nasional maupun internasional.

### **Kedudukan Rasul Sebagai Pendidik**

Nabi Muhammad sebagai seorang Sasul, sudah tidak diragukan lagi bagi kebanyakan ummat Islam, karena itu menjadi salah satu syarat keyakinan sebagai seorang muslim, artinya kalau merasa diri seorang muslim, maka wajib beriman kepada para Rasul, termasuk kepada Rasulullah Muhammad saw, akan tetapi kalau Nabi Muhammad sebagai seorang pendidik, masih menjadi pertanyaan beberapa kalangan, karena pada saat ini beberapa orang memahami

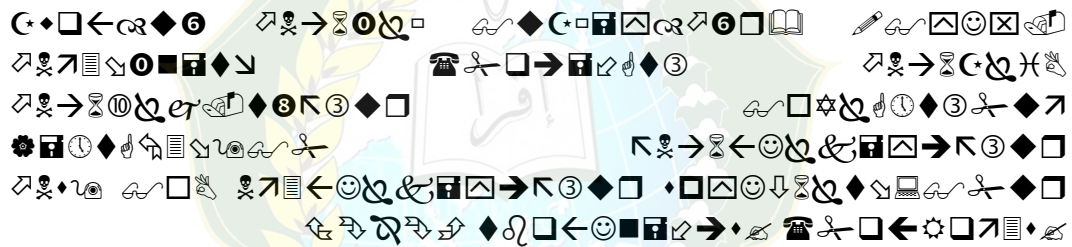
kalau yang namanya pendidik, adalah mereka yang berdiri dikelas memberikan ilmu pengetahuan pada sebuah lembaga pendidikan.

Kalau kita melihat perjalanan da'wah Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul rasanya kurang pantas dipertanyakan eksistensinya sebagai seorang pendidik, namun untuk menghindari keragu-raguan dihati semua orang hususnya umat muslim dan untuk memantapkan rasa kepercayaan umat muslim maka tidak salah kalau kita coba pahami lagi melalui Tulisan ini dengan alasan-alasan normative dan lebih mengedepankan bukti - bukti sejarah sosok Rasulullah dalam kehidupannya.

Bukti - bukti normative tersebut misalnya adalah :

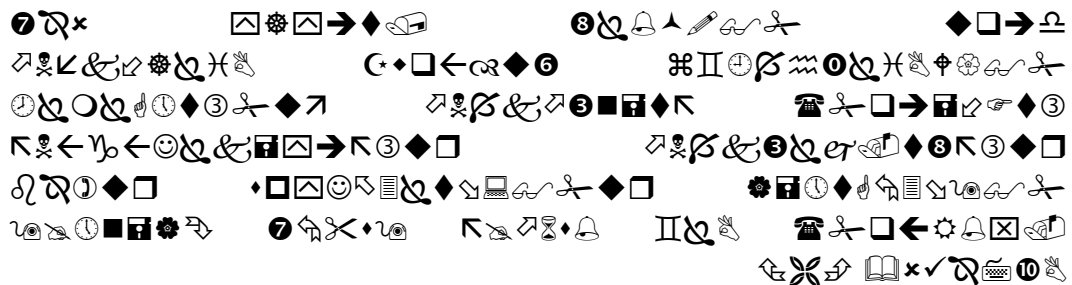
**1. Legitimasi Allah dalam Al - Qur'an yaitu :**

**a). Surat Al - Baqarah ayat : 151 yang berbunyi :**



*151. Sebagaimana (kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.*

**b). Surat Al - Jumu'ah ayat : 2 yang berbunyi :**



*2. Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan*

*mereka dan mengajarkan mereka kitab dan Hikmah (As Sunnah). dan Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata,*

Dari kedua ayat al - Qur'an tersebut diatas, dapat difahami bahwa baik secara tekstual maupun kontekstul Rasul memang dinyakini sebagai seorang pendidik, karena dari Beliaulah umat islam mengenal nilai - nilai kebenaran yang mengandung unsur - unsur kemanusiaan tanpa ada batasan - batasan ras, suku bangsa dan status social, intinya nilai-nilai kebenaran itu milik siapa saja yang mempergunakan dan memperjuangkannya.

## **2. Sejarah Real (Nyata) yang dicontohnya Rasul SAW**

Hal ini banyak tertuang pada buku – buku karangan para ahli pendidik muslim, salah satunya menurut Hussen Nasr bahwa hadits Nabi membahas berbagai hal, mulai dari metafisika sampai tata tertib di meja makan.

Didalamnya orang menjumpai nilai-nilai pendidikan dari apa yang dikatakan dan dilakukan Nabi, mulai dari kehidupan berumah tangga sampai pada persoalan-persoalan sosial, politik yang berhubungan dengan metafisika, kosmologi, eskatologi dan kehidupan spiritual. <sup>61</sup>

Rasul saw. Merupakan profil seorang pendidik yang dijadikan tokoh utama bagi ummatnya dalam proses pendidikan pada zamannya. Berkaitan dengan Rasul saw sebagai seorang pendidik, al-Abrasyi mengatakan :

*“Pada suatu hari Rasul keluar dari rumahnya dan beliau menyaksikan adanya dua pertemuan, pada pertemuan pertama, orang berdoa kepada Allah Swt. Mendekatkan diri kepadaNya dan dalam pertemuan kedua orang sedang memberikan pelajaran, kemudian Rasul saw. Bersabda :*

*“Mereka ini (pertemuan pertama) meminta kepada Allah SWT, apabila Allah menghendaki maka ia akan memenuhi permintaan tersebut dan jika Ia tidak menghendaki maka tidak akan mengabulkan-Nya. Akan tetapi golongan kedua ini mereka mengajar manusia, sedangkan aku sendiri diutus menjadi*

---

<sup>61</sup> Hussen Noer, *Islam Dalam Cita Dan Fakta*, diterjemahkan Abdurrahman Wahid dan Hasyim Wahid, Jakarta : LEPPENM, 1981, h.32



*pendidik”.*

Praktek pengajaran yang terjadi sebagaimana yang tergambar dalam kutipan al-Abrasyi diatas, mengilustrasikan kepada kita contoh terbaik dari pribadi Rasul yang memiliki visi dan keseriusan untuk memotivasi orang belajar atau menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu secara luas, artinya Rasul saw. Sangat menjunjung tinggi pada misi pendidikan dan terus memacu ummatnya agar selalu mencari ilmu Sikap Rasul saw. Seperti terungkap dalam pemikiran diatas, merupakan suatu bentuk kenyataan bahwa islam sangat mementingkan pendidikan dan pengajaran, sesuai dengan hadits Rasul saw. Yang Artinya :

*“Barang siapa yang menyembunyikan ilmunya, maka Allah akan mengekangnya dengan kalung dari api neraka “. (H.R. Ibnu Majah).*

Kontens hadits tersebut menunjukkan adanya kepentingan manusia untuk mengajar manusia lain yang membutuhkan dengan ilmu yang dimiliki, adanya keharusan bagi manusia untuk menyebarkan ilmu pengetahuan kepada manusia yang lain demi kepentingan manusia itu sendiri, artinya dari hadits tersebut juga mengindikasikan bahwa Rasul saw. Sangat layak untuk ditokohkan sebagai seorang pendidik. Karena sepanjang perjalanan kehidupan Rasulullah dihabiskan untuk mengajarkan dan berda'wah kepada para sahabat - sahabatnya.

Bukti yang ketiga kita dapat lihat dan fahami dari beberapa kontens hadits dibawah ini yang menggambarkan tentang kompetensi Rasulullah saw. Sesungguhnya figur sebagai seorang pendidik.<sup>62</sup>

### **3. Kompetensi Rasulullah saw. sebagai Seorang Pendidik**

Kontens hadits tersebut diatas, terungkap yang membuktikan bahwa sesungguhnya Rasulullah benar-benar memiliki kompetensi sebagai seorang pendidik diantaranya :

1. **Penyayang**, karakter ini sangat berkaitan erat pada proses belajar mengajar,

---

<sup>62</sup> HR. An - Nasa'I, *Kitab al-Mawaqit*, Bab. Akhir Waqt al - Asr, Nomor 510

karena secara psikologis sifat tersebut dapat memberikan rasa aman dan tenang pada para peserta didik dan akhirnya mereka dapat menerima ilmu dengan baik.

2. **Mengetahui kapasitas keilmuan para peserta didik**, ini dibuktikan dengan Rasul saw. Kepada para peserta didiknya yang dianggap mampu untuk mengajarkan kepada yang lain yang dianggap belum mampu.

3. **Pendamping yang bersahabat**, karakter pendidik seperti ini menyebabkan peserta didik lebih terbuka apa yang menjadi permasalahan dalam kehidupannya sehingga terjadilah sebuah dialog yang lebih rileks dan nyaman. Sejarah mencatat bahwa Rasulullah dalam kegiatan da'wah pengajaran selalu memanggil para peserta didik dengan sebutan "Para Sahabat".

4. **Perduli Terhadap Persoalan Peserta Didik**, sehingga mampu melihat situasi dan kondisi para peserta didik pada saat terjadinya proses belajar mengajar. Dari berbagai Uraian diatas menunjukkan bahwa Rasulullah saw. Sebagai pendidik dengan memiliki sifat sebagai berikut : <sup>63</sup>

**Pertama**, Beliau memberikan kesempatan kepada peserta didiknya berdialog dan membiarkan mereka untuk berbeda pendapat pada masalah yang diperbolehkan untuk berbeda.

**Kedua**, Adil maksudnya disini selalu memberikan sanjungan atau hadiah kepada peserta didik yang dianggap punya kelebihan atau prestasi.

Dalam hadits dijelaskan bahwa Rasulullah saw sebagai seorang pendidik memiliki sifat : **Sidiq, Amanah, Tabligh dan Fathanah**, yakni tidak menyembunyikan pengetahuan yang dimilikinya, selalu mengajarkan apa yang harus diketahui oleh peserta didik sebagai pedoman hidupnya, dalam contoh riil yang dijelaskan oleh Beliau bahwa seorang pendidik tidak diperkenankan menyembunyikan ilmunya ketika ditanya dengan alasan apapun yang tidak

---

<sup>63</sup> HR. An- Nasai, kitab : al-Ittithah, Bab, *Jami "Maja" a fi al-Qur"an*, no. 93

dibenarkan oleh syara“, apabila seorang pendidik berperilaku seperti itu, maka hukuman yang akan diterimanya adalah dilempar ke neraka.

Gambaran ini semakin memperjelas bahwa Rasulullah memandang pendidikan merupakan sesuatu aktifitas yang sangat penting, salah satunya adalah dengan jalan menginformasikan secara kontinu antara pendidik dan peserta didik. Artinya Ilmu tanpa *dikomunikasikan dan diinformasikan*, maka ilmu tersebut akan pelan-pelan menjadi punah, selain itu *komunikasi* merupakan unsur yang sangat penting untuk melestarikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan agar semakin maju sesuai dengan perkembangan zaman.

Pada konteks hadits diatas juga pendidikan dilaksanakan hanya pada lembaga pendidikan, akan tetapi bisa juga dilaksanakan pada setiap aktifitas kehidupan, baik dibangun masjid atau mushalla, tempat-tempat perbelanjaan, tranformasi umum dan lain sebagainya. Begitu juga hadits yang diriwayatkan oleh imam Abu Daud.<sup>64</sup>

Dalam kontens hadits tersebut, secara implisit menggambarkan bahwa Rasulullah saw. Sebagai seorang pendidik selalu menjaga integritas moral dan menjelaskan pentingnya bagi seorang pendidik untuk istiqomah pada nilai ikhlas, sebagaimana yang tergambar dalam hadits tersebut yang dicontohkan oleh *Rasul SAW. Yang melarang seorang pendidik menerima hadiah dari para peserta didik* adalah dalam rangka ada kekhawatiran akan membelokkan niat ikhlas, karena akan mempengaruhi obyektifitas dalam penilaian kepada para peserta didik dan tidak tanggung-tanggung ancaman bagi pendidik yang memiliki sifat seperti tersebut diatas *Imbalannya adalah Api Neraka*. Hal ini mengindikasikan bahwa karakter seorang pendidikan betul-betul sangat diperhatikan dalam hadits Rasul SAW dan sangat dijaga agar hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan optimal

**Dari ketiga bukti diatas**, dapat kita simpulkan bahwa sepanjang perjalanan kehidupan Rasulullah saw. Baik dari bentuk ucapanNya, perbuatanNya maupun ketetapan – ketetapanNya menggambarkan bagaimana

---

<sup>64</sup> HR.Tarmidzi dalam Kitabal – ‘*Ilmi ‘an - Rasulullah*, Nomor 2649

Beliau sesungguhnya adalah figur seorang pendidik yang professional dengan kriteria berbudi luhur dan sangat terjaga dari sifat-sifat tercela serta memiliki **Kompetensi Teaching Skill** yang tidak dapat diragukan, kalau tidak bagaimana mungkin beliau mampu membangun sebuah peradapan manusia yang berbudaya dan bermartabat di kawasan jazirah arab yang terkenal berkarakter keras dan perjalanan tersebut menjadi sebuah catatan sejarah sepanjang masa dan diakui di berbagai belahan dunia.

### **Pengertian Mutu Pendidikan**

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia “Mutu” berarti Karat. Baik buruknya sesuatu, kualitas, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan)<sup>65</sup>.

Pendidikan adalah perbuatan mendidik. Jadi yang dimaksud dengan mutu pendidikan secara etimologi adalah kualitas perbuatan mendidik. Mendidik disini adalah interaksi antara guru dan siswa dalam proses belajar mengajar di kelas.

Menurut Joremo S. A. Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup **Input, Proses Dan Output Pendidikan.**<sup>66</sup>

Antara proses dan hasil pendidikan yang bermutu saling berhubungan. Akan tetapi agar proses yang baik itu tidak salah arah, maka mutu dalam artian hasil (*ouput*) harus dirumuskan lebih dahulu oleh sekolah dan harus jelas target yang akan dicapai untuk setiap tahun atau kurun waktu lainnya.

Berbagai *input* dan proses harus selalu mengacu pada mutu-hasil (*output*) yang ingin dicapai. Dengan kata lain tanggung jawab sekolah dalam *School Based Qualit y Improvement* bukan hanya pada proses, tetapi tanggung jawab akhirnya adalah pada *hasil* yang dicapai. Untuk

---

<sup>65</sup>W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989, hal 788.

<sup>66</sup> Joremo S. Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu, Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, 85.

mengetahui hasil/prestasi yang dicapai oleh sekolah terutama yang menyangkut aspek kemampuan akademik atau "kognitif" dapat dilakukan *Benchmarking* (menggunakan titik acuan standar, misalnya : NEM oleh PKG atau MGMP).

Evaluasi terhadap seluruh hasil pendidikan pada tiap sekolah baik yang sudah ada patokannya (*Benchmarking*) maupun yang lain (kegiatan ekstra-kurikuler) dilakukan oleh individu sekolah sebagai evaluasi diri dan dimanfaatkan untuk memperbaiki target mutu dan proses pendidikan tahun berikutnya. Dalam hal ini RAPBS harus merupakan penjabaran dari target mutu yang ingin dicapai dan scenario bagaimana mencapainya.

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mengacu pada masukan, proses, keluaran dan dampaknya. Mutu masukan dapat dilihat dari berbagai sisi.

*Pertama*, kondisi baik tidaknya masukan sumber daya manusia, seperti kepala sekolah, guru laboran, staf tata usaha dan siswa.

*Kedua*, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, buku-buku, kurikulum, sarana dan prasarana sekolah, dan lain-lain.

*Ketiga*, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang berupa perangkat software, seperti peraturan, struktur organisasi dan deskripsi kerja.

*Keempat*: mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan, seperti visi, motivasi, ketekunan cita-cita.

Suryadi dan Tilaar menjelaskan bahwa “mutu pendidikan adalah merupakan kemampuan sistem pendidikan yang diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah faktor *input* agar menghasilkan *output* yang setinggi-tingginya”.<sup>67</sup>

Dari beberapa definisi mutu yang telah dikemukakan secara sederhana dapat diambil pemahaman bahwa mutu pendidikan merupakan kemampuan sistem pendidikan dalam mengelola dan memproses pendidikan secara berkualitas dan efektif untuk meningkatkan nilai tambah agar

---

<sup>67</sup> Ace Suryadi dan H.A.R. Tilaar, *Analisis Kebijakan Suatu Pengantar*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1995, 108.

menghasilkan *output* yang berkualitas. *Output* yang dihasilkan oleh pendidikan yang bermutu juga harus mampu memenuhi kebutuhan *stakeholders* seperti yang diungkapkan oleh E. Mulyasa sebagai berikut :

Pendidikan yang bermutu bukan hanya dilihat dari kualitas lulusannya tetapi juga mencakup bagaimana lembaga pendidikan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Pelanggan dalam hal ini adalah pelanggan internal (tenaga kependidikan) serta pelanggan eksternal (peserta didik, orang tua, masyarakat dan pemakai lulusan).<sup>68</sup>

Mutu Pendidikan bukanlah suatu konsep yang berdiri sendiri, melainkan terkait dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Dimana kebutuhan masyarakat dan perubahan yang terjadi bergerak dinamis seiring dengan perkembangan zaman, sehingga pendidikan juga harus mampu menyeimbangi perubahan yang terjadi sangat cepat dan bisa menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil pendidikan dipandang bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstra kurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu. Keunggulan akademik dinyatakan dengan nilai yang dicapai oleh peserta didik. Keunggulan ekstrakurikuler dinyatakan dengan aneka jenis ketrampilan yang diperoleh siswa selama mengikuti program ekstra kurikuler.

Diluar kerangka itu, mutu keluaran juga dapat dilihat dari nilai-nilai hidup yang dianut, moralitas, dorongan untuk maju dan lain-lain yang diperoleh anak didik selama menjalani pendidikan.

Mutu sebuah sekolah juga dapat dilihat dari tertib administrasinya. Salah satu bentuk tertib administrasi adalah adanya mekanisme kerja yang efektif dan efisien, baik secara vertikal maupun horisontal.

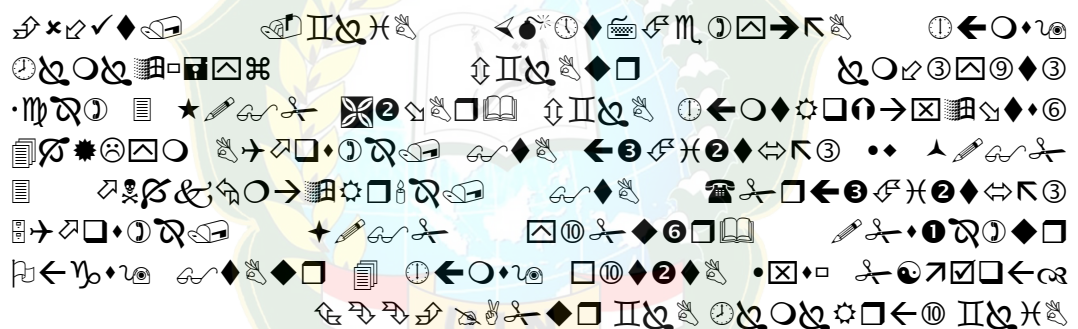
---

<sup>68</sup> E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004, h. 6.

Dilihat dari perspektif operasional, manajemen sekolah berbasis dikatakan bermutu jika sumber daya manusianya bekerja secara efektif dan efisien. Mereka bekerja bukan karena ada beban atau karena diawasi secara ketat. Proses pekerjaannya pun dilakukan benar dari awal, bukan mengatasi aneka masalah yang timbul secara rutin karena kekeliruan yang tidak disengaja.

Perkembangan zaman yang semakin berkembang menuntut lembaga pendidikan dalam bersaing memperkenalkan kualitas lembaga pendidikannya. Oleh karena itu, tugas stakeholder harus melakukan pembenahan dalam menghadapi persaingan terhadap lembaga pendidikan lainya yaitu dengan melakukan perubahan serta perbaikan-perbaikan dalam lembaga pendidikannya. Sebagaimana dalam :

**QS. Ar-Ra'd ayat : 11** Allah SWT berfirman :



*11. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, dimuka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah[767]. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan[768] yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.*

*767] Bagi tiap-tiap manusia ada beberapa Malaikat yang tetap menjaganya secara bergiliran dan ada pula beberapa Malaikat yang mencatat amalan-amalannya, dan yang dikehendaki dalam ayat ini ialah Malaikat yang menjaga secara bergiliran itu, disebut Malaikat Hafazhah.*

768] Tuhan tidak akan merubah Keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka.<sup>69</sup>

### **Pengertian Mutu Pendidikan Dalam Pendidikan Islam**

Secara terminologi istilah mutu memiliki pengertian yang cukup beragam, mengandung banyak tafsir dan pertentangan. Hal ini disebabkan karena tidak ada ukuran yang baku tentang mutu itu sendiri. Sehingga sulit kiranya untuk mendapatkan sebuah jawaban yang sama, apakah sesuatu itu bermutu atau tidak. Namun demikian ada kriteria umum yang telah disepakati bahwa sesuatu itu dikatakan bermutu, pasti ketika bernilai baik atau mengandung makna yang baik. Secara esensial istilah mutu menunjukan kepada sesuatu ukuran penilaian atau penghargaan yang diberikan atau dikenakan kepada barang dan atau kinerjanya.<sup>70</sup>

Menurut B. Suryobroto, konsep mutu mengandung pengertian makna derajat keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa, baik yang *tangible* maupun *intangibile*.<sup>71</sup>

Dari beberapa pengertian diatas, mutu mempunyai makna ukuran, kadar, ketentuan dan penilaian tentang kualitas sesuatu barang maupun jasa (produk) yang mempunyai sifat absolut dan relatif. Dalam pengertian yang absolut, mutu merupakan standar yang tinggi dan tidak dapat diungguli. Biasanya disebut dengan istilah baik, unggul, cantik, bagus, mahal, mewah dan sebagainya.<sup>72</sup>

Jika dikaitkan dengan konteks pendidikan, maka konsep mutu pendidikan adalah elit, karena hanya sedikit institusi yang dapat memberikan pengalaman pendidikan dengan mutu tinggi kepada anak didik. Dalam pengertian relatif, mutu memiliki dua pengertian.

**Pertama**, menyesuaikan diri dengan spesifikasi.

---

<sup>69</sup> Al Quran, Jakarta : Pustaka Maghfiroh, 2006, h. 250

<sup>70</sup> Aan Komariah dan Cepi Triatna, *Visionary Leadership: Menuju Sekolah Efektif*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008, h. 9

<sup>71</sup> B. Suryobroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2004, h. 210.

<sup>72</sup> Edward Sallis, *Total Quality Management in Education*, terj. Ahmad Ali Riadi & Fahrurrozi, Yogyakarta: Ircisod, 2012, h. 52



**Kedua**, memenuhi kebutuhan pelanggan.<sup>73</sup>

Mutu dalam pandangan seseorang terkadang bertentangan dengan mutu dalam pandangan orang lain, sehingga tidak aneh jika ada pakar yang tidak mempunyai kesimpulan yang sama tentang bagaimana cara menciptakan institusi yang baik.<sup>74</sup>

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen mutu adalah ilmu atau seni yang mengatur tentang proses pendayagunaan sumber daya manusia maupun sumber-sumber lainnya yang mendukung pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. berdasarkan ukuran, kadar, ketentuan dan penilaian tentang kualitas sesuatu barang maupun jasa (produk) sesuai dengan kepuasan pelanggan.

### **1. Tujuan dan Manfaat Otonomi Pendidikan**

Ada sejumlah faktor yang menjadi pendorong pelaksanaan otonomi pendidikan. Menurut Musaheri (2005) faktor tersebut antara lain :

1. Tuntutan orang tua, kelompok masyarakat, para legislator, bisnis dan perhimpunan buruh, untuk turut serta, berpartisipasi aktif, mengontrol dan melakukan penilaian kualitas proses dan *output* pendidikan.
2. Struktur pendidikan yang terpusat tidak dapat bekerja dengan baik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan ketidak mampuan birokrasi yang ada untuk merespon secara efektif kebutuhan dan tuntutan pendidikan bermutu sesuai karakteristik dan harapan masyarakat yang beraneka ragam.

Terjadinya tuntutan reformasi dalam bidang pendidikan dan kurangnya persaingan antar daerah dalam memajukan pendidikan serta tuntutan masyarakat untuk mandiri sesuai dengan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan memajukan bidang pendidikan.

Adanya ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat atas pendanaan, kurikulum, fasilitas, sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pendidikan

---

<sup>73</sup> Edward Sallis, *Total Quality Management in Education*, h.54

<sup>74</sup> Edward Sallis, *Total Quality Management in Education*, h.29-30

yang menjadikan kurangnya kreativitas dari daerah, sekolah dan personalia penyelenggara pendidikan serta akibatnya kemandirian dalam pengelolaan pendidikan sulit diwujudkan.

Otonomi pendidikan dapat meningkatkan efisiensi manajemen dan kepuasan kerja tenaga pendidikan serta menciptakan suatu sistem pendidikan dengan kebijakan-kebijakan yang konkret, sumber daya pendidikan dapat didayagunakan secara optimal dapat menggali potensi local secara lebih efektif, dapat mengelola sistem pendidikan yang sejalan dengan kebudayaan setempat, serta partisipasi masyarakat dalam pendidikan meningkat akuntabilitas pendidikan juga meningkat dan pada gilirannya mutu pendidikan dapat terjamin.

Dengan otonomi pendidikan, maka efek positif yang muncul adalah terjadinya perbaikan pendidikan ditingkat lokal, efisiensi administrasi, efisiensi keuangan, dan terwujudnya pelayanan pendidikan sebagai modal dasar terselenggaranya pendidikan berkualitas serta sebagai instrumen vital dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan.

### **Prinsip - Prinsip Otonomi Pendidikan**

Otonomi (*desentralisasi*) pendidikan memiliki prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi sebagai berikut :

- 1) Pola dan pelaksanaan manajemen yang diterapkan dalam otonomi pendidikan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, supervisi dan monitoring serta evaluasinya harus demokratis.
- 2) Pemberdayaan masyarakat harus menjadi tujuan utama peran serta masyarakat harus menjadi bagian mutlak dari sistem pengelolaan pendidikan, sehingga masyarakat diberi keleluasaan berpartisipasi, terlibat dan melibatkan diri secara aktif, difasilitasi, diberi ruang aktualisasi dan akhirnya diberi kepercayaan dan penghargaan atas partisipasinya.
- 3) Pelayanan harus lebih cepat, efisien dan efektif demi kepentingan peserta didik dan rakyat banyak, serta keaneka ragaman aspirasi serta nilai dan

norma local harus dihargai dalam kerangka dan untuk penguatan system pendidikan nasional.

### **Membangun Otonomi Pendidikan Yang Efektif**

Pendidikan yang berotonomi dapat cerah bergantung pada sistem yang mendasari, penyelenggaraannya *akuntabel*, pemimpin pendidikan yang dapat membangun system otonomi pendidikan secara berkelanjutan dengan manajemen modern, terbangunnya partisipasi masyarakat secara luas dan berjalannya rivitalisasi sekolah sebagai tumpuan utama otonomi pendidikan. Sistem pendidikan di era otonomi daerah dapat terbangun kokoh, bila dilandasi aturan main yang mantap dan jelas sebagai pijakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang berotonomi. Tanpa aturan main yang mantap dan jelas (komprehensif, aspiratif, demokratis dan daya antisipasi ke depan) memberi peluang terjadinya otoritarisme baru, inkonsistensi kebijakan dan kontraproduktif pengelolaan yang justru merusak sendi-sendi desentralisasi pendidikan.

Peraturan pendidikan, khususnya Perda merupakan keputusan politik. Upaya *desentralisasi* pendidikan seringkali sukses atau gagal lebih disebabkan oleh alasan politis dari pada alasan teknis. Keputusan politis pendidikan dapat berdampak positif, bila dibangun diatas konsensus luas, dengan dukungan penuh dari berbagai pelaku yang terlibat (*Stakeholder*) dan memperhatikan berbagai kelompok kepentingan yang terkena pengaruh sebagai akibat otonomi pendidikan melalui wadah Dewan Pendidikan.

### **2. Tantangan Dunia Pendidikan**

Diera baru, pendidikan nasional setidaknya menghadapi lima tantangan besar yang sangat kompleks. Tantangan-tantangan itu saling berkaitan satu sama lain dan memberi dampak langsung terhadap dunia pendidikan, serta dunia pendidikan harus dapat menyikapi tantangan itu secara efektif. Perubahan paradigma tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghadapi tantangan

dunia pendidikan dengan mengedepankan peningkatan mutu pendidikan itu sendiri.

Adapun tantangan-tantangan yang dihadapi dunia pendidikan tersebut, menurut Sidi (2003) yaitu :

- 1) Tantangan untuk meningkatkan nilai tambah (*added value*). Meningkatkan nilai tambah dalam rangka membangun produktivitas, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan pembangunan berkelanjutan ditengah tuntutan kebutuhan yang tak terbatas.
- 2) Tantangan untuk melakukan pengkajian secara komprehensif dan mendalam terhadap terjadinya transformasi (perubahan) struktur masyarakat dari masyarakat agraris kemasyarakat modern menuju masyarakat industri yang menguasai teknologi dan informasi yang implikasinya pada tuntutan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).
- 3) Tantangan dalam persaingan global yang semakin ketat, dengan jalan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghasilkan karya-karya yang bermutu dan mampu bersaing sebagai hasil penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEK).
- 4) Tantangan terhadap munculnya kolonialisme baru dibidang IPTEK dan ekonomi menggantikan kolonialisme politik. Dengan demikian, kolonialisme kini tidak lagi berbentuk fisik, melainkan dalam bentuk informasi. Berkembangnya teknologi informasi dalam bentuk komputer dan internet, sehingga bangsa kita menjadi sangat tergantung kepada bangsa Barat dalam hal teknologi dan informasi. Inilah bentuk kolonialisme baru yang menjadi semacam *virtual enemy* yang telah masuk keseluruh pelosok dunia ini. Semua tantangan itu menuntut SDM Indonesia, khususnya generasi muda terpelajar agar meningkatkan serta memperluas pengetahuan, wawasan keunggulan (baik komparatif maupun kompetitif), keahlian yang profesional, serta keterampilan yang

berkualitas.

- 5) Tantangan berkaitan dengan bertambah rusaknya jaman, dekadensi moral yang terus meningkat dan terpaan secara dahsyat budaya global serta dunia pendidikan dituntut menyiapkan sumber daya manusia yang bukan hanya memiliki ahlakul karimah, melainkan pula mampu dan tanggap membentengi diri dan mengarahkan pihak lain terhadap berbagai perilaku yang merusak tatanan agama, budaya dan etika bangsa. Untuk dapat lebih mudah memahaminya, penulis membuatnya dalam bentuk gambar berikut : <sup>75</sup>

**Gambar 2.3**  
**Pola Pikir Menjawab Tantangan Masa Depan**  
**Diera Otonomi Daerah dan Otonomi Pendidikan**

No.	Pola Fikir Masa Lalu	Pola Fikir Masa Kini
1	Pola berpikir masa lalu (milenium kedua)	Pola berpikir masa kini (milenium ketiga)
2	Pembelajaran penting hanya dapat dilakukan melalui fasilitas pembelajaran formal.	Orang dapat mempelajari sesuatu dari banyak sumber.
3	Setiap orang harus mempelajari satu isi materi yang sama.	Setiap orang memahami proses pembelajaran dan keterampilan dasar pembelajaran.
4	Proses pembelajaran dikendalikan oleh guru. Apa yang diajarkan, bilamana harus diajarkan, dan bagaimana harus diajarkan, semuanya ditentukan oleh seorang professional.	Pendidikan dan pembelajaran merupakan aktivitas interaktif. Keberhasilannya ditentukan oleh seberapa jauh pembelajar dapat bekerjasama sebagai tim.
5	Pendidikan formal mempersiapkan orang untuk hidup.	Pendidikan formal merupakan dasar bagi pembelajaran sepanjang hayat.
6	Sebutan “pendidikan” dan “sekolah” hampir selalu dalam pengertian yang sama	“Sekolah” hanya salah satu tahapan dalam perjalanan pendidikan.

<sup>75</sup> Ibid, h. 124 – 126.

7	Sekali seseorang meninggalkan pendidikan formal, maka ia memasuki “dunia nyata”. Makin lebih banyak memperoleh kualifikasi formal, maka makin banyak kesuksesan akan diraih.	Pendidikan formal menyediakan satu rentangan interaksi antara pembelajar dengan dunia bisnis, perdagangan, dan politik. Makin lebih banyak memiliki kemampuan dan daya adaptasi makin banyak meraih kesuksesan.
	Pendidikan dasar dibiayai oleh pemerintah.	Pendidikan dasar dibiayai bersama oleh pemerintah dan sektor swasta.

Sumber : Hasil Penelitian Penulis, di Era Otonomi Daerah dan Otonomi Pendidikan Pendidikan, Tahun 2021 – 2022.

## F. Konsep Analisis SWOT

### Pengertian Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities And Threats*).

Menurut Freddy Rangkuti Analisis swot adalah indifikasi berbagai factor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*sternghs*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan ((*weaknesses*) dan ancaman (*threats*).<sup>76</sup>

Analisis SWOT menurut Sondang P.Siagian merupakan salah satu instrument analisi yang ampuh apabila digunakan dengan tepat telah diketahui pula secara luas bahwa “SWOT merupakan akronim untuk kata-kata *strengths* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (peluang) dan *threats* (ancaman).<sup>77</sup>

Analisis SWOT menurut Philip Kotler diartikan sebagai evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT merupakan salah satu instrumen analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan yang dikenal luas. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan meminimalkan kelemahan dan ancaman. Bila diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini mempunyai dampak yang besar

<sup>76</sup> Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2018, h. 10

<sup>77</sup> Sondang P.Siagian, *Manajemen Strategik*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2000, h. 172

atas rancangan suatu strategi yang berhasil.

Menurut Ferrel dan Harline (2005), fungsi dari Analisis SWOT adalah untuk mendapatkan informasi dari analisis situasi dan memisahkannya dalam pokok persoalan internal (kekuatan dan kelemahan) dan pokok persoalan eksternal (peluang dan ancaman). Analisis SWOT tersebut akan menjelaskan apakah informasi tersebut berindikasi sesuatu yang akan membantu perusahaan mencapai tujuannya atau memberikan indikasi bahwa terdapat rintangan yang harus dihadapi atau diminimalkan untuk memenuhi pemasukan yang diinginkan.

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara systematis untuk merumuskan strategi perusahaan, analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat menimbulkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threat*). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan dan strategi dan kebijakan dari perusahaan. Dengan demikian perencanaan strategi (*strategic planner*) harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada disaat ini. Hal ini disebut dengan analisis situasi. Model yang paling populer untuk analisis situasi adalah analisis SWOT. Sedangkan menurut Sondang P Siagian ada pembagian faktor-faktor strategis dalam analisis SWOT yaitu :

#### **a. Faktor berupa kekuatan**

Yang dimaksud dengan faktor-faktor kekuatan yang dimiliki oleh suatu perusahaan termasuk satuan-satuan bisnis didalamnya adalah antara lain kompetisi khusus yang terdapat dalam organisasi yang berakibat pada pemilikan keunggulan komparatif oleh unit usaha dipasaran. Dikatan demikian karena satuan bisnis memiliki sumber keterampilan, produk andalan dan sebagainya yang membuatnya lebih kuat dari pada pesaing dalam memuaskan kebutuhan pasar yang sudah dan direncanakan akan dilayani oleh satuan usaha yang bersangkutan.

### **b. Faktor kelemahan**

Yang dimaksud dengan kelemahan ialah keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber, keterampilan dan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja organisasi yang memuaskan.

### **c. Faktor peluang**

Definisi peluang secara sederhana peluang ialah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu satuan bisnis.

### **d. Faktor ancaman**

Pengertian ancaman merupakan kebalikan pengertian peluang yaitu faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu satuan bisnis jika tidak diatasi ancaman akan menjadi bahaya bagi satuan bisnis yang bersangkutan baik untuk masa sekarang maupun dimasa depan.<sup>78</sup>

Dengan menggunakan cara penelitian dengan metode analisis SWOT ini ingin menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal, kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam analisis SWOT. Cara membuat analisis SWOT penelitian menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dapat ditentukan oleh kombinasi factor internal dan eksternal. Kedua factor tersebut harus dipertimbangkan dalam analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari lingkungan *internal strengths* dan *weaknesses* serta lingkungan *eksternal opportunities* dan *threats* yang dihadapi didunia bisnis. Analisis SWOT membandingkan antara factor eksternal peluang (*opportunities*) dan Ancaman (*threats*) dengan factor internal kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*).<sup>79</sup>

Menurut Rangkuti dalam menganalisa SWOT ada lima macam model

---

<sup>78</sup> Sondang P.Siagian, *Manajemen Strategik*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2000. h.173

<sup>79</sup> Freddy Rangkuti, *Freddy Analisis Swot membedah kasus bisnis*, h.18-19



pendekatan yang digunakan. Model pendekatan dalam menganalisa SWOT tersebut adalah sebagai berikut :

**a) Matrik SWOT**

Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan.

**b) Matrik *Boston Consulting Group***

Matrik BCG diciptakan oleh *Boston Consulting Group* (BCG) yang mempunyai beberapa tujuan diantaranya adalah untuk mengembangkan strategi pangsa pasar untuk portofolio produk berdasarkan karakteristik cash-flownya, serta untuk memutuskan apakah perlu meneruskan investasi produk yang tidak menguntungkan. Matriks BGC juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja manajemen berdasarkan kinerja produk di pasaran.

**c) Matrik Internal dan Eksternal**

Matrik ini dapat dikembangkan dari model *Boston Consulting Group* (GE-Model) parameter yang digunakan meliputi parameter kekuatan internal perusahaan dan pengaruh eksternal yang dihadapi. Tujuan penggunaan model ini adalah untuk memperoleh strategis bisnis ditingkatkan korporat yang lebih detail.

**d) Matrik *Space***

Adalah untuk mempertajam analisis agar perusahaan dapat melihat posisi dan arah perkembangan dimasa akan datang. Matrik space dapat memperlihatkan dengan jelas kekuatan keuangan dan kekuatan industry pada suatu perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut secara financial relative cukup kuat untuk mendayagunakan keuntungan kompetitif secara optimal melalui tindakan agresif dalam

merebut pasar.

**e) Matrik *Grand Strategy***

Matrik ini biasa digunakan untuk memecahkan masalah yang sering dihadapi dalam penggunaan analisis SWOT yaitu untuk menentukan apakah perusahaan ingin memanfaatkan posisi yang kuat atau mengatasi kendala yang ada dalam perusahaan.<sup>80</sup>

Rangkuti juga membagi cara membuat Analisis Swot (*Strength, Weakness, opportunities dan Threats*) menjadi 3 tahap yaitu :

**a. Matrik Factor Strategi Eksternal**

Sebelum membuat matrik factor strategi eksternal, perlu mengetahui terlebih dahulu factor strategi eksternal (EFAS). Berikut ini adalah cara-cara penentuan factor strategi eksternal (EFAS) :

- 1) Susunlah dalam kolom 1 (5 sampai dengan 10 peluang dan ancaman).
- 2) Beri bobot masing-masing faktor dalam kolom 2, mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting) faktor-faktor tersebut kemungkinan dapat memberikan dampak terhadap faktor strategis
- 3) Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing factor dengan memberikan skala mulai dari 4 (*outstanding*) samapai dengan 1 (*poor*) berdasarkan pengaruh factor tersebut terdapat kondisi perusahaan yang bersangkutan. Pemberian nilai rating untuk factor peluang bersifat positif (peluang yang semakin besar diberi rating +4, tetapi jika peluangnya kecil diberi rating +1). Pemberian nilai rating ancaman adalah kebalikannya. Misalnya, jika ancaman sangat besar, ratingnya adalah 1, sebaliknya, jika nilai ancamannya sedikit ratingnya 4
- 4) Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk memperoleh factor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa

---

<sup>80</sup> Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Membedah Kasus Bisnis*, h. 46

skor pembobotan untuk masing-masing factor yang dinilai bervariasi mulai dari 4,0 (*outstanding*) sampai dengan 1,0 (*poor*)

- 5) Gunakan kolom 5 untuk memberikan komentar atau catatan mengapa faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotan dihitung.
- 6) Jumlah skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total ini menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategis eksternal. Total skor ini dapat digunakan untuk membandingkan perusahaan ini dengan perusahaan lainnya dalam kelompok industri yang sama.

#### **b. Matrik Faktor Strategi Internal**

Setelah faktor-faktor strategi internal suatu perusahaan diidentifikasi, suatu tabel **IFAS** (*Internal Strategic Factors Analysis Summary*) disusun untuk merumuskan faktor-faktor strategi internal tersebut dalam kerangka *strength* dan *weakness* perusahaan. Tahapnya adalah :

- 1) Tentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan serta kelemahan perusahaan dalam kolom 1.
- 2) Beri bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dengan dari 1,0 (paling penting) sampai 0,0 (tidak penting), berdasarkan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap posisi perusahaan. (semua bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi skor total 1,00.)
- 3) Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai 4 (*outstanding*) sampai dengan 1 (*poor*), berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang bersangkutan. Variable yang bersifat positif (semua variabel yang masuk kategori kekuatan) diberi nilai mulai dari +1 sampai +4 (sangat baik) dengan membandingkan dengan rata-rata industri atau dengan pesaing utama. Sedangkan variabel yang bersifat negatif

sebaliknya. Contohnya, jika kelemahan perusahaan besar sekali dibandingkan dengan rata-rata industry, nilainya adalah 1, sedangkan jika kelemahan perusahaan dibawah rata-rata industry, nilainya 4.

- 4) Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk memperoleh factor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing factor yang dinilai bervariasi mulai dari 4,0 (*outstanding*) sampai dengan 1,0 (*poor*)
- 5) Gunakan kolom 5 untuk memberikan komentar atau catatan mengapa faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotan dihitung.
- 6) Jumlah skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total ini menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategis internal. Total skor ini dapat digunakan untuk membandingkan perusahaan ini dengan perusahaan lainnya dalam kelompok industry yang sama.<sup>81</sup>

### c. Tahap Analisis

Setelah mengumpulkan semua informasi yang berpengaruh terhadap kelangsungan perusahaan, tahap selanjutnya adalah memanfaatkan semua informasi tersebut dalam model-model kuantitatif perumusan strategi. Sebaiknya menggunakan beberapa model sekaligus, agar dapat memperoleh analisis yang lebih lengkap dan akurat.

Model yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Matrik TOWS atau Matrik SWOT
- 2) Matrik BCG
- 3) Matrik Internal Eksternal
- 4) Matrik SPACE
- 5) Matrik *Grand Strategy*

---

<sup>81</sup> Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka utama, 2017, h. 22-24

### 1) Matrik TOWS ATAU SWOT

Alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis perusahaan adalah Matrik SWOT. Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Matrik ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternative strategis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.4 Matriks Analisis SWOT

IFAS EFAS	<i>STRENGTHS (S)</i> Tentukan 5-10 Faktor-faktor kekuatan internal	<i>WEAKNESS (W)</i> Tentukan 5-10 Faktor-faktor Kelemahan Internal
<i>OPPORTUNITIES (O)</i> Tentukan 5-10 Faktor-faktor Peluang Eksternal	Ciptakan Strategi yang Menggunakan Kekuatan Untuk Memanfaatkan Peluang	Ciptakan Strategi yang Meminimalkan Kelemahan Untuk Memanfaatkan Peluang
<i>THREATS (T)</i> Tentukan 5-10 Faktor-faktor Ancaman Eksternal	Ciptakan Strategi yang Menggunakan Kekuatan Untuk Mengatasi Ancaman	Ciptakan Strategi yang Meminimalkan Kelemahan dan Menghindari Ancaman

#### a. Strategi SO

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan **memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.**

#### b. Strategi ST

Ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan dalam yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.

### c. Strategi WO

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

### d. Strategi WT

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat *defensive* dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.<sup>82</sup>

Metode pendekatan yang paling banyak digunakan untuk analisis korporat adalah BCG Growth/Share Matrix yang diciptakan pertama kali oleh Boston Consulting Group (BCG).

1. Mengidentifikasi unit analisis
2. Mengumpulkan data statistic yang diperlukan untuk analisis
3. Menghitung pangsa pasar relative
4. Membuat plot pangsa pasar pada diagram matrik BCG
5. Rumusan Setiap kuadran.

### 2) Matriks General electric / BCG

Model ini membutuhkan parameter factor daya tarik industry (*industry attractiveness factor*) dan factor kekuatan bisnis (*business strength Factor*).

### 3) Matriks Eksternal dan Internal

Matriks internal eksternal ini dikembangkan dari model general electric (GE Model). Parameter yang digunakan meliputi parameter kekuatan internal perusahaan dan pengaruh eksternal yang dihadapi. Tujuan penggunaan model ini yaitu untuk memperoleh strategi bisnis ditingkat korporat yang lebih detail.

### 4) Matriks Space

Selanjutnya setelah menggunakan model analisis matrik IE, perusahaan itu dapat menggunakan matrik space untuk mempertajam

---

<sup>82</sup> Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama, 2017, h. 31-32

analisisnya. Tujuannya adalah agar perusahaan itu dapat melihat posisinya dan arah perkembangan selanjutnya. Berdasarkan matrik space, analisis tersebut dapat memperlihatkan dengan jelas garis vector yang bersifat positif baik untuk kekuatan keuangan (KU) maupun kekuatan industry (KI). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan itu secara finansial relatif cukup kuat sehingga dia dapat mendayagunakan keuntungan kompetitifnya secara optimal melalui tindakan yang cukup agresif untuk merebut pasar.

#### 5) Matriks *Grand Strategy*

Model yang digunakan untuk menentukan apakah perusahaan ingin memanfaatkan posisi yang kuat atau mengatasi kendala yang ada. Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis dengan menggunakan matriks SWOT, untuk membandingkan antara factor internal (kekuatan dan kelemahan) dengan factor eksternal (ancaman dan peluang). Selain itu dengan menggunakan matrik ini dapat menggambarkan secara jelas mengenai ancaman dan peluang yang sesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya.

#### Analisis SWOT Dalam Presfektif Islam

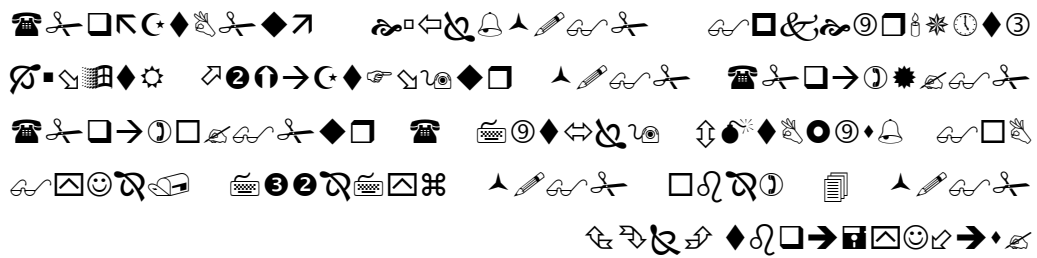
Apabila diuraikan satu persatu, maka pertama kali yang akan dibicarakan tentang kekuatan umat islam yaitu keimanan. Ini adalah modal yang sangat besar dan tidak semua mendapatkan hidayah ini. Kemudian kekuatan lain adalah kesehatan, kemampuan berpikir, kesempatan melakukan hal-hal yang potensial dan sedikit kekayaan. Kelemahannya yaitu belum memiliki cukup ilmu, sebab dalam islam sebuah ilmu harus mendahului amal sementara tantangan dalam kehidupan antara lain masalah pola kehidupan yang sudah sangat dipenuhi dengan pola pikir materialistis yang sangat mengagungkan kesenangan dunia.

Analisis SWOT diterangkan dalam salah satu ayat Al-Qur'an yaitu :

**Surat Al - Hasyr ayat : 18** sebagai berikut :<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Al Quran (Jakarta:Sygma Creative Media Corp) Hal 455



18. *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Dalam kitab *Fi Zilalil Quran* takwa merupakan kondisi dalam hati yang diisyaratkan oleh nuansa lafadzhnya. Namun, ungkapan tidak dapat menggambarkan hakikat. Takwa merupakan kondisi yang menjadikan hati selalu waspada, menghadirkan dan merasakan pengawasan Allah dalam setiap keadaan. Merasa takut, merasa bersalah dan malu bila Allah mendapatinya berada dalam keadaan yang dibenci Allah. Pengawasan atas setiap hati selalu terjadi setiap waktu dan setiap saat. Jadi kapan seseorang merasa aman dari penglihatan Allah....?

***“... Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat)...”***

Ungkapan kalimat ini juga memiliki nuansa dan sentuhan yang lebih luas daripada lafadzhnya sendiri. Kalimat ini hanya dengan sekedar terlintas dalam hati saja, terbukalah dihadapan manusia lembaran amal-amalnya bahkan lembaran seluruh kehidupannya. Manusia pasti akan mengarahkan pandangannya kesegala kata-katanya untuk merenungkan dan membayangkan hisab amalnya beserta perincian-perinciannya satu persatu, guna melihat dan mengecek apakah yang telah dia persiapkan untuk menghadapi hari esok itu.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> M. Ali Ash Shobuni, *Tafsir Fi Zilalil Quran*, Jakarta, Darul Kutub, 1999, h. 201



**“... dan Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui ...”**

Sehubungan dengan ayat diatas agar hati orang-orang yang beriman selalu waspada dan selalu ingat. Kondisi seperti ini sangat aneh namun merupakan hakikat yang nyata, karena orang-orang yang melupakan Allah pasti akan tersesat dalam kehidupan ini tanpa ikatan apapun tanpa menaikan ketinggian yang lebih tinggi, dalam sikap seperti ini manusia telah melupakan sikap manusianya sendiri, hakikat ini ditambahkan kepadanya atau ditumbuhkan dan dibangun darinya hakikat lainnya, yaitu hakikat melupakan diri sendiri.

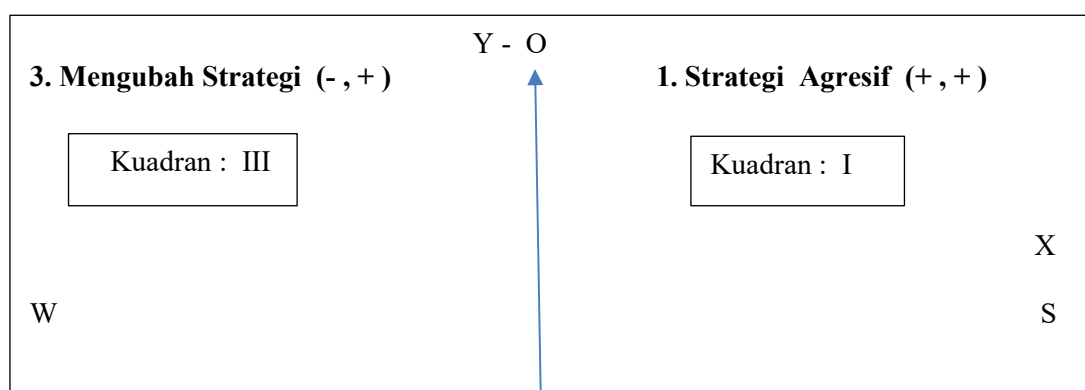
### **Positioning Kuadran Analisis SWOT**

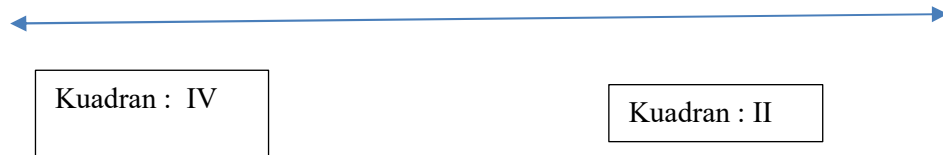
Setelah memasukkan data dalam Matriks *Internal Factors Analysis Summary* (IFAS) dan *Eksternal Factors Analysis Summary* (EFAS), tahapan kerja selanjutnya adalah : menghitung jumlah skor yang didapat dari kedua matriks tersebut. Maksud dari penghitungan ini adalah untuk mengetahui Positioning suatu wilayah atau kawasan dilihat dari posisi potensi yang ada. Positioning yang dimaksud disini adalah Positioning untuk mengetahui posisi potensi peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Serdang Bedagai. Berikut tahapan kerja untuk menentukan Positioning Kuadran SWOT.

Setelah sebelumnya membahas matriks IFAS dan EFAS, Maka dapat diketahui posisi suatu objek penelitian yang sesungguhnya. Dari matriks IFAS dapat diketahui Posisi Sumbu X (Strenghts dan Weakness). Sedangkan untuk Matriks EFAS dapat diketahui Posisi Sumbu Y (Opportunities dan Threats). Seperti yang pada Gambar berikut :

Gambar 2. 5

### **KUADRAN ANALISIS SWOT**





Sumbu X : Total Kekuatan (S) - Total Kelemahan (W)

Sumbu Y : Total Peluang (O) - Total Ancaman (T)

Berdasarkan matriks IFAS dan EFAS tersebut dapat diketahui posisi sumbu X dan posisi sumbu Y dimana menentukan posisi dikuadran SWOT. Rumusan setiap kuadran adaptasi dari penggunaan Analisis SWOT, sehingga diadaptasi dari rumusan sebagai berikut :

1. Kuadran I (Positif, Positif → SO)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang.

Rekomendasi strategi yang diberikan adalah : Progresif / Agresif. Artinya : organisasi dalam kondisi prima dan mantap, sehingga sangat memungkinkan untuk melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal.

2. Kuadran II (Positif, Negatif → ST)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat, namun menghadapi tantangan besar.

Rekomendasi strategi yang diberikan adalah : Diversifikasi.

Artinya : organisasi dalam kondisi prima dan mantap, namun menghadapi

sejumlah tantangan berat, sehingga diperkirakan roda organisasi akan mengalami kesulitan untuk terus berputar bila hanya bertumpu pada strategi sebelumnya. Oleh karena itu, organisasi disarankan untuk segera memperbanyak ragam strategi taktisnya.

### 3. Kuadran III (Negatif, Positif → WO)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah, namun sangat memiliki Peluang.

Rekomendasi strategi yang diberikan adalah : Mengubah Strategi / Turn Around, artinya : organisasi disarankan untuk mengubah strategi sebelumnya. Sebab strategi yang lama dikhawatirkan sulit untuk dapat menangkap peluang yang ada, sekaligus memperbaiki kinerja organisasi.

### 4. Kuadran IV (Negatif, Negatif → WT)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah dan menghadapi tantangan besar.

Rekomendasi strategi yang diberikan adalah : Strategi Bertahan / Defensif, artinya : kondisi internal organisasi berada pada pilihan Delematis. Oleh karenanya organisasi disarankan untuk Menggunakan Strategi Bertahan, Mengendalikan Kinerja Internal, Agar Tidak Semakin Terperosok. Strategi ini dipertahankan sambil terus berupaya membenahi diri.<sup>85</sup>

## 2. Strategi Meningkatkan Mutu Pendidikan Berdasarkan Analisis

### SWOT

Proses perencanaan strategi dalam konteks pendidikan tidak jauh berbeda dengan yang dipergunakan dalam dunia industri dan komersial. Melalui strategi sebuah institusi akan bisa yakin bagaimana memanfaatkan peluang-peluang baru dan mengembangkan rencana instansi dalam jangka panjang dan berdasarkan pertimbangan rasional.

---

<sup>85</sup> Ferddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2018, h. 20.

Strategi peningkatan mutu sekolah tidak lepas dari strategi yang dilakukan dalam rangka *Total Quality Management*. Alasan yang mendasarinya adalah :

Peningkatan mutu harus memberdayakan dan melibatkan semua unsur yang ada di sekolah.

Peningkatan mutu memiliki tujuan bahwa sekolah dapat memberikan kepuasan kepada murid, orang tua dan masyarakat.

Mengacu pada manajemen bisnis ada empat tingkatan strategi organisasi dalam peningkatan mutu di sekolah, yaitu strategi *societal*, *corporate*, perusahaan dan fungsional.

Dalam konteks organisasi sekolah, strategi *societal* berarti sekolah memberikan pendidikan yang dibutuhkan masyarakat sebagai tanggung jawab sosialnya. Sekolah menyiapkan sumber daya manusia yang berguna bagi masyarakat luas untuk menggerakkan roda ekonomi dalam berbagai sektor kehidupan. Strategi *corporate* dalam manajemen sekolah dirancang untuk menerapkan strategi sekolah dalam mencapai tujuan sesuai visi dan misi sekolah. Strategi fungsional sekolah memperhatikan formulasi strategi dalam setiap area fungsional sekolah (manajemen sekolah, manajemen kelas, layanan belajar, mutu lulusan, keuangan dan sebagainya) yang diterapkan secara bersama.

Berkaitan dengan manajemen peningkatan mutu sekolah, Usman mengatakan bahwa manajemen peningkatan mutu terkandung upaya :

- (a) Mengendalikan proses yang berlangsung di sekolah baik kurikuler maupun administrasi.
- (b) Melibatkan proses diagnosis dan proses tindakan untuk menindak lanjuti diagnosis.
- (c) Memerlukan partisipasi semua pihak baik kepala sekolah, guru, staf administrasi, peserta didik, orang tua, dan pakar.<sup>86</sup>

Kegiatan terpenting dalam proses analisis adalah memahami seluruh informasi

---

<sup>86</sup> Husaini Usman, *Manajemen: teori, praktik, dan riset pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, h. 28

yang terdapat pada suatu kasus, menganalisis situasi untuk mengetahui isu apa yang terjadi, memutuskan tindakan apa yang harus segera dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada dalam sekolah. Selesai mengumpulkan semua informasi yang berpengaruh terhadap kelangsungan organisasi sekolah, selanjutnya adalah memanfaatkan semua informasi tersebut dalam model-model kuantitatif.

Jika analisis ini digunakan dengan baik maka sekolah akan mendapat gambaran menyeluruh mengenai situasi sekolah dalam hubungannya dengan masyarakat, lingkungan sekitar, lembaga-lembaga pendidikan lain, dan jenjang lanjutan yang akan dimasuki siswa. Pemahaman mengenai faktor internal dan eksternal ini akan membantu pengembangan visi masa depan serta membuat program yang relevan dan inovatif.

## G. Penelitian Terdahulu

1). **T. Erry Nuradi (2008)**, melakukan penelitian dengan judul :

“Manfaat Pemekaran Terhadap Percepatan Pembangunan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat ”

(Studi Kasus Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat pemekaran Kabupaten Serdang Bedagai terhadap percepatan pembangunan yang terdiri dari PDRB dan PDRB perkapita, serta untuk mengetahui manfaat pemekaran Kabupaten Serdang Bedagai terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari pendapatan perkapita, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis pertumbuhan, uji beda rata-rata, dan analisis compare means uji t-statistik (Paired Sample t-test).

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pemekaran wilayah Kabupaten Serdang Bedagai **Berpengaruh Positif Dan Signifikan** terhadap pendapatan masyarakat.

**Kesamaan** dengan Penelitian yang akan dilakukan adalah : sama – sama

mengadakan penelitian di Kabupaten Serdang Bedagai. Dengan Tujuan Penelitian ingin mengetahui Manfaat otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

**Perbedaannya** : Peneliti Terdahulu Menggunakan Uji Statistik Regresi Linier Berganda. Sedang Penelitian yang akan dilakukan dengan Penelitian Kualitatif

2). **Putri Sion (2009)**, melakukan penelitian dengan judul :

“Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Nias Selatan”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kesejahteraan masyarakat sebelum dan sesudah adanya pemekaran wilayah. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis compare means uji t-statistik (Paired Sample t-test).

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pemekaran wilayah Kabupaten Nias Selatan **Berpengaruh Positif Dan Signifikan** terhadap sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan pengeluaran perkapita masyarakat. Pengaruh dominan terdapat pada sektor pendidikan.

**Kesamaan** : Sama – sama meneliti tentang Dampak Otonomi Daerah terhadap kesejahteraan masyarakat, Peneliti terdahulu menggunakan analisa Deskriptif.

**Perbedaannya** : Peneliti terdahulu, memfokuskan penelitian pada kesejahteraan masyarakat nelayan di kabupaten Nias Selatan

3). **Alinapia (2010)**, melakukan penelitian dengan judul :

“Pemekaran Daerah Dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Sumatera Utara”.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dan empiris. Penelitian deskriptif analitis ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan fungsi hukum dalam konsteks pengaturan tentang perangkat hukum yang mengatur tentang pemekaran dan otonomi daerah di Indonesia. Sedangkan deskriptif empiris dimaksudkan untuk pengungkapan kenyataan secara faktual yang

terjadi atas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemekaran daerah di Sumatera Utara dan implikasinya terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Sumatera Utara.

Dari Hasil penelitian ditemukan bahwa perangkat hukum yang mengatur pemekaran daerah dan otonomi daerah adalah undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemekaran daerah di Sumatera Utara adalah eforia demokrasi, jatuhnya orde baru ke orde reformasi, sehingga terjadi pergeseran pemahaman bahwa dengan pendeknya rentang pelayanan akan terjadi kesejahteraan masyarakat. Disamping faktor lain seperti : Luas Daerah, Budaya, Marga (Suku) Dan Faktor Historis Suatu Daerah.

Kemudian pelaksanaan pemekaran di Sumatera Utara berjalan dengan baik, demikian juga implikasi pemekaran daerah terhadap pelaksanaan otonomi daerah berjalan dengan baik, hal ini terbukti bahwa di daerah penelitian sudah ada daerah pemekaran yang dianggap sebagai daerah otonom bisa (**Kabupaten Serdang Bedagai**), dan kedua daerah penelitian tersebut juga merupakan **Daerah Sepuluh Besar Terbaik Di Indonesia Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah**, Dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tercinta ini.

Sedangkan satu lagi daerah pemekaran kota terbaik di Sumatera Utara (**Kota Padang Sidempuan**).

**Kesamaannya** : Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan analisa Deskriptif. Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.

**Perbedaannya** : peneliti terdahulu, memfokuskan penelitiannya dibidang Hukum. Sementara Penelitian yang dilakukan menitik beratkan pada Faktor Sosial, Ekonomi dan Kesehatan

**4). Nurmayana Siregar (2003)**, melakukan penelitian dengan judul :

“Analisis Sosial Ekonomi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : Karakteristik dan

Mekanisme Kerja Gelandangan dan Pengemis (GEPENG) di Kota Medan, Pengaruh Faktor – Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Alasan Mengapa menjadi GEPENG, Solusi Penanggulangan GEPENG Di Kota Medan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Metode Analisa Data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah : Metode Deskriptif untuk menganalisa permasalahan pertama dan ketiga, sedangkan untuk masalah kedua dipakai metode Regresi Linier Berganda. Berdasarkan data yang diperoleh dari penyebaran angket penelitian, kemudian diinterpretasikan sesuai dengan kebutuhan untuk dapat dipakai menjawab permasalahan yang dirumuskan.

Dari Uji Parsial diketahui bahwa : Faktor Sosial Ekonomi benar – benar berpengaruh secara signifikan terhadap alasan mengapa menjadi GEPENG (Terima  $H_1$ ). Sebab semua Nilai  $T_{Hitung}$  lebih besar dari  $T$  tabel dan Probabilitas / signifikansi jauh dibawah 0,05.

**Persamaannya** : peneliti terdahulu, Objek penelitiannya adalah Sosial Ekonomi para Gelandangan dan Pengemis di kota medan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.

**Perbedaannya** : Peneliti terdahulu menggunakan analisa kuantitatif, dengan regresi linier berganda. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan analisa kualitatif.

**5). Marthin Simangunsong (2009)**, melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Yuridis Terhadap Pemekaran Kabupaten Sedang Bedagai Ditinjau Dari Uu No. 12 Tahun 2008” .

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dan empiris. Penelitian deskriptif analitis ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan fungsi hukum dalam konsteks pengaturan tentang perangkat hukum yang mengatur tentang pemekaran dan otonomi daerah di Serdang Bedagai. Sedangkan deskriptif empiris dimaksudkan untuk pengungkapan kenyataan secara faktual yang terjadi atas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemekaran daerah di Sumatera Utara dan implikasinya terhadap pelaksanaan



otonomi daerah di Kabupaten Serdang Bedagai. Pemekaran Daerah adalah pemecahan Provinsi atau Kabupaten / Kota menjadi dua daerah atau lebih. Pemekaran Daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Semangat Otonomi Daerah dan Fenomena keiginan masyarakat pada berbagai wilayah di Indonesia. Pemekaran Kabupaten Deli Serdang menjadi Kabupaten baru, yakni Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara.

Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis dan empiris, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data mengenai pemekaran daerah, khususnya pemekaran kabupaten dan kota saat ini, serta buku-buku dan Peraturan Perundang-Undangan yang mengenai tata cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Wilayah.

**Hasil Penelitian** ini adalah : “Bahwa dalam Pemekaran suatu Daerah, baik Kota, Kabupaten, Provinsi haruslah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan pemekaran yang sesuai dengan Undang – Undang dan Peraturan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

**Kesamaanya** : Peneliti terdahulu juga mengadakan penelitian di Kabupaten Serdang dalam pelaksanaan otonomi Daerah. Analisa data yang digunakan juga analisa Deskriptif.

**Perbedaannya** : peneliti terdahulu, lebih fokus pada segi Yuridis / hukum. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus kepada Manfaat Otonomi Daerah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai.

**6). Prihariyanto (2013)**, melakukan penelitian dengan judul :

“Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Analisis Swot di SMPN 9 SALATIGA 2013”.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Strategi yang digunakan SMP Negeri 9 dalam

meningkatkan mutu adalah dengan cara memperbaiki mutu layanan melalui penerapan kurikulum SMP secara konsisten dan konsekuen. Guru yang lama harus mau berubah dalam cara mengajarnya, beradaptasi dengan kurikulum SMP yang ada.

Peningkatan batas nilai calon siswa baru yang masuk ke SMP Negeri 9 Salatiga.

Bila dilihat dari segi persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis dan Prihariyanto menyimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan penulis dan Prihariyanto sama-sama membahas tentang mutu pendidikan melalui analisis SWOT.

**7). Dian Farida (2015)**, melakukan penelitian dengan judul :

‘Analisis SWOT Program Pendidikan Sekolah Dalam Peningkatan mutu Pendidikan di SMK 5 Yogyakarta 2015’.

Berdasarkan penelitiannya dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian menunjukkan upaya sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah yaitu dengan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk peserta didik dan mengadakan Diklat untuk pendidik/tenaga kependidikan, mengadakan sumbangan buku untuk kelas IX dalam rangka menambahkan koleksi buku yang ada di perpustakaan SMK Negeri 5 Yogyakarta.

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Farida lebih menitik beratkan Program yang perlu dicapai, berbeda dengan penulis yang lebih mencari Strategi untuk meningkatkan Mutu Pendidikan. Tetapi sama – sama menggunakan Analisis SWOT.

**8). Aswiwin (2017)**, melakukan Penelitian Disertasi dengan judul :

‘Penataan Hukum Sistem Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia’.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menjelaskan dan menemukan Model Sistem Otonomi Daerah Dalam mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia, berdasarkan aspek Filosofi, Yuridis, Sosiologis dan politis berkenaan

dengan pemberlakuan hukum sistem otonomi, serta hubungan kewenangan, keuangan, pemberdayaan masyarakat dalam menyelenggarakan kebijakan sistem otonomi di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, data analisis dengan pendekatan deskriptif yuridis dan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan sistem otonomi di Indonesia belum efektif. Landasan keberlakuan hukum sistem otonomi yakni landasan Filosofi, Yuridis, Sosiologis dan politis kurang dipertimbangkan dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Jo. Undang – Undang No. 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah yang berlaku saat ini sehingga, melemahkan eksistensi otonomi. Tingkat kesejahteraan masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi di Indonesia saat ini belum optimal, karena adanya kewenangan daerah yang bersifat strategis ditarik oleh pemerintah pusat, khususnya pada sektor sumber daya alam. Hal tersebut dapat menghilangkan sumber pendapatan daerah. Model otonomi yang ada saat ini belum optimal dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, karena Undang – Undang Pemerintahan Daerah masih menganut penyeragaman urusan pemerintah, sedangkan otonomi yang bersifat khusus masih berlandaskan pada aspek Politik-Historis. Oleh karena itu direkomendasikan agar Redisain dengan **Model Otonomi Multi Dimensi** yang berlandaskan pada kondisi, karakteristik, kearifan lokal dan kemampuan daerah masing – masing, sehingga tercapai pemerintahan daerah yang mandiri dan mensejahterakan rakyat.

Penelitian yang dilakukan oleh Aswiwin lebih menitik beratkan Program yang perlu dicapai dengan redisain model agar Redisain dengan Model Otonomi Multi Dimensi yang berlandaskan pada kondisi, karakteristik, kearifan lokal dan kemampuan daerah masing – masing, sehingga tercapai pemerintahan daerah yang mandiri dan mensejahterakan rakyat. Sementara Penulis lebih mencari Strategi untuk meningkatkan Mutu Pendidikan.

**9). Hartono (2015)**, Dalam sebuah Jurnal Penelitian Ilmiah : Jurnal Potensia Vol. 14 Edisi 1 Januari – Juni 2015 di Universitas Islam Negeri Suska Riau,

dengan judul : “Otonomi Pendidikan”.

Tulisan ini bertujuan membahas plus minusnya pelaksanaan otonomi pendidikan di lembaga pendidikan serta realisasi kegiatan dimaksud. Otonomi pendidikan dimaksudkan sebagai pemberian sebagian wewenang dalam pengelolaan pendidikan kepada daerah, tanpa mengabaikan wewenang pusat dan standarisasi nasional. Nilai lebih dari otonomi pendidikan dapat dilihat dari kemandirian Sumber Daya Manusia yang ada di daerah dalam mengelola pendidikan dan masyarakat daerah dapat merasa memiliki hasil pembangunan pendidikan di daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Efek negatif yang mungkin menjadi minus bagi pelaksanaan otonomi pendidikan adalah kemungkinan terjadinya arogansi daerah, yang disebabkan perbedaan mencolok antar berbagai daerah yang ada. Realisasi otonomi pendidikan di Indonesia dapat dari manajemen berbasis sekolah, dimana pengambilan keputusan yang semula berada di Pusat /Kanwil/Kandep kelevel sekolah dan pendidikan berbasis masyarakat, dimana masyarakat sebagai elemen sosial diberdayakan melalui peran serta mereka dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan dengan membentuk komite sekolah. Persamaan penelitiannya adalah : sama – sama membahas tentang Plus minus pelaksanaan Otonomi Pendidikan sebagai tindak lanjut dari Pelaksanaan Otonomi daerah. Perbedaannya : Peneliti Terdahulu Fokus pada Plus minus Otonomi Pendidikan, Sementara Penulis selain Fokus pada Plus Minus Otonomi Pendidikan juga mencari Strategi untuk meningkatkan Mutu Pendidikan di Kabupaten Serdang Bedagai.

**10). Dewi Hasanah (2018)**, Dalam sebuah Jurnal Pendidikan Agama Islam : Jurnal AT – TA’LIM, Vol. 5 Edisi 1, Januari – Juni 201 di Universitas Islam Negeri Jambi, dengan judul : “Otonomi Pendidikan Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan”.

Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan manusia, karena pendidikan berfungsi sebagai pengembangan pengetahuan, keterampilan, nilai dan kebudayaan. Keberhasilan pembangunan

pendidikan menjadi satu faktor penentu tercapainya kemampuan suatu negara dan karenanya pemerintah kita sangat kosen dengan aspek pendidikan bagi setiap warganya. Namun kenyataannya, berbagai upaya dilakukan belum mampu meningkatkan mutu pendidikan dan mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional yang dicita – citakan tertuang dalam UU Sisdiknas. Sebaliknya berbagai kritikan dari beragam kalangan tentang rendahnya mutu pendidikan terus bermunculan sejalan dengan spirit reformasi bidang pendidikan yang mulai menggema semenjak krisis multi dimensi melanda Indonesia. Pemberlakuan sistem desentralisasi dengan dikeluarkannya Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi daerah telah menjadi agenda penting dalam kebijakan pemerintahan, memberi dampak dalam sektor pendidikan, yaitu pelaksanaan pada manajemen pendidikan, dengan memberi gerak yang lebih luas kepada pengelola pendidikan. Otonomi dibidang pendidikan, merupakan upaya pengelolaan pendidikan didaerah dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri.

Melalui tema ‘Desentralisasi’ terdapat isyarat pengalihan tanggung jawab dari pemerintah pusat dalam hal : Perencanaan, Pengelolaan, Pengalihan Dana dan Alokasi Sumber Daya Pendidikan kepada pemerintah daerah. Keputusan – keputusan desentralisasi secara tidak langsung terhadap komponen program pendidikan baik yang bersifat umumnya, maupun yang bersifat khusus, terutama : kurikulum, rekrutmen siswa dan sumber daya guru dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana. Mengacu pada kepentingan bangsa dalam arti luas, bukan atas kepentingan pribadi atau golongan atau kepentingan pemerintah pusat, maka sekolah sebagai tonggak terdepan dalam menyelenggarakan otonomi pendidikan, hendaklah mengimplementasikan upaya sepenuh hati dan konsisten dalam rangka mengangkat harkat dan martabat bangsa dan masyarakat yang berbudaya dan mampu menunjukkan keunggulannya dalam persaingan di era globalisasi.

Persamaan Penelitian : Sama – Sama Menetapkan Upaya meningkatkan Mutu Pendidikan. Perbedaanya : Penulis, selain Menetapkan Upaya meningkatkan Mutu Pendidikan, juga mengkaitkannya dengan Analisis Pelaksanaan Otonomi

Daerah. Juga menggunakan Analisis SWOT.

**11). Yoyon Suryono (2020)**, Dalam sebuah Jurnal Pendidikan : *Dinamika Pendidikan*, No. 2 / Tahun 2020 di Universitas Negeri Yogyakarta, dengan judul : “Arah Kebijakan Otonomi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah”.

Kemampuan ekonomi dan keuangan suatu daerah otonom merupakan sisi strategis dalam implementasi otonomi daerah berkenaan dua hal : Bertambahnya kewenangan yang harus dijalankan dan kewajiban menggali sendiri sumber – sumber dana yang diperlukan sejalan dengan menipisnya alokasi dana dari pemerintah pusat. Hal terakhir ini dirasakan akan sangat berpengaruh terhadap usaha yang sedang dilakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan sebagai bahagian penting dari otonomi pendidikan.

Implementasi otonomi daerah membawa konsekuensi perlunya memikirkan arah kebijakan otonomi pendidikan dalam konteks otonomi daerah dan tuntutan perkembangan pendidikan itu sendiri, secara inherent yang saat ini sedang dihadapkan pada persoalan rendahnya mutu pendidikan hampir disegala jenis dan jenjang pendidikan. Otonomi pendidikan yang muncul dalam konsep *School Base Management* untuk persekolahan dan otonomi untuk ‘Menyelenggarakan Sendiri’. Perguruan tinggi memerlukan operasionalisasi yang tepat atas dasar arah kebijakan yang jelas berupa : orientasi kepada mutu, adanya partisipasi masyarakat, pendidikan harus menjadi prioritas pada skala nasional, daerah dan lokal, tempat yang tepat untuk penataan kelembagaan, disertai tumbuhnya akuntabilitas, menempatkan pendidikan tinggi sebagai asset nasional yang memiliki kekuatan moral, ekonomi dan bahkan politik dalam mewujudkan : ‘Clean Government and Good Governance’, pemerintah yang bersih, bebas praktek Kolusi, Korupsi dan Nopotisme.

Secara umum, otonomi pendidikan menuju pada upaya meningkatkan mutu pendidikan sebagai jawaban atas ‘Kekeliruan’ kita lebih dari dua puluh tahun, bergelut dengan persoalan – persoalan kuantitas. Pada sisi otonomi

daerah, otonomi pendidikan mengarah pada menipisnya kewenangan pusat dan membengkaknya kewenangan daerah otonom (baik Provinsi, Kabupaten, maupun Kota) atas bidang pemerintahan berlabel pendidikan yang harus disertai dengan tumbuhnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Pada gilirannya, otonomi pendidikan dalam konteks otonomi daerah menempatkan kepentingan ekonomik dan finansial sebagai kekuatan tarik menarik antara pemerintah daerah otonom dengan institusi pendidikan, tugas perbantuan sebagai pilar otonomi melalui pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan berperan menetralsir kekuatan tarik menarik itu.

Masih dalam konteks otonomi daerah, kejelasan ‘tempat’ institusi-institusi pendidikan perlu diformulasikan agar otonomi pendidikan dapat berjalan pada relnya. Dalam Format otonomi daerah, daerah provinsi memiliki otonomi terbatas, sedangkan daerah kabupaten dan daerah kota memiliki otonomi luas dan utuh.

Pada tingkat persekolahan, otonomi pendidikan berjalan atas dasar desentralisasi dan prinsip ‘*School Base Management*’ pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, penataan kelembagaan pada level tempat yang tepat menjadi faktor kunci keberhasilan otonomi pendidikan.

Sudah selayaknya bahwa kebijakan otonomi pendidikan harus bergandengan dengan kebijakan akuntabiliti terutama yang berkaitan dengan mekanisme pendanaan atau pembiayaan pendidikan.

Pada tingkat pendidikan tinggi, kebijakan otonomi pendidikan masih tetap berada dalam kerangka otonomi keilmuan terbatas, pengelolaan perguruan tinggi dan otonomi perguruan tinggi menuju perguruan tinggi berbadan hukum dalam wacana paradigma baru manajemen pendidikan tinggi yang format implementasinya masih dalam pencarian bentuk.

Dalam konteks otonomi daerah, kebijakan otonomi pendidikan tinggi, dapatlah ditempatkan pada yang semestinya, bukan pada kepentingan daerah semata – mata, karena pada kenyataannya bahwa pendidikan tinggi adalah asset nasional.

Secara makro, apapun muatan yang terkandung didalamnya, otonomi pendidikan tinggi haruslah menonjolkan keunggulan – keunggulan perguruan tinggi, baik sebagai kekuatan moral, kekuatan ekonomi, bahkan bisa jadi kekuatan politik yang mampu mewarnai mozaik perjalanan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta.

**Persamaannya :** Peneliti Terdahulu juga Mengkritisi pelaksanaan Otonomi Daerah yang dilanjutkan dengan Otonomi Pendidikan.

**Perbedaannya :** Peneliti menggunakan Analisis SWOT, sebagai Pisua Analisisnya.

**12). Marsus Suti (2020),** Dalam sebuah Jurnal Pendidikan, dengan judul : ‘Strategi Peningkatan Pendidikan di Era Otonomi Pendidikan’.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk memberikan wawasan atau pandangan kepada pembaca, pengamat, akademisi dan praktisi pendidikan, untuk memahami bagaimana menemukan solusi terbaik dalam mengembangkan kualitas pendidikan di era otonomi daerah dan otonomi pendidikan, melalui penerapan prinsip – prinsip manajemen yaitu : Tata pemerintahan yang baik, Efisiensi Internal dan Eksternal pendidikan. Melalui tiga pendekatan :

- (1). Pengembangan kapasitas lembaga dan semua program dibidang pendidikan dapat dilaksanakan.
- (2). Pengembangan kualitas pendidikan melalui input, proses dan out put berdasarkan otonomi daerah.
- (3). Manfaat dan dampak hasil pengembangan pendidikan dasar terhadap otonomi daerah .

Peneliti Terdahulu, ini mendeskripsikan strategi peningkatan mutu pendidikan di era otonomi pendidikan, sedangkan Penelitian Penulis memaparkan Analisis pelaksanaan otonomi daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai. Dengan menggunakan Analisis SWOT.



**13). Anik Indrawati (2020)**, Dalam sebuah Jurnal Pendidikan Islam , dengan Judul : “Pengaruh Kualitas Layanan Lembaga Pendidikan Terhadap Kepuasan Konsumen Di Kota Malang”’.

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada gagasan tentang pertumbuhan cepat anggota industri jasa di kota Malang, khususnya lembaga pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dimensi kualitas layanan (Keandalan, Bukti Fisik, Responsif, Assurance, Emphaty) dan kepuasan pelanggan pada Arithmetic Mental Education Institutions di kota Malang. Hasil dari penelitian ini adalah :

- (1). Lima dimensi kualitas layanan (Keandalan, Bukti Fisik, Responsif, Assurance, Emphaty) memiliki signifikansi tidak dapat memberikan efek positif pada kepuasan pelanggan lembaga pendidikan.
- (2). Arithmetic Mental lembaga pendidikan di kota malang belum memenuhi harapan kepuasan pelanggan.

Penelitian ini mendiskripsikan pengaruh kualitas layanan lembaga pendidikan terhadap kepuasan konsumen, sedangkan penelitian penulis, memaparkan Peningkatan Mutu Pendidikan di era otonomi daerah, Dengan SWOT Analysis.

**14). Muhammad Fadli (2019)**, melakukan penelitian dengan judul : “Manajemen Mutu Pendidikan Di Indonesia “.

Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia sebenarnya merupakan diskusi yang sudah berlangsung lama, namun belum terselesaikan. Pendidikan yang berkualitas adalah harapan dan permintaan semua pemangku kepentingan pendidikan. Setiap orang tentu saja akan lebih menyukai pengetahuan tentang institusi yang memiliki mutu yang baik. Atas dasar ini, sekolah / lembaga pendidikan harus mampu memberikan pelayanan dan mutu yang baik agar tidak ketinggalan dan mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya. Dari berbagai pandangan, kriteria dan indikator yang dapat kita ambil pemahaman, bahwa pendidikan pendidikan berkualitas dapat ditingkatkan jika sekolah memiliki :

- (1). Dukungan dari pemerintah.

- (2). Kepemimpinan Kepala sekolah yang efektif.
- (3). Kinerja guru yang baik.
- (4). Kurikulum yang relevan.
- (5). Lulusan yang berkualitas.
- (6). Budaya dan iklim organisasi yang efektif.
- (7). Dukungan masyarakat dan orang tua.

Implementasi manajemen dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah solusi nyata yang diharapkan mampu mengelola indikator mutu pendidikan untuk bekerjasama dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian ini memaparkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, sedangkan penelitian penulis adalah memaparkan Peningkatan Mutu Pendidikan di era otonomi daerah.

**15. Hartati Muchtar (2018)**, melakukan penelitian dengan judul : ‘Penerapan Penilaian Autentik dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional‘.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan nasional, yang diperlukan dalam membangun bangsa dan negara Republik Indonesia. Namun pemahaman dan bagaimana mengukur mutu pendidikan yang benar dan dapat dipercaya, masih menjadi bahan diskusi yang tak berkesudahan. Mutu pendidikan secara nasional pada dasarnya adalah cerminan dari hasil belajar setiap siswa. Oleh karena itu, berbagai teknik dan bentuk penilaian dibuat untuk memperoleh hasil belajar peserta didik yang dapat dipertanggung jawabkan dan benar – benar dapat menggambarkan kemampuan peserta didik yang dapat menggambarkan kemampuan peserta didik secara keseluruhan. Tulisan ini membahas pemahaman dan teknik pengukuran mutu pendidikan. Dari teknik yang tersedia, penilaian Autentik dianggap digunakan oleh guru dan lembaga pendidikan dalam gambaran umum tentang mutu pendidikan yang diperoleh peserta didik dan kualitas pendidikan secara nasional. Penelitian ini memaparkan penerapan penilaian autentik dalam upaya peningkatan mutu

pendidikan, sedangkan penulis memaparkan Analisis pelaksanaan otonomi daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai.

**16. Chairus Suryati (2012)**, Universitas Medan Area, Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum, melakukan penelitian dengan judul : “Aspek Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menyelenggarakan Pendidikan berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah”.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keaneka ragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sebuah peradaban disebuah negara. Karena salah satu ciri negara maju adalah bagaimana pendidikan bisa menjadi prioritas dalam sebuah agenda pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Metode penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis data primer dan didukung data sekunder dengan diberlakukannya otonomi daerah sejak 1 Januari 2000, persoalan pendidikan kini menjadi persoalan sentral yang akan sangat berpengaruh bagi kemajuan suatu daerah diseluruh wilayah tanah air Indonesia. Oleh sebab itu dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang lebih bermutu serta mampu menjawab tantangan masa depan, pemerintah harus memiliki **Kerangka Sistem Pendidikan Nasional** yang akan dijadikan sebagai dasar acuan pelaksanaan kegiatan pendidikan secara menyeluruh disegenap wilayah tanah air Indonesia. Pemerintah Kota/Daerah khususnya Binjai dalam menentukan

kewenangan didalam merencanakan tujuan kerja daerahnya masing-masing harus melibatkan instansi/dinas terkait. Sehingga antara pemerintahan dengan instansi/dinas ada kerjasama yang baik dalam melaksanakan segala kegiatan atau tugasnya masing-masing. Sehingga apa yang menjadi tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dapat terlaksana. Persamaannya adalah : Peneliti Terdahulu juga membahas Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Perbedaanya : Peneliti Terdahulu hanya memaparkan secara Deskriptif saja, sementara Penulis menganalisa data yang dengan menggunakan SWOT Analisis. Demi mencari Solusi yang tepat untuk meningkatkan mutu Pendidikan di Kabupaten Serdang Bedagai.

**17. Mayor Chaval Chompucot (2011)**, melakukan penelitian dengan judul :“Major Factors Affecting Educational Policy Implementattion Effectiveness for the Three Southernmost Provinces of Thailand as Percaived by School Directors of Public Administration, National Institute of Development Administration”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat efektivitas implementasi kebijakan pendidikan dan mempelajari faktor-faktor utama yang mempengaruhi efektivitas kinerja dalam kepemimpinan sekolah. Dengan temuan penelitian :

- (1) Efektivitas implementasi kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi tujuh factor terutama kepedulian terhadap keselamatan.
- (2) Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis pada bidang implementasi kebijakan sehingga model implementasi harus mempertimbangkan kondisi lokal yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.
- (3) Kepedulian terhadap faktor keamanan yang belum disebutkan dalam setiap model implementasi kebijakan sebelumnya memiliki dampak besar pada kebijakan di wilayah yang diteliti.

Penelitian ini memfokuskan pada efektivitas implementasi kebijakan pendidikan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih

menekankan pada implementasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan tinggi, namun teori-teori yang dipergunakan pada penelitian terdahulu ini sangat membantu untuk memperkaya teori implementasi kebijakan yang akan dikaji oleh peneliti.

**18). Arbel Gane dan David Nachmias (2008)**, melakukan penelitian dengan judul : “Policy Implementation in Israel ; The Loss of Governmental Capacity, The Interdisciplinary center, Herzliyn Israel”.

Penelitian ini bertujuan membahas kapasitas pemerintahan dan menilai faktor-faktor yang mencegah pemerintah Israel untuk mencapai tujuan mereka. Temuan dalam penelitian ini adalah :

- (1) Sukses implementasi tergantung pada negosiasi yang dilakukan antara pembuat kebijakan. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan komunikasi dengan mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
- (2) Kurangnya stabilitas kelembagaan yang melekat dalam struktur rezim pimpinan terpilih untuk membuat keputusan sangat tergantung pada kepentingan pemerintah.

Penelitian ini membahas bahwa implementasi kebijakan di Israel dapat terlaksana apabila menggunakan pendekatan komunikasi sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak hanya berfokus pada komunikasi yang dilakukan melainkan pada konten dan konteks kebijakan serta sumber daya yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai.

**19). Brigitte Smith (2003)**, melakukan penelitian dengan judul : “Can Qualitative Research Inform Policy Implementation/Evidence and Arguments from a Developing County Context”.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas kemungkinan penelitian kualitatif diterapkan pada implementasi kebijakan pendidikan. Relevansi antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah kemungkinan dilakukannya penelitian kualitatif pada implementasi

kebijakan pendidikan pada sebuah Negara berkembang, hal ini sangat cocok dengan metode yang digunakan peneliti yaitu pendekatan kualitatif dan teknik wawancara mendalam terkait dengan implementasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan. Kabupaten Serdang Bedagai

**20). Winsomme Chunnu Brayda (2012)**, melakukan penelitian dengan judul : “Quering Top-Down Bottom-up Implementation Guidelines : Education Implementation in Jamaica”,

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pendekatan implementasi top down dan bottom up serta teori model politik. Hasil penelitian ini :

- (1) Difusi langkah kebijakan yang terkait dengan implementasi sangat ditentukan komunikasi guru.
- (2) Kurangnya komunikasi dimana sebagian guru mengatakan bahwa mereka tidak diminta untuk memberikan pendapatnya sebelum kebijakan diimplementasikan.
- (3) Kurangnya sumber daya manusia, dimana alokasi dan potensi sumber daya memiliki dampak yang jelas pada proses implementasi.

Anggapan penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan penulis, karena temuan penelitian ini menyatakan bahwa komunikasi dan sumber daya manusia serta difusi langkah kebijakan merupakan hal terpenting dalam organisasi pendidikan, sementara penulis beranggapan bahwa keberhasilan peningkatan mutu pendidikan ditentukan oleh kebijakan peningkatan mutu pendidikan itu sendiri, baik konteks dan konten kebijakan tersebut, sedangkan teori Top Down dan Bottom Up pada implementasi kebijakan dapat menjadi perbandingan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Serdang Bedagai Khususnya dan Indonesia pada umumnya.

**21). Jhon Simth Gourth (2015)**, melakukan penelitian dengan judul : “Decentralized Policy Implementatio” (Political Research Quarterly), Proquest

Social Science’.

Artikel ini mengembangkan model pemisahan implementasi kebijakan desentralisasi untuk mengintegrasikan dua pendekatan yang bersumber pada ketegangan antara fleksibilitas lokal dan kontrol yang dilakukan secara nasional. Temuan penelitian ini memperkirakan kedua model yang secara bersamaan menunjukkan bahwa setiap kebijakan perlu dilakukan pemetaan dalam implementasinya. Hal ini diperlukan karena kebijakan ditingkat regional dan ditingkat nasional respon masyarakat dan kontribusi kebijakan tersebut juga akan berbeda.

Oleh karena itu pelaksanaan undang-undang primer merupakan implementasi kebijakan yang bersifat desentralisasi, artinya, Kebijakan Desentralisasi harus dilakukan dengan sepenuhnya, dengan memberikan Wewenang kepada daerah untuk mengurus dirinya sendiri. Namun pusat juga masih harus menjadi pengontrol atas pelaksanaan desentralisasi yang diimplementasikan berdasarkan kondisi masyarakat lokal. Begitu juga dengan Peneliti, berpendapat bahwa desentralisasi bukan kebebasan tanpa batas, sehingga bermunculan raja – raja kecil di daerah. Melainkan harus tetap ada kemesraan antara pemerintah pusat dan daerah, demi kemajuan NKRI tercinta.

**22).Nuria Siswi Enggarani (2014)**, melakukan penelitian Disertasi (Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta) dengan Judul :

“Analisis Otonomi Daerah Dalam Memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Juncto Undang - Undang No 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah)”.

Penelitian ini bertujuan mengkaji otonomi daerah di Indonesia dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UU No 32/2004. Mengkaji ketentuan UU No 32/2004 memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menemukan model otonomi daerah yang dapat memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memfokuskan pada data kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan penalaran deduktif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan asas-asas hukum, sistematika peraturan perundang - undangan, penelitian terhadap taraf sinkronisasi dari peraturan perundang - undangan, penelitian terhadap sejarah hukum serta menggunakan penafsiran hukum.

Urusan dan pengawasan merupakan elemen yang paling penting dalam rangka menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan dasar bagi diterapkannya otonomi luas. Indikator yang digunakan untuk mengetahui bahwa UU No 32/2004 dapat menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau tidak adalah dilihat dari elemen urusan dan pengawasan. Penulis melihat urusan dan pengawasan dalam ketentuan UU No 32/2004 menimbulkan asumsi penafsiran yang mengarah pada kecenderungan menguatkan kearah federalisme dan menguatkan kearah resentralisasi yaitu :

- (1) Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan rumah tangga dengan asas otonomi bukan asas desentralisasi.
- (2) Penggunaan otonomi seluas-luasnya.
- (3) Penggunaan prinsip kewenangan sisa.
- (4) Perincian urusan wajib dan pilihan yang sama baik bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (5) Penggunaan urusan yang bersifat *concurrent* untuk urusan wajib dan pilihan.
- (6) Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan wajib.

Penyebab Otonomi Daerah Menurut UU No 32/2004 Tidak menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah :

- (1) Konsep pemberian kewenangan menurut UU No 32/2004 yang dirumuskan dalam bentuk kewenangan sisa (*residu power*) mengarah pada federalism.
- (2) Penggunaan asas otonomi dan otonomi seluas-luasnya pada awalnya lahir berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 tentang pemberian



otonomi seluas-luasnya kepada daerah, dapat membahayakan keutuhan NKRI karena otonomi seluas-luasnya diartikan secara salah berkaitan dengan jumlah urusan rumah tangga suatu daerah.

- (3) Pola pembagian kewenangan diperinci dan dibagi bersama / *concurrent*, serta pengawasan terhadap pelaksanaan urusan wajib menyebabkan pengekan terhadap kebebasan dalam berotonomi.
- (4) UU No. 32/2004 Mengadopsi kebebasan untuk menentukan jenis otonomi.

Model otonomi yang menguatkan Negara kesatuan terletak pada sistem pembagian urusan dan pengawasan :

- (1) Model otonomi yang menguatkan negara kesatuan terletak pada pembagian kewenangan dengan mengubah system otonomi seluas-luasnya menjadi otonomi kesejahteraan nasional, focus dan bertanggung jawab.
- (2) Sistem pembagian urusan diberi frase “tambahan kewenangan lain” bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dan diperinci tetapi focus sesuai dengan acuan dalam penyusunan system pembagian urusan pusat dan daerah. Pembagian urusan yang bersifat *Concurrent* hanya terletak pada urusan pemerintah dalam rangka menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak *concurrent* pada semua bidang urusan baik pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Penggunaan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan secara seimbang.
- (4) Pengawasan represif dan pengawasan prefentif tetap diperlukan dan pengawasan prefentif tidak hanya ditujukan terhadap rancangan peraturan daerah yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD dan RUTR saja namun ditujukan terhadap semua jenis rancangan peraturan daerah dalam rangka menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tetapi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan wajib, dihapus karena pengawasan telah dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah.

Kedudukan provinsi sebagai daerah otonom dihapus provinsi hanya berkedudukan sebagai wilayah administratif saja dan Bentuk otonomi yang dapat menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah otonomi daerah dalam bentuk otonomi luas dan otonomi khusus atau desentralisasi asimetris. Desentralisasi asimetris tersebut dilakukan untuk memperkuat integrasi nasional sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menempatkan hukum dan demokrasi sebagai pilar utamanya, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, dengan tetap menjaga nilai-nilai keberaneka ragaman daerah, baik dalam bentuk keistimewaan ataupun kekhususan.

**Kesamaanya** : Peneliti terdahulu juga membahas tentang pelaksanaan Otonomi Daerah. Analisa data yang digunakan juga Analisa Deskriptif.

**Perbedaannya** : Peneliti terdahulu, lebih fokus pada segi Yuridis / Hukum. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus kepada Manfaat Otonomi Daerah Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai.

**Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu antara lain :**

1. Lokus : Penelitian Di Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Tahun Pelaksanaan Penelitian : 2021 s / d 2022
3. Fokus : Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Serdang Bedagai
4. Metode Analisa Data Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian Studi Empiris yang bersifat Deskriptif Analitis Kualitatif dengan Menggunakan Analisis SWOT. Serta Membahas dan Menyimpulkan Dampak Negatif Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Otonomi Pendidikan.

## **H. Kerangka Pemikiran**

Otonomi Daerah pada hakekatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Otonomi Daerah memiliki nilai strategis dalam

mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Hal tersebut mempunyai dampak penting bagi kemajuan suatu daerah baik dalam bidang ekonomi jelas berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan pada prinsipnya memiliki arti luas, secara sederhana pembangunan adalah perubahan kearah lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya. Dilaksanakannya proses pembangunan tidak lain karena ada perasaan tidak puas dari individu maupun masyarakat dari keadaan yang dialami saat ini. Namun demikian, perlu didasari bahwa pembangunan adalah sebuah proses evolusi, sehingga perlu adanya tindakan secara bertahap sesuai dengan sumber daya yang dimiliki terhadap setiap masalah yang sedang dihadapi.

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiraan yang mengidentikan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangun dengan westernisasi. Seluruh pembangunan tersebut didasarkan pada aspek kehidupan masyarakat. Maka makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/ perbaikan, dan pertumbuhan Ekonomi masyarakat, sehingga terwujud Kesejahteraan Masyarakat, dengan membuat batasan Pemikiran sebagai berikut :

#### **1. Otonomi Daerah** adalah :

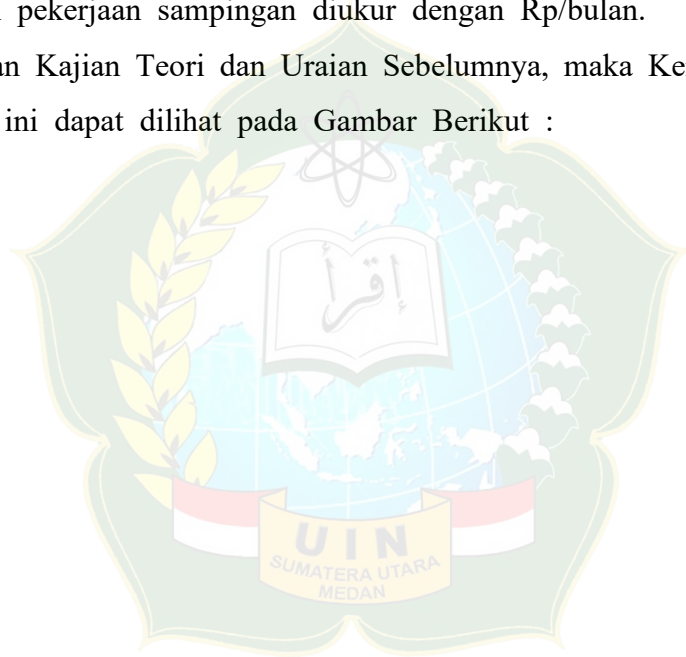
Pemisahan diri suatu daerah dari induknya dengan tujuan mendapatkan status yang lebih tinggi untuk meningkatkan pembangunan daerahnya. Sehingga Otonomi Daerah tersebut diharapkan memiliki dampak yang mempunyai pengaruh kuat dan dapat menimbulkan akibat sebagai berikut :

- a). Meningkatkan Sarana Pendidikan.** Maksudnya dengan Otonomi Daerah diharapkan dapat menciptakan suatu peningkatan pendidikan dan perluasan wajib belajar mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi.
- b). Meningkatkan Sarana Kesehatan.** Maksudnya dengan Otonomi Daerah diharapkan adanya tambahan fasilitas kesehatan yang dapat menunjang

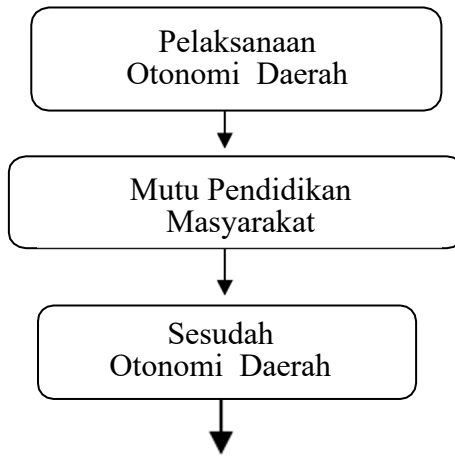
tingkat kesehatan masyarakat seperti tersedianya sebuah gedung kesehatan yang dapat memungkinkan meningkatnya mutu pelayanan terhadap kesehatan masyarakat, karena salah satu alasan Otonomi Daerah adalah pelayanan Publik dan dengan Otonomi Daerah Ini Masalah Tersebut Dapat Teratasi Dengan Baik.

- c). **Pendapatan** yang dimaksud adalah pendapatan masyarakat setiap bulannya yang diterima oleh kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya di Kabupaten Serdang Bedagai sebagai yang bekerja baik dari pekerjaan utama maupun pekerjaan sampingan diukur dengan Rp/bulan.

Berdasarkan Kajian Teori dan Uraian Sebelumnya, maka Kerangka Pemikiran Penelitian ini dapat dilihat pada Gambar Berikut :



**Gambar : 2. 6. Kerangka Pemikiran**



Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai



## METODOLOGI PENELITIAN

### A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan dalam Sebelas Bulan terhitung Sejak Tanggal 05 Januari s/d 30 November 2021.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Serdang Bedagai pada kecamatan **Perbaungan, Dolok Masihul dan Bandar Khalifah**. Daerah-daerah ini dianggap dapat mewakili 17 kecamatan yang ada, menggunakan Teknik Purposive Sampling, dengan alasan : Kecamatan Perbaungan mewakili kecamatan yang tingkat kesejahteraannya tinggi, Kecamatan Dolok Masihul mewakili kecamatan yang tingkat kesejahteraannya menengah dan Kecamatan Bandar Khalifah mewakili kecamatan yang tingkat kesejahteraannya rendah. Seperti terlihat dari table berikut :

Table – 3.6  
Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera  
Menurut Kecamatan Tahun 2019  
di Kabupaten Serdang Bedagai

No	Kecamat an	Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera					Jumlah
			I	II	III	III +	JLH	
1	Kotarih	799	4.867	3.153	1.364	252	9.636	10.435
2	Silinda	1.299	2.693	9.199	13.374	2.047	27.313	28.612
3	Bintang Bayu	1.783	2.640	3.723	2.739	380	9.482	11.265
4	Dolok Masihul	1.229	2.016	2.275	3.763	858	15.912	10.141
5	Serbajadi	1.567	1.238	4.970	1.194	353	7.755	9.322
6	Sipispis	1.280	1.570	2.896	902	165	5.533	6.813
7	Dolok Merawan	174	457	2.295	1.950	190	4.892	5.066
8	Tebing	644	2.436	2.566	3.223	27	8.252	8.896

	Tinggi							
9	Tebing Syahbandar	1.173	1.583	7.451	2.180	642	11.856	13.029
10	Bandar Khalifah	152	422	1.356	310	126	2.214	2.366
11	Tanjung Beringin	161	480	634	972	298	2.384	2.545
12	Sei Rampah	309	1.065	2.290	1.857	168	5.379	5.688
13	Sei Bamban	762	1.128	3.137	4.767	1.527	10.559	11.321
14	Teluk Mengku du	444	880	3.855	2.826	51	7.612	8.056
15	Perbau ngan	766	801	1.118	6.378	8.138	16.435	17.201
16	Penggajaan	593	1.350	3.187	2.367	1.017	7.921	8.514
17	Pantai Cermin	210	701	1.639	717	72	3.129	3.339
	Jumlah	13.345	28.327	60.744	50.883	9.310	149.264	162.609

Sumber : BPS Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020

## B. Teknik Pengumpulan Data Penelitian.

Metode pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standard untuk mendapatkan data yang diperlukan, baik data Primer maupun data skunder, maka digunakan beberapa pendekatan yang lazim dilakukan dalam penelitian kualitatif.<sup>87</sup>

### 1. Data Primer

<sup>87</sup> Ibid, h. 50 - 97

Beberapa cara dalam pengumpulan data Primer antara lain :

#### **a. Teknik Observasi**

Yaitu : melakukan Pengamatan secara langsung kelapangan untuk melihat situasi dan kondisi ”**Mutu Pendidikan Masyarakat** ” secara sistematis sesuai dengan permasalahan penelitian.

#### **Pra Observasi**

Penulis pernah bertugas di Kabupten Serdang Bedagai, tepatnya di Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dari **Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2010**, sebagai **Kepala Seksi Program di UPTD Panti Sosial Bina Karya (PSBK) Sungai Buluh**, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai **Sebelum Menjadi Widyaiswara**. Sebagai seorang Pekerja Sosial, Penulis kerap kali terjun langsung kelapangan, sampai Kepelosok Desa. Saat itu Penulis melihat ada sekitar 10% anak putus sekolah, dikarenakan orang tua mereka tidak mampu dan sarana prasana sekolah yang kurang memadai. Sehingga mereka terpaksa menjadi buruh pengumpul brondolan sawit, guna membantu ekonomi keluarganya.

#### **Observasi**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Observasi Partisipatif, untuk memahami Pola, Norma dan makna perilaku dari Key Informan yang diteliti dilokasi Penelitian. Dengan mengobservasi dan wawancara :

- 1) Kelompok A, Pejabat Stuktural dan Jajarannya dibidang Pendidikan
- 2) Kelompok B, Guru Bidang Studi
- 3) Kelompok C, Orang Tua Murid / Komite Sekolah
- 4) Kelompok D, Siswa / Ketua OSIS
- 5) Kelompok E, Masyarakat
- 6) Kelompok F, Para Tokoh : Agama dan Adat

#### **b.Wawancara**

Yaitu : Melakukan **Komunikasi secara langsung** kepada para Responden / Kelompok Key Informan, dengan mengajukan sejumlah Pertanyaan yang menyangkut permasalahan penilitian. Wawancara ini dilakukan untuk



memperoleh keterangan yang mendukung terhadap permasalahan penelitian. Adapun Kelompok Key Informan adalah :

- 1) Kelompok A, Pejabat Struktural dan Jajarannya dibidang Pendidikan
- 2) Kelompok B, Guru Bidang Studi
- 3) Kelompok C, Orang Tua Murid / Komite Sekolah
- 4) Kelompok D, Siswa / Ketua OSIS
- 5) Kelompok E, Masyarakat
- 6) Kelompok F, Para Tokoh : Agama dan Adat

Agar Pelaksanaan wawancara lebih Efektif dan Effisien, Peneliti mempersiapkan Daftar Pertanyaan. Dari Jumlah Populasi berjumlah sekitar : **653** Orang, dengan **Teknik Purposive Sampling, Ditetapkan Sample sebanyak : 200 Orang.** Pada Mulanya Peneliti Mempersiapkan 200 Exemplar Daftar Pertanyaan yang terdiri dari : 50 Exemplar untuk Masyarakat Kecamatan Perbaungan, 50 Exemplar untuk Masyarakat Kecamatan Dolok Masihul, 50 Exemplar untuk Masyarakat Kecamatan Bandar Khalifah dan 50 Exemplar untuk Para Pejabat Structural di Dinas Pendidikan dan Jajarannya serta Para Praktisi Pendidikan. Namun setelah dilakukan Identifikasi Data Daftar Pertanyaan yang terisi dengan lengkap hanya 167 exemplar. Data inilah yang diolah dan dianalisis dengan Menggunakan Metode Analisis SWOT. Data Penelitian dapat dilihat pada Daftar Lampiran.

### **c. Focus Group Discussion (FGD)**

Dalam penelitian ini dilakukan FGD, untuk mendapatkan hasil Analisa yang Maksimal dan Akurat. Walaupun sebenarnya penulis mengalami sedikit **Kendala** dalam melakukan pengumpulan data, sehubungan dengan Wabah Covid – 19 ini. Namun peneliti tidak putus asa, peneliti mensiasatinya dengan mengadakan Komunikasi melalui media Elektronik. Penulis menggunakan media Tehnologi Informasi seperti :

- 1) Telepon
- 2) Vedio Call
- 3) WhatsApp dan

#### 4) Zoom Meeting

Begitu juga dengan pelaksanaan FGD ini, akan dilakukan dengan Zoom meeting. Dengan Mengundang Para Perwakilan Kelompok Key Informan :

- 1) Narasumber yang Kompeten dibidangnya (Dosen / Pembimbing).
- 2) Kelompok A, Pejabat Struktural dan Jajarannya dibidang Pendidikan
- 3) Kelompok B, Guru Bidang Studi
- 4) Kelompok C, Orang Tua Murid / Komite Sekolah
- 5) Kelompok D, Siswa / Ketua OSIS
- 6) Kelompok E, Masyarakat
- 7) Kelompok F, Para Tokoh : Agama dan Adat

Pertanyaan dalam FGD Merupakan pertanyaan yang mendalam tentang masalah penelitian. Untuk Para Perwakilan Key Informan, tinggal mengembangkan dan mendalami pertanyaan pada Wawancara. Serta dilengkapi dengan pertanyaan mendalam berikut :

**“Bagaimana Strategi yang tepat dalam Mengatasi Tingginya Angka Anak Putus Sekolah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Kabupaten Serdang Bedagai.**

#### **2. Data Sekunder ( Library Research = Penelitian Kepustakaan)**

Data yang diperoleh dari Dokumentasi yang telah ada, antara lain Dari :

##### **a).Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara, dan BPS Kabupaten Serdang Bedagai.**

Data yang akan digunakan sebagai Bahan Perbandingan dan Mendeskripsikan tentang Sosial Ekonomi Masyarakat.

##### **b).Penelitian Terdahulu.**

Sebagai Acuan dan Perbandingan dalam menganalisa Data yang diperoleh di Objek Penelitian. Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini, maka data akan Dianalisa guna memperoleh gambaran yang jelas untuk mendukung Data Primer.

##### **c).Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen dan catatan-catatan tertulis serta mempelajari secara seksama tentang hal-hal yang berkaitan dengan data yang diperlukan. Adapun data yang didapatkan dari mengkaji dokumentasi yaitu : tentang gambaran umum lokasi penelitian, profil atau sejarah, Struktur Organisasi kabupaten Serdang Bedagai.

### C. Teknik Analisis Data Penelitian

Penelitian merupakan penelitian studi empiris yang bersifat Deskriptif Analitis Kualitatif dengan **Menggunakan Analisis SWOT**, maksudnya memaparkan data-data yang ditemukan dilapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat, Serta Penetapan Strategi yang Tepat, Effisien dan Effektif.<sup>88</sup>

#### Selanjutnya Proses Perancangan Matriks IFAS dan EFAS SWOT

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian adalah Merancang Daftar pertanyaan untuk para Key Informan/variable. Dengan mengelompokkan para Informan/variable menjadi dua bahagian yaitu : variable internal dan eksternal. Seperti terlihat pada table berikut :

**Tabel 3.7 Indikator Faktor dalam Analisis SWOT**

Penilaian Terhadap Indikator - Indikator Faktor Internal dan Eksternal	
Faktor Internal	Faktor Eksternal
Faktor 1	Faktor 1
Faktor 2	Faktor 2
Faktor 3	Faktor 3
Faktor-n, dst	Faktor-n, dst

Kemudian dari hasil skor yang diberikan oleh para Key Informan tersebut diolah terlebih dahulu agar menghasilkan Bobot penilaian, yang selanjutnya akan dijadikan sumber data yang akan dianalisis dengan menggunakan

<sup>88</sup> Ibid h. 77 - 80

metode SWOT. Hasil dari pengolahan penilaian Key Informan baik internal maupun eksternal tersebut, akan menghasilkan kelompok : Faktor – faktor : Strength, Weakness, Opportunity dan Threat. Sehingga menghasilkan Strategi interaksi matriks SWOT yang berupa :

- 1). Strategi SO (Strength, Opportunity)
- 2). Strategi ST (Strength, Threat).
- 3). Strategi WO (Weakness, Opportunity)
- 4). Strategi WT (Weakness, Threat).

Hasil kombinasi interaksi strategi : SO, WO, ST, WT seperti diuraikan diatas, menunjukan kepada 4 (empat) strategi pilihan yang dapat ditempuh dalam melihat persepsi Key Informan, terhadap berbagai kemungkinan dalam pengambilan keputusan kebijakan yang dapat dilakukan. Hasil interaksi antara strategi internal dan strategi eksternal dapat menunjukkan strategi dominan terbaik untuk solusi yang dipilih, yang dapat sebagai strategi andalan.

Dalam Penelitian ini, variabel yang digunakan untuk menganalisis Mutu Pendidikan Masyarakat di kabupaten Serdang Bedagai, terdiri dari 2 (dua) kelompok variabel yakni :

- 1).Variabel Input Internal Sebanyak : 6 (Enam) jenis variabel. Dengan 18 (Delapan Belas) atribut.
- 2).Variabel Input Eksternal Sebanyak : 6 (Enam) jenis variabel. Dengan 15 (Lima Belas) atribut.

Didalam penelitian ini, mengenai Atribut, dapat juga berfungsi sebagai Indikator atau alat ukur yang mendukung penelitian.

Keseluruhan Variabel dan indikator penelitian yang dimaksud secara rinci tersaji pada tabel berikut :

**Tabel – 3.8**  
**Variabel Input Internal dan Indikatornya**

No. Var.	Variabel	Indikator / Atribut
1.	Sumber Daya Manusia	1). Para Pejabat Struktural/Jajarannya dibidang Pendidikan. 2). Profesionalisme Guru 3). Kualitas dan Kuantitas Tenaga : Administrasi, Perpustakaan dan Laboratorium.
2.	Sarana dan Prasarana	1). Sarana Belajar Kelengkapan Pembelajaran, Peralatan Pendidikan, Media Pendidikan, Buku-buku dan Sumber belajar lainnya. Tehnologi – Informasi dan Komunikasi (TIK). Kelengkapan Laboratorium : Fisika, Kimia, Biologi dan Komputer. Perpustakaan, Ruang Konsling, Tempat Beribadah dan Tempat Olah raga. 2). Prasarana a. Lahan Lahan harus terhindar dari Pencemaran Udara, Suara dan Air, serta Banjir. b. Bangunan Bangunan Sekolah harus mampu menampung peserta didik. - Memiliki Konstruksi yang stabil dan kokoh - Memenuhi persyaratan kesehatan (Ventilasi udara, Pencahayaan dan Sanitasi). 3). Sarana Penunjang
3.	Kesiswaan	1). Penerimaan Peserta Didik dilakukan secara Objektif, Transparan dan Akuntabel, sesuai

		<p>dengan aturan yang berlaku.</p> <p>2).Orientasi Peserta Didik yang baru, bersifat Akademik dan Pengenalan lingkungan tanpa kekerasan dan dengan pengawasan guru.</p>
4.	Keuangan / Anggaran	<p>1).Biaya Pengadaan Sarana dan Prasarana</p> <p>2).Biaya untuk program kegiatan utama : Operasional kegiatan belajar mengajar Pembayaran Gaji, Insentif, Transport dan Tunjangan lain Bagi Pendidik dan non Pendidik</p> <p>3).Biaya untuk kegiatan Penunjang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penyelenggaraan kegiatan kesiswaan Subsidi Silang untuk siswa yang Tidak Mampu</p>
5.	Metode / Kurikulum	<p>1).Penerapan Kurikulum Nasional dan lokal</p> <p>2).Pengembangan Kurikulum Nasional dan lokal</p> <p>3).Kesesuaian dengan Potensi atau Kondisi Sekolah</p>
6.	Keorganisasian	<p>1).Ketepatan Struktur Organisasi dan ketepatan Personil.</p> <p>2).Koordinasi antar bagian dan atau Personil</p>

**Tabel – 3.9**  
**Variabel Input Eksternal dan Indikatornya**

No. Var.	Variabel	Indikator / Atribut
1.	Lingkungan	1). Kondisi Lingkungan Sekitar Sekolah
2.	Kebijakan Pendidikan	1).Pemberlakuan Otonomi Sekolah 2).Proses Seleksi dan Perekrutan Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidik. 3).Peran Pemerintah dalam Pendidikan 4).Anggaran Pendidikan 5).Kesejahteraan Tenaga Pendidik (Guru)
3.	IPTEK	1).Perkembangan Tehnologi 2).Perkembangan Ilmu Pengetahuan
4.	Peraturan	1).Peraturan Formal Pemerintah Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sytem Pendidikan Nasional Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.19/2007 tentang Standard Pengelolaan Pendidikan (mencakup Struktur Operasional Sekolah, Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Pendidik, Sarana dan Prasarana, Keuangan, Budaya dan Lingkungan serta Peran serta masyarakat dan Kemitraan Sekolah).
5.	Partisipasi Masyarakat	1).Jalinan Kemitraan Sekolah dengan Lembaga lain 2).Dibentuknya Dewan Pendidikan 3).Peran serta Orang Tua melalui wadah Komite Sekolah. 4).Persepsi Masyarakat 5).Dukungan dan Partisipasi Masyarakat Terhadap pendidikan. 6).Peran serta Jasa Konsultan pendidikan

6.	Lembaga Independen Pendidikan	<p>1).Keberadaan Lembaga Independen Pendidikan, seperti : BSNP = Badan Standard Nasional Pendidikan</p> <p>LSP = Lembaga Sertifikasi Profesi</p> <p>LPMP = Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan</p>
----	-------------------------------	---



**B A B - IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**



## **A. Hasil Penelitian**

### **1. Profil Kabupaten Serdang Bedagai**

#### **Sejarah Kabupaten Serdang Bedagai**

Proses lahirnya undang-undang tentang pembentukan Sergai sebagai kabupaten pemekaran merujuk pada usulan yang disampaikan melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 18/K/2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Deli Serdang.

Kemudian Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 26/K/DPRD/2003 **Tanggal 10 Maret 2003** tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang Atas Usul Rencana Pemekaran Kabupaten Deli Serdang menjadi 2 (dua) Kabupaten Kabupaten Deli Serdang (Induk) dan Kabupaten Serdang Bedagai.

Kabupaten Serdang Bedagai memiliki luas wilayah **1.900,22 Km<sup>2</sup>**, terdiri dari **17 Kecamatan** dengan 237 Desa dan 6 Kelurahan. Sei Rampah merupakan Ibu Kota Pusat Pemerintahan. Penduduk kabupaten Serdang Bedagai **pada tahun 2020 berjumlah 657.490 Jiwa** atau 150.281 keluarga dengan kepadatan penduduk rata-rata 346 jiwa per kilometer persegi. Dari jumlah penduduk tersebut, tingkat pengangguran terbuka relatif kecil yakni 14.774 jiwa atau sekitar 3 persen. Sementara keragaman budaya yang ada tergambar dari Multi Etnis yang ada, yakni : Melayu, Batak Toba, Batak Simalungun, Jawa, Karo, Batak Angkola, Batak Mandailing, Minangkabau, Banjar, Aceh, Nias dan Tionghoa Indonesia.

Kepemimpinan Bupati Serdang Bedagai (Sergai) : Soekirman dan Wakil Bupati (Wabup) Darma Wijaya periode 2016-2021, yang dikenal dengan nama pasangan “Bersaudara” telah berakhir pada hari Rabu tanggal Tujuh Belas Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (17/2/2021).

Selanjutnya setelah dilantik, maka **Periode 2021 - 2026** akan dilanjutkan oleh Bupati terpilih yakni : **Darma Wijaya dengan Wabup, Adlin Yusri Tambunan.** Pada hari Jumat, **26 Februari 2021** sekitar pukul 08:00 WIB, bertempat di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara yang beralamatkan di Jalan Sudirman Medan, telah berlangsung pelantikan Kepala Daerah terpilih pada pelaksanaan pilkada serentak Tahun 2020. Pelantikan dilakukan langsung oleh **Bapak Edy Rahmayadi** selaku Gubernur Sumatera Utara yang didampingi oleh Bapak Musa Rajekshah selaku Wakil Gubernur Sumatera Utara.

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai dilaksanakan secara bersamaan dengan enam Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang dibagi dua sesi. Adapun Kabupaten/Kota pada sesi pertama diantaranya :

1. Kota Medan
2. Kota Binjai
3. Kota Tanjung Balai
4. Kabupaten Asahan
5. Kabupaten Humbang Hasundutan
6. Kabupaten Serdang Bedagai

Turut hadir pada pelantikan tersebut diantaranya Ketua DPRD Sumut, Kapoldasu, Kajati Sumut dan Pangdam I Bukit Barisan.

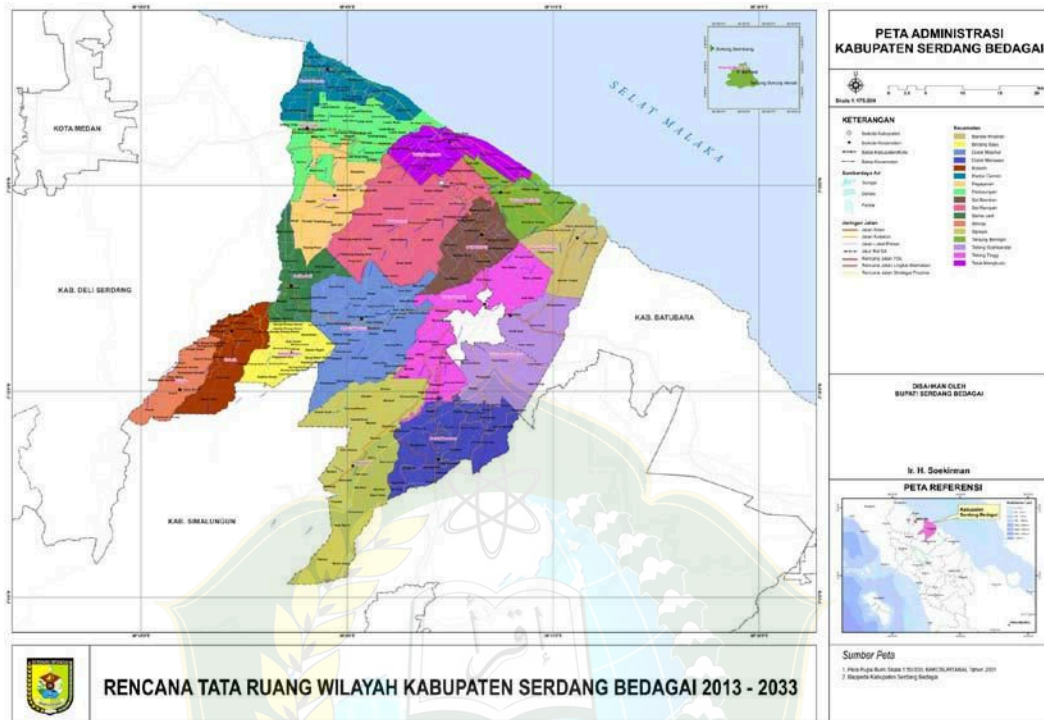
### **Letak Geografis Kabupaten Serdang Bedagai**

Secara Geografis Kabupaten Serdang Bedagai terletak pada posisi 20 57'' Lintang Utara, 30 16'' Lintang Selatan, 980 33'' - 990 27'' Bujur Timur dengan ketinggian berkisar 0 – 500 meter diatas permukaan laut. Secara administratif Kabupaten Serdang Bedagai berbatasan dengan beberapa daerah, yaitu :

- 1) Sebelah Utara : Selat Malaka
- 2) Sebelah Timur : Kabupaten Batu Bara dan Simalungun
- 3) Sebelah Selatan : Kabupaten Simalungun

#### 4) Sebelah Barat : Kabupaten Deli Serdang

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Peta Wilayah sebagai berikut :



Sumber : Serdang Bedagai Dalam Angka Tahun 2021.

### Kependudukan Dan Pendidikan di Kabupaten Serdang Bedagai

1. Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000 dan 2010.
2. Didalam sensus penduduk, pencacahan dilakukan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia termasuk warga Negara asing kecuali anggota korps diplomatic Negara sahabat beserta keluarganya.
3. Metode pengumpulan data dalam sensus dilakukan dengan wawancara antara petugas sensus dengan responden dan juga melalui e-sensus. Pencatatan penduduk menggunakan konsep usual residence, yaitu konsep dimana penduduk biasa bertempat tinggal.

Bagi penduduk yang bertempat tinggal tetap dicacah dimana mereka biasa tinggal, sedangkan untuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap dicacah ditempat dimana mereka ditemukan petugas sensus pada malam Hari Sensus. Termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap adalah tuna wisma, awak kapal berbendera Indonesia, penghuni perahu/rumah apung, masyarakat terpencil/terasing dan pengungsi. Bagi mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap dan sedang bepergian keluar wilayah lebih dari enam bulan, tidak dicacah ditempat tinggalnya, tetapi dicacah ditempat tujuannya.

Untuk tahun yang tidak dilaksanakan sensus penduduk, data kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen - komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian dan migrasi.

Proyeksi penduduk Indonesia 2010– 2035 menggunakan data dasar penduduk hasil SP2010.

4. Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.
5. Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu.
6. Kepadatan penduduk adalah rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi.
7. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan.
8. Distribusi penduduk adalah pola persebaran penduduk di suatu wilayah, baik berdasarkan batas-batas geografis maupun berdasarkan batas-batas administrasi pemerintahan.
9. Komposisi penduduk adalah pola persebaran penduduk menurut karakteristiknya, contoh: penduduk menurut kelompok umur, penduduk menurut jenis kelamin.

10. Rumah tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makan dari satu dapur. Yang dimaksud makan dari satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola bersama-sama menjadi satu.

11. Anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun yang sementara tidak ada.

Agar Penjelasan diatas dapat lebih mudah dipahami, sebaiknya kita Perhatikan Tabel – Tabel berikut ini :

Tabel - 4.10

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Per - Kecamatan  
Di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun : 2010, 2019 dan 2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	
	2010	2019	2020	2010-2020	2019-2020
Kotarih	7.975	8.216	9.169	1.36	0.94
Silinda	8.332	8.544	9.514	1.29	1.04
Bintang Bayu	10.581	10.864	12.511	1.63	1.21
Dolok Masihul	48.241	49.837	52.705	0.86	0.62
Serbajadi	19.560	20.071	21.759	1.04	0.79
Sipispis	31.617	32.473	33.826	0.66	0.49
Dolok Merawan	17.029	17.455	17.976	0.53	0.43
Tebing Tinggi	40.253	41.681	41.162	0.22	0.14
Tebing Syahbandar	32.191	33.124	33.585	0.41	0.32

Bandar Khalifah	24.774	25.478	25.857	0.41	0.30
Tanjung Beringin	36.864	38.011	42.142	1.30	0.93
Sei Rampah	63.379	65.660	71.366	1.16	0.81
Sei Bamban	42.791	44.275	46.043	0.71	0.48
Teluk Mengkudu	41.118	42.513	48.334	1.58	1.02
<b>Perbaungan</b>	99.936	105.177	112.153	1.12	0.55
Penggajahan	26.859	27.676	30.206	1.14	0.81
Pantai Cermin	42.883	45.341	49.182	1.34	0.56
<b>Serdang Bedagai</b>	<b>594.383</b>	<b>616.396</b>	<b>657.490</b>	<b>0.98</b>	<b>0.93</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai, 2021

Dari Tabel : Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk, Kabupaten Serdang Bedagai Tahun : 2014 – 2020 diatas, dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa Jumlah Penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya, sementara luas wilayah Tetap. Begitu juga dengan Kepadatan penduduk juga semakin bertambah.

Artinya Kabupaten Serdang Bedagai harus mempercepat Proses laju Pembangunan di wilayahnya, dengan membuka sumber – sumber Ekonomi baru, seperti : membuka lapangan pekerjaan bagi anggota masyarakatnya. Sehingga Potensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara maksimal. Jika tidak akan memunculkan masalah baru seperti : meningkatnya jumlah pengangguran, kriminalitas dan kantong – kantong kemiskinan. Jumlah Penduduk yang terus bertambah akan menjadi bencana, jika tidak dikelola dengan baik.

Tabel - 4.11.

Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin

Di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun : 2020

Golongan Umur	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
0 – 4	32.094	30.740	62.834
5 – 9	31.566	30.296	61.862
10 – 14	31.045	28.806	59.851
15 – 19	27.672	26.443	54.115
20 – 24	27.971	26.640	54.611
25 – 29	27.638	25.969	53.607
30 – 34	26.138	24.914	51.052
35 – 39	25.081	24.724	49.805
40 – 44	22.514	22.529	45.043
45 – 49	19.978	20.462	40.440
50 – 54	17.750	18.256	36.006
55 - 59	14.862	15.964	30.826
60 – 64	11.737	12.534	24.271
65 – 69	8.128	8.725	16.853
70 – 75	3.919	4.787	8.706
75 +	3.008	4.600	7.608
Total 2020	331.101	326.389	657.490

2019	309.382	307.014	616.396
2018	308.419	306.199	614.618

Sumber : Badan Pusat Statistik 309 Kabupaten Serdang Bedagai, 2021

Jika dilihat pada Tabel diatas, Jumlah Penduduk yang berusia : 0 – 4 tahun berjumlah 62.834 orang. Ini berarti Kabupaten Serdang Bedagai harus mempersiapkan Tenaga Dokter sepsialis anak, peningkatan Jumlah Posyandu untuk Para Balita, serta fasilitas lain yang dibutuhkan demi pertumbuhan para Balita. Sehingga tercipta generasi yang cerdas dan sehat.

Tabel - 4.12.

Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas  
Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan  
Di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun : 2018 – 2020

No.	Pendidikan yang Ditamatkan	2018	2019	2020
01.	Tidak Punya Ijazah Sekolah Dasar (SD)	13.82	21.61	18.21
02.	Sekolah Dasar (SD)	22.92	23.76	26.72
03.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	26.72	21.52	21.46
04.	Sekolah Menengah Umum (SMU)	3.03	29.46	29.29
05.	Diploma - I III (D - I, III)	0.54	0.09	0.17
06.	Diploma III / Akademi (D – III)	0.69	0.88	0.47
07.	Diploma IV, S – 1 (D – IV, S – 1)	5.22	2.67	3.67
08.	S - 2	0.06	-	-
	Total	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik 309 Kabupaten Serdang Bedagai, 2021



Jika dianalisa Data diatas, Jumlah Anak Sekolah Dasar yang tamat pada pada : Tahun 2018 sebanyak : 22.92 % dan pada Tahun 2019 sebanyak : 23.76 % sementara pada Tahun 2020 sebanyak : 26.72 %. Berarti **terjadi peningkatan Persentase anak yang tamat di tingkat SD.**

Sementara, Jika dianalisa untuk tingkat SMP pada pada : Tahun 2018 sebanyak : 26.72 % dan pada Tahun 2019 sebanyak : 21.52 % sementara pada Tahun 2020 sebanyak : 21.46 %. Berarti **terjadi penurunan Persentase anak yang tamat di tingkat SMP.**

Tabel - 4.13.

Jumlah : Sekolah, Murid, Guru dan Ratio Murid - Guru  
Sekolah Dasar (SD) Negeri menurut Kecamatan  
Di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun : 2020

Kecamatan	Sekolah	Murid			Guru			Ratio Murid-Guru
		Laki - Laki	Perempuan	Jlh	Lk	Pr	Jlh	
Kotarih	6	502	486	988	17	50	67	14.7
Silinda	7	486	428	914	25	53	78	11.7
Bintang Bayu	12	592	489	1.081	15	93	108	10
Dolak Masihul	38	2.942	2.769	5.711	75	257	332	17.2
Serbajadi	15	995	907	1.902	30	106	136	14
Sipispis	31	1.820	1.687	3.507	56	222	278	12.6
Dolak Merawan	19	1.082	991	2.073	16	121	137	15.1
Tebing Tinggi	35	2.188	1.966	4.154	36	228	264	15.7

Tebing Syahbandar	18	1.374	1.270	2.644	20	127	147	18
<b>Bandar Khalifah</b>	25	1.635	1.494	3.129	45	158	200	15.6
Tanjung Beringin	22	2.255	1.971	4.226	46	163	209	20.2
Sei Rempah	36	2.813	2.655	5.468	42	273	315	17.3
Sei Bamban	35	2.048	1.909	3.957	54	230	284	13.9
Teluk Mengkudu	25	2.627	2.367	4.994	58	210	268	18.6
<b>Perbaungan</b>	43	5.374	5.139	10.513	74	420	494	21.3
Penggajahan	17	1.846	1.790	3.636	35	142	177	20.5
Pantai Cermin	24	2.705	2.460	5.165	43	197	240	21.5
Serdang Bedagai 2020	408	33.284	30.778	64.062	684	3.050	3.734	17
2019	426	34.362	31.844	66.206	708	3.055	3.763	17
2018	426	35.623	32.635	68.258	729	3.078	3.078	18

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai, 2021

Pada Tabel : Jumlah : Sekolah, Murid, Guru dan Ratio Murid – Guru, Sekolah Dasar (SD) Negeri menurut Kecamatan, Di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun : 2020, diatas menggambarkan :

1. Kecamatan Perbaungan yang memiliki 43 buah sekolah dengan jumlah murid 10.513 , memilki guru sebanyak 494, dengan Ratio : 21.3

- Analisisnya : di Kecamatan Perbaungan masih membutuhkan guru untuk tingkat Sekolah Dasar Negeri, sebab Ratio antar Guru dan Murid adalah : 21.3. Artinya : seorang Guru harus mendidik / melayani 21.3 orang Murid. Bisa dibayangkan betapa diharapkannya kehadiran guru lainnya di Kecamatan Perbaungan.
2. Kecamatan Dolok Masihul yang memiliki 38 buah sekolah dengan jumlah murid 5.711 , memiliki guru sebanyak 332, dengan Ratio : 17.2
- Analisisnya : di Kecamatan Dolok Masihul masih membutuhkan guru untuk tingkat Sekolah Dasar Negeri, sebab Ratio antar Guru dan Murid adalah : 17.2 Artinya : seorang Guru harus mendidik / melayani : 17.2 orang Murid. Bisa dibayangkan betapa diharapkannya kehadiran guru lainnya di Kecamatan Perbaungan.
3. Kecamatan Bandar Khalifah yang memiliki 25 buah sekolah dengan jumlah murid 3.129, memiliki guru sebanyak 200, dengan Ratio : 15.6
- Analisisnya : di Kecamatan Bandar Khalifah masih membutuhkan guru untuk tingkat Sekolah Dasar Negeri, sebab Ratio antar Guru dan Murid adalah : 15.6. Artinya : seorang Guru harus mendidik / melayani : 15.6 orang Murid. Bisa dibayangkan betapa diharapkannya kehadiran guru lainnya di Kecamatan Perbaungan. Demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai yang sehat dan Cerdas yang dapat setara dengan Daerah – Daerah lain yang ada di tanah Air Tercinta.

Adapun Visi dan Misi Kabupaten Serdang Bedagai yang tercantum dalam Kabupaten Serdang Bedagai Angka Tahun 2021 adalah :

#### **VISI**

**“Mewujudkan Serdang Bedagai MAJU TERUS (Mandiri, Sejahtera dan Religius)”.**

#### **MISI : SAPTA DAMBAAN**

##### **1). SEKOLAH MANTAB (Sekolah Mandiri, Asri dan Berkualitas).**

Program pembangunan daerah ini mendorong agar sekolah formal dan nonformal mandiri, terampil dan kreatif dalam pengelolaan pendidikan dan

lingkungan sekolah yang menyenangkan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter.

**2). Masyarakat Sehat dan Religius.**

Program ini merupakan tindak lanjut dari program nasional, yaitu Indonesia Sehat. Melalui program ini diharapkan akan ada semangat baru pada masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai dalam mewujudkan masyarakat yang Sehat Jasmani dan Rohani (Religius).

**3). Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan.**

Sektor Pertanian merupakan salah satu sektor prioritas di Kabupaten Serdang Bedagai. Kedepannya pertanian di kabupaten Serdang Bedagai lebih diarahkan kepada pertanian organik dan komoditas hortikultura dengan lebih banyak melibatkan kaum muda tani.

**4). Infrastruktur Terintegrasi.**

Program ini akan mendukung seluruh sektor prioritas di Kabupaten Serdang Bedagai dengan jaminan konektivitas yang kuat. Infrastruktur yang dibangun akan melibatkan seluruh komponen masyarakat sehingga muncul rasa kepemilikan yang kuat terhadap infrastruktur yang dibangun.

**5). Ekonomi Berdaya Saing.**

Program ini bertumpu pada sektor UMKM yang diharapkan sebagai pondasi kekuatan ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai. Pendekatan Industri 4.0 akan menjadi strategi dalam pelaksanaan program ini.

**6). Wisata Maju Terus.**

Program ini akan menggerakkan sektor pariwisata Kabupaten Serdang Bedagai menjadi salah satu primadona wisata di Sumatera Utara. Program ini juga akan adanya inovasi terus menerus dalam pengelolaan wisata di Kabupaten Serdang Bedagai.

**7). Birokrasi Dambaan.**

Program ini akan mewujudkan Birokrasi yang benar-benar didambakan oleh masyarakat, yaitu pegawai yang melayani dengan sikap, Perhatian dan Perlakuan yang prima. (Serdang Bedagai Dalam Angka 2021).

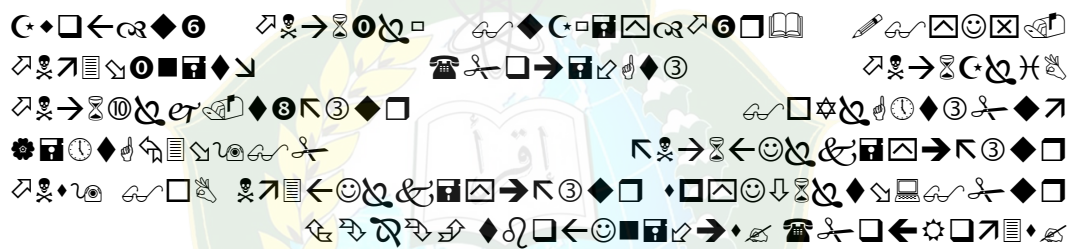
**2. Kondisi dan Permasalahan Pendidikan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Kabupaten Serdang Bedagai.**

Dalam bahasa Indonesia, Pendidikan berasal dari kata “didik” lalu kata itu mendapat awalan “Pe” dan akhiran “an”, artinya : memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan, diperlukan adanya ajaran, tuntunan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.<sup>89</sup>

Pengertian Pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : Sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.<sup>90</sup>

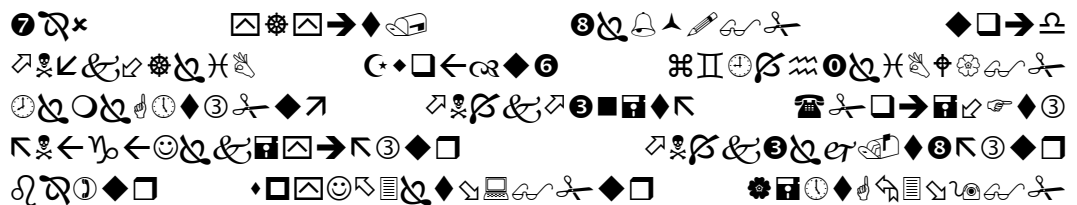
Dalam Al – Qur’an disebutkan bahwa :

**1. Surat Al - Baqarah ayat : 151 yang berbunyi :**



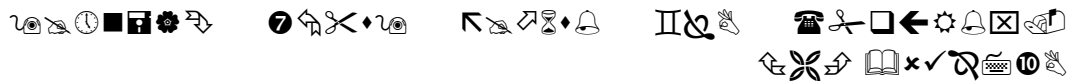
*151. Sebagaimana (kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.*

**2. Surat Al - Jumu'ah ayat : 2 yang berbunyi :**



<sup>89</sup> Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, Bandung : Rosdakarya, 2000, Cet. ke-3, h.65

<sup>90</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1998, Cet. ke-1, h.210



2. Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan Hikmah (As Sunnah). dan Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata,

Dari kedua ayat al - Qur'an tersebut diatas, dapat difahami bahwa baik secara tekstual maupun kontekstual Rasul memang dinyakini sebagai seorang pendidik, karena dari Beliauulah umat islam mengenal nilai - nilai kebenaran yang mengandung unsur - unsur kemanusiaan tanpa ada batasan – batasan ras, suku bangsa dan status social, intinya nilai-nilai kebenaran itu milik siapa saja yang mempergunakan dan memperjuangkannya.

Rasul juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan ahli hadist lainnya seperti Bukhari dan Muslim. Yang artinya :

Dari Anas bin Malik berkata : bersabda Rasulullah : ***“Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan”***

(HR. Ibnu Majah).

Berdasarkan hadist di atas menuntut ilmu, bersekolah dalam rangka mencari ilmu, menambah pengetahuan, dan memperbaiki diri, adalah sebuah kewajiban bagi muslim laki-laki ataupun perempuan, betapa penting dan perlunya ilmu pengetahuan tersebut baik secara umum maupun secara khusus, baik ilmu pengetahuan untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat luas sehingga Allah dan Rasulullah mewajibkan bagi kita. Anak merupakan generasi penerus bagi kelangsungan hidup keluarga, bangsa dan negara di masa mendatang. Oleh karena itu memberikan jaminan bagi generasi penerus untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik merupakan investasi sosial masa depan yang tidak murah dan harus dipikul oleh keluarga, masyarakat dan negara.

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab

I (Ketentuan Umum) Pasal 1 butir 1: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan ketrampilan yang diperlukan dirinya, Masyarakat, Bangsa dan Negara”.<sup>91</sup>

Secara umum kebijakan Pendidikan ditujukan untuk menghasilkan manusia-manusia yang tidak hanya pandai secara akademis namun juga siap untuk bekerja. Demi tercapainya tujuan itu ada beberapa persoalan yang perlu dibenahi dalam pembangunan dibidang pendidikan Yaitu :

### **1). Angka Putus Sekolah yang terus Meningkat**

Kondisi Ekonomi yang semakin sulit, ternyata berdampak Negatif pada dunia pendidikan. Terutama dimasa Pandemi Covid-19 ini. Salah satunya ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah anak Putus sekolah. Menurut Data Statistik Dinas pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai Data IPM Tahun 2019 Terdapat 3,30 % anak putus sekolah ditingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sementara ditingkat Sekolah Dasar (SD) Pada Tahun 2019 terdapat 88 orang Anak Putus dan pada 2020 ada 106 orang anak putus sekolah. Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Tahun 2019 terdapat 45 orang anak putus sekolah. Tahun 2020 ada sejumlah 60 orang anak putus sekolah. Begitu juga dengan jumlah sekolah swasta yang ditutup (tidak dapat dapat beroperasi lagi karena tidak dapat menutupi biaya operasionalnya. Siswanya juga tidak terpenuhi. Tahun 2019 jumlah sekolah tingkat Sekolah Dasar 474 buah, Selanjutnya pada Tahun 2020 tinggal 462 buah. Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2019 ada 93 Buah, kemudian Tahun 2020 tinggal 87 Buah, sebagaimana yang terlihat pada Lampiran : A.

Kondisi yang sangat menyedihkan.

---

<sup>91</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, h. 57

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan akan ditemukan Apa saja yang menjadi Faktor Internal dan Eksternal penyebab tingginya angka anak putus sekolah di Kabupaten Serdang Bedagai.

2). **Pelaksanaan Strategi Kebijakan Pendidikan yang belum Optimal.**

Otonomi Daerah yang Indentik dengan Otonomi Pendidikan, ternyata untuk jangka pendek, memang seolah – olah membawa angin segar bagi dunia pendidikan, tapi untuk jangka panjang malah membuat mutu pendidikan di Kabupaten Serdang Bedagai semakin menurun, Oleh sebab itu, hal ini tidak boleh dibiarkan berkepanjangan, harus dicari **Strategi yang tepat** dalam Mengatasi Tingginya Angka Anak Putus Sekolah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Kabupaten Serdang Bedagai.

**B. Pembahasan**

**1. Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Tingginya Angka Anak Putus Sekolah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Kabupaten Serdang Bedagai.**

**a). Perumusan Faktor Internal dan Eksternal**

Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan yang akan dirumuskan dalam Penelitian ini, bertitik tolak pada penjelasan UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Angka Tahun 2021. Tahapan Pertama Penelitian, dimulai dengan melakukan kegiatan Wawancara dengan beberapa para ahli, guna proses Identifikasi terhadap indikasi – indikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang yang ada dan Ancaman yang dihadapi oleh Organisasi dan akan dianalisis.

Organisasi yang dimaksud adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, beserta Stakeholdersnya. Selanjutnya, Identifikasi dirumuskan melalui berbagai sumber Literatur kepustakaan dan juga beberapa wawancara langsung dengan Responden. Hasil Perumusan Identifikasi Elemen – Elemen Faktor Internal dan Eksternal, Seperti yang terlihat pada Tabel berikut :



Tabel – 4.14

Perumusan Identifikasi Faktor Internal

<b>EFEKTIFITAS PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI</b>	
1.	Kemampuan Manajerial (Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan, Pengontrolan dan Evaluasi) Kepada Para Pejabat Struktural dan Jajarannya dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.
2.	Kemampuan Para Guru dalam Menguasai Materi, Struktur, Konsep dan Pola Fikir Keilmuan yang mendukung Proses Belajar Mengajar.
3.	Kualitas Kinerja Tenaga Administrasi, Pustakawan dan Laboran sebagai Pendukung Proses Pembelajaran.
4.	Jumlah Sumber Daya Manusia (Tenaga Pendidik/Guru) yang Tersedia dan Berdedikasi .
5.	Keberadaan Fasilitas Fisik Layanan Khusus (Seperti : Laboratorium, Ruang Diskusi dan Konseling serta Perpustakaan).
6.	Kelengkapan Sarana Belajar Utama (Gedung Sekolah, Perabot Fisik, Peralatan Pendidikan, Buku, Teknologi Informasi) yang menunjang Kelancaran Proses Belajar Siswa.
7.	Lokasi Sekolah yang Terbebas dari gangguan Pencemaran Udara, Air dan Kebisingan serta Banjir.
8.	Penerimaan Siswa Baru dilakukan secara Selektif dan Trasparan sesuai dengan Aturan yang berlaku.
9.	Orientasi Siswa Baru, bersifat Akademik dan Mendidik, jauh dari tindak kekerasan dan Berada dalam Pengawasan Guru.
10.	Kemampuan Pembiayaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Pengadaan Sarana dan Prasana Sekolah.
11.	Pengelolaan Biaya / Anggaran dan Dana dari Masyarakat untuk

	pelaksanaan Program Kegiatan Utama (Operasional Kegiatan Belajar Mengajar, Pembayaran Gaji, Transport, Insentif dan Tunjangan Tenaga pendidik).
12.	Kemampuan Pembiayaan dalam kegiatan Program Penunjang (Seperti : Sertifikasi Guru, Kegiatan Kesiswaan dan Ekstra kulikuler).
13.	Kemampuan Sekolah dalam melakukan Subsidi Silang, untuk Murid yang Tidak Mampu.
14.	Penerapan Kurikulum Nasional yang Relevan dengan Potensi dan Kondisi Sekolah.
15.	Pengembangan Kurikulum Sekolah sesuai dengan Kebutuhan Siswa.
16.	Kurikulum Sekolah diterapkan sesuai dengan Perkembangan Ilmu Penegtahuan dan Teknologi saat ini.
17.	Ketepatan dari Penempatan Jabatan Struktural dan Personil (The Right Man On The Right Place) dalam Struktur organisasi di Dinas Pendidikan Serdang Kabupaten Bedagai dan Jajarannya.
18.	Pelaksanaan Manajemen Organisasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai dan Jajarannya, secara Sinergis harus sesuai dengan Job Description yang Ditetapkan.

Tabel – 4.15

Perumusan Identifikasi Faktor Eksternal

<b>EFEKTIFITAS PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI</b>	
1.	Pengaruh Kondisi Lingkungan sekitar Sekolah terhadap Kegiatan Proses Belajar Mengajar.
2.	Dampak Pemberlakuan Otonomi Daerah, termasuk Otonomi Pendidikan (yang meliputi : Pengelolaan Sekolah, Perekrutan dan Pembiayaan).
3.	Kemampuan Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai dalam Menseleksi, Merekrut Para Pejabat Struktural dan Jajarannya serta Para

	tenaga Pengajarnya.
4.	<b>Political Will</b> dari Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Dinas Pendidikan) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.
5.	Kemungkinan Tidak adanya Peningkatan Anggaran Pendidikan dari Pusat maupun Daerah.
6.	Kondisi Kesejahteraan, adanya Ketimpangan Gaji / tunjangan antara Tenaga Pendidik Tetap / PNS dengan Tenaga Pendidik Honorer.
7.	Akses terhadap pemanfaatan Tehnologi Informasi dan Komunikasi serta ilmu Pengetahuan saat ini, dapat mendukung Proses Belajar Mengajar yang Interaktif.
8.	Keberadaan : UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Peraturan Pemerintah : No. 19/2005 tentang Standard Pendidikan Nasional dan
9.	Peraturan Menteri Pendidikan : No. 19/2007 tentang Standard Pengelolaan Pendidikan.
10.	Kemungkinan Terciptanya Jalinan Kemitraan Sekolah dengan Lembaga lain, yang Relevan (Seperti : Perguruan Tinggi dan Pendidikan Kedinasan) berkaitan dengan Investasi (Beasiswa) dan pemanfaatan Output Lulusan.
11.	Keberadaan Dewan Pendidikan disetiap Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Penyalur Aspirasi / keluhan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pendidikan.
12.	Keaktifan Orang Tua dalam Mengatasi masalah Pendidikan melalui Wadah Komite Sekolah.
13.	Persepsi Masyarakat terhadap Pengelolaan Pendidikan Sekolah
14.	Dukungan dan Partisipasi Masyarakat terhadap Dunia Pendidikan. Peran serta Tenaga Ahli (Konsultan Pendidikan) untuk Membantu Memberi Masukan dalam Tata Cara Pengelolaan Sekolah.
15.	Keberadaan : Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) sebagai lembaga Independen yang bertugas memantau Proses

Penyelenggaraan Pendidikan dan melakukan Program Sertifikasi guru.
--

Perubahan penilaian Responden dari priode jangka pendek (Tiga Tahun) sampai priode jangka panjang (Lima Tahun) menunjukkan adanya perubahan persepsi, seiring dengan bertambahnya waktu. **Faktor – Faktor Eksternal yang sebelumnya menjadi peluang untuk jangka pendek, seperti : Pemberlakuan Otonomi Daerah, termasuk Otonomi Pendidikan, ternyata untuk jangka panjang menjadi Ancaman.**

Secara ringkas hasil rata – rata pembobotan elemen IFAS – EFAS SWOT dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel - 4.16**  
**Internal Factor Analysis System Strategy (IFAS)**

<b>STRENGTH (S)</b>		
No.	Uraian	Nilai Rata-Rata Baris
1	Penerimaan siswa baru dilakukan secara Selektif dan Transparan ( <b>Secara Online</b> ), sesuai aturan yg berlaku.	2.19
2	Jumlah Sumber Daya Manusia (Tenaga Pendidik/Guru) yang Tersedia dan Berdedikasi	2.18
3	Pengelolaan dana dari masyarakat untuk pelaksanaan Kegiatan Program Utama (Pembayaran gaji, transport, insentif dan tunjangan tenaga pendidik) dan Kegiatan Program Penunjang	2.17
4	Kerjasama dalam Bidang Sosial dgn masyarakat sekitar, guna menciptakan lingkungan sekolah yg aman dalam Proses Belajar Mengajar.	2.17
5	Penerapan kurikulum nasional maupun Lokal yang relevan dengan potensi sekolah.	2.14

<b>WEAKNESS (W)</b>		
1.	Ketidak Aktifan orang tua dalam Mengatasi Masalah Pendidikan Anaknya.	2.20
2.	Rendahnya Kemampuan Sekolah dalam melakukan Subsidi Silang untuk murid yang tidak mampu.	2.19
3.	Belum Adanya Kelengkapan Sarana belajar utama (gedung sekolah, perabot fisik, peralatan pendidikan, buku, TIK) & Sarana menunjang yang Mendukung Kelancaran Proses Belajar Mengajar.	2.18
4.	Belum Tersedianya Lokasi sekolah yang nyaman dan Asri, bebas dari gangguan : Pencemaran Air, Udara dan Kebisingan serta Banjir.	2.18
5.	Kurangnya Kompetensi guru dalam menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan (Kurikulum) yang mendukung proses belajar mengajar, dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi (TIK) yang ada saat ini.	2.17

**Tabel - 4.17**

**Eksternal Factor Analysis System Strategy (EFAS)**

<b>OPPORTUNITY (O)</b>		
No.	Uraian	Nilai Rata-Rata Baris
1	Keberadaan Dewan Pendidikan disetiap Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai Penyalur Aspirasi/keluhan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pendidikan.	2.20
2	Keberadaan UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No.19/2007 tentang Standard Pengelolaan Pendidikan yang dapat digunakan	2.17

	sebagai acuan dalam mengelola pendidikan sekolah menjadi lebih efektif.	
3	Keberadaan Badan Standard Nasional Pendidikan (BSNP), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPMP) sebagai lembaga independen yang bertugas memantau proses penyelenggaraan pendidikan dan melakukan program sertifikasi guru	2.16
4	Terciptanya Jalinan Kemitraan Sekolah dengan Lembaga lain, yg Relevan (Seperti : Perguruan Tinggi dan Pendidikan Kedinasan).	2.15
5	Dukungan dan partisipasi masyarakat dan Orang Tua Siswa serta Alumni terhadap dunia pendidikan.	2.14
	<b>THREAT (T)</b>	
1.	Belum mampunya Sekolah untuk Memanfaatkan dukungan masyarakat terhadap pendidikan melalui Gerakan Orang Tua Asuh ( <b>GNOTA</b> ) serta memanfaatkan Political Will Pemerintah dlm Pemberian Bea Siswa Ataupun <b>Sekolah Gratis</b> .	1.25
2.	Ketidak mampuan Sekolah dlm Mencari Pembiayaan Alternative ( <b>Sponsor</b> ) untuk mempercepat pengadaan fasilitas layanan khusus dgn melibatkan Keaktifan orang tua siswa, melalui wadah komite sekolah	1.24
3.	Rendahnya kualitas Pengawasan Rutin dari Komponen Personalia Sekolah (Kepala Sekolah sebagai Top Manajer, guru & tenaga penunjang) guna <b>Mencegah Pandangan Buruk Masyarakat Terhadap Dunia Pendidikan</b> .	1.24
4.	Belum mampunya Dinas Pendidikan dlm Merekrut	1.23

	Menseleksi & Menempatkan Para Pejabat Struktural & Para Kepala Sekolah serta Tenaga Pengajar, dgn Konsep ' <b>The Right Man On The Right Place</b> '.	
5.	Tidak Efektif & Effesiennya Strategi yg dilaksanakan, akibat Wewenang yg diberikan kepada sekolah sebagai <b>Dampak Negatif</b> Pemberlakuan Otonomi Daerah & Otonomi Pendidikan, yg meliputi : Pengelolaan Sekolah, Perekrutan, Pengangkatan & Penempatan Pejabat Stuktural & Tenaga Pendidik serta Pengelolaan Keuangan ( <b>Akuntabilitas</b> ).	1.23

Dari data hasil Penelitian diatas, maka yang menjadi Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Tingginya Angka Anak Putus Sekolah **Dalam Perspektif Ekonomi Syariah** di Kabupaten Serdang Bedagai adalah :

**Faktor Internal yakni :**

1. Ketidak Aktifan orang tua dalam Mengatasi Masalah Pendidikan Anaknya.
2. Rendahnya Kemampuan Sekolah dalam melakukan Subsidi Silang untuk murid yang tidak mampu.
3. Belum Adanya Kelengkapan Sarana belajar utama (gedung sekolah, perabot fisik, peralatan pendidikan, buku, TIK) & Sarana penunjang yang Mendukung Kelancaran Proses Belajar Mengajar.
4. Belum Tersedianya Lokasi sekolah yang nyaman dan Asri, bebas dari gangguan : Pencemaran Air, Udara dan Kebisingan serta Banjir.
5. Kurangnya Kompetensi guru dalam menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan (Kurikulum) yang mendukung proses belajar mengajar, dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi (TIK) yang ada saat ini.

**Faktor Eksternal Yakni :**

1. Belum mampunya Sekolah untuk Memanfaatkan dukungan masyarakat terhadap pendidikan melalui Gerakan Orang Tua Asuh (GNOTA) serta memanfaatkan Political Will Pemerintah dlm Pemberian Bea Siswa Ataupun Sekolah Gratis.

2. Ketidak mampuan Sekolah dlm Mencari Pembiayaan Alternative (Sponsor) untuk mempercepat pengadaan fasilitas layanan khusus dgn melibatkan Keaktifan orang tua siswa, melalui wadah komite sekolah.
3. Rendahnya kualitas Pengawasan Rutin dari Komponen Personalia Sekolah (Kepala Sekolah sebagai Top Manajer, guru & tenaga penunjang) guna **Mencegah Pandangan Buruk Masyarakat Terhadap Dunia Pendidikan.**
4. Belum mampunya Dinas Pendidikan dlm Merekrut Menseleksi & Menempatkan Para Pejabat Struktural & Para Kepala Sekolah serta Tenaga Pengajar, dgn Konsep **‘The Right Man On The Right Place’.**
5. Tidak Efektif & Effesiennya Strategi yg dilaksanakan, akibat Wewenang yang diberikan kepada sekolah sebagai Dampak Negatif Pemberlakuan Otonomi Daerah & Otonomi Pendidikan, yang meliputi : Pengelolaan Sekolah, Perekrutan, Pengangkatan & Penempatan Pejabat Stuktural & Tenaga Pendidik serta Pengelolaan Keuangan (**Akuntabilitas**).

**b). Perumusan Elemen – Elemen SWOT.**

Dari hasil Perumusan Indikator Faktor Internal dan Eksternal diatas (Tabel 4.16 dan 4.17) selanjutnya dituangkan daftar pertanyaan SWOT yang diberikan kepada Responden untuk menjaring penilaian Bobot dan Rating (Urgensi) terhadap setiap indikator yang telah dikemukakan, dan akan menghasilkan keempat elemen strategis model SWOT, Yaitu : Faktor Strength (S), Faktor Weakness (W), Faktor Opportunity (O) dan Faktor Threat .

Secara ringkas, perhitungan / pengolahan data hasil penelitian penulis terhadap pertanyaan SWOT oleh responden, diuraikan dalam bentuk tabel dibawah ini. Susunan tabel – tabel hasil penilaian responden terhadap faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor Eksternal (faktor peluang dan tantangan). Yaitu : tabel 4.18, tabel 4.19 dan tabel 4.20 , tabel 4.21 berikut ini :



**Tabel-4.18**  
**Penilaian Bobot IFAS (Strength)**

No.	Daftar Pertanyaan	Nilai Rata-Rata Baris (Bobot)	Urgensi	Bobot x Urgensi
1	Penerimaan siswa baru dilakukan secara Selektif dan Transparan ( <b>Secara Online</b> ), sesuai aturan yg berlaku.	2.19	0.39	<b>0.85</b>
2.	Jumlah Sumber Daya Manusia (Tenaga Pendidik/Guru) yang Tersedia dan Berdedikasi	2.18	0.39	<b>0.84</b>
3	Pengelolaan dana dari masyarakat untuk pelaksanaan Kegiatan Program Utama (Pembayaran gaji, transport, insentif dan tunjangan tenaga pendidik) dan Kegiatan Program Penunjang	2.17	0.38	<b>0.81</b>
4.	Kerjasama dalam Bidang Sosial dgn masyarakat sekitar, guna menciptakan lingkungan sekolah yg aman dalam Proses Belajar Mengajar.	2.17	0.37	<b>0.80</b>
5.	Penerapan kurikulum nasional maupun Lokal yang relevan dengan potensi	2.14	0.34	<b>0.72</b>

	sekolah			
	Rata – Rata Kolom	-	1	4.02

**Tabel-4.19**  
**Penilaian Bobot IFAS (Weakness)**

No.	Daftar Pertanyaan	Nilai Rata-Rata Baris (Bobot)	Urgensi	Bobot x Urgensi
1.	Ketidak Aktifan orang tua dalam Mengatasi Masalah Pendidikan Anaknya.	2.20	0.39	0.85
2.	Rendahnya Kemampuan Sekolah dalam melakukan Subsidi Silang untuk murid yang tidak mampu.	2.19	0.38	0.83
3.	Belum Adanya Kelengkapan Sarana belajar utama (gedung sekolah, perabot fisik, peralatan pendidikan, buku, TIK) & Sarana menunjang yang Mendukung Kelancaran Proses Belajar Mengajar.	2.18	0.33	0.71
4.	Belum Tersedianya Lokasi sekolah yang nyaman dan Asri, bebas dari gangguan : Pencemaran Air, Udara dan Kebisingan serta Banjir.	2.18	0.32	0.70

5.	Kurangnya Kompetensi guru dalam menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan (Kurikulum) yang mendukung proses belajar mengajar, dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi (TIK) yang ada saat ini.	2.17	0.32	0.69
	Rata – Rata Kolom	-	1	3.78

**Tabel-4.20**  
**Penilaian Bobot EFAS (Opportunity)**

No.	Daftar Pertanyaan	Nilai Rata - Rata Baris (Bobot)	Urgensi	Bobot x Urgensi
1.	Keberadaan Dewan Pendidikan disetiap Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai Penyalur Aspirasi/keluhan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pendidikan.	2.20	0.39	0.85
2.	Keberadaan UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No.19/2007 tentang Standard Pengelolaan Pendidikan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mengelola penedidikan sekolah menjadi lebih efektif.	2.17	0.37	0.80
3.	Keberadaan Badan Standard Nasional Pendidikan (BSNP), Lembaga	2.16	0.37	0.79

	Sertifikasi Profesi (LSP), dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPMP) sebagai lembaga independen yang bertugas memantau proses penyelenggaraan pendidikan dan melakukan program sertifikasi guru			
4.	Terciptanya Jalinan Kemitraan Sekolah dengan Lembaga lain, yg Relevan (Seperti : Perguruan Tinggi dan Pendidikan Kedinasan).	2.15	0.35	<b>0.75</b>
5.	Dukungan dan partisipasi masyarakat dan Orang Tua Siswa serta Alumni terhadap dunia pendidikan.	2.14	0.30	<b>0.65</b>
	Rata – Rata Kolom	-	1	<b>3.84</b>

**Tabel-4.21**  
**Penilaian Bobot EFAS (Threat)**

No.	Daftar Pertanyaan	Nilai Rata-Rata Baris (Bobot)	Urgensi	Bobot x Urgensi
1	Belum mempunya Sekolah untuk Memanfaatkan dukungan masyarakat terhadap pendidikan melalui Gerakan Orang Tua Asuh (GNOTA) serta memanfaatkan Political Will Pemerintah dlm Pemberian Bea Siswa Ataupun Sekolah Gratis.	1.25	0.39	<b>0.49</b>
2	Ketidak mampuan Sekolah dlm Mencari Pembiayaan Alternative	1.24	0.39	<b>0.48</b>

	(Sponsor) untuk mempercepat pengadaan fasilitas layanan khusus dgn melibatkan Keaktifan orang tua siswa, melalui wadah komite sekolah			
3.	Rendahnya kualitas Pengawasan Rutin dari Komponen Personalia Sekolah (Kepala Sekolah sebagai Top Manajer, guru & tenaga penunjang) guna <b>Mencegah Pandangan Buruk Masyarakat Terhadap Dunia Pendidikan.</b>	1.24	0.39	<b>0.48</b>
4.	Belum mampunya Dinas Pendidikan dlm Merekrut Menseleksi & Menempatkan Para Pejabat Struktural & Para Kepala Sekolah serta Tenaga Pengajar, dgn Konsep <b>‘The Right Man On The Right Place’.</b>	1.23	0.19	<b>0.47</b>
5.	Tidak Efektif & Effesiennya Strategi yg dilaksanakan, akibat Wewenang yg diberikan kepada sekolah sebagai Dampak Negatif Pemberlakuan Otonomi Daerah & Otonomi Pendidikan, yg meliputi : Pengelolaan Sekolah, Perekrutan, Pengangkatan & Penempatan Pejabat Stuktural & Tenaga Pendidik serta Pengelolaan Keuangan ( <b>Akuntabilitas</b> ).	1.23	0.19	<b>0.47</b>
	Rata – Rata Kolom	-	1	<b>2.40</b>

Hasil penelitian yang dilakukan, untuk proyeksi yang akan datang menunjukkan adanya Penilaian Positif Responden terhadap proyeksi masa depan bagi Efektifitas Lembaga Pendidikan Formal dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini terlihat dari bobot setiap unsur-unsur : Strength (S) : 4.02 (Tabel-4.18) dan Opportunity (O) : 3.84 (Tabel-4.20) jauh lebih besar jika dibandingkan dengan unsur – unsur :

Weakness (W) : 3.78 (Tabel-4.19) dan Threat (T) : 2.40 (Tabel-4.21) .

Langkah berikutnya adalah melakukan Analisa Kuadran SWOT berikut ini :

1. Kuadran I (Positif, Positif → SO)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang.

Rekomendasi strategi yang diberikan adalah : Progresif / Agresif. Artinya : organisasi dalam kondisi prima dan mantap, sehingga sangat memungkinkan untuk melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal.

2. Kuadran II (Positif, Negatif → ST)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat, namun menghadapi tantangan besar.

Rekomendasi strategi yang diberikan adalah : Diversifikasi.

Artinya : organisasi dalam kondisi prima dan mantap, namun menghadapi sejumlah tantangan berat, sehingga diperkirakan roda organisasi akan mengalami kesulitan untuk terus berputar bila hanya bertumpu pada strategi sebelumnya. Oleh karena itu, organisasi disarankan untuk segera memperbanyak ragam strategi taktisnya.

3. Kuadran III (Negatif, Positif → WO)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah, namun sangat memiliki Peluang.

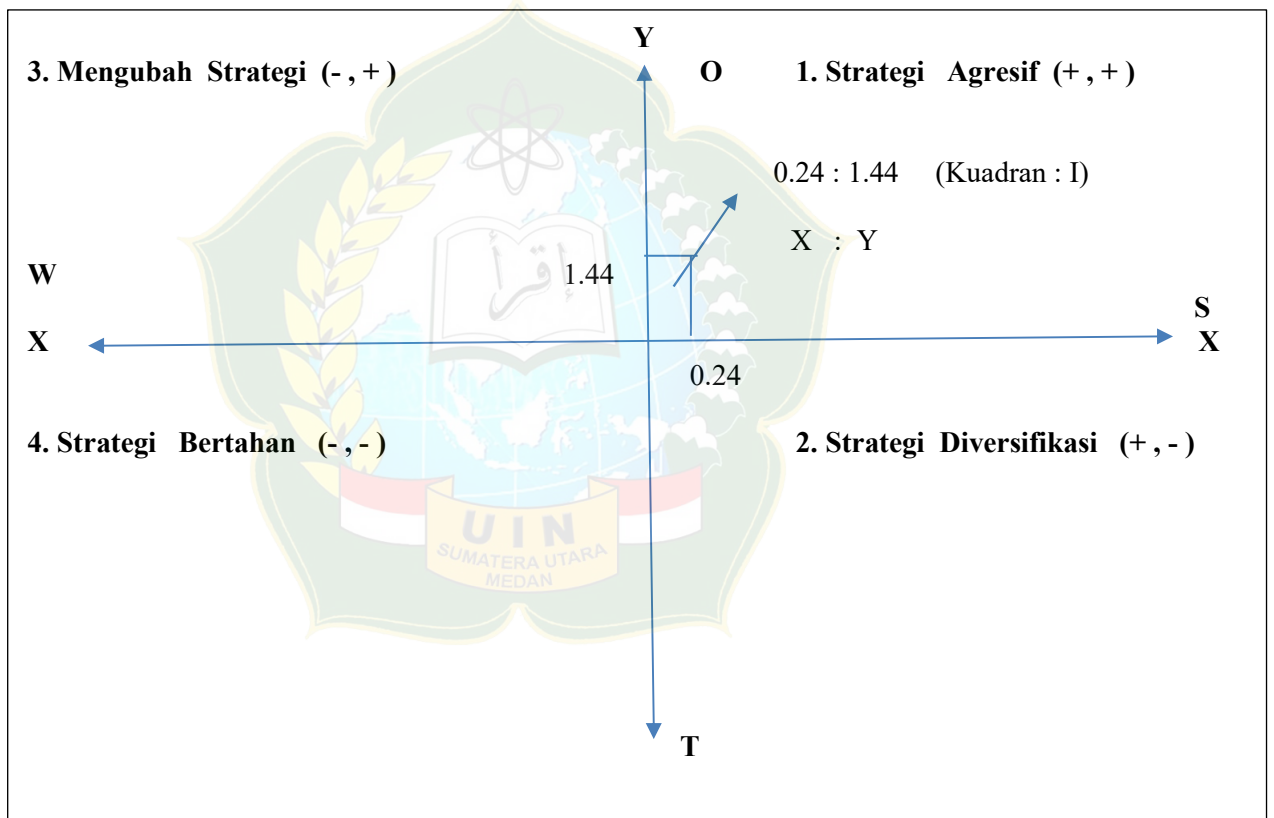
Rekomendasi strategi yang diberikan adalah : Mengubah Strategi / Turn Around, artinya : organisasi disarankan untuk mengubah strategi sebelumnya. Sebab strategi yang lama dikhawatirkan sulit untuk dapat menangkap peluang yang ada, sekaligus memperbaiki kinerja organisasi.

4. Kuadran IV (Negatif, Negatif → WT)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah dan menghadapi tantangan besar.

Rekomendasi strategi yang diberikan adalah : Strategi Bertahan / Defensif, artinya : kondisi internal organisasi berada pada pilihan Delematis. Oleh karenanya organisasi disarankan untuk Menggunakan Strategi Bertahan, Mengendalikan Kinerja Internal, Agar Tidak Semakin Terperosok. Strategi ini dipertahankan sambil terus berupaya membenahi diri.<sup>92</sup>

Gambar – 4.7. Kuadran Analisis SWOT Strategi Prioritas



Rekomendasi strategi yang diberikan adalah : **Progresif / Agresif.**

Artinya : Kabupaten Serdang Bedagai dalam kondisi prima dan mantap, sehingga sangat memungkinkan untuk melakukan ekspansi / membuat berbagai

<sup>92</sup> Ferddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2018, h. 20.

program kerja, untuk meraih kemajuan secara maksimal.

Dari Hasil Perhitungan dalam Matriks IFAS dan EFAS diperoleh :

Total Kekuatan (S) = 4.02                      Total Kelemahan (W) = 3.78

Total Peluang (O) = 3.84                      Total Ancaman (T) = 2.40

Selanjutnya Menentukan Posisi Kuadran SWOT yaitu :

Posisi Sumbu X adalah :

$X = \text{Total Kekuatan (S)} - \text{Total Kelemahan (W)}$

$X = 4.02 - 3.78$

$X = 0.24$

Posisi Sumbu Y adalah :

$Y = \text{Total Peluang (O)} - \text{Total Ancaman (T)}$

$Y = 3.84 - 2.40$

$Y = 1.44$

**Perpotongan Sumbu X dan Sumbu Y adalah : 0.24 : 1.44**

Berdasarkan berbagai Kajian/ Analisa diatas, maka strategi optimal yang dapat digunakan untuk memberikan Usulan Alternatif Strategi Prioritas dalam Mengatasi Tingginya Angka Anak Putus Sekolah di Kabupaten Serdang Bedagai, **adalah : SO** (Berada Pada Titik Potong Sumbu X:Y --→ 0.24 : 1.44)

**2. Strategi yang Tepat** dalam Mengatasi Tingginya Angka Anak Putus Sekolah **Dalam Perspektif Ekonomi Syariah** di Kabupaten Serdang Bedagai dan Pengimplementasiannya.

Strategi adalah : Seni dan Ilmu Penyusunan, Penerapan dan Pengevaluasian keputusan-keputusan lintas fungsional yang dapat memungkinkan suatu perusahaan mencapai sasarannya. Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan Gagasan, Perencanaan dan Eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.

Dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip – prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan dan memiliki



taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.<sup>93</sup>

Dari hasil analisa Kuadran SWOT yang dilakukan, maka langkah berikutnya adalah menetapkan langkah Strategi dan Implementasinya, yakni :

### **Strategi : S**

#### **1).Meningkatkan pengawasan pada proses Penerimaan Siswa Baru dengan memanfaatkan keaktifan orang tua siswa dalam Mengatasi Masalah Pendidikan Anaknya serta bekerjasama dengan Dewan Pendidikan Sekolah.**

Strategi ini bertujuan meningkatkan partisipasi aktif orang tua, sekaligus melibatkan peranan Dewan Pendidikan untuk memantau dan mengawasi proses penerimaan siswa, agar sesuai dengan prosedur dan standar pendidikan nasional yang telah ditetapkan. Guna mencegah kecurangan yang dilakukan oleh pihak tertentu, sehingga dapat mengurangi persepsi buruk masyarakat terhadap dunia pendidikan. Untuk efektifnya strategi ini dilakukan :

Pembentukan panitia penerimaan siswa baru dengan mengikut sertakan keterlibatan Dewan Pendidikan seperti masyarakat yang peduli pendidikan. Lembaga Swadaya Masyarakat yang benar – benar kompeten terhadap pendidikan, guna mewujudkan proses penerimaan yang transparan.

Merencanakan sistem penerimaan siswa baru secara online mulai dari proses seleksi hingga pendaftaran ulang, agar semua dapat terlayani dengan baik. Selain itu juga dapat membantu sekolah agar mempunyai sistem database siswa yang terpadu dan lengkap.

#### **2).Menciptakan Jalinan Kemitraan Sekolah dengan Lembaga lain yang Relevan (Seperti : Perguruan Tinggi dan Pendidikan Kedinasan) berkaitan dengan Investasi (Beasiswa) dan Pemanfaatan Output lulusan (Alumni), dengan Meningkatkan Kemampuan Sekolah dalam melakukan Subsidi**

---

<sup>93</sup> Siregar, Nurmayana, *“Manajemen Strategi”*, Medan : Perdana Publishing, 2020.

### ***Silang untuk Murid yang Tidak Mampu.***

Memanfaatkan Kemampuan Sekolah dalam melakukan Subsidi Silang untuk murid yang tidak mampu dengan terus melakukan kerjasama dengan para orang tua murid yang bercukupan, memanfaatkan dukungan masyarakat terhadap pendidikan melalui Gerakan Orang Tua Asuh serta memanfaatkan Political Will Pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan pemberian Beasiswa atau sekolah gratis, sehingga dapat menekan angka putus sekolah.

### ***3).Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan layanan khusus (laboratorium, perpustakaan pemanfaatan TIK dll) yang disertai dengan peningkatan kualitas tenaga administrasi, laboran dan pustakawan dengan memanfaatkan peran pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan.***

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas proses pembelajaran para siswa, karena dengan adanya penyediaan fasilitas tersebut oleh pihak sekolah (baik swadaya maupun dengan bantuan pemerintah) para siswa dapat lebih memahami pelajaran yang disampaikan oleh para pengajar, karena dengan adanya bantuan alat peraga, materi yang disampaikan oleh pengajar akan lebih mudah terserap dan dipahami oleh para siswa, selain itu para siswa juga dapat menambah dan mengembangkan pengetahuannya dengan memanfaatkan TIK. Disamping itu, strategi ini juga dapat meningkatkan kualitas para operator layanan khusus, karena secara langsung mereka dituntut untuk dapat membantu membimbing para siswa.

### ***4). Melakukan kerjasama dlm Bidang Sosial dengan masyarakat sekitar, guna mengupayakan lokasi sekolah yang nyaman dan Asri, sehingga terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Bebas dari : Polusi Udara, Air dan Kebisingan serta Banjir.***

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif dan sekaligus melibatkan peran masyarakat dalam mendukung kelancaran proses pendidikan,

sehingga dapat memudahkan/meringankan beban sekolah dalam memperbaiki serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan ditingkat sekolah. Hal ini akan tercapai apabila sekolah benar – benar mampu menjadikan masyarakat sebagai mitra dalam pengembangan dan peningkatan kualitas sekolah. Karena tanpa dukungan yang kuat dari lingkungan masyarakat sekitar akan sulit bagi sekolah untuk berkembang.

Agar strategi ini dapat bekerja secara efektif, maka untuk mengimplementasikannya harus dibuat perencanaan program terlebih dahulu. Yaitu : merencanakan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat disekitar sekolah, seperti : melaksanakan gotong royong dalam kebersihan sekolah dan lingkungan sekitar sekolah, penanaman pohon dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya, sehingga masyarakat merasa turut memiliki sekolah tersebut dan merasa bertanggung jawab bagi perkembangannya kedepan.

***5). Meningkatkan Kemampuan dan Kompetensi guru sesuai bidangnya dengan memanfaatkan perkembangan IPTEK saat ini. Serta mendorong dan memberi kesempatan untuk mengikuti proses sertifikasi profesi guna meningkatkan mutu guru.***

Strategi ini bertujuan untuk menciptakan dan membina SDM (Pendidik/guru) menjadi berkualitas dan profesional serta memiliki kemampuan dibidang IPTEK guna mendukung proses belajar mengajar. Terutama dalam **Proses Pembelajaran E-Learning** saat ini.

Agar strategi ini dapat bekerja secara efektif, maka untuk mengimplementasikannya, harus diadakan perencanaan programnya terlebih dahulu, antara lain :

- 1) Melakukan identifikasi / pemetaan terhadap kemampuan guru.
- 2) Pengembangan jenjang karir
- 3) Peningkatan jenjang pendidikan pengajar
- 4) Pembahagian tugas yang adil dan merata sesuai dengan kemampuan.
- 5) Menetapkan budaya reward and punishment agar tercipta iklim kerja yang kondusif dan kompetitif yang sehat.

- 6) Meningkatkan kemampuan guru dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

**Srategi : O**

- 1). *Memanfaatkan Political Will dari Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Dinas Pendidikan) dalam Pemberian Bea Siswa Ataupun Sekolah Gratis, dan Menggaungkan kembali GNOTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh).*

Memotivasi dan memberdayakan jumlah Sumber Daya Manusia yang tersedia menjadi lebih profesional dibidangnya dengan memanfaatkan Jasa Konsultan Pendidikan sebagai pemberi masukan dan Political Will Pemerintah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Termasuk Perbaikan Tingkat Kinerja Tenaga Pendidik.

- 2). *Memanfaatkan Keberadaan Dewan Pendidikan yang terdapat disetiap Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai Penyalur Aspirasi/keluhan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pendidikan.*

- 3). *Memperbaiki Sistem Managemen Keuangan Sekolah dan dana dari masyarakat untuk pelaksanaan program kegiatan utama dan program kegiatan penunjang, mengacu kepada standar pembiayaan yang telah ditentukan secara transparan dan Akuntabel dengan melibatkan Keaktifan orang tua Siswa, melalui Wadah Komite Sekolah.*

Strategi ini bertujuan untuk menciptakan **Sistem Manajemen Keuangan** sekolah yang efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan (Akuntabel), dengan begitu penyalahgunaan anggaran sekolah untuk kegiatan yang kurang mendatangkan manfaat bagi para siswa dapat diminimalisasi. Sehingga anggaran untuk kegiatan program utama dan penunjang dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu strategi ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif sekaligus peran serta orang tua dalam pembuatan : Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS),

sehingga orang tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima sekolah dan digunakan untuk apa saja, dengan begitu semakin memperkecil peluang terjadinya penyimpangan dalam pembuatan anggaran sekolah.

**4).Melaksanakan Sistem Managemen Sumber Daya Manusia dengan menerapkan Konsep ‘The Right Man on The Right Place’, Yang dimulai dari : Perekrutan, Pengangkatan dan Penempatan Para Pejabat Struktural dan Tenaga Pendidik serta Pengelolaan Keuangan.**

**5). Meningkatkan Kualitas Managemen Sekolah, Bagi Para Pejabat Struktural Dinas Pendidikan dan Jajarannya sebagai dampak dari pemberlakuan Otonomi Daerah dan Otonomi Pendidikan, sehingga tercipta Strategi yang Effesien dan Effektif.**

Strategi ini bertujuan meningkatkan kemampuan para pejabat struktural Dinas Pendidikan dan Jajarannya, sebagai manajer perencanaan sekaligus sebagai pengatur, pengorganisir dan pemimpin keseluruhan pelaksanaan tugas – tugas pendidikan di sekolah, untuk dapat membangun manajemen sekolah yang effesien dan efektif seiring dengan perubahan – perubahan yang sedang terjadi dimasyarakat. Sehingga sekolah melalui Program – program pendidikannya dapat disajikan sesuai dengan kebutuhan baru dan kondisi baru, termasuk perkembangan kebijakan makro pendidikan.

Agar strategi ini dapat bekerja secara efektif maka untuk mengimplementasikannya Para Pejabat Struktural dan Jajarannya harus membuat perencanaan atau program kerja terlebih dahulu, antara lain :

- 1) Peningkatan pemahaman tentang konsep dasar kepemimpinan efektif
- 2) Peningkatan kemampuan berkomunikasi secara tepat untuk mengarahkan program sekolah.
- 3) Membuat jadwal pelaksanaan program – program yang telah direncanakan, untuk dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

### **STRATEGI SO :**

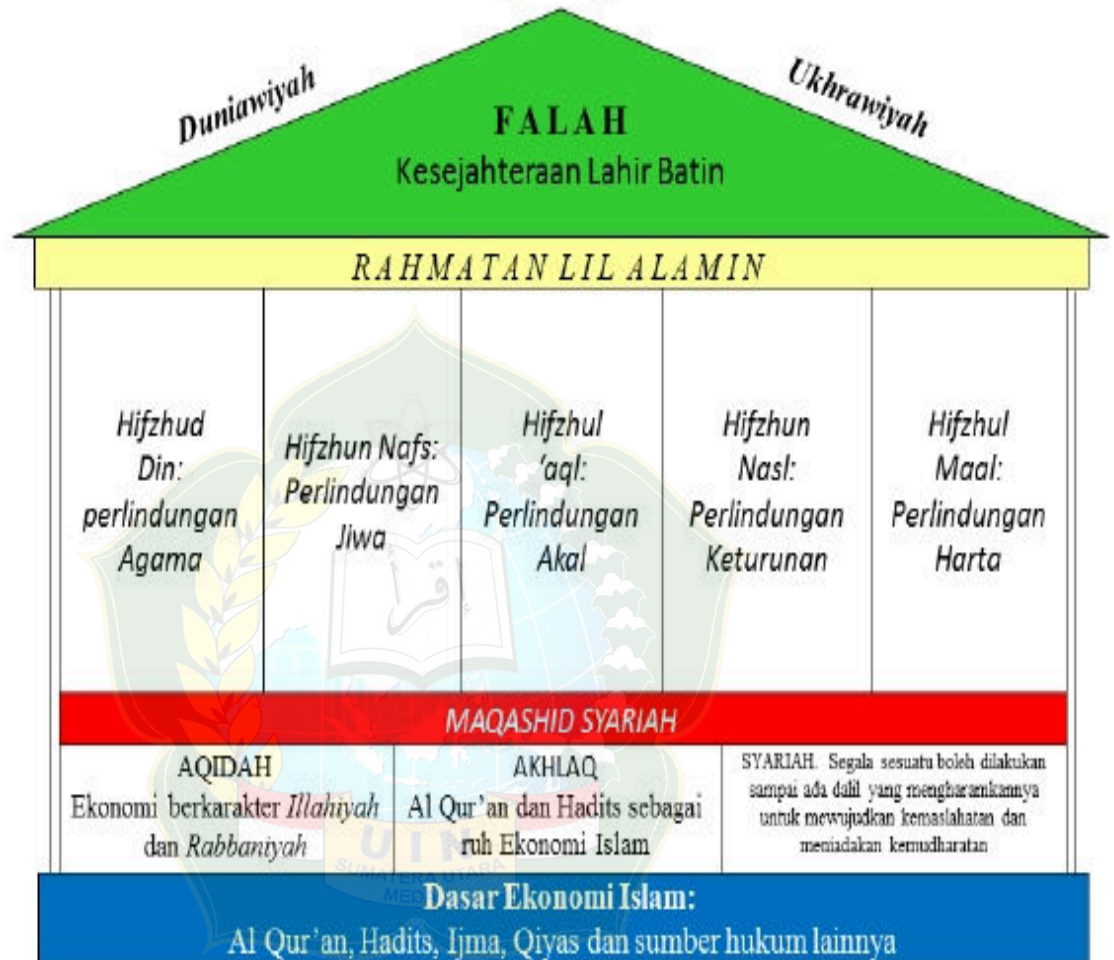
1. Meningkatkan pengawasan pada proses Penerimaan Siswa Baru dengan memanfaatkan keaktifan orang tua siswa dalam Mengatasi Masalah Pendidikan Anaknya serta bekerjasama dengan Dewan Pendidikan Sekolah. Pelaksanaannya dipantau dan dievaluasi oleh lembaga Independen Pendidikan yang relevan (BSNP = Badan Standar Nasional Pendidikan).
2. Menciptakan Jalinan Kemitraan Sekolah dengan Lembaga lain yang Relevan (Seperti : Perguruan Tinggi dan Pendidikan Kedinasan) berkaitan dengan Investasi (Beasiswa) dan Pemanfaatan Output lulusan (Alumni), dengan Meningkatkan Kemampuan Sekolah dalam melakukan Subsidi Silang untuk Murid yang Tidak Mampu.
3. Melaksanakan pengadaan Sarana dan Prasarana pendidikan layanan khusus (laboratorium, perpustakaan pemanfaatan TIK dll) yang disertai dengan peningkatan kualitas tenaga administrasi, laboran dan pustakawan dengan memanfaatkan peran pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Mengacu kepada Standar Pembiayaan yang telah ditentukan (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.19/2007 tentang Standar Pendidikan (termasuk Standar Pembiayaan).
4. Melakukan kerjasama dalam Bidang Sosial dengan masyarakat sekitar, guna mengupayakan lokasi sekolah yang nyaman dan Asri, sehingga terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Bebas dari : Polusi Udara, Air dan Kebisingan serta Banjir.
5. Meningkatkan Kemampuan dan Kompetensi Guru sesuai bidangnya dengan memanfaatkan perkembangan IPTEK saat ini. Serta mendorong dan memberi kesempatan untuk mengikuti proses sertifikasi profesi guna meningkatkan mutu guru. Bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPMP) sebagai Lembaga Independen yang bertugas memantau proses penyelenggaraan pendidikan dan melakukan **Program Sertifikasi Guru**.
6. Memanfaatkan Political Will dari Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Dinas Pendidikan) dalam **Pemberian Bea Siswa** Ataupun Sekolah

Gratis, dan Menggaungkan kembali **GNOTA** (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh).

7. Memanfaatkan **Keberadaan Dewan Pendidikan** yang terdapat di setiap Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai Penyalur Aspirasi/keluhan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Memperbaiki Sistem Manajemen Keuangan Sekolah dan **Dana dari Masyarakat** untuk pelaksanaan program kegiatan utama dan program kegiatan penunjang, mengacu kepada standar pembiayaan yang telah ditentukan secara Transparan dan **Akuntabel** dengan melibatkan Keaktifan orang tua Siswa, melalui Wadah Komite Sekolah.
9. Melaksanakan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia dengan menerapkan Konsep : '**The Right Man on The Right Place**', Yang dimulai dari : Perekrutan, Pengangkatan dan Penempatan Para Pejabat Struktural dan Tenaga Pendidik serta Pengelolaan Keuangan. Mengacu pada : UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
10. Meningkatkan Kualitas Manajemen Sekolah, Bagi Para Pejabat Struktural Dinas Pendidikan dan Jajarannya sebagai **Dampak Negatif** dari pemberlakuan Otonomi Daerah dan Otonomi Pendidikan, sehingga tercipta Strategi yang Efisien dan Efektif, yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.19/2007 tentang Standard Pengelolaan Pendidikan (termasuk Standar Pembiayaan).

Otonomi Daerah Dalam Prospektif Maqashid Syariah

Gambar 1. Rancang Bangun Ekonomi Islam



Belajar ekonomi Islam merupakan jihad suci yang bertujuan untuk membebaskan masyarakat dari pengaruh nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam (pembangunan secara menyeluruh). Selain itu, melalui ekonomi Islam kita dapat memperbaiki kondisi, menegakkan hukum Islam serta menyelamatkan akhlak dan membangkitkan keluhuran dalam bidang ekonomi. Selanjutnya untuk memperbaiki kondisi perekonomian, Islam memiliki rancang bangun ekonomi Islam yang berdasar pada Al Quran, hadits, ijma', qiyas dan dipilah menjadi tiga ajaran, yakni :



1. Aqidah : ekonomi yang berkarakter ilaihiyah dan rabbaniyah
2. Akhlak : Al Quran dan hadits sebagai ruh ekonomi Islam
3. Syariah : segala sesuatu yang boleh dilaksanakan jika ada dalilnya

Ketiga hal tersebut bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah) dengan memelihara lima maqashid syariah yang terdiri dari :

1. Hifdzud Diin (Agama),
2. Hifdzun Nafs (Jiwa),
3. Hifdzul Aql (Akal),
4. Hifdzun Nasl (Keturunan),
5. Hifdzul Maal (Harta).

Jika bank syariah ingin menerapkan rancang bangun ekonomi Islam dalam sistem operasionalnya, maka kunci utamanya terletak pada baitul maal, menerapkan maqashid syariah, dan mengatur **ZISWAF** untuk mensejahterakan masyarakat.

#### **Kontribusi ZISWAF Dalam Mensejahterakan Masyarakat.**

Salah satu solusi yang ditawarkan sector keuangan social Islam menghadapi krisis adalah melalui **Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Ziswaf)**. Khususnya zakat untuk meningkatkan stimulan konsumsi dan produksi mustahik yang akan menghasilkan permintaan (*demand*) yang secara paralel akan menghasilkan permintaan (*supply*) yang lambat laun akan mengembalikan keseimbangan transaksi ekonomi dimasyarakat.

Pada hakikatnya zakat adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. Karena memang salah satu tujuan utama adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pengertian shadaqah, infak, zakat memang beragam sesuai dengan sudut pandang yang memperhatikan, tetapi sebenarnya semuanya adalah shadaqah yang mana pengertian shadaqah lebih luas dan umum sesuai dengan QS. at-Taubah Ayat

: 60. **Zakat merupakan salah satu rukun Islam** yang menjadi kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu.

**Zakat bukanlah pajak yang merupakan sumber pendapatan negara.** Karena itu, keduanya harus dibedakan. Perkataan zakat disebut di dalam Al-Qur'an 82 kali banyaknya, dan selalu dirangkaikan dengan shalat yang merupakan rukun Islam kedua. Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat menonjolkan kepaduan antara aspek ilahiyah dan aspek insanîyah adalah zakat, dan menjadi salah satu sisi ajaran Islam yang belum ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan, baik kemiskinan fisik maupun kemiskinan mental dalam bentuk pendidikan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah.

Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan generasi penerusnya dizaman keemasan Islam, padahal umat Islam (Indonesia) sebenarnya mempunyai potensi dan dana besar yang belum tergalai dari sumbernya yaitu masyarakat muslim yang kaya (kaum aghniya'). Mengapa potensi yang sangat besar ini tidak dapat teroptimalkan..?

Salah satu jawabannya adalah karena potensi besar ini tidak diiringi dengan pengetahuan masyarakat aghniya' yang memadai tentang arti penting wajibnya mengeluarkan zakat bagi mereka.

Definisi zakat, infak, shadaqah menurut **UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat** yaitu :

**Zakat** adalah : harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

**Infak** adalah : harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.

**Sedekah** adalah : harta dan nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.

Menurut syariat, **Wakaf** bermakna : menahan pokok atau dengan kata lain, wakaf berarti menahan harta dan mengalirkan manfaat-manfaatnya di jalan

Allah SWT. Dengan berwakaf, seorang muslim tidak hanya memperoleh keberkahan diakhirat seiring ketahanan manfaat harta yang diwakafkan.

Dalam konteks zakat, kita mengenal ada setidaknya empat klasifikasi orang berdasarkan pendapatan atau kepemilikan harta adalah :

- 1). Fakir (*ekstreme poor*) dimana mereka hanya memiliki pendapatan kurang dari 50 persen kebutuhan hidup layak.
- 2). Kedua miskin (*poor*) dimana kisaran pendapatan mereka sekitar 50-99 persen dari standar kebutuhan hidup layak (*had kifayah*). Fakir dan miskin (*mustahik*) ini adalah orang yang hidup dibawah garis kemiskinan.
- 3). Tidak Miskin tapi bukan *muzaki*, dimana pendapatan mereka diatas standar hidup layak (*had kifayah*) namun belum mencapai garis *nishob* untuk membayar zakat. Namun mereka sudah bisa dengan mudah untuk membayar infak (*munfiq*). Termasuk didalamnya orang-orang yang rentan miskin seperti para pedagang, pekerja informal atau sektor UMKM yang bertumpu pada penghasilan harian.
- 4). *Muzaki* (zakat payer), mereka adalah orang yang memiliki pendapatan/harta melebihi garis *nishob* sehingga wajib membayar zakat.

Dari ke-empat klasifikasi tersebut, maka tipe ketiga adalah yang paling rentan untuk kembali menjadi *mustahik* dan hidup dibawah garis kemiskinan pada saat terjadi krisis seperti saat ini. Sementara tipe pertama dan kedua akan jauh lebih sulit hidupnya. Dapat dipastikan pengangguran akan meningkat terutama pada sektor UMKM karena tidak berjalannya transaksi ekonomi. Maka yang terjadi adalah penurunan jumlah muzaki yang diikuti dengan peningkatan jumlah *mustahik*.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup>Nazlah, Khairina, “*Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa*”, Jakarta, Gramedia, 2020, h. 20-43.

**Menurut UU No. 41 Tahun 2004 wakaf adalah** perbuatan hukum wakif (pemberi wakaf) untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Namun yang terjadi saat ini masih jauh dari harapan. Termasuk Kontribusi Lembaga Keuangan Syariah belum maksimal, contoh seperti : bank syariah, yang merupakan lembaga keuangan yang berdasarkan Syariat Islam, masih cenderung berpikir tentang tjiarah daripada tabarru". Bank syariah lupa akan fungsi sosial dan non-profit (fungsi baitul maal), padahal jika fungsi tersebut dioptimalkan dan berjalan dengan baik akan membantu orang-orang miskin, menciptakan lapangan pekerjaan sehingga pengangguran dapat berkurang. Keberkahan adalah ukuran absolut. Pertumbuhan ekonomi harus dibangun melalui instrument yang halal. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam :

**QS. Al A'raf Ayat : 96 yaitu :**



*96. Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.*

Untuk itu dalam mengukur kekaffahan bank syariah, kita bisa melihat dari akad-akad yang dijalankan. Jika dianalisis, akad di bank syariah yang paling kaffah dan sesuai syariat adalah akad qardhul hasan, qardh, mudharabah, syirkah, ijarah, dan jual beli (salam, istishna", murabahah). Selain dari akad-akad yang ada bank syariah, tolak ukur kekaffahan bank syariah dalam menjalankan syariat Islam dapat dilihat dari operasional, implementasi

maqashid syariah, laporan keuangan, hukum positif, dan pelayanan yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya. Ekonomi bukan urusan akal semata. Hal ini tercantum dalam :

**QS. At Thalaq Ayat : 10 berbunyi :**



*10. Allah menyediakan bagi mereka azab yang keras, Maka bertakwalah kepada Allah Hai orang-orang yang mempunyai akal; (yaitu) orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepadamu,*

Selanjutnya implementasi maqashid syariah dalam bank syariah bisa dicapai dengan pemeringkatan kebutuhan yang dibutuhkan bank syariah.

Istilah maqâshid al-syarî'ah awalnya dikembangkan oleh al-Ghazâlî (w. 505 H/1111 M) dan kemudian mengalami kesempurnaan konsepnya di tangan al-Syâthibî w. 790 H/1388 M). Menurut al-Syâthibî bahwa yang menjadi tujuan dari maqâshid al-syarî'ah adalah kemaslahatan hamba (manusia). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan dari syariat adalah untuk memperoleh kemaslahatan (jalb al mashâlih) dan menolak keburukan (daf' al-mafâsid). Pendapat al-Syâthibî ini juga diperkuat oleh ulama belakangan seperti Fathî al-Daraynî, Muhammad Abû Zahrah dan M. Umer Chapra.

Secara terpisah, al-Daraynî menjelaskan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan lain yaitu kemaslahatan manusia. Sementara itu Abû Zahrah mengatakan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan.<sup>95</sup>

Dalam konteks ekonomi, M. Umer Chapra menjelaskan bahwa pada dasarnya maqâshid al-syarî'ah mengandung semua yang diperlukan manusia untuk merealisasikan falâh dan hayâtan thayyibah dalam batas-batas syariat

<sup>95</sup> Yafiz, Muhammad, *“Argumen Integrasi Islam & Ekonomi, Melacak Rasionalitas Islamissi Ilmu Ekonomi ”*, Medan, : FEBI UIN-SU Press, 2015, h.78 – 79.

Menurut Chapra, pengertian ini sesuai dengan tujuan utama mengapa Nabi Muhammad Saw diutus kemuka bumi, yaitu untuk membawa rahmat bagi seluruh alam, yang manusia adalah bagian darinya.

Berikut ini akan dijelaskan masing-masing dari kelima unsur pokok diatas, khususnya dilihat dari perspektif ekonomi Islam.

### **Pertama, Iman (dîn).**

Pemeliharaan dan pengembangan terhadap iman (dîn) diletakkan pada urutan pertama karena berperan sebagai cara pandang dunia (worldview) yang dapat mempengaruhi kepribadian seseorang yang meliputi perilaku, gaya hidup, selera (preferensi) dan sikapnya, baik terhadap manusia, lingkungan maupun sumber daya (resources). Ini juga sangat terkait dengan upaya dalam menentukan sifat, kualitas dan kuantitas kebutuhan yang ingin dipenuhi serta cara mendapatkannya. Sebagai konsekuensinya, diharapkan terciptanya keseimbangan antara dorongan material dan spiritual, meningkatnya solidaritas keluarga dan sosial, serta mencegah berkembangnya anomie (ketiadaan standar moral). Ini juga sekaligus akan menjadi saringan moral (moral filter) dalam menentukan tindakan ekonomi yang dilakukan. Signifikansi pandangan ini, menurut Chapra, berangkat dari kenyataan bahwa tidak ada satu perangkat nilai yang mampu berhasil mengawal dan maintain moral kecuali agama (keimanan). Selanjutnya Chapra menambahkan bahwa tidak ada satu motivasi pun yang mampu menundukkan preferensi pribadi seseorang dengan mengutamakan kepentingan sosial yang didasarkan pada kebersamaan dan kekeluargaan (brotherhood).

Demikian pula halnya dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memperkuat solidaritas sosial dan kerjasama antara individu. Tentunya hanya motivasi keimanan saja yang dapat melakukan tugas ini. Disinilah keimanan memberikan perspektif jangka panjang yang lebih luas dari hanya ruang lingkup dunia.

Perspektif ini meniscayakan adanya pertanggungjawaban (fully accountable) dalam bentuk reward and punishment serta mampu membuat

individu dan kelompok sadar mengenai kewajiban sosial mereka dan sekaligus memotivasi mereka untuk tidak memenuhi tuntutan terhadap sumber daya secara egois sehingga dapat menciptakan konflik antara kepentingan pribadi dan sosial. Oleh karena itu, unsur keimanan (dîn) yang didasarkan kepada ke-Tuhan-an, hari akhir dan amal saleh harus dijadikan titik tolak pemikiran dan tindakan ekonomi. Konsekuensi dari keimanan kepada Tuhan (tauhid) sebagai pencipta dan pemilik alam semesta menjadikan setiap usaha untuk mencari rezeki hendaklah melalui cara yang halal dan beretika dengan mengikuti petunjuk-Nya. Kepercayaan pada hari akhir mengandung konsekuensi bahwa kegiatan ekonomi itu harus dilakukan secara bebas tetapi bertanggung jawab, dengan cara-cara tertentu yang dapat dirumuskan kedalam norma-norma ekonomi. Sedangkan amal saleh meniscayakan perbuatan yang harmonis dengan lingkungan atau memberi manfaat kepada orang lain.

#### **Kedua, Jiwa (nafs).**

Berkaitan dengan pemeliharaan dan pengembangan jiwa manusia, Chapra menyatakan bahwa hal tersebut harus dilakukan dengan memenuhi kebutuhan utamanya. Kebutuhan yang dimaksudkan tidak hanya untuk menjamin keberlangsungan jiwa dan kesejahteraan, melainkan memastikannya dapat melakukan perannya sebagai khalifah secara efektif. Diantara hal terpenting untuk kebutuhan tersebut adalah terpenuhinya martabat (dignity), penghargaan (self respect), persaudaraan (human brotherhood) dan persamaan sosial (social equity). Ini semua adalah fitrah dari setiap manusia yang mempunyai kecenderungan alamiah untuk dihargai dan diperlakukan sama tanpa diskriminasi akibat perbedaan warna kulit, suku, jenis kelamin dan lainnya. Bersamaan dengan itu, manusia juga menginginkan tumbuhnya persaudaraan diantara sesama dengan adanya rasa saling toleransi dalam menggunakan sumber daya (resources) yang telah disediakan Tuhan.

Selanjutnya Chapra menambahkan bahwa hal lain yang juga merupakan substansi dari itu semua adalah kebutuhan akan rasa adil (justice) dan

sebaliknya menghindari kedzaliman (injustice). Hal ini tentunya hanya dapat terwujud apabila setiap individu dan institusi menyadari urgensi kehadirannya melalui nilai-nilai moral yang dibangun berdasarkan pandangan dunia yang religius (religious worldview). Disamping kebutuhan diatas, kebutuhan lainnya yang juga sangat terkait adalah adanya jaminan hidup, hak milik dan kehormatan (security of life, property and honour). Hal ini memberikan konsekuensi bahwa kegiatan ekonomi harus melindungi jiwa manusia dan menghindari kegiatan ekonomi yang membahayakan jiwa manusia, misalnya ancaman kekerasan, kriminalitas dan pembunuhan, produksi obat-obatan dan makanan yang membahayakan kesehatan manusia, eksploitasi sumberdaya alam yang merusak ekologi dan membahayakan hidup manusia dan lainnya. Kebutuhan lain yang diperlukan oleh manusia adalah kebebasan (freedom) dan pendidikan (education). Dengan kebebasan manusia dapat meningkatkan kepribadiannya dengan melakukan pelbagai inovasi dan kreativitas hidup. Sedangkan dengan pendidikan manusia akan mampu mendapatkan pencerahan tentang nilai moral Islam dan pandangan dunia untuk menjalankan misi kekhilafahan dengan benar, disamping juga untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat mereka. Tidak cukup hanya sampai di situ, Chapra menambahkan sejumlah kebutuhan lainnya berkaitan dengan pemeliharaan dan pengembangan jiwa (nafs) manusia. Kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah tersedianya pemerintahan (good governance) yang baik bagi terciptanya stabilitas social dan politik, ketersediaan kebutuhan hidup (need fulfillment), ketersediaan lapangan kerja (self employment opportunity), distribusi pendapatan dan kekayaan secara merata (equitable distribution of income and wealth), menikah dan berkeluarga (marriage and stable family life), perasaan damai dan kebahagiaan (mental peace and happiness) serta beberapa kebutuhan lainnya.

### **Ketiga, Akal ('aql).**

Akal adalah karakteristik yang membedakan setiap manusia dan perlu



untuk dikembangkan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi dan masyarakat. Menurut Chapra, **untuk pemeliharaan dan pengembangan akal diperlukan dukungan tersedianya kualitas pendidikan yang baik dengan harga terjangkau, fasilitas perpustakaan penelitian (library and research facilities), kebebasan berpikir dan berekspresi (freedom of thought and expression), penghargaan atas prestasi kerja, dan keuangan (finance).** Pemeliharaan dan pengembangan akal memberikan konsekuensi bahwa kegiatan ekonomi itu dilakukan berdasarkan rasionalitas ekonomi dan menggunakan pengetahuan sebagai modal. Dalam ekonomi konvensional, rasionalitas diukur berdasarkan nilai utilitarianisme, yaitu kegiatan ekonomi harus bisa mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya kepada sebanyak mungkin orang. Rasionalitas ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan yang mengandung unsur persamaan, pemerataan dan keseimbangan manfaat ekonomi. Selain itu, berdasar pada penghormatan pada akal yang merupakan anugerah Tuhan yang utama kepada manusia, maka kegiatan ekonomi juga harus mengembangkan dan menghargai akal atau pengetahuan sebagai modal.

#### **Keempat, Keturunan (nasl).**

Tidak ada peradaban yang dapat bertahan apabila generasi penerusnya mempunyai kualitas yang rendah, baik secara spritual, fisik maupun mental. Oleh karena itu, diperlukan generasi masa depan yang tangguh dan mampu merespon tantangan zamannya. Generasi muda harus diberikan pendidikan sejak mereka masih kecil dan keluarga adalah institusi pertama yang bertanggung jawab untuk menanamkan pendidikan moral dan akhlak yang mulia. Rasulullah Saw bersabda bahwa orang mukmin yang kuat lebih baik dan disenangi Allah daripada orang mukmin yang lemah. Untuk terselenggaranya pemeliharaan dan pengembangan unsur keturunan (nasl) ini diperlukan beberapa faktor pendukung.

Chapra menyebutkan bahwa diantara faktor-faktor tersebut adalah pernikahan dan keluarga yang berintegritas (marriage and family integrity)

dengan kepastian kesehatan ibu dan gizi yang cukup bagi perkembangan anak, pemenuhan kebutuhan hidup (need fulfillment) dengan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan dengan cara penciptaan dan menjamin ketersediaan sumberdaya ekonomi bagi generasi sekarang dan yang akan datang, lingkungan yang bersih dan sehat (healty and clean environment) dengan konsep pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan (sustainable development), terbebasnya dari konflik (freedom from conflict) dan jaminan keamanan (scurity).

#### **Kelima, Harta (mâl).**

Meletakkan harta pada urutan terakhir tidaklah berarti bahwa harta tidak memiliki peran yang penting. Bahkan dapat dipastikan bahwa tanpa harta, maka keempat unsur maqâshid al-syarî'ah sebelumnya tidak akan dapat terlaksana dengan baik dalam rangka menciptakan kesejahteraan manusia. Ada beberapa konsekuensi dari perlindungan dan pengembangan harta. Konsekuensi ekonominya adalah:

1. Bahwa manusia memiliki hak untuk memperkaya sumberdaya ekonomi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi mengandung fungsi sosial karena **Harus Membagi Hak Itu Kepada Orang Lain** atau masyarakat keseluruhan.
2. Kegiatan ekonomi harus bisa memperbanyak pilihan (freedom of choise) dalam konsumsi yang berarti memperluas kebebasan dalam pilihan konsumsi.
3. Sumberdaya alam yang dimiliki oleh suatu masyarakat harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian upaya untuk memajukan ekonomi, memproduksi barang dan jasa dalam kegiatan produksi dan mengkonsumsi hasil-hasil produksi serta mendistribusikannya seharusnya berpijak pada ajaran agama.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup>Chapra, M. Umer, “*The Islamic Vision of Development in The Light of The Maqâshid al-Syarî'ah*”, (Richmond, UK: The International Institute of Islamic Thouht, 2008), h.117 – 230.

Hasil kajian dan analisa diatas, jelas bahwa Islam sangat menghargai Pendidikan, sebagaimana Firman Allah SWT dalam :

**Qur'an Surat : An-Nisa Ayat : 9** yang berbunyi :

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ خَشَوْنَ أَنَّ يُقَالُوا لَهُمْ لَسَّانًا أُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ هَرَجْنَا عَنْكَ إِذْ جَاءَكَ الْمُرْسَلُونَ وَلَٰكِن لِّئَلَّا تُقَالُوا لَهُمْ لَسَّانًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَرَجْنَا عَنْكَ إِذْ جَاءَكَ الْمُرْسَلُونَ وَلَٰكِن لِّئَلَّا تُقَالُوا لَهُمْ لَسَّانًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَرَجْنَا عَنْكَ إِذْ جَاءَكَ الْمُرْسَلُونَ وَلَٰكِن لِّئَلَّا تُقَالُوا لَهُمْ لَسَّانًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَرَجْنَا عَنْكَ إِذْ جَاءَكَ الْمُرْسَلُونَ

9. “Dan hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (**Kesejahteraan**) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”.

Kesejahteraan dapat diperoleh hanya dengan ketaqwaan kepada Allah SWT dan juga berbicara secara jujur dan benar. Pada ayat ini, Allah meminta kepada hambaNya **Untuk Memperhatikan Kesejahteraan Generasi Yang Akan Datang**. Oleh karenanya harus dipersiapkan generasi yang kuat akan ketaqwaannya kepada Allah Swt. Bahkan Nabi Muhammad Saw juga melarang untuk memberikan seluruh hartanya kepada orang lain dengan meninggalkan ahli warisnya. Nabi SAW bersabda: ”Sesungguhnya bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik dari pada membiarkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain.”<sup>97</sup>

Dari hasil Kuadran Analisis SWOT, direkomendasi strategi yang diberikan adalah : **Progresif / Agresif, berada Pada Kuadran : I**

Artinya : Kabupaten Serdang Bedagai dalam kondisi prima dan mantap, sehingga sangat memungkinkan untuk **Melakukan Ekspansi / Membuat Berbagai Program Kerja, Untuk Meraih Kemajuan Secara Maksimal.**

Pendidikan merupakan Kebutuhan Dasar Paling Utama yang bersifat terbuka, sebab suatu pendidkan tidak dapat berjalan sesuai fungsinya apabila mengisolasikan diri dengan lingkungannya. Pendidikan berada dimasyarakat, ia

---

<sup>97</sup> Kementerian Sosial RI, *”Masyarakat Madani Yang Sejahtera”* , Jakarta : Kemensos Printing, 2014, H . 22 -23

adalah milik masyarakat. Itulah sebabnya, pemerintah menegaskan bahwa pendidikan adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah/Sekolah, Orang Tua Dan Masyarakat. Oleh karena keberadaan pendidikan seperti itu maka apa yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat akan berpengaruh pula terhadap pendidikan.

Namun pada kenyataannya, **Kondisi Ekonomi Masyarakat** tentu saja berbeda, tidak semua keluarga memiliki kemampuan ekonomi yang memadai dan mampu memenuhi segala kebutuhan anggota keluarga. Salah satu pengaruh yang ditimbulkan oleh kondisi ekonomi yang seperti ini adalah orang tua tidak sanggup menyekolahkan anaknya pada jenjang yang lebih tinggi walaupun mereka mampu membiayainya ditingkat sekolah dasar.

**Kondisi Ekonomi Keluarga** merupakan faktor pendukung yang paling besar untuk kelanjutan pendidikan anak-anaknya, sebab pendidikan juga membutuhkan dana besar. Banyak sekali faktor yang menyebabkan anak putus sekolah, seperti :

Faktor Internal Dan Faktor Eksternal. Faktor Internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri anak, baik berupa kemalasan, hobi bermain, dan rendahnya minat yang menyebabkan anak putus sekolah.

Sedangkan Faktor Eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri anak baik berasal dari orang tua yakni Keadaan Ekonomi Keluarga, **Perhatian Orang Tua**, hubungan orang tua yang kurang harmonis, latar belakang pendidikan orang tua dan lingkungan pergaulan sehingga menyebabkan dorongan anak untuk bersekolah juga rendah.

Dalam Penelitian ini, ditetapkan Faktor Internal Penyebab Tingginya anak putus sekolah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Kabupaten Serdang Bedagai adalah :

### **1. Ketidak Aktifan Orang Tua Dalam Mengatasi Masalah Pendidikan Anaknya.**

Kurang perhatian orang tua terhadap anak, dapat disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga atau rendahnya pendapatan orang tua si anak sehingga perhatian orang tua lebih banyak tercurah pada upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Meningkatnya Persentase anak yang tidak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi dan putus sekolah karena kurangnya perhatian orang tua.

Putus sekolah bukan merupakan persoalan baru dalam sejarah pendidikan. **Persoalan ini telah berakar dan sulit untuk untuk dipecahkan**, sebab ketika membicarakan solusi maka **tidak ada pilihan lain kecuali Memperbaiki Kondisi Ekonomi Keluarga**.

Ketika membicarakan peningkatan ekonomi keluarga terkait bagaimana **Meningkatkan Sumber Daya Manusiannya**. Sementara semua solusi yang diinginkan tidak akan lepas dari **Kondisi Ekonomi Nasional** secara menyeluruh, sehingga kebijakan pemerintah berperan penting dalam mengatasi segala permasalahan termasuk perbaikan kondisi masyarakat. Putus sekolah bukan merupakan salah satu permasalahan pendidikan yang tidak pernah berakhir. Masalah ini telah berakar dan sulit untuk dipecahkan penyebabnya.

Kebanyakan orang tua siswa bekerja sebagai petani, buruh bangunan, ataupun Nelayan dengan perahu seadanya, sehingga kondisi keluarga secara finansial menjadi sangat terbatas. Pendidikan anak tidak menjadi focus atau prioritas keluarga karena penghasilan hanya cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seorang Ayah yang bekerja sebagai petani serabutan yang penghasilannya tidak menentu. Pendapatan /Pemasukan yang terbatas tentu juga ia sangat membatasi pengeluaran sehari-harinya mulai dari pembelian pakaian, kesehatan misalnya kalau sakit lebih menggunakan obat-obatan herbal dari tanaman sekitaran rumah dan tentu juga masalah pendidikan Anak, akhirnya Anak menjadi korban karena desakan ekonomi keluarganya. Selain jumlah pendapatan dari hasil pertanian yang minim, kemiskinan petani juga disebabkan karena lahan pertanian yang sempit serta kondisi tanah atau cuaca.

Selain sebagai buruh tani, banyak juga dari orang tua siswa yang berprofesi sebagai buruh bangunan. Kondisi ekonomi sebagai buruh bangunan tidak berbeda jauh dengan buruh tani. Hal ini didasarkan pada pekerjaan sebagai buruh bangunan yang hanya bergantung pada proyek atau pekerjaan yang datang sebab tidak setiap hari atau setiap bulan ada orang yang membangun sehingga pekerjaan mereka menjadi tidak menentu.

Selain dari sumber penghasilan yang terbatas, faktor ekonomi yang mempengaruhi siswa untuk putus sekolah adalah biaya sekolah itu sendiri seperti pembelian buku LKS (Lembar Kerja Siswa), biaya seragam sekolah, uang jajan dan transportasi. Desakan ekonomi yang lainnya juga disebabkan oleh jumlah tanggungan pada keluarga. Semakin besar jumlah anggota keluarga akan semakin besar pendapatan yang dikeluarkan untuk biaya hidup. Alasan jumlah tanggungan keluarga yang banyak, dapat disebabkan oleh beberapa penyebab antara lain, banyak anak, ada anggota keluarga yang tidak produktif (usia lanjut atau alasan lain) dan kesulitan memperoleh pekerjaan bagi anggota keluarga yang sebenarnya sudah mencapai usia produktif.

Untuk kasus Seorang anak yang mengalami putus sekolah karena keasyikan bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, sudah bisa merasakan yang namanya menghasilkan uang sendiri. Secara sosiologis, sudah bekerja dan bisa mendapatkan penghasilan sendiri bukan hanya berarti bisa membeli apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan seseorang namun memiliki penghasilan sendiri juga merupakan simbol ketidak bergantungan anak kepada orang tuanya lagi.

Dampak Terhadap Siswa Putus Sekolah, Implikasi putus sekolah yang dialami anak putus sekolah itu sendiri tentulah sangat besar mengingat peran pendidikan yang begitu besar dalam kehidupan dan perkembangan manusia. Sekolah dapat membuka kesempatan untuk meningkatkan status anak-anak dari golongan rendah. Disekolah mereka mempunyai hak yang sama atas

pelajaran, mempelajari buku yang sama, mempunyai guru yang sama, bahkan berpakaian seragam yang sama dengan anak-anak dari golongan tinggi.

**Secara Sosiologis, Putus Sekolah Merupakan Penyakit Sosial** yang akan ikut memberikan dampak bagi keluarga karena tentu anak putus sekolah akan menjadi beban keluarga itu sendiri. Selain itu juga Berdampak Terhadap Masyarakat. Putus sekolah menjadi salah satu gejala munculnya patologi sosial di masyarakat sebab ada kecendrungan bahwa anak-anak yang mengalami putus sekolah memiliki pergaulan-pergaulan yang berdampak negative bagi dirinya dan masyarakat seperti : Suka keluyuran, minum-minuman keras, perkelahian dan kekerasan sampai pada tindak criminal lain seperti narkoba. Hal ini tidak mengherankan mengingat anak yang sebenarnya masih dalam kategori usia sekolah dan seharusnya mendapat bimbingan dari orang tua, guru, teman sebaya sekarang harus lebih banyak menghabiskan waktu dijalan dan tanpa ada pengawasan dan bimbingan sehingga arah hidupnya pun menjadi tidak jelas. Kasus anak putus sekolah membuat semakin banyak remaja didesa menjadi '**Anak Jalanan**' yang secara karakter biasanya mereka sangat susah dikontrol dimasyarakat maupun dikeluarganya mereka.

Selain dampak akan rawannya tindakan kriminal yang dilakukan anak-anak yang mengalami putus sekolah bagi masyarakat, anak-anak putus sekolah juga akan memberikan dampak seperti semakin menurunnya kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia. Dengan hanya lulus pada tingkatan sekolah dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) tentu keterampilan yang dimiliki anak-anak ini ketika nanti sudah memasuki **Usia Produktif** sangat kurang dan hanya mampu **Memasuki Sektor Pekerjaan Kasar**. Akhirnya melahirkan **Siklus Kemiskinan Baru**. Terlebih di kota – kota Besar Siklus Kemiskinan ini akan lebih sulit untuk memutus mata rantainya. Karena Kota selalu memiliki daya Tarik untuk orang berdatangan, dengan berharap dapat merubah nasib dan memperbaiki Taraf hidup dan Ekonomi keluarganya. Namun pada kenyataannya tidak demikian yang terjadi. Bukan

Kesejahteraan yang mereka peroleh, tapi malah mereka menimbulkan masalah baru di Perkotaan. Agar lebih jelas pembahasan dalam penelitian ini, Penulis akan membandingkannya dengan penelitian terdahulu antara lain :

1). **Nurmayana Siregar**, Universitas Sumatera Utara, Program Pascasarjana. Program Studi : Program Perencanaan Wilayah dan Pedesaan. Penelitiannya berjudul :

***“Analisis Sosial Ekonomi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah”***.

Menyebutkan Bahwa, Kemiskinan yang terjadi di daerah perkotaan Seperti Kota Medan, salah satu penyebabnya adalah : Semakin tingginya Angka Anak Putus Sekolah, yang tinggal disekitar Hiterlandnya kota Medan.

Suatu kota akan berakhir tanpa tambahan warga baru. Begitulah kota senantiasa memperagakan daya tarik yang menyebabkan orang berdatangan, baik atas kemauan sendiri, maupun karena tidak lagi dapat bertahan hidup di desa. Tapi ketika kota tidak lagi mampu untuk menyerap semua pendatang baru dalam peri kehidupan yang layak, maka muncullah gelandangan.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa kotalah sebenarnya yang merupakan tempat asal gejala gelandangan, hal ini disebabkan oleh adanya ***“Push and Full Fancctors”***.<sup>98</sup>

**Gelandangan** adalah : orang – orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap diwilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat Umum.

**Pengemis** adalah : Orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta – minta dimuka umum, dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari Orang lain. (PP No. 31 tahun 1999, pasal 1 ayat (1)).<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Jakti Dorojatun Kuncoro, ***“Kemiskinan di Indonesia”***, Jakarta : Serat Alam Media (SAM), 2016, h. 8 – 9.

<sup>99</sup> Sihombing,R, ***“Petunjuk Teknis Pelaksanaa Penangan gelandangan dan Pengemis”***, Jakarta : Pustaka Salemba, 2020, h. 67 – 90.



Adanya para GEPENG dalam tata kehidupan masyarakat, tidak sesuai dengan norma tata kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Masalah GEPENG perlu mendapat penanganan sedini mungkin secara konseptual dan Pragmatik, agar tidak membawa Dampak negatif yang lebih rawan serta dapat mengganggu stabilitas dibidang Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, juga dapat menimbulkan Citra Negatif terhadap keberhasilan pembangunan nasional dewasa ini.

Pemerintah bersama masyarakat, mempunyai tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial kepada para GEPENG, agar mereka dapat pulih kembali : Rasa Harga Diri, Kepercayaan Diri dan Tanggung jawab sosialnya, juga dapat serta dalam pembangunan nasional.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa GEPENG merupakan akibat samping / **Side Effect Dari Proses Pembangunan Nasional Itu Sendiri**, maka penanggulangannya perlu dikoordinasikan, dalam program lintas sektoral dan regional dengan pendekatan menyeluruh, baik antar profesi maupun antar instansi disertai partisipasi aktif dari masyarakat dengan mengadakan Konsep : **Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi (KIS)**.<sup>100</sup>

Dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 menyebutkan bahwa, Pemerintah daerah dapat melaksanakan kebijakan khusus dalam penanggulangan GEPENG sesuai dengan kondisi daerah setempat, karena latar belakang dan situasi yang berbeda dimasing-masing daerah.<sup>101</sup>

Dari berbagai uraian diatas dapatlah diketahui bahwa perhatian pemerintah terhadap penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), khususnya usaha penanggulangan GEPENG sangat besar sekali.

---

<sup>100</sup> Suparlan, Parsudi, *“Kemiskinan di Perkotaan Bacaan untuk Antropologi Perkotaan”*, Jakarta : Sinar Harapan, 2019, h. 86 – 97.

<sup>101</sup> Najib, Emha, Ainun, *“Gelandangan di kampung Sendiri”*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2020, h.14 – 56.

Namun kenyataannya dilapangan dan data dari Dinas Sosial Sumatera Utara, ternyata jumlah GEPENG dari waktu ke waktu kian bertambah.

Maka untuk ini perlu dicari solusi untuk **Memutus Mata Rantai Pertumbuhan GEPENG, yang menyebabkan terjadinya siklus Kemiskinan yang tiada akhir.**

Kabupaten Serdang Bedagai, dengan Penduduknya mayoritas beragama Islam, seharusnya bisa bangkit dan tidak membiarkan masih ada anak putus sekolah, yang disebabkan **Ketidak Aktifan orang tua dalam mengatasi masalah pendidikan anaknya.** Karena anak adalah Asset dan Investasi masa depan bagi orang tua, Bangsa dan Negara maupun Agama. Orang Tua, walaupun harus mencari nafkah bagi keluarganya. Namun pendidikan anak harus tetap nomor satu. Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah di Kabupaten Serdang Bedagai, banyak **Orang Tua / Kepala Keluarga Yang Menganggur,** tadinya mereka bekerja di Kabupaten Deli Serdang, dengan adanya pembatasan wilayah kerja akibat diadakannya Otonomi Daerah, mereka terpaksa dirumahkan (PHK). Sementara di Kabupten Serdang Bedagai belum memiliki Pabrik / Lapangan Kerja sebanyak Kabupaten Deli Serdang.

## **2. Rendahnya Kemampuan Sekolah dalam melakukan Subsidi Silang untuk murid yang tidak mampu.**

Otonomi Daerah dan Otonomi Pendidikan yang dilaksanakan, pada mulanya memang mendatangkan angin segar bagi masyarakat Serdang Bedagai, yang tadinya tidak ada sekolah, Didirikan sekolah dan diangkat Para Pejabat Struktural, Fungsional / Guru maupun Tenaga Pendukung Laninnya. namun dengan berjalanya waktu, hal ini berubah drastis. Selama ini sekolah sangat tergantung pada kucuran dana dari Pusat, kini kucuran dana tersebut semakin menurun jumlahnya, Akhirnya sekolah tidak mampu lagi membiayai dirinya sendiri, apalagi untuk memberikan Beasiswa ataupun melakukan Subsidi Silang untuk Anak yang tidak Mampu.

Sebagaimana M. Umer Chapra menjelaskan bahwa pada dasarnya Harta adalah Unsur yang Penting, dalam Maqâshid al-syarî'ah, sebab tanpa harta,

maka keempat unsur maqâshid al-syarî'ah sebelumnya tidak akan dapat terlaksana dengan baik dalam rangka menciptakan kesejahteraan manusia. Bahwa manusia memiliki hak untuk memperkaya sumberdaya ekonomi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi mengandung fungsi sosial karena harus membagi hak itu kepada orang lain atau masyarakat keseluruhan. **Penduduk Kabupaten Serdang Bedagai adalah Masyarakat yang Religius.** Sangat mudah untuk meminta pada Masyarakat yang memiliki Harta untuk menjadi Orang Tua Asuh bagi Anak yang Kurang Mampu. Namun sangat disayangkan Teori Chapra ini masih belum tersosialisasi dengan baik. Sebagaimana Allah berfirman Dalam :

**1. Surah Az-Zariyat ayat : 19 yaitu :**



*19. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian[1417].*

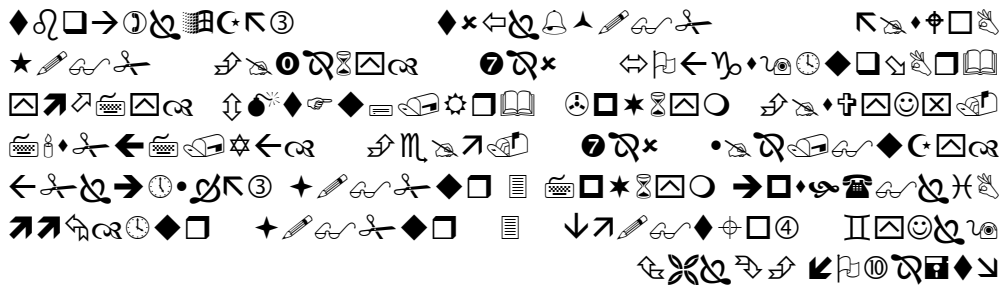
*[1417] Orang miskin yang tidak mendapat bagian Maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta.*

**2. Surah Al – Baqarah Ayat : 245**



*245. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.*

**3. Surah Al – Baqarah Ayat : 261**



261. *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah [166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.*

[166] *Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.*

Jelas.... ya, jangan pelit dalam bersedekah. Jika dapat rezeki maka nafkahkan harta di jalan Allah maka Dia akan melipat gandakan apa yang telah kamu keluarkan. Berikan pada anak yatim piatu atau tetangga yang membutuhkannya. Dan kamu harus yakin bahwa Allah yang menyempitkan serta meluaskan rezeki. Setelah apa yang kamu keluarkan dilipat gandakan Allah akan memberikan balasan atas amal baik yang telah kamu berikan saat kematian.

Hasil Uraian diatas dapat dipahami bahwa ekonomi Syariah sebagai bagian dari sistem ajaran Islam sejatinya sejak awal harus sudah mewujudkan apa yang menjadi tujuan pensyariatannya (maqâshid al-syarî'ah) yaitu terwujudnya kemaslahatan untuk mencapai kebahagiaan baik didunia maupun diakhirat.

Dari Pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hasil Penelitian yang dilakukan saat ini, semakin diperkuat oleh adanya Penelitian terdahulu dan Teori Ekonomi yang dikemukakan oleh Umar

## **Chapra dan Maqasyih Syariah.**

### **3. Belum Adanya Kelengkapan Sarana belajar Utama (gedung sekolah, perabot fisik, peralatan pendidikan, buku, TIK) & Sarana Penunjang yang Mendukung Kelancaran Proses Belajar Mengajar.**

Fasilitas pembelajaran yang kurang memadai merupakan faktor penting bagi peningkatan minat belajar siswa, fasilitas belajar yang tersedia di sekolah, misalnya perangkat (alat, bahan, dan media) pembelajaran yang kurang memadai, buku pelajaran kurang memadai, dan sebagainya. Kebutuhan dan fasilitas belajar yang dibutuhkan siswa jika tidak dapat dipenuhi, dapat menyebabkan turunnya minat belajar anak, yang pada akhirnya menyebabkan anak putus sekolah.

Menurut Chapra, untuk pemeliharaan dan pengembangan akal diperlukan dukungan tersedianya kualitas pendidikan yang baik dengan harga terjangkau, fasilitas perpustakaan penelitian (library and research facilities), kebebasan berpikir dan berekspresi (freedom of thought and expression), penghargaan atas prestasi kerja, dan keuangan (finance). Pemeliharaan dan pengembangan akal memberikan konsekuensi bahwa kegiatan ekonomi itu dilakukan berdasarkan rasionalitas ekonomi dan menggunakan pengetahuan sebagai modal.

### **4. Belum Tersedianya Lokasi sekolah yang nyaman dan Asri, bebas dari gangguan : Pencemaran Air, Udara dan Kebisingan serta Banjir.**

Kabupaten Serdang Bedagai, yang terkenal dengan daerah langganan Banjir, kerap kali menjadi penghalang bagi Siswa dalam menerima Proses pembelajaran. Jika terjadi Banjir bisa berlangsung berhari – hari, bahkan berminggu – minggu. Artinya selama itu pula siswa tidak dapat pergi ke sekolah dan belajar sebagaimana mestinya, sekolah diliburkan, karena Sekolah kebanjiran.

Selain Banjir, Lokasi atau letak sekolah juga merupakan faktor penting yang mampu menyebabkan anak putus sekolah. Jarak yang jauh dengan

akses yang sulit merupakan hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh masyarakat untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya. Alat transportasi (malah di Kecamatan Perbaungan ada anak sekolah yang pergi dan pulang Sekolah, terpaksa menggunakan Geteks, dengan jaminan keselamatannya, sangat mengkhawatirkan. Dikarena harus menyeberangi Sungai Ular yang begitu Lebar dan Dalam). Serta jarak antara rumah dengan sekolah yang cukup jauh. Selain itu juga dengan akses yang dirasa sulit, keselamatan pun dianggap tidak terjamin, dapat menjadi penyebab anak enggak pergi ke sekolah. Akhirnya putus sekolah.

**5. Kurangnya Kompetensi guru dalam menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan (Kurikulum) yang mendukung proses belajar mengajar, dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi (TIK) yang ada saat ini.**

Ajaran Islam mengajarkan, 'Jangan memberikan suatu urusan kepada orang yang bukan Ahlinya. Jika tetap dipaksakan tunggulah saat kehancurannya'. Begitu juga yang terjadi dengan para Guru yang ada, mereka diangkat, hanya berdasarkan kedekatan kekerabatan / keluarga, Bukan karena kompetensi yang mereka miliki. Akhirnya para **siswa yang menjadi korban. Mendapatkan** Para guru yang tidak sesuai dengan Kompetensi yang seharusnya. Padahal kualitas dan kemajuan suatu sekolah sangat ditentukan dengan kompetensi guru yang tersedia.

Begitu juga dengan Dinas Pendidikan Belum mampu dalam Merekrut Menseleksi dan Menempatkan Para Pejabat Struktural dan Para Kepala Sekolah serta Tenaga Pengajar, dengan **Konsep 'The Right Man on The Right Place'**.

Nabi SAW bersabda : *"Apabila sebuah urusan/pekerjaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka bersiaplah menghadapi hari kiamat"* (HR. Bukhari).

Yang dimaksud hadits ini bahwa bila sebuah tugas yang berkaitan dengan orang banyak, baik dalam urusan dunia maupun agama diemban orang yang tidak memiliki keahlian dibidang tersebut, ini pertanda hari kiamat sudah dekat.

Mengembangkan sebuah tugas kenegaraan kepada calon pegawai berdasarkan kedekatan atau besarnya sogok yang dibayar, padahal pencari kerja tersebut belum tentu memiliki kecakapan yang layak, atau ada calon pegawai pendaftar yang lebih layak dari padanya, jelas tindakan ini merupakan penyerahan amanah terhadap yang bukan ahlinya. Inilah yang menjadi pertanda hari kiamat telah dekat.

Bila persyaratan sifat amanah dan keshalihan calon seorang pegawai diabaikan. Dan pegawai diangkat berdasarkan kedekatan hubungan dengan pimpinan dan yang paling nista mengangkat serta menerima yang mau membayar sogok, maka ini adalah kesalahan paling fatal yang menyebabkan lahirnya para pegawai korup. Karena mau tidak mau, pegawai yang telah membayar sogok pada saat penerimaan masuk pegawai, ia akan berusaha dengan berbagai cara mengembalikan modal sogok yang telah ia bayar, sekalipun harus melakukan tindak korupsi. Pihak yang diamanahi untuk menerima calon pegawai bilamana ia mendahulukan calon pegawai yang membayar sogok terbanyak, sungguh telah berbuat dosa dan mengkhianati amanah, serta menjadi penyebab datangnya petaka hari kiamat.

Pemaparan hadist diatas *Menyadarkan Penulis*, bahwa Konsep Manajemen : *“The Right Man on The Right Place “*, sebenarnya *Sudah Ada Dalam Ajaran Islam*. Hanya saja umat Islam belum menerapkannya dalam kehidupan sehari – hari.

**Pengertian** "The Right Man on the Right Place" (By : Hendry Fayol).

The right man on the right place memiliki pengertian menempatkan seseorang sesuai dengan kemampuan atau keahliannya. Dengan menerapkan

filosofi ini dalam perusahaan, diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan maupun produktivitas perusahaan. Filosofi ini berguna untuk memberdayakan sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan menjadi sumber daya manusia unggul. Hal ini juga dilakukan untuk memajukan perusahaan guna mencapai visi dan tujuan yang sudah dicanangkan.

### **Tujuan dari Filosofi "The Right Man on the Right Place"**

#### **1. Pembagian Kerja Berdasarkan Kemampuan.**

Dengan menempatkan seseorang dalam posisi yang tepat, dapat mempermudah dalam pembagian kerja. Pembagian kerja merupakan hal penting dalam menentukan alur kerja yang baik. Karena menempatkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, pastinya pekerjaan tersebut dapat dikerjakan dengan cepat dan tepat tanpa banyak kesalahan serta mengerjakannya tanpa beban.

#### **2. Dapat Melaksanakan Tugas dengan Penuh Tanggung Jawab**

Karena mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuan, pastinya lebih bertanggung jawab akan tugas tersebut. Selain itu, pekerjaan akan dilakukan dengan rasa senang dan tanpa beban, serta membuat rasa memiliki terhadap pekerjaan tersebut menjadi semakin besar.

#### **3. Meningkatkan "Skill"**

Memberikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan bukan berarti kemampuan yang dimiliki hanya akan sampai disitu saja, melainkan akan meningkatkan kemampuan tersebut hingga batas maksimal dan bahkan dapat memperoleh kemampuan baru. Misalnya, Anda diberikan tanggung jawab dalam menjual suatu produk dan Anda memang andal dalam bagian sales. Bukan hanya skill negosiasi yang semakin terasah, namun public speaking dan market research juga bertambah.



## **Kendala Menerapkan "The Right Man on the Right Place"**

### 1. Mudah Jenuh

Bila kita memplotkan seorang karyawan berdasarkan resume atau CV yang dimiliki pada database karyawan, seseorang dapat mudah jenuh dengan pekerjaan yang berulang. Tidak sedikit karyawan yang ingin menambah skill-nya dalam bidang lain. Sehingga hal ini membuat karyawan menjadi mudah jenuh dengan pekerjaan dan produktivitas menurun.

### 2. Kurangnya Pengalaman

Salah satu kendala yang cukup banyak ditemui yaitu kurangnya pengalaman karyawan tersebut. Walaupun memiliki latar belakang yang baik dan sesuai kualifikasi, namun dengan kurangnya pengalaman atau bahkan tidak memiliki pengalaman membuat hal ini menjadi cukup sulit, terutama dalam pekerjaan formal seperti akuntan atau pekerja proyek.

### 3. Persaingan Antar Karyawan yang Cukup Sengit

Walaupun lapangan pekerjaan terbuka lebar, namun keterampilan yang dimiliki setiap karyawan hampir sama. Oleh karena itu, persaingan antar karyawan semakin sengit. Dalam situasi ini HRD dituntut untuk lebih jeli dan detail agar dapat menemukan the right man on the right place. Perbedaan sedikit skill antar karyawan juga ikut mempengaruhi performa perusahaan suatu saat nanti. Jadi, pastikan karyawan bersaing secara sehat untuk meningkatkan kinerja perusahaan, bukan untuk kepentingan individu semata.

### 4. Salah Penilaian Terhadap Sumber Daya Manusia

Salah penilaian bisa menjadi hambatan dalam penerapan filosofi ini. Misalnya, ada seorang karyawan memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, namun karena hobi dan kesukaannya terhadap menggambar,

membuat dia lebih fokus pada design graphic atau apapun diluar ranah akuntansinya. Hal ini bisa menyebabkan HRD salah dalam menentukan penempatan posisi. Disatu sisi, memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan yang cukup baik namun design graphic lebih ditekuni sehingga lebih expert. Oleh karena itu, filosofi ini bisa menjadi bimbang dan salah penempatan. Hal ini dapat terpecahkan dengan bertanya bagian mana yang lebih disukai dan mengerjakannya dengan sepenuh hati.

#### 5. "Mindset" yang Kurang Tepat

The right man on the right place dapat disalah artikan jika seorang individu memiliki mindset yang salah. Sering kali seorang individu merasa posisi tersebut hanya cocok dengan orang yang memiliki kualifikasi yang sama persis, sehingga membuat kesempatan bagi yang lain akan pupus. Sebenarnya bukan itu tujuannya. Karena filosofi itu dimaksudkan agar memudahkan dalam memposisikan seseorang di kantor tersebut. Pasti setiap perusahaan memiliki pertimbangan mengapa seseorang diberikan jabatan terlepas dari factor skill dan lainnya.

**Apa yang Harus Dilakukan** untuk Menerapkan "The Right Man on the Right Place"...?. Setelah mempelajari tujuan dari filosofi ini dan hambatan yang sekiranya akan dihadapi, ada hal-hal yang harus dilakukan agar filosofi ini dapat diterapkan dan tepat sasaran, antara lain :

- 1). Evaluasi minat dan latar belakang karyawan.
- 2). Bertanya pada karyawan goals yang ingin diambil selama bekerja di perusahaan ini
- 3). Sharing pengalaman yang menarik dan kurang menarik selama bekerja
- 4). Pimpinan wajib peka terhadap karakteristik karyawan
- 5). Mengenal satu sama lain agar tidak membuat gap yang terlalu besar.

Jika dibandingkan dari kedua Konsep Kepemimpinan ini, sebenarnya memiliki kemiripan, hanya saja dalam Ajaran Islam, selalu mengkaitkannya dengan Kehidupan kelak diakhirat. Sementara dalam Konsep, The Right Man on The Right Place selalu mempertimbangkan Kompetensi Karyawan. Namun tujuannya adalah sama – sama agar Para karyawan / PNS dapat bekerja secara Profesional, sehingga tercapai hasil yang Optimal, sesuai dengan Perencanaan.

Kabupaten Serdang Bedagai yang melaksanakan Kebijakan Otonomi Daerah dan Otonomi Pendidikan belum dapat menerapkan kedua Filosofi diatas. Sehingga Kebijakan yang dibuat Tidak Efektif dan Tidak Effesien, akibat Wewenang yang diberikan kepada sekolah sebagai **Dampak Negatif Pemberlakuan Otonomi Daerah dan Otonomi Pendidikan**, yang meliputi : Pengelolaan Sekolah, Perekrutan, Pengangkatan dan Penempatan Pejabat Stuktural dan Tenaga Pendidik serta Pengelolaan Keuangan, dengan diberlakukannya Otonomi Daerah dan Otonomi Pendidikan, Kucuran dana Pusat yang diterima Sekolah, Para Pejabat terkait, merasa bahwa Dana tersebut, adalah miliknya, terlebih para Kepala Sekolah. Mereka merasa, ini Kan Uangku, terserah mau diapakan, karena untuk bisa diangkat jadi Kepala Sekolah juga sudah mengeluarkan banyak Dana. Jadi wajar kalau ini milikku. Akhirnya apa yang terjadi, Strategi dan Program kerja dibuat asal – asalan. Kepala Sekolah sebagai seorang Top Leader di sekolahnya, adalah **Pemegang Amanah** sebagai seorang Pemimpin dan Penentu dan Perencana Strategi Sekolah. Sehingga tidak tercapainya Sasaran Kinerja yang diamanatkan Undang – Undang.

Amanat adalah segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia, baik yang menyangkut hak dirinya, hak orang lain, maupun hak Allah SWT yang harus dipertanggungjawabkan. Amanat bisa bermacam-macam bentuknya. Amanat Allah adalah beribadah kepada-Nya tanpa mensyirikkan-Nya dengan satu apapun, taat dan tunduk terhadap apa yang menjadi perintah-Nya dan menghindari apa yang dilarang-Nya.

Amanat terhadap diri sendiri adalah menjaga dirinya agar mampu menjalankan tujuan hidupnya yakni beribadah kepada Allah. Amanat seorang suami adalah memberikan nafkah, mendidik keluarganya dengan Islam, dan memimpin mereka di jalan Allah. Amanat seorang istri adalah taat kepada suami, mengurus rumahnya dengan baik dan mengasuh serta mendidik anak-anak.

Selain itu, Allah telah menyerahkan amanat yang berat bagi seluruh manusia untuk menjadi khalifatu fii al-ardhiy, sebagaimana yang difirmankan-Nya dalam :

**QS Al Baqarah Ayat : 30 yaitu :**



30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili ketika menafsirkan ayat ini menyatakan : “*Ingatlah wahai nabi Allah pada hari dimana Tuhanmu berkata kepada malaikat bahwasanya Allah akan menjadikan di bumi Khalifah untuk menegakkan kalimat Allah dan menjalankan perintah-perintah-Nya serta diberikan kepadanya beban syariat kepada Adam dan keturunannya.*

(Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili).

Dengan demikian manusia mengemban amanat menegakkan syariat Allah dimuka bumi sehingga terwujudlah kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk. Khalifatu fii al-ardhiy yang pertama adalah Nabi Adam as. Selanjutnya beban syariat Allah pikulkan kepada para nabi dan rasul sesudahnya dari keturunannya. Ketika masa para nabi ini telah berakhir, maka tugas para khalifah ini diemban oleh seluruh muslim dan diwakilkan kepada seorang pemimpin yang disebut khalifah. Dialah yang bertugas untuk menerapkan syariat Allah yang terakhir dimuka bumi, yakni syariat Islam.

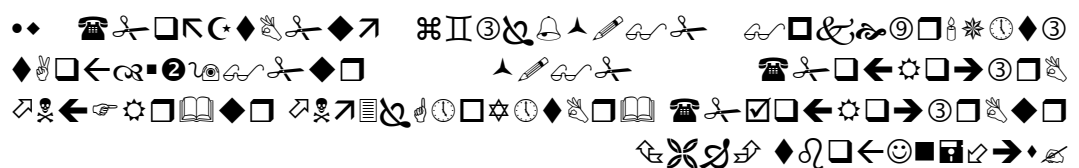
Bahwa setiap orang memiliki amanat dan harus mempertanggung jawabkannya, Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda :

*“Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian akan diminta pertanggung jawabannya tentang apa yang kamu pimpin. Imam adalah pemimpin dan ia akan diminta pertanggungjawabannya tentang apa yang dipimpinnnya, dan orang laki-laki (suami) adalah pemimpin dalam ingkungan keluarganya, dan ia akan ditanya tentang apa yang ia pimpin, orang perempuan (istri) juga pemimpin, dalam mengendalikan rumah tangga suaminya, dan ia juga akan ditanya tentang apa yang dipimpinnnya, dan pembantu rumah tangga juga pemimpin dalam mengawasi harta benda majikannya, dan dia juga akan ditanya tentang apa yang ia pimpin.”*

(H.R. Ahmad, Muttafaq ‘alaih, Abu Daud dan Tirmidzi dari Ibnu Umar).

Begitupun Allah telah memerintahkan manusia menjaga amanatnya sebagaimana firman-Nya :

**QS. Al Anfal Ayat : 27**



27. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Selanjutnya dalam Surah An Nisa Ayat : 58, Berbunyi :

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ الَّذِي يَصْعَقُونَ فِيهِ الْمَأْتِمَاتُ وَالشَّجَارُ الَّتِي لَا تَحْمِلُ أَوْكِيًا وَلَا تَشْجَرٌ لَهُمْ فِيهَا آسَنٌ كَأَنَّ الْأَشْيَاقَ بِآسَنِهَا يُعَذِّبُهُمْ أَيُّهَا الْمَلَأَى الْأَعْيُنَ وَأَنْعَمَ الْبَصَرُ لِيُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ فِيهَا إِلَهُكُمُ الَّذِي يُنَزِّلُ الْفُرْقَانَ ۗ إِنَّ إِلَهُكُمُ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۚ

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Rasulullah saw telah memberikan peringatan, ketika amanat ini disia-siakan, maka yang akan terjadi adalah kehancuran. Begitu pula Allah memberikan peringatan :

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَرْضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو الْبُرْهُدِ ۚ

49. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa

*Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (QS Al-Maidah : 49)*

Berdasarkan ayat diatas, jelas bahwa Allah mengancam bakal terjadinya musibah bila suatu kaum berpaling dari hukum Allah, yaitu menyia-nyiakan amanat-Nya. Salah satu bentuk menyia-nyiakan amanat disampaikan Rasulullah saw dalam hadis diatas, yaitu ketika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Amanah membangun jembatan diserahkan kepada ahli hukum, tentu jembatan akan hancur. Begitupun jika mencari nafkah diserahkan pada istri sedangkan suami mengurus anak dirumah, tentu keluarga akan hancur, cepat atau lambat.

Apalah lagi amanat yang besar seperti mengurus Negara Ketika urusan rakyat diserahkan kepada wakilnya yang menyogok, sedangkan sang wakil ini tidak memiliki kompetensi yang layak, tentu urusan tak tertangani. Begitupun jika yang diberikan amanat memimpin Negara tidak memiliki kemampuan memimpin, miskin konsep dan minim implementasi, hanya menuruti kehendak Para Dalang dibelakangnya, maka negara hanya tinggal tunggu waktu menjemput kehancurannya.

Kabupaten Serdang Bedagai yang memilki Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang sangat banyak, tidak seharusnya masih ada anak Sekolah Dasar yang Putus Sekolah di Era Otonomi Daerah dan Otonomi Pendidikan.

Jika Teori Ekonomi ini dilaksanakan, maka di Kabupaten Serdang Bedagai, Tidak akan sulit Mencari **Pembiayaan Alternative (Sponsor) untuk mempercepat pengadaan fasilitas layanan khusus dgn melibatkan Keaktifan orang tua siswa, melalui wadah Komite Sekolah.**

2). Chairus Suryati (2012), Universitas Medan Area, Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum, melakukan penelitian dengan judul : **“Aspek Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menyelenggarakan**

***Pendidikan berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah”.***

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu **Melalui Otonomi Luas, Daerah Diharapkan Mampu Meningkatkan Daya Saing** dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keaneka ragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Metode penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis data primer dan didukung data sekunder dengan **diberlakukannya Otonomi Daerah Sejak 1 Januari 2000**, persoalan pendidikan kini menjadi persoalan sentral yang akan sangat berpengaruh bagi kemajuan suatu daerah diseluruh wilayah tanah air Indonesia.

Oleh sebab itu dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang lebih bermutu serta mampu menjawab tantangan masa depan, pemerintah harus memiliki **Kerangka Sistem Pendidikan Nasional**. Yang akan dijadikan sebagai dasar acuan pelaksanaan kegiatan pendidikan secara menyeluruh disegenap wilayah tanah air Indonesia.

**Persamaannya adalah** : Peneliti Terdahulu juga membahas tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

**Perbedaanya** : Peneliti Terdahulu hanya memaparkan secara Deskriptif saja, sementara Penulis menganalisa data yang dengan menggunakan SWOT Analisis. Demi mencari Stategi yang tepat untuk meningkatkan mutu Pendidikan di Kabupaten Serdang Bedagai.

3). **Aswiwin (2017)**, melakukan Penelitian Disertasi dengan judul :

***”Penataan Hukum Sistem Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia”.***

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa **Kebijakan Sistem Otonomi di Indonesia belum efektif**. Landasan keberlakuan hukum sistem otonomi



yakni landasan Filosofi, Yuridis, Sosiologis dan politis kurang dipertimbangkan dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Jo. Undang – Undang No. 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah yang berlaku saat ini, sehingga melemahkan eksistensi otonomi.

Tingkat kesejahteraan masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi di Indonesia saat ini belum optimal, karena adanya kewenangan daerah yang bersifat strategis ditarik oleh pemerintah pusat, khususnya pada **Sektor Sumber Daya Alam**.

Hal tersebut dapat menghilangkan sumber pendapatan daerah. Model otonomi yang ada saat ini belum optimal dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, karena Undang – Undang Pemerintahan Daerah masih menganut penyeragaman urusan pemerintah, sedangkan otonomi yang bersifat khusus masih berlandaskan pada aspek Politik-Historis. Oleh karena itu direkomendasikan **agar Redisain dengan Model Otonomi Multi Dimensi** yang berlandaskan pada kondisi, karakteristik, kearifan lokal dan kemampuan daerah masing – masing, sehingga tercapai pemerintahan daerah yang mandiri dan mensejahterakan rakyat.

**Perbedaan :** Penelitian ini, lebih menitik beratkan Program yang perlu dicapai dengan Redisain model agar **Redisain dengan Model Otonomi Multi Dimensi** yang berlandaskan pada kondisi, karakteristik, kearifan lokal dan kemampuan daerah masing – masing, sehingga tercapai pemerintahan daerah yang mandiri dan mensejahterakan rakyat.

**Persamaannya :** Sama – Sama Berpendapat bahwa **Kebijakan Sistem Otonomi Daerah di Indonesia belum efektif**.

**Selanjutnya Penulis** lebih berfokus, untuk mencari Strategi untuk meningkatkan Mutu Pendidikan di kabupaten Serdang Bedagai.

4). **Alinapia (2010)**, melakukan penelitian dengan judul :

***“Pemekaran Daerah Dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Sumatera Utara”***.

Dari Hasil penelitian ditemukan bahwa perangkat hukum yang

mengatur pemekaran daerah dan otonomi daerah adalah undang-undang tentang Pemerintahan Daerah.

Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemekaran daerah di Sumatera Utara adalah **Eforia Demokrasi**, jatuhnya orde baru ke orde reformasi, **Sehingga Terjadi Pergeseran Pemahaman** bahwa dengan pendeknya rentang pelayanan akan terjadi kesejahteraan masyarakat. Disamping faktor lain seperti : Luas Daerah, Budaya, Marga (Suku) Dan Faktor Historis Suatu Daerah.

Pelaksanaan pemekaran di Sumatera Utara berjalan dengan baik, hal ini terbukti bahwa di daerah penelitian sudah ada daerah pemekaran yang dianggap Berhasil : 1. **Kabupaten Serdang Bedagai**, merupakan Daerah Sepuluh Besar Terbaik di Indonesia dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. **2.Pemerintahan Padang Sidempuan.**

**Kesamaannya** : Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan analisa Deskriptif, dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.

**Perbedaannya** : peneliti terdahulu, memfokuskan penelitiannya dibidang Hukum. Sementara Penelitian yang dilakukan menitik beratkan pada Faktor Sosial, Ekonomi dan Kesehatan ( Indikator IPM ).

**5). Isnaini Harahap**, dalam Bukunya yang berjudul : “ *Ekonomi Pembangunan Pendekatan Transdisipliner*”.

Secara teoritis Pembangunan mensyaratkan adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Guna mencapai SDM yang berkualitas, maka dibutuhkan beberapa upaya, diantaranya adalah dengan melakukan pengembangan SDM melalui : **Pendidikan yang diorganisir secara formal pada tingkat Dasar, Menengah dan Pendidikan Tingkat Tinggi**. Tanpa mengabaikan fungsi lainnya, maka pendidikan dan penguasaan teknologi adalah prasarat utama dalam pembangunan.

Saat ini, SDM suatu negara adalah unsur pokok bagi kemakmuran dan pertumbuhan serta penggunaan yang efektif atas sumber daya modal fisiknya. Investasi dalam bentuk modal manusia (Human Capital) adalah

komponen integral dari semua upaya pembangunan daerah.<sup>102</sup>

Kesejahteraan dapat diperoleh hanya dengan ketaqwaan kepada Allah Swt dan juga berbicara secara jujur dan benar. Pada ayat ini, Allah meminta kepada hambaNya **Untuk Memperhatikan Kesejahteraan Generasi Yang Akan Datang**. Oleh karenanya harus dipersiapkan generasi yang kuat akan ketaqwaannya kepada Allah Swt. Bahkan Nabi Muhammad Saw juga melarang untuk memberikan seluruh hartanya kepada orang lain dengan meninggalkan ahli warisnya. Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik dari pada membiarkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain."<sup>103</sup>

Sistem pendidikan di era otonomi daerah dapat terbangun kokoh, bila dilandasi aturan main yang Konsisten dan jelas sebagai pijakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang berotonomi. Tanpa aturan main yang Konsisten dan jelas (komprehensif, aspiratif, demokratis dan daya antisipasi kedepan) akan memberi peluang terjadinya otoritarisme baru, inkonsistensi kebijakan dan kontra produktif pengelolaan yang justru merusak sendi-sendi desentralisasi pendidikan. Peraturan pendidikan, khususnya Perda merupakan keputusan politik. Upaya *desentralisasi* pendidikan seringkali sukses atau gagal lebih disebabkan oleh alasan politis dari pada alasan teknis. Keputusan politis pendidikan dapat berdampak positif, bila dibangun diatas consensus luas, dengan dukungan penuh dari berbagai pelaku yang terlibat (*Stakeholder*) dan memperhatikan berbagai kelompok kepentingan yang terkena pengaruh sebagai akibat otonomi pendidikan melalui wadah Dewan Pendidikan, Tetapi jika hal ini tidak terlaksana dengan baik, akan muncul berbagai penyimpangan dalam alokasi anggaran, akan terjadi kebocoran anggaran, korupsi akan tumbuh subur. Korupsi biasanya dihubungkan dengan

---

<sup>102</sup> Harahap, Isnaini, " *Ekonomi Pembangunan Pendekatan Transdisipliner*". Medan : Perdana Publishing, 2018, h.202 – 203.

<sup>103</sup> Kementerian Sosial RI, " *Masyarakat Madani Yang Sejahtera* ", Jakarta : Kemensos Printing, 2014, H . 22 -23

aktivitas dalam pemerintahan, terutama dalam kaitannya dengan adanya factor monopoli dan kekuatan kebijakan pemerintahan. Dalam sector lainpun, penyebab utama munculnya korupsi adalah karena adanya monopoli dan kekuasaan. Korupsi Dilakukan dengan cara diluar peraturan yang berlaku Korupsi semakin tumbuh subur karena kurangnya transparansi dan factor pengendalian internal yang buruk. Padahal pengendalian internal merupakan aspek penting dalam mekanisme akuntabilitas.

Pengembangan dan pemeliharaan pengendalian internal yang baik akan mendorong terbentuknya akuntabilitas yang baik pula. Akuntabilitas yang baik merupakan salah satu mekanisme untuk mencegah terjadinya korupsi. Dengan demikian, akuntabilitas yang baik akan mencegah korupsi. Dengan demikian ,cara yang tepat untuk mengatasi korupsi adalah akuntabilitas yang sifatnya menyeluruh dan mendasar, sehingga mampu mengubah cara pandang yang keliru tersebut. Bersifat menyeluruh berarti, mekanisme akuntabilitas juga mencakup pada proses pelaksanaan tanggungjawab, tidak terbatas pada saat akhir pelaporan.

Akuntabilitas Islam adalah akuntabilitas selama proses pelaksanaan tanggungjawab, yang ditujukan kepada Allah. Akuntabilitas Islam, sebagai turunan dari konsep tauhid dan konsep kepemilikan dalam Islam, berimplikasi pada proses pelaksanaan suatu tanggungjawab, yaitu pada :

1. Niat melaksanakan suatu tanggungjawab, yaitu niat beribadah kepada Allah.
2. Pelaksanaan tanggungjawab adalah perwujudan mengemban amanah.
3. Rejeki (reward atau punishment) atau hasil dari pelaksanaan tanggungjawab, bukan menjadi orientasi utama.

Dalam kaitannya dengan tujuan dilakukannya akuntabilitas, Islam memiliki tujuan yang jelas dan kuat, yang penulis yakini, dengan tujuan tersebut, akuntabilitas akan berjalan dengan baik, penyakit korupsi dalam tubuh bangsa Indonesia akan sembuh. Tujuan tersebut adalah Allah. Allah adalah satu-satunya nilai yang tertinggi, sedangkan yang lainnya hanyalah instrument yang nilainya tergantung pada Tuhan, karena instrument-instrumen itu pada

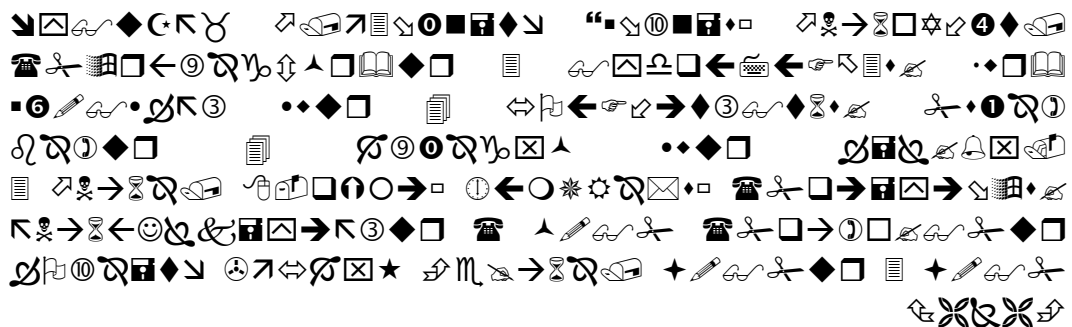
asalnya tidak punya nilai sendiri, dan yang kebaikannya diukur dengan aktualisasi kebaikan ketuhanan yang tinggi.

Ini berarti bahwa Tuhan adalah tujuan akhir seluruh keinginan. Sudah seharusnya seorang muslim menggunakannya, baik dalam kehidupan pribadi maupun secara organisasional. Sehingga tujuan manusia sebagai pemimpin di bumi dan pengemban misi untuk kebaikan seluruh alam akan tercapai.

Berbagai ayat dalam al-Quran telah menjelaskan pentingnya perhatian pada aspek akuntansi atau pencatatan. Diantaranya :

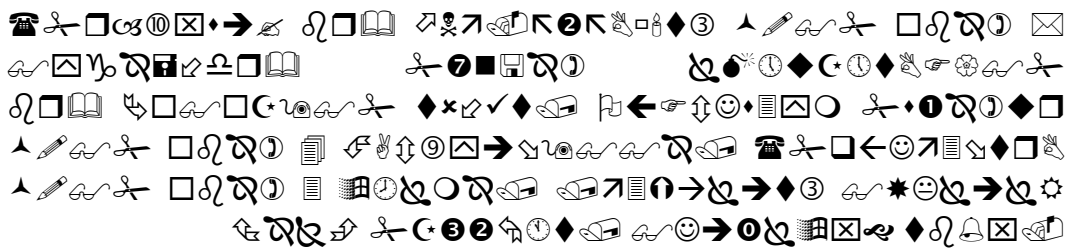
**1. Surat al - Baqarah ayat : 282, terkait perintah untuk menulis dengan benar utang-piutang, mendatangkan saksi, dan tanpa bosan untuk mencatat meskipun nilai transaksi kecil.**





282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah





58. *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*

**5. Al-Hadis** juga menjelaskan bagaimana pentingnya akuntansi dalam pengelolaan harta atau kekayaan. Salah satunya adalah terkait hadis yang menjelaskan kondisi yang akan menimpa seseorang pada hari perhitungan diakhirat kelak. Hadis tersebut menjelaskan bahwa : ***“Seseorang tidak akan bergeser kedua kaki manusia (anak adam) pada hari kiamat dari sisi Tuhannya, hingga dia ditanya tentang lima perkara yaitu tentang : umurnya, masa mudanya, hartanya dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia belanjakan, serta amalan dari ilmu yang dimiliki”***

(HR. at-Tirmidzi no. 2416 dan HR. Al-Thabrani no. 9772).

Dari Surat - Surat dalam Al Quran dan Al Hadist diatas adalah sebagian dari banyak perintah Allah dalam agama Islam kepada manusia untuk memperhatikan aspek akuntabilitas dalam setiap tindakannya. Islam adalah agama yang sangat mengutamakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban.

Akuntabilitas merupakan kunci utama penyelenggaraan otonomi pendidikan. Dalam hal ini yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas yakni : Adanya transparansi para penyelenggara pendidikan dalam menetapkan kebijakan publik dengan menerima masukan dan mengikut sertakan institusi terkait. Adanya standarisasi kinerja pendidikan yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dan adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam memberikan pelayanan



masyarakat dengan prosedur yang mudah disertai biaya murah dan pelayanan yang cepat.

Setelah **Membahas dan Menyimpulkan Dampak Negative Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Otonomi Pendidikan**, Maka penulis menawarkan Strategi Untuk Melaksanakan Sistem Managemen Sumber Daya Manusia dengan menerapkan Konsep **‘The Right Man on The Right Place’** dalam Pengelolaan Sekolah, dimulai dari : Perekrutan, Pengangkatan dan Penempatan Para Pejabat Stuktural dan Tenaga Pendidik serta Menerapkan Sistem Manajemen Keuangan yang **Akuntabel**, adalah merupakan Novelty Penelitian ini.



## **A. Kesimpulan**

### **1. Faktor Penyebab Tingginya Angka Anak Putus Sekolah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Kabupaten Serdang Bedagai adalah :**

- 1) **Faktor Internal** yaitu : Ketidak Aktifan Orang Tua, Rendahnya Kemampuan Sekolah dalam melakukan **Subsidi Silang**, Belum Adanya Kelengkapan Sarana Belajar Utama dan Sarana Penunjang, Belum Tersedianya Lokasi Sekolah yang nyaman dan Asri, Kurangnya Kompetensi Guru dalam menguasai Kurikulum dengan Memanfaatkan TIK.

2) **Faktor Eksternal Yaitu** : Sekolah Belum mampu Memanfaatkan dukungan masyarakat Gerakan Orang Tua Asuh (GNOTA) dan Political Will Pemerintah dlm Pemberian Bea Siswa / Sekolah Gratis, Ketidak mampuan Sekolah dalam Mencari Sponsor, Rendahnya kemampuan Kualitas Managemen Sekolah & Dinas Pendidikan dalam Merekrut, Menseleksi dan Menempatkan Para Pejabat Struktural : Para Kepala Sekolah serta Tenaga Pengajar, belum menerapkan Konsep ‘**The Right Man on The Right Place**’, Tidak Efektif dan Effesiennya Strategi yang dilaksanakan, akibat Dampak Negatif Pemberlakuan Otonomi Daerah dan Otonomi Pendidikan.

**2.Strategi yang Tepat dalam Mengatasi Tingginya Angka Anak Putus Sekolah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Kabupaten Serdang Bedagai adalah : STRATEGI SO :**

- 1). Meningkatkan pengawasan pada proses Penerimaan Siswa Baru secara On Line dan Transparan dengan memanfaatkan keaktifan orang tua siswa dalam Mengatasi Masalah Pendidikan Anaknya serta bekerjasama dengan Dewan Pendidikan Sekolah. Pelaksanaannya dipantau dan dievaluasi oleh lembaga Independen Pendidikan yang relevan (BSNP = Badan Standar Nasional Pendidikan). **Dalam Perspektif Ekonomi Syariah** : Jangan Meninggalkan generasi yang lemah dan Tidak Sejahtera, (QS. An-Nisa’ Ayat : 9) dan Hadis Rasulullah : “Dari Anas Ibn Malik : “Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, baik Laki-laki maupun Perempuan”.
- 2).Terciptanya Jaringan Kemitraan Sekolah dengan Lembaga lain yang Relevan (Seperti : Perguruan Tinggi dan Pendidikan Kedinasan) berkaitan dengan Investasi (Beasiswa) dan Pemanfaatan Output lulusan (Alumni), dengan Meningkatkan Kemampuan Sekolah dalam melakukan Subsidi Silang untuk Murid yang Tidak Mampu. Dalam Perspektif Ekonomi Syariah : Menafkahkan Harta dijalan Allah : Sebutir Benih Menjadi Tujuh Butir, Tiap-tiap Butir akan menjadi Seratus Biji. (QS. Al-Baqarah Ayat : 261) Dan Optimalisasi Penggunaa dana ZISWAF.

- 3).Melaksanakan pengadaan Sarana dan Prasarana pendidikan layanan khusus (laboratorium, perpustakaan pemanfaatan TIK dll) yang disertai dengan peningkatan kualitas tenaga administrasi, laboran dan pustakawan dengan memanfaatkan peran pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Mengacu kepada Standar Pembiayaan yang telah ditentukan (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.19/2007 tentang Standar Pendidikan (termasuk Standar Pembiayaan). Dalam Perspektif Ekonomi Syariah : Siapa yang Memberi Pinjaman Kepada Allah / Menafkahkan Hartanya dijalan Allah, Allah akan melipat gandakan Pembayaranannya. (QS. Al-Baqarah Ayat : 245) dan Optimalisasi Penggunaa dana ZISWAF.
- 4). Melakukan kerjasama dalam Bidang Sosial dengan masyarakat sekitar, guna mengupayakan lokasi sekolah yang nyaman dan Asri, sehingga terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Bebas dari : Polusi Udara, Air dan Kebisingan serta Banjir. Dalam Perspektif Ekonomi Syariah : Jika Penduduk suatu negeri beriman dan bertaqwa kepada Allah, maka Allah akan melimpahkan Berkah langit dan Bumi kepada Mereka (QS.Al-A’Raf Ayat : 96) dan Mengaktualisasikan Teori M.Chapra, Bahwa : harta yang dimiliki harus Berfungsi Sosial. Serta Menjadikan Masyarakat mitra Sekolah.
- 5). Meningkatkan Kemampuan dan Kompetensi Guru sesuai bidangnya dengan memanfaatkan perkembangan IPTEK saat ini. Serta mendorong dan memberi kesempatan untuk mengikuti proses sertifikasi profesi guna meningkatkan mutu guru. Bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPMP) sebagai Lembaga Independen yang bertugas memantau proses penyelenggraan pendidikan dan melakukan **Program Sertifikasi Guru**. Dalam Perspektif Ekonomi Syariah : Allah akan memberi Azab kepada orang-orang yang tidak Amanah (QS. At-Thalaq Ayat : 10) dan Hadis : ‘Jangan memberikan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.’
- 6). Memanfaatkan Political Will dari Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Dinas Pendidikan) dalam **Pemberian Bea Siswa** Ataupun Sekolah

Gratis, dan Menggaungkan kembali **GNOTA** (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh). Dalam Perspektif Ekonomi Syariah : Hai Orang-orang yang Beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan RasulNYA serta Amanah yang telah diberikan kepadamu (QS.Al-Anfal Ayat : 27) dan **Optimalisasi Penggunaa dana ZISWAF.**

- 7).Terciptanya Jalinan Kemitraan Sekolah dengan Lembaga lain yang Relevan (Seperti : Perguruan Tinggi dan Pendidikan Kedinasan) berkaitan dengan Investasi (Beasiswa) dan pemanfaatan Output Lulusan (Alumni). Dengan Memanfaatkan **Keberadaan Dewan Pendidikan** yang terdapat disetiap Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai Penyalur Aspirasi/keluhan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam Perspektif Ekonomi Syariah : Hendaklah kamu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat (QS.An-Nisa' Ayat : 58) serta mengadakan kerjasama dengan Masyarakat dan para dermawan, yang rela menjadi Orang Tua Asuh.
- 8). Memperbaiki Sistem Managemen Keuangan Sekolah dan **Dana dari Masyarakat** untuk pelaksanaan program kegiatan utama dan program kegiatan penunjang, mengacu kepada standar pembiayaan yang telah ditentukan secara **Transparan dan Akuntabel** dengan melibatkan Keaktifan orang tua Siswa, melalui Wadah Komite Sekolah. Dalam Perspektif Ekonomi Syariah : Jika kamu Bermuamalah secara Tidak Tunai (A/P), hendaknya kamu menuliskannya dengan baik dan benar. (QS.Al-Baqarah Ayat : 282)
- 9). Melaksanakan Sistem Managemen Sumber Daya Manusia dengan menerapkan Konsep : **'The Right Man on The Right Place'**, Yang dimulai dari : Perekrutan, Pengangkatan dan Penempatan Para Pejabat Stuktural dan Tenaga Pendidik serta Pengelolaan Keuangan. Mengacu pada : UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Perspektif Ekonomi Syariah : Allah Mengetahui dan Mengawasi Serta Mencatat apa yang Kamu Kerjakan (QS. Al-Infithar Ayat : 10 – 12) Serta Hadis : 'Jangan memberikan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.'

10). Meningkatkan Kualitas Manajemen Sekolah, Bagi Para Pejabat Struktural Dinas Pendidikan dan Jajarannya sebagai **Dampak Negatif** dari pemberlakuan Otonomi Daerah dan Otonomi Pendidikan, sehingga tercipta Strategi yang Efisien dan Efektif, yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.19/2007 tentang Standard Pengelolaan Pendidikan (termasuk Standar Pembiayaan). Dalam Perspektif Ekonomi Syariah : Hendaklah kamu memutuskan Perkara sesuai dengan apa yang telah diturunkan Allah, Janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu. Sesungguhnya azab Allah sangat pedih. (QS.Al-Maidah Ayat : 49) dan Bekerjasama dengan Dewan Pengawas Sekolah untuk mengadakan Pengawasan secara rutin.

## **B. Saran**

Bagi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai :

1. Harus bisa memberdayakan Tenaga pendidik, dengan meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru dengan memberikan Pelatihan tentang **Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research)**.
2. Diperlukan **dukungan dari seluruh Stakeholders Penyedia Jasa Pendidikan** (Dinas Pendidikan dan Jajarannya) maupun **Stakeholders Pengguna Jasa Pendidikan** (Orang tua siswa dan masyarakat).
3. Para Pejabat Struktural di Dinas pendidikan dan Jajarannya sebagai stakeholders penyedia jasa pendidikan harus **Meningkatkan Kemampuan Manajerialnya dan Manajemen Keuangan Yang Transparan dan Akuntabel**. Sehingga ketertinggalan selama ini dapat ditingkatkan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul, Halim, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : UUP AMP YPKN, 2001.
- Abdur, Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din*, Surabaya : Bina Ilmu, 2010
- Abdurrahman, *Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah*, Jakarta : Media Sarana, 1987.
- Adenan, Djamasri, dkk, *Ekonomi Pembangunan I*. Jakarta : Pusat Penerbitan UT,

2010

Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2012

Aedy, Hasan, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam Sebuah Studi Komparasi*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011

Ahmad, Zainal Abidin, *Negara Adil Makmur Menurut Ibnu Siena*, Jakarta : Bulan Bintang, 2009

Ali, Masykur Musa, *Politik Anggaran Pendidikan Pasca Perubahan UUD 1945*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009.

Ali, Mohammad, " *Penelitian Kependidikan Prosedur & Strategi*", Bandung : CV Angkasa, 2013.

Al-Ittihad Al-'ām li Thulāb Jumhuriyyah Misr, *Islamic Way of Life*, diterjemahkan oleh Osman Raliby dengan judul *Pokok-pokok pandangan Hidup Muslim*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1878 M

Amin, Abdullah, *Dinamika Islam Kultural*, Bandung : Mizan, 2000

Amirin, Tatang, " *Menyusun Rencana Penelitian*", Jakarta : Rajawali Press, 2018.

Anwar, M, Idochi, " *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*", Jakarta : Rajawali Pers., 2015

Arafat, Yasir, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya Ke I, II, III, & IV*, Jakarta : Permata Press, 2014

Arikunto, Suharsimi, " *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*", Jakarta : PT Asdi Mahasatya. Binguin, 2016.

Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Cetakan Ketujuh, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005

Asyari, Imam, " *Patologi Sosial, Usaha Nasional*" , Surabaya : Ganesha Press, 2021

Ateng, Syafruddin, *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Dati II dan Perkembangannya*, Bandung : Mandar Maju, 1991.

Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyi

- Al-Kattani, dkk., Jakarta : Gema Insani, 2011
- Badawi Ahmad Zaki, *Mu'jam Mushthalahâtu al-'Ulûm al-Ijtimâ'iyah*. Beirut: Maktabah Lubnan, New Impresi, 1982
- Baharsyah , Yustika , “*Menuju Masyarakat Yang Berketahan Sosial, pelajaran dari Krisis*”, Jakarta : Kementerian Sosial RI, 2019.
- Bambang, Sunggono dan Sri Mamudji, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- <sup>1</sup>Beik, Irfan, Syauqi, “*Ekonomi Pembangunan Syariah*”, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2017.
- Bintarto, R, “*Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya* ”, Yogyakarta : Ghalia Indonesia, 2021.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1998
- Budiman, Arif, *Harapan dan Kecemasan Menatap arah Reformasi Indonesia*, Jakarta : BIGRAF Publishing, 2000
- Burhan, M, *Penelitian Kualitatif*”, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Burki, Shahid Javed, et.al, *Beyond the Center : Decentralizing The State*, Washington D.C, World Bank, 1999
- Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta : Gema Insani Press, 2000
- Chapra, M. Umer, *The Islamic Vision of Development in The Light of The Maqâshid al-Syari'ah*, (Richmond, UK: The International Institute of Islamic Thouht), 2008
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Cet. VI, PT. Bumi Aksara, 2005
- Dampriyanto., *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sidoarjo : Masmmedia Buana Pustaka, 2009
- Danim, Sudarwan. *Visi Baru Manajemen Sekolah dari Unit Birokrasi ke*



- Lembaga Akademik. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- David, Fred, *Manajemen Strategi Konsep*, Jakarta : Salemba Empat, 2010
- David, Osborne, Hasil terjemahan dalam bukunya “*Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for Reinventing Government*”, East Lansing, Michigan, 1996, h. 56.
- Deddy, Supriady Brataku sumah, dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Draft, Ricard L, *Management*, Edisi 6 Buku 1, Jakarta : Salemba Empat, 2007.
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Thesis dan Desertasi)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada , 2008.
- Edward, B.Fiske dan J.Drost (editor), *Arahan Pembangunan Desentralisasi Pengajaran Politik dan Konsensus*, Jakarta : Grasindo, 1998.
- Fahrudin, Adi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung : Refika Aditama, 1989
- Fatah, Nanang, *Sistem Penjamin Mutu Pendidikan*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013.
- Fathurrohman, Muhammad dan Sulistiyorini, “*Meretas Pendidikan Berkualitas Dalam Pendidikan Islam*”. Yogyakarta : Teras, 2012.
- Faturrahman, Muhammad & Sulistiyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam*, Yogyakarta : Teras, 2012.
- Gaspersz, Vincent, *Total Quality Manegement*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Hadis, Abdul dan Nurhayati, “*Manajemen Mutu Pendidikan*”, Bandung : Alfabeta, 2010.
- Haekal, Muhammad Husain, *Sejarah Hidup Muhammad*, Jakarta : Litera Antar Nusa, 1989.
- Harahap, Isnaini, ‘*Ekonomi Pembangunan Pendekatan Transdisipliner*’, Medan : Perdana Publishing, 2018

- Harry, Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung : Humaniora Utama Press, 2010
- Harun, Nasution, 2013, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta : UI Press, 2013
- Hasan, Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam Sebuah Studi Komparasi*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011
- Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010.
- Hasbullah. *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah Dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan* PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007.
- Hatta, Moh. "*Demokrasi dan Autonomi*" Keng Po lauggal, Akhyaris Press, 2011
- Hendrawan, Sanerya, *Spiritual Management, From Personal Enlightenment Towards God Corporate Governance*, Bandung : Mizan, Cet. 1, 2009
- Heri, Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta : Ekonisia, 2004
- Hidayat, Ara & Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan, Konsep, Prinsip dan Aplikasi Dalam Pengelolaan Sekolah*, Bandung : Pustaka Educa, 2010.
- Hikmat, Harry, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung : Humaniora Utama Press, 2010.
- Hilal, Mushaf Al Azhar, *Al Quran Dan Terjemahannya*. Bandung : Penerbit Hilal, 20015
- Husain, Muhammad, Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, Jakarta : Litera Antar Nusa, 1989.
- Husodo, S, *Pancasila : Jalan Menuju Negara Kesejahteraan*, Yogyakarta : Gramedia, 2010
- Ibn, Katsier, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier I*, terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, 1988
- Ikhsan, M, *Membumikan Al-Quran, Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung : Mizan, Edisi II, 2013

- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku 1. Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Jakti, Dorajatun, Kuncoro, “*Kemiskinan di Indonesia*”, Jakarta : Serat Alam Media (SAM), 2016.
- Juli, Panglima Saragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003.
- Kaho, Josef Rihu, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta : Bhineka Cipta, 1990
- Karim, Abdul Gaffar, *Kompleksitas Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003
- Karnaen, Perwaatmadja dan Syafii Antonio, 1992, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1992
- Karsidi, Ravik, *Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan*, Bahan ceramah di Pondok Pesantren Assalam, Surakarta : 19 Februari 2000.
- Keith, Green, *Decentralization and Good Governance : The Case of Indonesia*, Munchen : Munich Personal RePEC Archive, 28 February 2005.
- Kenward, Lloyd, 1999, *Indonesia Sustaining High growth with Equality*, document of The World Bank, Report No. 16433-IND.
- Koesoemaatmadja, *Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bandung : Binacipta, 1999 .
- Kristanto, HC, R. Heru, *Kewirausahaan Entrepreneurship*, Jogyakarta : Graha Ilmu, 2009.
- Lexy, J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1994
- Maemunati, Titi, *Manajemen Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah di MTS Negeri Tempel Sleman*, Jogyakarta : Penerbit Andi, 2008.
- Mankoe, Joseph and Bill Maynes, 1992, *Decentralization of Education Decision Making in Ghana*, Pergamon.
- Mansyur, Ramli, 2000, *Otonomi Pendidikan Tinggi Menghadapi Tantangan*

- Global*, Makalah pada Seminar Nasional Reposisi dan Reorientasi Pendidikan Tinggi Menghadapi Tantangan Abad 21, Aptisi Wilayah IV Semarang.
- Maraghi, AL, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*, Lebanon: Dari Al-Kutub Al-Ilmiyyah. Edisi II, Al-Maudūdī Abu A'la. *Nazriyyah Al-Islam Al-Siyasiyyah; Shaut Al-Haq Katīb Islāmī Syahrī*. Mesir, 2006
- Marbun, B.N, *Otonomi Daerah 1945-2005 Proses Dan Realita*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2005
- Marbun, S.F, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta : VII-Press, 2003.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : Penerbit Andi, 2002
- Matin, "*Perencanaan Pendidikan*", Jakarta : Rajawali Perss, 2015.
- Moleong, Lexy J, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mulyana, Deddy, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mulyasa, E. *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi dan Implementasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mustafa, Edwin Nasution, Nurul Huda, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Bandung : Kencana Prenada Media Group, 2014
- Mutahhari, Murtadha, *Insone Komil*, diterjemahkan oleh Abdillah Hamid Ba'abud, dengan judul : *Manusia Seutuhnya*, Jakarta : Sadra Press, 2012
- Najib, Emha, Ainun, "*Gelandangan di kampung Sendiri* ", Jogyakarta : Pustaka Pelajar, 2020.
- Nasarudin, Endin, "*Psikologi Manajemen*", Bandung : CV Pustaka Setia, 2010
- Nasution, Arif, dkk, "*Demokratisasi & Problema Otonomi Daerah*", Bandung : CV. Mandar Maju, 2019.

- Nur, M, Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam*, Bandung : Alfabeta, 2010
- Nurdin, M, Matry, *Implementasi Dasar – Dasar Manajemen Sekolah di era Otonomi Daerah*, Makasar : Aksara Madani, 2008
- Nurkholis, manajemen Berbasis Sekolah Teori, Model dan Aplikasi, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Pabbadia, Sardin, “*Indahnya kemilau lampu kota* ”, Jakarta: Obor Indonesia, 2019.
- Paul, A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Ekonomi Edisi Keduabelas Jilid I*, terjemahan. Jaka Wasana, Jakarta : Penerbit Erlangga, 1989
- Peter, Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Poerwadarminto, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1999
- Prajudi, S, Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Cetakan 10, 1994.
- Qaradlāwi, AL, Syekh Muḥammad Yūsuf, *Musykilatul Fakri Wa Kaifa ‘alajahal Islām*, diterjemahkan oleh Umar Fanany, B.A, dengan judul *Problema Kemiskinan Apa Konsep Islam*. Surabaya : Bina Ilmu, Cet. II, 1982
- Qomar, Mujamil, *Manajemen Pendidikan Islam*, Malang : Erlangga, 2009.
- R. M. Suparman, Studi Pengembangan Kemampuan Daerah dalam Pendidikan, Jakarta: Balitbangdikbud, t.th.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, Jakarta : UI Press, 2014
- Rammal, H. G., Zurbruegg, R, *Awareness Of Islamic Banking Products Among Muslims: The Case Of Australia*, dalam : *Journal Of Financial Services Marketing*, Jakarta : Gramedia, 2007
- Rangkuti, Freddy, *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Rasial, *Al-Markaz, Al-Islami, Al-Ruhāniyyah Al-Ijtimā’iyyah Fi Al-Islam*, Suriah : Al-Markaz Al-Islami, 1385 H / 1965 M, 2013

- Republik, Indonesia, “*Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)*”, 2003.
- Riant, D.Nugroho, *Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi*, Jakarta : Elex Media Komputindo, 2000.
- Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
- Rohiat, *Manajemen Sekolah*, Bandung : Refika Aditama, 2010
- Rohman, Abdur, *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam Dalam Ihya’ Ulum Al-Din*. Surabaya : Bina Ilmu, 2010.
- Rosada, Dede et all, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta : ICCE Syarif Hidayatullah, 2009.
- Rozi, M. Asep Fathur ,”*Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Islam*”, (Volume 04, Nomor 02, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Ryaas, Rasyid, Muhammad, *Kajian Awal Birokrasi Pemerintah Dan Orde Baru*, Jakarta : Yarsip Watampone, 1998
- Saddu, Waristono, “*Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*”, Jatinangor Sumedang : Alqaprint, 2001
- Saebani, Beni Ahmad, “*Filsafat Ilmu dan Metode Penelitian*”, Bandung : CV Pustaka Setia, 2015.
- Sahgala, Syaiful, *Manajemen Strategik Dalam peningkatan Mutu Pendidikan*, Bandung : Alfabeta, 2013.
- Salam, Dharma Setyawan, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai Dan Sumber Daya*, Jakarta : Jambatan Press, 2002
- Salim, Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid II*, Surabaya : Bina Ilmu, 1998
- Sallis, Edward, *Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009.
- Samuelson, Paul A. Dan William D. Nordhaus, *Ekonomi Edisi Keduabelas Jilid I*, terj. Jaka Wasana. Jakarta : Penerbit Erlangga, 1989.

- Santoso, S. Hamijoyo, *Pola Otonomi Daerah yang Efektif dan Efisien untuk Diimplementasikan dalam Bidang Pendidikan*, Malang : FIP UNM, 1999.
- Sarundajang, S,H, *Arus Bak Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.
- Satjipto, Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Setyawan, Salam, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, Jakarta : Djambatan, 2007.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Quran : Tafsir Maudhlui Atas Berbagai Persoalan Umat.*, Jakarta : Edisi E-book, 2014
- Sholahuddin, Muhammad, *World Revolution With Muhammad*, Sidoarjo Mashun, Insani Press, 2009
- Sihombing,R, *“Petunjuk Teknis Pelaksanaa Penangan gelandangan dan Pengemis”*, Jakarta : Pustaka Salemba, 2020.
- Siregar, Nurmayana, *“Manajemen Strategi”*, Medan : Perdana Publishing, 2020.
- Siregar, Nurmayana, *“Semangat Berbangsa dan Bernegara Di Era Globalisasi”*, Medan : Perdana Publishing, 2020.
- Sirozi, M, *Politik Pendidikan, Dinamika Hubungan Antara Kepentingan Kekuasaan Dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekarwo, *Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah*, Jakarta : Airlangga University Press. 2003.
- Soemardjan, S, *Pancasila Dalam Kehidupan Sosial*, Jakarta : BP 7 Pusat, 2004
- Soerjono, Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soesilo, R, *“KUHP Pasal – Pasal Demi Pasal”*, Bogor : Politea, 2021.

- Soetomo. *Kesejahteraan Dan Upaya Mewujudkannya Dalam Perspektif Masyarakat Lokal*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014.
- Soyogyo, “*Bunga Rampai Perekonomian Desa*”, Bogor : Yayasan Obor Indonesia dan Institut Pertanian Bogor, 2018.
- Subhi, Y, Labib, “*Capitalism In Medieval Islam Dalam The Journal Of Economic History*”, The Wall Street, America, 2013
- Sudarwan, Danim, *Otonomi Manajemen Sekolah*, Bandung : Alfabeta, 2013
- Sudarsono, Heri, “*Konsep Ekonomi Islam suatu Pengantar*”, Jogyakarta, Okonosia, 2004
- Sufyarma, *Kapita Selektta Manajemen Pendidikan*, Bandung : Alfabeta, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Alfabeta, 2012.
- Sugono, Dendy, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa, 2008
- Suharsini, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996
- Sujanto, Bedjo. *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah; Model Pengelolaan Sekolah di Era Otonomi Daerah*, Jakarta: Sagung Seto, 2007.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Pendidikan*, Bandung : Alfabeta, 2013.
- Sumodiningrat, Gunawan, *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa Menanggulangi Kemiskinan Dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta : Elex Media Komputindo, 2009.
- Sunarso, Hs. dan Joh. Mardimin, *Konsep Ketidak Adilan Dan Kemiskinan Dalam Dimensi Kritis Proses Pembangunan Di Indonesia*, Yogyakarta : Kanisius, 1996
- Suparlan, Parsudi, “*Kemiskinan di Perkotaan Bacaan untuk Antropologi Perkotaan*”, Jakarta : Sinar Harapan, 2019.
- Suwandi, *Penggunaan Analisis SWOT Untuk Menentukan Strategi Pemasaran*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012.
- Suyosubroto, B, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- Syafaruddin, *Effektifitas Kebijakan Pendidikan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008
- Syaukani, dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, cetakan kesatu,



- Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002
- Syaukani, dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.
- Syukur, NC, Fatah, *Manajemen Pendidikan Berbasis Pada Madrasah*, Semarang : PT Pustaka Rizqi Putra, 2011.
- Taufiq, Mohamad, *Quran In Word*, Aplikasi Al-Quran dan Terjemahan Bahasa Indonesia *Add-Ins Version 1.3* Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional, Kajian Pendidikan Masa Depan*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Tim, Dosen Administrasi UPI, *Manajemen Pendidikan*, Bandung : Alfabeta, 2008
- Todaro, Michael, "*Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*", Jakarta : Erlangga, 2019.
- Tumar, Sumihardjo, *Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Pengembangan Daya Saing Berbasis Potensi Daerah*, Bandung : Fokusmedia, 2008.
- Umar, Husein, "*Metode Penelitian Untuk Skripsi, Tesis dan Disertasi*", Jakarta : PT.Grafindo Utama, 2019.
- Umar, Juora, *Desentralisasi, Demokrasi dan Pemulihan Ekonomi*, dalam Jurnal Demokrasi dan HAM, Vol.2, No.2, Juni - September 2002.
- Umiarso dan Imam Ghozali, *Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan*, Jogjakarta: IRCiSoD, 2010.
- Van, Zanten, W, "*Statistika Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*", Bandung : CV. Maju Munandar, 2019
- Veithzal, Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2010.
- Wahyu, Makalau Rio, "*Pengantar Ekonomi Islam*", Yogyakarta, PT Rafika Adhitama, 2020.
- Wajong, J, *Asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah*, Jakarta : Djambatan, 1989.

- Wakil, AL, Muhammad Al-Sayyid Ahmad, *Hadza Al-Dīn Baina Jahl Abnāihi Wa Kaida A'dāihi*. Madinah : Tanpa Nama Penerbit, Cet. I, 1391 H / 1871 M.
- Walter, Berka et al (editor) *Otonomy and Education : Year Book of The European Association, Law and Polcy*.
- Waluto, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Widyanti, Ninik, “*Masalah Penduduk kini dan mendatang*”, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2019.
- Windham, DM, “*Forthcoming Strategies for Decentralizing Date Use*”, dalam Mahlck L dan Chapman D, *Strategies fot Improving Education Quality Through Better Use of Information*, IIEP, Paris, 1984
- Yafiz, Muhammad, “*Argumen Integrasi Islam & Ekonomi, Melacak Rasionalitas Islamissi Ilmu Ekonomi*”, Medan, : FEBI UIN-SU Press, 2015.
- Yatim, Badri, 1995, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995
- Yong, Pai, *Cultural Foundation of Education*, Untied State of America, Merill Publishing Company, 1999.
- Yoyon, Bachtiar dan Udin Syaefuddin Sa'ud, *Desentralisasi Sistem Pendidikan Nasional Dalam Manajemen Pendidikan*, Bandung : Alfabeta, 2012.
- Yudoyono, Bambang, *Otonomi Daerah*, Jakarta : Pustaka Harapan, 2002



**Peraturan Perundang – Undangan :**

Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang pendidikan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum .

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Daerah .

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah .

Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

[https://www.kemendagri.go.id/page/read/18/ditjen-otonomi-daerah,sekilas Tentang Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, diakses tanggal 20 Januari 2021.](https://www.kemendagri.go.id/page/read/18/ditjen-otonomi-daerah,sekilas%20Tentang%20Direktorat%20Jenderal%20Otonomi%20Daerah,diakses%20tanggal%2020%20Januari%202021.)

